

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 14 No 2 Juni 2015
ISSN 1412 - 6451

Daftar Isi

Editorial

1. Pendekatan Tiga Pilar Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan Berperspektif Gender 123 - 136
Three Pillars Approach as Gender Perspective and Poverty Alleviation Model
(Rosalia Indriyati S., Tri Siwi Nugrahani, dan Sri Rejeki)
2. Efek Modal dan Dukungan Sosial terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia Peserta Program Home Care 137 - 148
The Effect of Social Capital and Social Support toward Elderly Welfare Members of Home Care Program
(Mariani, Subhan Kadir, dan Sunarru Samsi Hariadi)
3. Analisis Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal 149 - 162
Analyze on Social Insurance and Protection of Informal Workers
(Akhmad Purnama)
4. Kinerja Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam Pengentasan Kemiskinan 163 - 180
Business Group Program Performance on Poverty Elevation
(Sri Yuni Murti Widayanti dan A. Nururrochman Hidayatulloh)
5. Menakar Perubahan Sosial Keluarga Migran 181 - 196
Measuring Social Change of Migrant Family
(Sri Kuntari)
6. Faktor yang Mempengaruhi Anak Bekerja 197 - 210
The Influential Factors of Children to Work
(Ikawati)
7. Pengetahuan Masyarakat tentang Penyebaran HIV/AIDS 211 - 224
People Knowledge on HIV/AIDS
(Soetji Andari)
8. Perubahan Sosial Masyarakat Segitiga Hilir Dampak Pembangunan Waduk Kedungombo 225 - 236
Social Change of Downstream Triangle Community as an Impact of Kedungombo Dam Development
Gunanto Surjono

Editorial

Pendekatan Tiga Pilar Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan Berperspektif Gender, tulisan Rosalia Indriyati. S, Tri Siwi Nugrahani, dan Sri Rejeki, membuka JPKS Volume 14 Nomor 2 Juni 2015. Disusul Efek Modal dan Dukungan Sosial terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia Peserta Program *Home Care*, yang disajikan oleh Mariani, Subhan Kadir, dan Sunarru Samsi Hariadi. Dalam permasalahan lain, Akhmad Purnama mengungkapkan tentang Analisis Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal, disusul dengan sajian tentang Kinerja Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam Pengentasan Kemiskinan, oleh Sri Yuni Murti Widayanti dan A. Nururrochman Hidayatulloh. Kondisi keluarga migran diungkapkan oleh Sri Kuntari dalam Menakar Perubahan Sosial Keluarga Migran, disusul oleh Ikawati dengan tulisan tentang Faktor yang Mempengaruhi Anak Bekerja. Pengetahuan Masyarakat tentang HIV/AIDS di DIY diungkapkan oleh Soetji Andari, yang kemudian ditutup oleh Gunanto Surjono dalam Perubahan Sosial Masyarakat Segitiga Hilir Dampak Pembangunan Waduk Kedungombo.

Dewan Redaktur

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya
Keywords are extracted from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost

Rosalia Indriyati S., Tri Siwi Nugrahani, dan Sri Rejeki (Universitas PGRI Yogyakarta)
Pendekatan Tiga Pilar Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan Berperspektif Gender
Three Pillars Approach as Gender Perspective and Poverty Alleviation Model
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 2 Juni 2015, hal 123 - 136

The purpose of this research are to conduct an inventory of village poverty problems, describe the actual conditions of rural women poverty map, analyze the poverty alleviation programs with a gender perspective, as well as an overview of coordination between relevant agencies poverty alleviation programs, formulate policy design strategy model of poverty reduction through socio-cultural approach and economics. This research is qualitative approach. Data are collected through observation, documentation, and depth interview. Research subjects are officials and community members of poverty alleviation programs. It can be revealed that the numbers of poor households in Sleman Regency are 45.037 families (13.89 persen). Various poverty alleviation programs have been conducted by various work units, but the synergy among units in the poverty eradication program not yet works, although the target data used program has been one source. Programs among agencies run their own because they often work in sectoral programs. The results of the research can be summarized as follows: Sleman district government strongly supports reduction gender perspective model, since there is a gender disparity in Sleman, which can be seen from index of 79.29 persen, gender development index 75.76 persen and gender inequality gap 3.65 persen. This is due to the access to better education school are male dominated; Access to capital strengthening male-dominated, women still lack of access. Poverty alleviation models with a gender perspective can be tested in Sleman, and will be a pioneer for women with access to poverty reduction. The results of the questionnaire showed that the stage in the design of the model is expressed well, and the meaning of each stage is considered good. Thus, the model of a gender perspective in poverty reduction strategies can be tested.

Keywords: *Three Pillars; Poverty Reduction Model; Gender Perspective*

Tujuan penelitian untuk melakukan inventarisasi masalah kemiskinan di desa, mendeskripsikan kondisi aktual peta kemiskinan perempuan desa, menganalisis program pengentasan kemiskinan berperspektif gender, gambaran koordinasi antar instansi terkait program pengentasan kemiskinan, dan merumuskan rancangan kebijakan model strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan sosio kultural, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara mendalam. Subyek penelitian pejabat dinas terkait dan masyarakat sasaran program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah KK miskin Kabupaten Sleman 45.037 KK (13,89 persen). Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi belum diketahui secara pasti tingkat sinergitas antarinstansi dalam program pengentasan kemiskinan, meskipun data sasaran program yang digunakan satu sumber. Program

antarinstansi berjalan sendiri-sendiri karena masih sering terjadi program sektoral. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dapat dirangkum sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Sleman sangat mendukung model pengentasan berperspektif gender, mengingat masih ada ketimpangan gender, yang dapat diketahui dengan IPM 79,29 persen, indeks pembangunan gender 75,76 persen ada kesenjangan 3,65 persen kesenjangan gender, dikarenakan akses pendidikan lama sekolah lebih bagus laki-laki, penguatan modal didominasi laki-laki, perempuan masih kurang mendapatkan akses, sehingga model pengentasan kemiskinan dengan perspektif gender dapat diujicobakan di Kabupaten Sleman, dan menjadi pionir untuk perempuan dengan akses mengurangi kemiskinan. Hasil angket menunjukkan, bahwa tahapan dalam rancangan model dinyatakan baik, makna dari setiap tahapan dinilai baik. Model dari strategi pengentasan kemiskinan berperspektif gender dapat diujicobakan .

Kata Kunci: Tiga Pilar; Model Pengentasan Kemiskinan; Perspektif Gender

Mariani, Subhan Kadir, dan Sunarru Samsi Hariadi (PSTW Gau Mabaji Gowa)
Efek Modal dan Dukungan Sosial terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia Peserta Program Home Care
The Effect of Social Capital and Social Support toward Elderly Welfare Members of Home Care Program
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 2 Juni 2015, hal 137 - 148

The purpose of the research is to analyze the influence of social capital and social support toward elderly welfare, involving 35 elderly participants in Home Care Program as respondents. This research is quantitative method. The results showed that although social capital and social support are at a high level, but they did not necessarily have impact on improving the welfare for the elderly. The result of regression analysis showed no significant effect of social capital ($t = 0.812$. $P > \alpha 0.05$) and social support ($t = 0.333$. $P > \alpha 0.05$) separately and collectively ($F = 0.552$. $P > \alpha 0.05$) on the welfare of the elderly. The value of $R = 0.191$ indicates a very weak relationship between social capital and social support to the elderly welfare. Contribution influenced of social capital and social support to the elderly welfare is only 3.6persen ($R^2 = 0.036$). The rest of 96.4 persen are caused by other factors not included in the variables of this study. The effect of social capital and social support to welfare of the elderly is on physical and psychosocial aspects only. Other aspects included welfare indicators consist of environmental conditions, especially housing, access to public and social services, and household economic are not maximal. It is recommended that home care program further to strengthen social capital and social support should be specifically directed to elderly welfare. The program should be implemented by encouraging active participation of community in order to continue the program without depending external parties.

Keywords: Social Capital; Social Support; Home Care; Elderly Welfare

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh modal sosial dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan lanjut usia. Melibatkan 35 lanjut usia peserta Program *Home Care* sebagai responden. Penelitian menerapkan metode kuantitatif korelasional. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa walaupun modal sosial dan dukungan sosial berada pada tingkat yang tinggi tetapi tidak serta merta berdampak pada meningkatnya kesejahteraan bagi lanjut usia. Analisis regresi menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan modal sosial ($t = 0,812$. $p > \alpha 0,05$) dan dukungan sosial ($t = 0,333$. $p >$

α 0,05) secara terpisah dan secara bersama ($F = 0,552$. $p > \alpha$ 0,05) terhadap kesejahteraan lanjut usia. Nilai $R = 0,191$ menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara modal sosial dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan lanjut usia. Sumbangan pengaruh modal sosial dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan lanjut usia hanya 3,6 persen ($R^2 = 0,036$). 96,4 persen disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini. Modal sosial dan dukungan sosial mempengaruhi kesejahteraan lanjut usia hanya pada aspek fisik dan Psikososial saja. Aspek lainnya yang termasuk dalam indikator kesejahteraan meliputi kondisi lingkungan terutama tempat tinggal, akses terhadap pelayanan publik dan sosial, serta ekonomi keluarga belum maksimal. Disarankan agar program *Home Care* lebih memperkuat Modal Sosial dan Dukungan Sosial yang secara spesifik diarahkan kepada kesejahteraan lanjut usia. Program dijalankan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat agar terus berlanjut secara berkesinambungan tanpa bergantung pihak luar.

Kata kunci: Modal Sosial; Dukungan Sosial; *Home Care*; Kesejahteraan Lanjut Usia

Akhmad Purnama (B2P3KS)

Analisis Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

Analyze on Social Insurance and Protection of Informal Workers

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 2 Juni 2015, hal 149 - 162

The research means to know the beneficiary of New Initiative Social Welfare Insurance program on informal workers protection. The research is implemented in Malang Regency, Central Java Province. Data resources are participant and implementer of the program (LPA management team, program guides, and controller) all are 60 people. Data are gathered through interview, documentary analysis, and focus group discussion. Data are analyzed through qualitative-descriptive technique. The result shows that New Initiative Social Welfare program is very beneficial for informal workers, create safety feeling for the participant and get income substitute should they face working accident and dye, reduce family bandage and enhance lives needs normally. It is recommended that The Ministry of Social Affairs, through the General Directorate of Social Insurance and Protection resume the program for informal workers with low wage and widen the outreach of contribution assistance receivers (PBI). It needs also socialization and procures adequate facilities of the program holders. It needs also joint-venture between The Ministry of Social Affairs and Social Insurance Board holder in covering health, working accident, and mortal insurance. The improvement of LPA role and guidance motivate low waged informal workers of the importance to participate in social insurance.

Keywords: Informal Workers; Social Protection; New Initiative Social Welfare

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemanfaatan program Askesos *New Initiative* dalam perlindungan bagi pekerja informal. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pemasang Provinsi Jawa Tengah, sumber data penelitian meliputi peserta dan pelaksana (LPA, pendamping, tim pengendali, PT Jamsostek) berjumlah 60 orang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan telaah dokumen serta dilakukan FGD. Analisis penelitian digunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Program Askesos *New Initiative* yang dilaksanakan di Kabupaten Pemasang sangat bermanfaat bagi pekerja sektor informal, yaitu terciptanya rasa aman bagi peserta; Mandapatkan pengganti penghasilan apabila terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian; dapat

mengurangi beban keluarga dan meningkatkan kebutuhan hidup secara layak. Rekomendasi yang diajukan Kementerian Sosial RI cq Direktorat Linjamsos untuk melanjutkan program jaminan sosial bagi pekerja informal penghasilan rendah dan memperluas jangkauan penerimaan bantuan iuran (PBI). Perlu adanya sosialisasi dan mempersiapkan sarana prasarana yang memadai oleh penyelenggara. Perlu kerjasama antara Kementerian Sosial dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai cakupan program jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Peningkatan peran LPA dan Pendamping memotivasi Pekerja Sektor Informal berpenghasilan rendah tentang pentingnya ikut jaminan sosial.

Kata Kunci: Pekerja Sektor Informal; Perlindungan Sosial; Program Askesos *New Initiative*

Sri Yuni Murti Widayanti dan A. Nururrochman Hidayatulloh (B2P3KS)
Kinerja Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam Pengentasan Kemiskinan
Business Group Program Performance on Poverty Elevation
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 2 Juni 2015, hal 163 - 180

This research means to reveal business group (Kube) seen from social, economic, and institutional aspects, including its benefit to the members of the poor community, its handicap and supporting factors. This research is qualitative-descriptive approach. Data resources are from eight business groups, the informants are rural local officials from related institution, social guides, social volunteers, informal leaders, women cadets, cooperational partners, and community members from Kupang Municipality and Regency. Data are gathered through interview, observation, and documentary analysis. Data are analysed through interpretive-descriptive technique. The result shows that kubes are in developing category. If they seen from social performance aspect, five kubes have good score, three kubes have sufficient score, seen from social aspect there are five kubes have good score, three kubes have sufficient score. If they seen from institutional aspect, one kube has good score, and three kubes have sufficient score, and four Kubes have poor score. kube as a mean of empowerment and poverty elevation should improve its performance so that kube as a business group can be achieved. Kube can be economic institution that based on the spirit of togetherness and solidarity, national loyalty, that it can improve lives and social welfare qualities.

Keywords: *Performance; Business Group; Poverty Elevation*

Penelitian ini bertujuan mengungkap implementasi kinerja Kube dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kube, serta manfaat Kube bagi anggota dan masyarakat yang dijadikan indikator keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data informan terkait, meliputi aparat pemerintah desa, pendamping, relawan sosial, tokoh masyarakat, kader perempuan, dan mitra usaha (dunia usaha yang terlibat kegiatan Kube). Rincian informan meliputi, pejabat instansi terkait, pendamping kube, relawan, tokoh informal, mitra usaha, warga masyarakat sekitar kube dari Kabupaten dan Kota Kupang. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data yang telah terkumpul di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan delapan Kube dalam kategori berkembang. Berdasarkan pada analisis kinerja kube dilihat dari aspek sosial, ada lima kube bernilai baik dan tiga kube bernilai kurang, dilihat dari aspek ekonomi terdapat satu kube bernilai baik, tiga kube bernilai cukup, dan empat kube bernilai kurang. Dilihat dari aspek kelembagaan, ada satu kube yang bernilai baik dan tiga

kube bernilai cukup serta empat Kube bernilai kurang. Kube sebagai wadah pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan perlu meningkatkan kinerjanya agar keberhasilan Kube menjadi usaha ekonomi kelompok dapat terwujud. Kube dapat menjadi potensi ekonomi berbasis kelompok yang mengedepankan semangat kebersamaan berlandaskan kesetiakawanan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Kinerja; Kube; Pengentasan Kemiskinan

Sri Kuntari (B2P3KS)

Menakar Perubahan Sosial Keluarga Migran

Measuring Social Change of Migrant Family

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 2 Juni 2015, hal 181 - 196

The research on measuring social welfare of migrant families is to describe social change in migrants familie structure. Methodologically, the approach used is qualitative-descriptive. Research location ditermined purposively in Sukabumi Regency, West Java Province, based on cosideration that in this regency many migrant workers go abroad, especially women working in informal sector. Subjects in this research are migrant worker women, chosen purposively, based on criteria they ever worked or are on leave status and will work back abroad. Data are gathered through interview and documentary analysis, and analyzed through qualitative-descriptive technique. The research finds that the decession of working abroad as migrant workers causes basic change in family lives to be better. The change caused by remintant contribution from working abroad, families are able enhance life quality, both on their children education and economic-social improvement. But behind its positive change there is negative change, namely the cofusing of family member functions, between husbands and wives during they are abroad. It is recommended it should be set an integrated services unit, untited from related agencies to identify problems and needs of social services to ex-migrant workers, also it should be set local group work and communication forum for ex-migrant workers under supervision and guidance of related agencies.

Keywords: Migrant Worker Family; Social Change

Penelitian menakar kesejahteraan sosial keluarga pekerja migran bertujuan mengetahui perubahan sosial dalam struktur keluarga migran. Secara metodologis, metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan bahwa daerah ini banyak mengirim pekerja migran ke luar negeri, umumnya dilakukan oleh perempuan dan bekerja di sektor informal. Subjek penelitian ditentukan secara purposive yang didasarkan pada kriteria tertentu yakni orang yang pernah menjadi pekerja migran dan yang sedang pulang kampung tetapi masih ingin bekerja lagi sebagai pekerja migran ke luar negeri. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan pengumpulan dokumen, data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan perempuan pergi ke luar negeri menjadi pekerja migran menyebabkan perubahan mendasar dalam kehidupan keluarga ke arah yang lebih baik. Perubahan terjadi dengan kontribusi remitan yang diperoleh selama menjadi pekerja migran, keluarga mampu memperbaiki kualitas hidup, baik dalam hal pendidikan anak maupun dalam peningkatan sosial-ekonomi. Namun di balik keberhasilan tersebut ditemukan adanya suatu perubahan negatif, yaitu kekacauan fungsi keluarga (suami atau istri) selama ditinggal ke

luar negeri. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya dibentuk unit pelayanan terpadu yang terdiri atas beberapa instansi terkait dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pelayanan sosial bagi eks pekerja migran, juga perlunya dibentuk kelompok kerja dan forum paguyuban pekerja migran di daerah asal dengan pengawasan dan pembinaan dari unit pelayanan terpadu.

Kata Kunci: Perubahan Sosial; Keluarga Migran

Ikawati (B2P3KS)

Faktor yang Mempengaruhi Anak Bekerja

The Influential Factors of Children to Work

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 2 Juni 2015, hal 197 - 210

This research is to analysis the influential factors children to work and its impact on their physical, psychical, and social condition, and its contribution on economic and social, including family, community, and government efforts on stemming the number of working children. This research is qualitative descriptive, research location determined purposively in West Java, East Java, West Nusa Tenggara. Research subjects are children working abroad that happen having vacation in their villages. Based on purposive determination, it is found 30 children as samples. Data gathered through interview, focus group discussion, observation, and documentary analysis. Data are analyzed through qualitative-descriptive technique. The research finds that the causal factors of children to work are the condition of parent education and their low income, and the number of many family members that should be held, and family in harmony. The impact of children working is delaying their growth, physically, psychologically, and socially. The contribution of children work is increasing the social and economy of the family, such as income and schooling members of the family, and increasing members of the family in social activity. Some family, community, and government efforts to stem the number of working children are sending the children until primary school, diffusing information on the important of children education, monitoring on learning time, forming learning group, looking for reference on school grant, making data on children drop out, giving work skills, giving entrepreneur capital for family with vulnerable economy, monitoring on identity card faking, and limiting working letter to children under age. Some of the government effort to stem the number of working children are, nine-year schooling obligation program, electronic identification card, issuing regulation on the protection of working children and law measurement on children traffickers. It is recommended for the Ministry of Social Affairs through the Directorate of Violent Victims of Migrant Workers on poor family empowerment program, that in sending migrants workers areas based on local potential, children committing in work should be prevented.

Keywords: Working Children; Causal Factors

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak bekerja, dampaknya terhadap kondisi fisik, psikis, sosial anak, dan kontribusinya terhadap ekonomi dan sosial, serta upaya keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam menekan jumlah anak bekerja. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ditentukan secara purposif di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Subyek penelitian adalah anak yang bekerja di luar negeri dan secara kebetulan sedang berada atau libur di desanya, berdasarkan teknik

purposif ditemukan 30 anak. Pengumpulan data menggunakan wawancara, FGD, observasi dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab anak bekerja adalah kondisi tingkat pendidikan orangtua dan penghasilan yang rendah serta jumlah tanggungan orangtua yang banyak dan adanya ketidakharmonisan keluarga. Dampak anak bekerja dapat menghambat tumbuh kembang mereka, baik secara fisik, psikis dan sosial. Kontribusi anak bekerja adalah meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial keluarganya, seperti peningkatan penghasilan, dapat menyekolahkan anggota keluarga, dan meningkatnya keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan sosial. Upaya keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam menekan jumlah anak bekerja antara lain keluarga telah menyekolahkan anak (tamat SD), mengadakan penyuluhan tentang pentingnya tumbuh kembang anak, pemantauan jam belajar anak, membentuk kelompok belajar, mencari rujukan beasiswa, pendataan anak putus sekolah, memberikan keterampilan kerja, modal usaha kepada keluarga rawan sosial ekonomi, memantau terjadinya pemalsuan KTP, dan membatasi memberikan surat keterangan bekerja bagi anak yang masih di bawah usia. Upaya pemerintah dalam menekan jumlah anak yang bekerja antara lain, wajib belajar sembilan tahun, kartu penduduk sistem elektronik, penerbitan peraturan tentang perlindungan anak yang bekerja dan penindakan hukum bagi pelaku *trafficking*. Rekomendasi yang diajukan pada Kementrian Sosial RI melalui Direktorat Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran dalam program pemberdayaan keluarga miskin di daerah asal pekerja migran (PM) berbasis potensi lokal, agar dapat tercegah keterlibatan anak yang bekerja.

Kata kunci: Masalah-Anak-Bekerja

Soetji Andari (B2P3KS)

Pengetahuan Masyarakat tentang Penyebaran HIV/AIDS

People Knowledge on HIV/AIDS

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 2 Juni 2015, hal 211 - 224

The highest number of people living with HIV/AIDS are of childbearing age. The cumulative proportion of people living with HIV/AIDS in Yogyakarta is located at the level of 20-29 years of age. High activity in this age group makes a lot of productive risky sexual behavior. In the number of persons over the last ten years has increased tenfold. The research is meant to find out about people's knowledge on the spread of HIV/AIDS in Yogyakarta. This study used is descriptive method, a research procedure that produces descriptive data in the form of words written or spoken by persons or behavior that being observed. This research is directed at the background of the individual in holistic and detail description on the phenomena of various things about the knowledge of the various groups on HIV/AIDS. The results of the study shows that there are many who do not know the transmission mode of this virus. They do not know how the disease is transmitted and only know the transmission of disease when in contact with people living with HIV/AIDS. Nearly 50 percent of respondents of the communities living around people with HIV/AIDS can not name a single cause of HIV/AIDS. This means that public knowledge about the disease around the respondents are not widely known. However, the level of knowledge possessed by peers (peer group) is quite good, because they are able to explain the cause of the spread of HIV/AIDS. Similarly with PLWHA (People Living with HIV/AIDS) and OHIDA (People living with people with HIV/AIDS) are used as the respondents have a fairly good knowledge about the causes of the spread of HIV/AIDS.

Keywords: People; Knowledge; HIV/AIDS

Jumlah terbanyak dari penyandang HIV/AIDS adalah usia produktif. Secara kumulatif proporsi penyandang HIV/AIDS di Yogyakarta berada pada tataran usia 20-29 tahun. Aktivitas yang tinggi pada usia ini membuat banyak kelompok produktif yang melakukan perilaku seks berisiko. Pertambahan jumlah penyandang selama sepuluh tahun terakhir meningkat sepuluh kali lipat. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang penyebaran HIV/AIDS di Yogyakarta, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh), mendeskripsikan secara terperinci fenomena tentang berbagai pengetahuan dari berbagai kalangan masyarakat tentang virus HIV/AIDS, dan berusaha menggambarkan suatu gejala sosial tersebut. Hasil penelitian menunjukkan ternyata warga masyarakat banyak yang tidak tahu cara penularannya virus ini. Mereka tidak mengetahui bagaimana penyakit tersebut ditularkan dan hanya tahu penularan penyakit apabila bersentuhan dengan penyandang HIV/AIDS. Hampir 50 persen responden dari unsur masyarakat yang tinggal di sekitar penyandang HIV/AIDS tidak dapat menyebutkan satu pun penyebab HIV/AIDS. Artinya pengetahuan masyarakat tentang penyakit di sekitar responden sedikit. Namun tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh teman sebaya (*peer group*) cukup baik, karena mereka mampu menjelaskan penyebab penyebaran HIV/AIDS. Demikian pula dengan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) atau OHIDA (Orang yang hidup dengan penyandang HIV/AIDS) yang dijadikan responden memiliki pengetahuan baik mengenai penyebab penyebaran HIV/AIDS.

Kata kunci: Masyarakat; Penyebaran; HIV/AIDS

Gunanto Surjono (B2P3KS)

Perubahan Sosial Masyarakat Segitiga Hilir Dampak Pembangunan Waduk Kedungombo
Social Change of Downstream Triangle Community as an Impact of Kedungombo Dam Development

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 2 Juni 2015, hal 225 - 236

This research is done to describe social change on the community living at downstream triangle of Kedungombo water reservoir, Central Java. Approaching model used in this research is quantitative-descriptive, which is implemented through informants choosing, gathering and analyzing data techniques as follows: Informants are chosen purposively those who saw and experienced their changing environment, from piece of farm land to water reservoir (dam). Data are gathered through interview with informants through snowball technique. The research finds that a significant change happens to the downstream triangle community during 25 years of their environmental change on the aspect of communal economy, family system, relation with local government, and local belief.

Keywords: Social Change; Community; Downstream Triangle

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan perubahan sosial pada komunitas masyarakat di daerah segitiga hilir waduk Kedungombo, Jawa Tengah. Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yang diimplementasikan melalui teknik pengumpulan data wawancara, pemilihan informan secara purposif dengan jumlah yang ditentukan secara snowball terhadap informan yang mengalami perubahan alam lingkungan dari semula hamparan tanah pertanian ke air waduk irigasi. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan sosial terjadi dalam masyarakat segitiga hilir dalam aspek ekonomi lokal, sistem kekeluargaan, hubungan

dengan pemerintah setempat, dan kepercayaan yang dianutnya setelah perubahan alam lingkungan berlangsung selama 25 tahun.

Kata Kunci: Perubahan Sosial; Komunitas; Segitiga Hilir

Pendekatan Tiga Pilar Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan Berperspektif Gender *Three Pillars Approach as Gender Perspective and Poverty Alleviation Model*

Rosalia Indriyati S., Tri Siwi Nugrahani, dan Sri Rejeki

Universitas PGRI Yogyakarta, Jl. PGRI I/117 Sonosewu Yogyakarta Telpn (0274) 376808, fax (0274) 376808.

E-mail: iin.rosalia@yahoo.com Diterima 17 November 2014, direvisi 20 Februari 2015, disetujui 15 Maret 2015

Abstract

The purpose of this research are to conduct an inventory of village poverty problems, describe the actual conditions of rural women poverty map, analyze the poverty alleviation programs with a gender perspective, as well as an overview of coordination between relevant agencies poverty alleviation programs, formulate policy design strategy model of poverty reduction through socio-cultural approach and economics. This research is qualitative approach. Data are collected through observation, documentation, and depth interview. Research subjects are officials and community members of poverty alleviation programs. It can be revealed that the numbers of poor households in Sleman Regency are 45.037 families (13.89 persen). Various poverty alleviation programs have been conducted by various work units, but the synergy among units in the poverty eradication program not yet works, although the target data used program has been one source. Programs among agencies run their own because they often work in sectoral programs. The results of the research can be summarized as follows: Sleman district government strongly supports reduction gender perspective model, since there is a gender disparity in Sleman, which can be seen from index of 79.29 persen, gender development index 75.76 persen and gender inequality gap 3.65 persen. This is due to the access to better education school are male dominated; Access to capital strengthening male-dominated, women still lack of access. Poverty alleviation models with a gender perspective can be tested in Sleman, and will be a pioneer for women with access to poverty reduction. The results of the questionnaire showed that the stage in the design of the model is expressed well, and the meaning of each stage is considered good. Thus, the model of a gender perspective in poverty reduction strategies can be tested.

Keywords: *Three Pillars; Poverty Reduction Model; Gender Perspective*

Abstrak

Tujuan penelitian untuk melakukan inventarisasi masalah kemiskinan di desa, mendeskripsikan kondisi aktual peta kemiskinan perempuan desa, menganalisis program pengentasan kemiskinan berperspektif gender, gambaran koordinasi antar instansi terkait program pengentasan kemiskinan, dan merumuskan rancangan kebijakan model strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan sosio kultural, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara mendalam. Subyek penelitian pejabat dinas terkait dan masyarakat sasaran program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah KK miskin Kabupaten Sleman 45.037 KK (13,89 persen). Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi belum diketahui secara pasti tingkat sinergitas antarinstansi dalam program pengentasan kemiskinan, meskipun data sasaran program yang digunakan satu sumber. Program antarinstansi berjalan sendiri-sendiri karena masih sering terjadi program sektoral. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dapat dirangkum sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Sleman sangat mendukung model pengentasan berperspektif gender, mengingat masih ada ketimpangan gender, yang dapat diketahui dengan IPM 79,29 persen, indeks pembangunan gender 75,76 persen ada kesenjangan 3,65 persen kesenjangan gender, dikarenakan akses pendidikan lama sekolah lebih bagus laki-laki, penguatan modal didominasi laki-laki, perempuan masih kurang mendapatkan akses, sehingga model pengentasan kemiskinan dengan perspektif gender dapat diujicobakan di Kabupaten Sleman, dan menjadi pionir untuk perempuan dengan akses mengurangi kemiskinan. Hasil angket menunjukkan, bahwa tahapan dalam rancangan model dinyatakan baik, makna dari setiap tahapan dinilai baik. Model dari strategi pengentasan kemiskinan berperspektif gender dapat diujicobakan.

Kata Kunci: *Tiga Pilar; Model Pengentasan Kemiskinan; Perspektif Gender*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Sebagai fenomena sosial yang multi dimensional, kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan dimensi ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan masalah struktural, psikologis, kultural, ekologis dan faktor lain. Jumlah masyarakat miskin tampaknya akan semakin banyak, dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar korban kemiskinan adalah perempuan dan anak. Masih banyak perempuan mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek sosial, budaya juga ekonomi. Perempuan desa khususnya masih banyak yang tidak berdaya. Rupanya usaha peningkatan potensi perempuan di Indonesia masih harus mendapat perhatian. Pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis perempuan saja, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak kewajiban status dan akses dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai fenomena sosial, kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan masalah struktural, psikologis, kultural, ekologis dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi (Indriyati & Nugrahani, 2010)

Kondisi ekonomi keluarga di Kabupaten Sleman pada tahun 2006 dapat diklasifikasikan menjadi keluarga tidak miskin berjumlah 183.004 dan keluarga miskin berjumlah 62.518 (proporsi 25,46 persen). Pada tahun 2007 dapat diklasifikasikan menjadi keluarga tidak miskin sebanyak 211.841 KK dan keluarga miskin sebanyak 58.701 (proporsi 21,70 persen) (Bapeda Sleman, 2007: 6) Jumlah penduduk di kabupaten Sleman pada tahun 2012 sebesar 1.114.833 jiwa, terdiri dari 557.911 laki-laki dan 556.922 perempuan. Kondisi ekonomi keluarga di Kabupaten Sleman pada tahun 2012-2013 dapat diklasifikasikan menjadi keluarga miskin berjumlah 49.441 KK (15.85 persen) dan keluarga tidak miskin berjumlah 262.618 KK (84,15 persen) (BPS Kabupaten Sleman, 2013). Dengan melihat

data tersebut, tampak bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman masih cukup tinggi (15.85 persen), meskipun telah terjadi penurunan, namun jika kondisi ekonomi yang sangat sulit saat ini tidak makin membaik, ada kemungkinan akan bertambah jumlah kemiskinan ditahun yang akan datang.

Oleh karena itu, sudah selayaknya berbagai program pengentasan kemiskinan perlu menjadi prioritas pembangunan. Dari hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan perlu melibatkan perempuan sebagai subyek, agar perempuan dapat mengetahui permasalahan, potensi dan kebutuhannya, sehingga akan berkembang sesuai potensi. Adanya bencana gunung merapi dapat diduga bahwa jumlah KK miskin di daerah Kabupaten Sleman akan meningkat pasca bencana Gunung merapi, karena bencana Gunung Merapi selain korban jiwa juga kerugian material yang tidak sedikit (Indriyati & Nugrahani, 2010).

Pembangunan yang telah dilakukan oleh negara berkembang termasuk Indonesia belum membawa dampak yang menguntungkan bagi sebagian besar perempuan. Laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun, namun jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dari 73,3 juta tahun 1945 menjadi 219,5 juta pada tahun 2005, dengan hampir setengahnya (49,8 persen) adalah perempuan. (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI, 2005: 5). Untuk Propinsi DIY pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk sebanyak 3.295.127 jiwa, ini merupakan daerah terpadat setelah DKI. Persentase jumlah penduduk laki-laki 49,44 persen, dan 50,56 persen perempuan (Laporan Tim Pembangunan Berperspektif Gender, 2003). Hal ini merupakan potensi yang dapat digunakan sebagai subyek pembangunan sebagai langkah awal pengembangan program pembangunan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan pembangunan Indonesia secara umum ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada aspek keadilan dengan menghargai hak-hak warga negara tanpa membedakan ras, suku, golongan, dan jenis ke-

lamin. Untuk menuju ke arah pembangunan yang adil gender dan mengikis ketimpangan pelaksanaan pembangunan ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap aspek pembangunan. Langkah ini diwujudkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan penguasaan terhadap proses pembangunan. (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, DIY 2013)

Kemiskinan merupakan isu gender, karena peran sentral perempuan dalam manajemen kesejahteraan keluarganya. Krisis dimensional seperti yang dialami bangsa Indonesia saat ini ekonomi, politik dan sosial, bencana alam, banjir, dan lain-lain, sehingga membuat harga kebutuhan pangan seperti harga beras dan kebutuhan pokok lainnya naik, juga kesulitan air bersih dan lain-lain membuat perempuanlah yang memikul beban paling berat. Oleh karena itu memperhatikan masalah perempuan sangatlah penting, karena antara kualitas ibu rumah tangga dan kualitas keluarga saling berhubungan. Hal ini dapat dipahami, bahwa jika kualitas perempuan sebagai ibu rumah tangga rendah, akan berpengaruh pada kualitas keluarga. Perempuan sebagai ibu rumah tangga berperan dalam menjalankan fungsi keluarga dan fungsi reproduksi. Bagaimana caranya melaksanakan peran dengan baik, jika dirinya sendiri sebagai perempuan masih rapuh atau rentan.

Kaum perempuan pada masyarakat miskin umumnya selalu berupaya melepaskan diri dari belenggu kesulitan ekonomi dan mengusahakan kehidupan ekonomis yang lebih baik dalam bentuk atau kiat tertentu dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal, memberdayakan perempuan dalam rumah tangga miskin merupakan masalah yang mendesak dalam strategi pengentasan kemiskinan.

Dalam menghadapi globalisasi diperlukan komitmen bersama, untuk bersatu dengan semangat solidaritas dan membangun relasi setara

antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Perempuan perlu dilibatkan dalam membuat perencanaan, melaksanakan program kegiatan, dan melakukan evaluasi serta menganalisis dampak pembangunan. Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan masyarakat miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan melalui pendekatan humanistik, pendekatan ekonomi produktif dan penyadaran lingkungan hidup. Pengalaman melaksanakan Pengabdian Masyarakat melalui Hibah PPM IbM tahun 2009 (Indriyati, dkk., 2009) pemberdayaan perempuan melalui partisipasi aktif sasaran, menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan perempuan dan keluarganya. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian Kajian Wanita, yang berkaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan (Indriyati dan Nugrahani, 2010).

Dengan analisis gender memungkinkan suatu program pembangunan memfokuskan pada relasi gender yang setara. Dengan demikian yang menjadi agenda utama perjuangan pembangunan berperspektif gender adalah tidak sekedar menjawab kebutuhan praktis perempuan saja tetapi menjawab kebutuhan strategis perempuan, yaitu memperjuangkan perubahan posisi perempuan untuk keadilan. Usaha pemberdayaan (*empowerment*) dan perubahan struktur gender yang dikenal dengan *Gender and Development* (GAD). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak asasinya. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Untuk memberdayakan perempuan dan untuk meningkatkan statusnya perlu adanya model pemberdayaan yang dapat menyadarkan perempuan agar dapat menggali potensi yang ada pada perempuan baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Model yang akan diterapkan dalam penelitian ini melalui pendekatan sosiokultural, ekonomi, dan lingkungan. Dengan pendekatan sosio kultural perempuan mempunyai kesadaran

akan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya dan posisi dalam budayanya, sedangkan pemberdayaan melalui ekonomi merupakan hal yang sangat penting, mengingat masalah pemenuhan kebutuhan pokok merupakan unsur utama pada masyarakat miskin. Sedangkan kesadaran mengenai pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pendekatan yang tersebut. Melalui penyadaran lingkungan hidup, maka generasi mendatang tetap akan dapat menikmati lingkungan yang lestari, sehat dan aman. Dengan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dimunculkan adalah apakah melalui pendekatan tri pilar yaitu sosiokultural, ekonomi, dan lingkungan hidup dapat dijadikan model yang tepat dalam Pengentasan Kemiskinan Berprespektif Gender?

B. Penggunaan Metode Penelitian

Teknik Pengumpulan Data: Data sekunder, didapat dengan mengumpulkan dokumen pelbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan, berupa profil lembaga, peraturan, sumber dana dalam mendukung pelaksanaan program, dikumpulkan secara acak dengan asas kelayakan, yakni peneliti menganggap data bersangkutan representatif. Data sekunder mempunyai peran besar menjadi bahan perbandingan antara fakta yang ditemui di lapangan dan tulisan yang diprogramkan, mempengaruhi penulis dalam penafsiran data. Data primer didapat melalui, wawancara mendalam (*depth interview*), dengan pimpinan lembaga yang bersangkutan, asumsinya pimpinan merupakan penentu kebijakan atas kegiatan program jejaring yang dibangun dengan lembaga lain. *Depth interview* menggunakan instrumen *interview guide* guna memudahkan dan memberi petunjuk dalam rangka pengumpulan data. Observasi, dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan langsung segala yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, teknik ini sebagai alat untuk melengkapi teknik lainnya. *Focus grup discussion (FGD)*, sebagai narasumber dalam FGD adalah pejabat Bappeda Kabupaten Sleman (Kepala Bidang Sosial Budaya), Kepala

Dinas Nakersos Kabupaten Sleman, dan Badan KBPMPP diwakili oleh Kasubbid Penanganan Kemiskinan. FGD juga diikuti oleh kepala seksi kesmas kecamatan Turi, Cangkringan dan Ngemplak, dan beberapa tokoh perempuan yang sering terlibat dalam program pengentasan kemiskinan. Teknik ini sengaja digunakan untuk memperdalam, sekaligus sebagai *crosscheck* berbagai informasi yang diperoleh dari wawancara.

Analisis Data, menggunakan model Miles and Huberman yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Heberman (1984) mengemukakan, bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*, *verification*, (Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2012). Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan kemudian direduksi yaitu data yang ada disaring melalui pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan sehingga mendapatkan data yang diharapkan. Penyajian data berupa narasi, dari data yang dimiliki dari berbagai informasi tersebut digabungkan agar tersusun dalam bentuk terpadu dan mudah dipahami, kemudian dibuat deskripsi, dan dilihat tendensi-tendensinya, kemudian dibuat interpretasi, yang pertanyaan dalam penelitian, lalu ditempatkan sebagai kesimpulan hasil penelitian program pemberdayaan perempuan sebagai strategi pengentasan kemiskinan.

Pengembangan Penelitian: meliputi kegiatan mengidentifikasi masalah untuk melihat bagaimana identifikasi data berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat miskin,

kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat, yang akhirnya disusun laporan sebagai dasar untuk membuat rancangan model pengentasan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 1.

Hasil dari penelitian tersebut perlu dianalisis kemudian dirumuskan menjadi model pengentasan kemiskinan. Rancangan model perlu dilakukan ujicoba kemudian dilakukan pengkajian melalui *Focus Group Discussion* (FGD) diharapkan melalui FGD tersebut dapat menyempurnakan model. Model pemberdayaan masyarakat berperspektif gender melalui Tri Pilar Pendekatan Sosiokultural, ekonomi, dan Lingkungan hidup, dapat dijadikan panduan/acuan penetapan kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang akan datang.

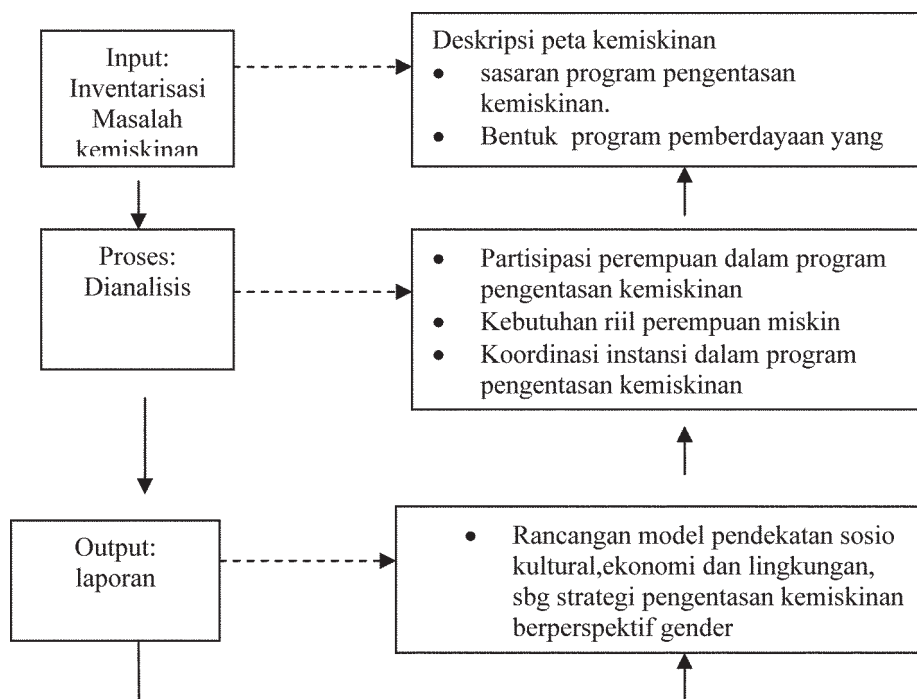
C. Hasil Dan Pembahasan

1. Deskripsi Umum Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten dalam Provinsi DIY yang berada di bagian utara dengan luas sekitar 247,82 km². Untuk menyelenggarakan administrasi peme-

rintahan, kabupaten ini secara berjenjang dibagi menjadi 17 kecamatan, 86 desa serta 1.212 padukuhan. Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 110° 13' 00" sampai 110° 33' 00" Bujur Timur, dan mulai 7° 34' 52" sampai 7° 47' 03" Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100 – 2.500 meter di atas permukaan air laut. Jarak terjauh Utara - Selatan kira-kira 35 km, terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 padukuhan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, bagian selatan berbatasan dengan kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta dan bagian Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur, sedang bagian utara sebagian besar merupakan tanah kering yang berupa ladang dan pekarangan, serta memiliki permukaan yang agak miring ke selatan dengan batas paling utara adalah Gunung Merapi. Di lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua buah bukit,



Gambar 1.
Prosedur Pengembangan Penelitian

yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari Kawasan Wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Kuning Boyong, Winongo, Gendol dan Opak.

2. Deskripsi Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Sleman Tahun 2012 sebesar 1.114.833 jiwa, terdiri dari 557.911 laki-laki dan 556.922 perempuan. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 1.

Dari Tabel 1 tersebut diketahui bahwa persentase tertinggi jumlah penduduk ada pada usia 60 tahun lebih yaitu sebesar 10,40 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa harapan usia hidup di Sleman cukup tinggi, namun jika dilihat untuk tingkat produktifitas usia tersebut sudah kurang produktif. Urutan kedua ada pada usia 20 – 24 tahun yaitu sebesar 10,25 persen usia ini merupakan usia dewasa awal yang perlu diperhatikan untuk dapat menjadi generasi penerus yang mandiri, handal, dan berkarakter. Jika dilihat dari jenis kelamin tidak ada perbedaan yang menyolok antar jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Jumlah

penduduk laki-laki ada sebesar 50,04 persen, sedangkan jumlah penduduk perempuan 49,96 persen. Dengan melihat data penduduk tersebut akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan tentang pembangunan daerah.

3. Peta Kemiskinan di Kabupaten Sleman

Untuk mengetahui peta kemiskinan di Kabupaten Sleman dapat diketahui melalui data jumlah kepala keluar miskin di tingkat kecamatan, jumlah kepala keluarga miskin di lihat dari jenis kelamin. Dari Tabel 2 diketahui bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten Sleman pada tahun 2012 sebesar 49.471 KK (15,85 persen), dan tampak pula bahwa tiga kecamatan yang digunakan sebagai sampel penelitian ini cukup tinggi tingkat kemiskinannya yaitu Kecamatan Ngemplak 2.396 KK (14,76 persen), Kecamatan Turi 2.158 KK (19,45 persen), dan Kecamatan Cangkringan 4.572 KK (47,78 persen). Untuk Kecamatan terbesar tingkat kemiskinannya adalah di Kecamatan Cangkringan. Hal ini sangat dapat dimengerti, mengingat untuk Kecamatan Cangkringan merupakan daerah yang paling parah terkena dampak erupsi Gunung Merapi pada Tahun 2010. Namun pada tahun 2014 ini dari data yang di peroleh dari Bappeda Kabu-

Tabel 1
Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	persen	Perempuan	persen	Jumlah Total	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	45.099	8,08	42.825	7,69	87.924	7,89
5-9	40.460	7,25	38.517	6,92	78.977	7,08
10-14	39.281	7,04	37.345	6,71	76.626	6,87
15-19	47.112	8,44	45.689	8,20	92.801	8,32
20-24	59.630	10,69	54.607	9,81	114.237	10,25
25-29	55.517	9,95	50.670	9,10	106.187	9,52
30-34	46.778	8,38	45.579	8,18	92.357	8,28
35-39	41.930	7,52	42.380	7,61	84.310	7,56
40-44	40.413	7,24	41.513	7,45	81.926	7,35
45-49	35.170	6,30	37.399	6,72	72.569	6,51
50-54	29.556	5,30	31.853	5,72	61.409	5,51
55-59	24.404	4,37	25.117	4,51	49.521	4,44
60+	52.561	9,42	63.428	11,39	115.989	10,40
Jumlah	557.911	100,00	556.922	100,00	1.114.833	100,00

Sumber: Sensus Penduduk 2010 dalam BPS Kab.Sleman (2013)

Tabel 2
Jumlah Kepala Keluarga Miskin dan Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jumlah Kk	Kk Miskin	Persen	Jumlah Jiwa	Jiwa Miskin	Laki - Laki	Perempuan
1	Gamping	27.697	3.175	11,46	91.880	11.587	5.846	5.741
2	Godean	21.456	3.259	15,19	70.208	11.634	5.848	5.786
3	Moyudan	10.768	1.821	16,91	33.291	5.884	2.927	2.957
4	Minggir	11.310	2.558	22,62	35.577	8.395	4.164	4.231
5	Seyegan	15.385	3.660	23,79	47.601	12.566	6.261	6.305
6	Mlati	27.905	3.239	11,61	92.321	11.165	5.604	5.561
7	Depok	38.497	1.572	4,08	132.521	6.317	3.173	3.144
8	Berbah	15.906	2.081	13,08	52.546	7.359	3.630	3.729
9	Prambanan	16.303	3.684	22,60	50.604	12.339	6.186	6.153
10	Kalasan	23.207	2.828	12,19	77.462	9.923	4.922	5.001
11	Ngemplak	17.692	1.697	9,59	57.941	5.786	2.846	2.940
12	Ngaglik	28.572	2.126	7,44	97.076	7.982	3.951	4.031
13	Sleman	20.315	3.923	19,31	65.415	13.284	6.721	6.563
14	Tempel	17.547	4.076	23,23	54.260	13.366	6.731	6.635
15	Turi	10.783	2.147	19,91	34.682	7.522	3.805	3.717
16	Pakem	11.344	1.145	10,09	35.430	4.003	1.996	2.007
17	Cangkringan	9.554	2.046	21,42	30.568	6.802	3.398	3.404
Total		324.241	45.037	13,89	1.059.383	155.914	78.009	77.905

Sumber Bappeda Kabupaten Sleman 2014

paten Sleman telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman. Jumlah KK Miskin untuk seluruh Kabupaten Sleman ada sebesar 45.037 KK (13,89 persen), dan untuk Kecamatan Ngemplak berjumlah 1.697 KK (9,59 persen), Kecamatan Turi 2147 KK (19,91 persen), dan Kecamatan Cangkringan 2046 KK (21,42 persen). Untuk Kecamatan Cangkringan ada penurunan yang sangat besar dari 47,78 persen menjadi 21,42 persen penurunan angka ini dapat dimungkinkan karena adanya berbagai program pengentasan yang dilakukan oleh pemerintah dan banyaknya lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri yang membantu pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana erupsi Merapi. Namun secara keseluruhan untuk tingkat Kabupaten penurunan angka kemiskinan tidak besar yaitu dari 15,85 persen menjadi 13,89 persen. Rendahnya penurunan angka kemiskinan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengkaji lebih lanjut program-program pengentasan kemiskinan yang dilaku-

kan berbagai instansi di Kabupaten Sleman. Tahapan penelitian berikutnya adalah menggali permasalahan mendasar kemiskinan, partisipasi masyarakat khususnya keterlibatan perempuan miskin, dan jenis-jenis program antarinstansi .

4. Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman

Dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwa berbagai program yang dilakukan oleh beberapa instansi belum nampak program pengentasan kemiskinan yang secara sinergi dilakukan bersama. Setiap instansi berjalan sendiri-sendiri meskipun sasaran programnya sama yaitu KK miskin. Program pengentasan kemiskinan yang secara khusus untuk kelompok perempuan belum tampak dilakukan secara sinergi antar instansi. Meskipun banyak diakui bahwa potensi perempuan dalam upaya pengentasan kemiskinan sangat penting. Dari hasil penelitian ini belum tampak program pengembangan kemampuan potensi perempuan di bidang ekonomi produktif dilakukan secara sinergi antar instansi. Oleh

karena itu untuk program pengentasan kemiskinan diperlukan program khusus pemberdayaan perempuan yang dilakukan secara sinergi antar instansi, agar dapat memberikan efek ganda pada tumbuhnya swadaya dalam mencukupi kebutuhan keluarga yang juga berpengaruh pada wilayah setempat. Sebagai wilayah yang kaya akan potensi alam pedesaan, Sleman perlu dukungan sektor ekonomi produktif yang mampu mengolah dan mengubah potensi alam menjadi karya inovatif yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Potensi wilayah yang tersedia seperti hasil bumi, salak pondoh, pisang, serta hasil pertanian lainnya merupakan kekayaan yang hendaknya diolah sehingga menambah perkembangan ekonomi masyarakat. Melalui program pemberdayaan perempuan akan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

5. Hasil Focus Group Discussion

FGD dilaksanakan pada tanggal 4 November 2014 di Rumah Makan Mr. Blangkon, Jalan Kaliurang Yogyakarta. Peserta yang diundang dan hadir sebagai nara sumber adalah dari instansi SKPD Bappeda, Dinas Nakersos, BKBPMPP instansi tersebut merupakan penentu dan pelaksana dalam program pengentasan kemiskinan.

sedangkan peserta FGD antara lain Kasi Kesmas dan Kasi Ekobang Kecamatan Cangkringan, Turi, dan Ngemplak serta perwakilan kelompok sasaran. Dalam FGD peneliti memaparkan draf model pengentasan kemiskinan, melalui delapan langkah seperti tertera dalam Gambar 2.

Dari hasil diskusi, didapatkan berbagai masukan baik dari nara sumber, maupun dari peserta FGD yang terlibat sebagai pelaksana program serta sebagai sasaran program pengentasan kemiskinan, dapat dirangkum sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Sleman sangat mendukung model pengentasan berperspektif gender, mengingat masih ada ketimpangan gender di Kabupaten Sleman, yang dapat diketahui Kabupaten Sleman IPM 79,29 persen indeks pembangunan gender 75,76 persen ada kesenjangan 3,65 persen kesenjangan gender, hal ini dikarenakan akses pendidikan lama sekolah lebih bagus laki-laki, penguatan modal didominasi laki-laki, sehingga model pengentasan kemiskinan dengan perspektif gender jika dapat dijalankan akan baik, dan Sleman menjadi pioneer untuk perempuan dengan akses mengurangi kemiskinan, mengingat Sleman memiliki banyak potensi dan perkembangan yang sangat dinamis, sehingga tersedia *market* yang dapat dijadikan sarana pemasaran



Gambar 2
Rancangan Model

sebagai akses perempuan untuk berkembang dan mandiri. Untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan, subyek perlu dipikirkan strategi memperlakukannya untuk dapat mengetahui potensi dan kebutuhannya. Untuk implementasi model dapat diusulkan dengan mengambil salah satu kelompok sasaran di Sleman, misalnya dari P2KWSS, meskipun tahapan yang dirancang dirasa sudah cukup lengkap, tetapi perlu tahapan monitoring dan pendampingan yang berkelanjutan, agar model tampak hasilnya dengan nyata.

6. Analisis Pengentasan Kemiskinan Berperspektif Gender

Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu hasil bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari UU No 40 tahun 2004 tersebut terlihat, bahwa upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat adalah salah satu program yang harus dilakukan oleh pemerintah meskipun bertahap. Beberapa program yang saat ini dijalankan dengan simultan adalah penyediaan perumahan murah, kesehatan dan pendidikan gratis bagi keluarga miskin, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat, juga harus melihat potensi yang dimiliki di wilayah sekitar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Apabila sudah mengetahui potensi wilayah tersebut, maka akan mampu mengetahui pula daya saing atau keunggulan dari wilayah tersebut, sehingga masyarakat di sekitar wilayah tersebut akan merasa sejahtera karena masyarakat mampu memiliki penghasilan yang cukup atau tidak dikatakan miskin

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensi, sehingga secara umum masyarakat miskin adalah suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya secara layak. Mengingat persoalan struktural dan multidimensi tersebut, maka upaya penanggulangan seyogyanya diletakkan dan dipercayakan

kepada masyarakat itu sendiri, tentunya dengan didukung dan difasilitasi oleh pemerintah, maupun pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil lainnya, sehingga proses penanggulangan kemiskinan akan menjadi suatu gerakan masyarakat yang akan menjamin potensi kemandirian dan keberlanjutan guna meningkatkan kehidupannya yang lebih layak (Keppi Sukes, 2009: 1). Selanjutnya salah satu rekomendasinya hasil penelitiannya adalah model penanggulangan kemiskinan partisipatif yaitu yang berasal masyarakat terutama perempuan miskin dan tokoh masyarakat adalah alternatif yang perlu diuji coba. Model ini dimulai dari kegiatan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang perempuan miskin, perencanaan dan pelaksanaan program dengan prinsip adil, partisipatif, dan berorientasi pemecahan masalah, kelembagaan terpadu dan monitoring serta evaluasi periodik dan berkelanjutan (Keppi Sukes, 2009: 15).

Masalah kemiskinan di Indonesia masih didominasi kemiskinan di pedesaan. Data Susenas 2003 menunjukkan bahwa pada tahun 2003 penduduk miskin di pedesaan diperkirakan 67 persen, dan sebagian bekerja disektor pertanian. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan. Masyarakat miskin di pedesaan dihadapkan pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan lahan yang rata-rata kurang dari 0,5 ha, banyaknya rumah tangga yang tidak mempunyai asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja belum tercukupinya pelayanan publik, lemahnya kelembagaan organisasi masyarakat, dan ketidakberdayaan dalam menentukan produk yang dihasilkan. Berbagai persoalan agraria dan pertanian mempunyai implikasi luas terhadap kehidupan petani dan buruh tani. Dari hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan perlu melibatkan perempuan sebagai subyek, agar perempuan dapat mengetahui permasalahan, potensi dan kebutuhannya, sehingga akan berkembang sesuai potensi. Adanya bencana gunung merapi dapat diduga bahwa jumlah KK miskin di daerah Kabupaten Sleman akan meningkat pasca bencana

Gunung merapi, karena bencana Gunung Merapi selain korban jiwa juga kerugian material yang tidak sedikit (Indriyati & Nugrahani, 2010).

Tiga Pilar Pendekatan (Sosio Kultural, ekonomi, dan Lingkungan hidup): Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia lahir dari manusia lain, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu orangpun dapat hidup tanpa orang lain. Kondisi tersebut merupakan suatu realitas sosiokultural yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari secara riil karena menyangkut kondisi kehidupan manusia didalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat sekelompok orang yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, sehingga dapat menimbulkan suatu tata aturan bagi kehidupan bersama. Dengan demikian realitas sosiokultural (sosial budaya) merupakan kenyataan atau keadaan sosial budaya yang menempati daerah atau lingkungan sekitar kehidupan masyarakat. Dengan gambaran lebih jelas bahwa realitas sosiokultural adalah keadaan sosial budaya yang dapat dilihat dan sering terjadi setiap waktu disekitar kehidupan masyarakat (Tri Cahyo Wibowo, 2014).

Upaya meningkatkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, kualitas kehidupan dan martabat manusia di segala aspek, baik aspek fisik, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Secara sengaja atau tidak, pembangunan seringkali hanya diinterpretasikan sebagai pembangunan fisik dan ekonomi saja, walaupun terlihat sederhana penyerderhanaan tersebut mempunyai konsekuensi yang besar terhadap cara pandang pihak-pihak tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan di lapangan dan konsistensinya dalam mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan yang pada hakekatnya untuk kepentingan peningkatan kehidupan masyarakat. Paling tidak terdapat dua konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari hasil proses penyerderhanaan tersebut: Pertama, konsekuensi terhadap proses pembangunan. Penyerderhanaan ini mengakibatkan proses pembangunan hanya

dilihat dalam perspektif perubahan masyarakat yang bersifat partial, bukan holistik. Pembangunan fisik dengan demikian hanya dilihat dalam perspektif teknikal saja dan kurang mempertimbangkan perspektif humanitas dan sosio-kultural masyarakat. Kedua, konsekuensi terhadap hasil pembangunan.

Penyerderhanaan ini mengakibatkan keberhasilan pembangunan hanya dilihat atau dinilai dari banyaknya fasilitas fisik yang telah dibangun. Padahal dalam kenyataannya, hal tersebut kurang merefleksikan keadaan yang sesungguhnya dimana keberhasilan pembangunan infrastruktur fisik pada dasarnya sangat terkait erat dengan pemanfaatan infrastruktur tersebut oleh masyarakat. Oleh karena itu, bisa saja di suatu daerah telah banyak fasilitas yang dibangun, tetapi dampak positif dari pembangunan tersebut bagi peningkatan kehidupan masyarakat sangat kecil. Keadaan ini tentunya harus segera diperbaiki dengan cara memperluas dan mengikutsertakan pendekatan *socio-cultural* dan *socio-economy* dalam pendekatan pembangunan yang telah ada. Pendekatan sosiokultural dalam pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai usaha untuk mempertimbangkan aspek aspek sosiokultural dan menggali nilai kultural serta pengetahuan lokal yang positif di dalam masyarakat yang berguna dalam proses pembangunan, termasuk pada pembangunan prasarana fisik, dengan cara ini pengabaian terhadap aspek sosio-kultural masyarakat dalam pembangunan dapat dihindarkan. Sebagai hasilnya tercipta keseimbangan dan sinergi antara pendekatan teknis dan sosiokultural. Apabila hal ini dapat diwujudkan maka pembangunan infrastruktur fisik lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan terjadi perubahan kondisi sosiokultural masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai dengan fase-fase yang diharapkan dalam pembangunan (Dhenov, 2008). Demikian juga dalam upaya pengentasan kemiskinan, tiga pendekatan sosiokultural, ekonomi dan lingkungan hidup dapat dilakukan secara holistik, sebab jika pendekatan hanya dilakukan dari sisi ekonomi, maka hasilnya akan lebih optimal. Proses

pemberdayaan dilakukan dengan mengantarkan agar manusia sadar akan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya, dan pendekatan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan pendekatan lingkungan hidup diharapkan akan dapat ikut melestarikan lingkungan untuk generasi penerus.

Pemberdayaan Berperspektif Gender:

Pemberdayaan mempunyai makna harafiah membuat seseorang dan kelompok berdaya, istilah lain untuk memberdayakan adalah penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Didalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegasan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Proses pemberdayaan diusahakan agar orang lain berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidak seimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Pemberdayaan diterjemahkan sebagai suatu usaha untuk mendapatkan kontrol dan sumber daya yang dibutuhkan. Suatu proses dikatakan memberdayakan apabila mampu menolong perempuan untuk dapat mengembangkan kemampuan sehingga mereka menjadi entitas yang mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan mampu mengambil keputusan secara otonom (Fatterman, et. all., 1996). Proses pemberdayaan menempatkan perempuan sebagai bagian terpenting dalam implementasi program (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, 2013)

Lahir dan berkembangnya konsep *empowerment* memerlukan sikap dan wawasan yang mendasar, jernih serta kuat mengenai kekuasaan atau power itu sendiri. Kerancuan yang menyertai perkembangan konsep *empowerment* itu tidak saja disebabkan oleh adanya berbagai versi dan bentuk *empowerment* akan tetapi juga disebabkan karena tumbuh dan berkembangnya konsep *empowerment* tersebut tidak disertai dengan

terjadinya refleksi mendasar secara jernih dan kritis terhadap konsep kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu, memahami soal pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dengan memahami tentang kekuasaan atau *power*; orang yang tidak berdaya dapat berdaya dapat disebut sebagai orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Kekuasaan, berarti menguasai sesuatu, sehingga mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu. Dalam melaksanakan pengembangan masyarakat berwawasan gender perlu partisipasi masyarakat. Partisipasi disini diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat sepenuhnya baik laki-laki maupun perempuan dalam kegiatan pembangunan. Keterlibatan ini harus dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang perbedaan gender, suku, ras, kelas, agama atau orientasi jenis kelamin, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai perencanaan dan pelaku (subjek) pembangunan.

Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan daerah yang miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan untuk peningkatan potensi perempuan yang telah ada, melalui pengembangan usaha produktif dan diversifikasi hasil lokal secara berkelompok. Dalam proses pemberdayaan perempuan ini diajak untuk mengenali dulu apa yang menjadi kebutuhan riil perempuan baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis, dan permasalahannya. Dengan mengetahui kebutuhannya sendiri diharapkan mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Sehingga perempuan sendirilah yang menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari solusi yang ditentukan. Proses ini pernah dilakukan pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui hibah PPM IBM tahun 2009, di Parangtritis Bantul, yang hasilnya bahwa dengan metode partisipasi aktif, perempuan Kelompok perempuan pesisir setelah mendapatkan tambahan pelatihan, dan pendampingan pelaksanaan hibah PPM 2009 ini adalah perempuan pesisir menjadi mandiri dalam hal ekonomi dan sosial, dan dapat ikut mengembangkan lingku-

ngan sosialnya. Dengan meningkatnya kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi akan meningkatkan pula penghasilan dan kesejahteraan keluarganya, yang selanjutnya akan mampu mempengaruhi perempuan lain agar mau ikut ambil bagian dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan, sehingga akhirnya mampu pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir selatan (Indriyati, dkk, 2009).

Hasil penelitian PSW UGM tahun 2006, merumuskan bahwa pada hakekatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Selanjutnya, dalam salah satu rekomendasi penelitiannya menyebutkan bahwa perlunya dirumuskan kebijakan dan rencana program-program pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai implementasi Inpres no 9 tahun 2000 (Tim PSW UGM, 2006: 70). Dengan penelitian ini nantinya akan berupaya menerapkan model pendekatan sosio kultural, ekonomi dan lingkungan, melalui pendekatan tersebut diharapkan perempuan miskin mampu mengenali dirinya sebagai manusia yang utuh dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan dengan pendekatan kultural dapat diketahui faktor-faktor budaya yang mendukung perubahan. Pendekatan ekonomi ini diharapkan perempuan dapat meningkatkan penghasilannya melalui usaha ekonomi produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Sedangkan dengan pendekatan lingkungan perempuan diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungannya melalui penyadaran untuk masa depan generasi penerusnya.

D. Penutup

Kesimpulan: Hasil penelitian diketahui jumlah KK miskin perempuan hampir sebanding dengan jumlah KK laki-laki, perlu dikaji lebih dalam bagaimana keterlibatan kaum perempuan dalam pengentasan kemiskinan. dari data peta

kemiskinan diketahui bahwa jumlah KK Miskin untuk seluruh Kabupaten Sleman ada sebesar 45.037 KK (13,89 persen). Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh berbagai SKPD, tetapi belum diketahui secara pasti tingkat sinergitas antarinstansi dalam program pengentasan kemiskinan, meskipun data yang digunakan sudah satu sumber. Program dan kegiatan antar instansi berjalan sendiri-sendiri karena masih sering terjadi program sektoral. Hasil FGD dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman sangat mendukung model pengentasan berperspektif gender, mengingat masih ada ketimpangan gender di Kabupaten Sleman, yang dapat diketahui Kabupaten Sleman IPM 79,29 persen indeks pembangunan gender 75,76 persen ada kesenjangan 3,65 persen kesenjangan gender, dikarenakan akses pendidikan lama sekolah lebih bagus laki-laki, penguatan modal didominasi laki-laki, perempuan masih kurang mendapatkan akses, sehingga model pengentasan kemiskinan dengan perspektif gender dapat diujicobakan di Sleman, dan menjadi pionir untuk perempuan dalam mengurangi kemiskinan.

Rekomendasi: Model pendekatan sosio-kultural ekonomi dan lingkungan hidup alam pengentasan kemiskinan berperspektif gender dapat dijadikan rujukan untuk program-program pembangunan di daerah. Perlu dilakukan program yang sinergi antarinstansi dalam pengentasan kemiskinan agar hasil dari program dapat benar-benar mengurangi angka kemiskinan.

Pustaka Acuan

- Badan Pemberdayaan Perempuan DIY. (2003). *Laporan Tim Pembangunan Berperspektif Gender*, Yogyakarta
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY (2013). *Panduan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat*
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman. (2012). *Kajian Dana Bergulir Sebagai Bagian Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, Sleman
- Bappenas. (2005). Hasil Kajian Pembelajaran dari Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan

- BPS dengan BAPPEDA Kabupaten Sleman. (2013). *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2012/2013*, BPS Kabupaten Sleman.
- BPS dengan BAPPEDA Kabupaten Sleman. (2009). *Penduduk Kabupaten Sleman Hasil Registrasi Penduduk Pertengahan tahun 2009*, BPS Kabupaten Sleman
- Dhenov, <http://dhenov.blogspot.com/2008/02/pendekatan-sosio-kultural-dalam.html>, diunduh 26 Juni 2014
- Forum Komunikasi PSW DIY. (2000). *Laporan hasil Penelitian Evaluasi Program Daerah dan Non Sektor*, Yogyakarta
- Handayani, Sih dan Yos Soetiyoso. (1997). *Merekonstruksi Realitas Dengan Perspektif Gender*, Sekretaris Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY) kerjasama OXFAM UK/I, Yogyakarta.
- Indriyati, Nugahani, Gunawan, Bahrum, dan Purwanti. (2009). *Laporan Ibm Kelompok Perempuan Usaha Pengolahan Makanan Hasil Laut di Pesisir Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul* (Hibah IbM Pengabdian Dikti)
- Indriyati, dan Nugahani. (2010). *Pemberdayaan Perempuan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Studi Tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)* (Hibah Penelitian Studi Kajian Wanita)
- Keppi Sukesu. (2009). *Perempuan dan Kemiskinan Profil dan Upaya Pengentasan*, Makalah Seminar Gender dan Keadilan Sosial, Pusat Studi Kependudukan UGM kerjasama DP2M Dirjen Dikti .
- Lembaran Negara. (2004). Undang-Undang No. 40, *Sistem Jaminan Sosial Nasional* (SJSN)
- Maswita Jaya. (2006). *Perempuan Indonesia 2005*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- Prasetyo Murniati. (2004). *Getar Gender*, Yabinkas Yogyakarta
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Peneliti PSW UGM, *Profil Gender Development Index (GDI) Dan Gender Empowerment Measure (GEM) Kabupaten Sleman*, PSW UGM Kerjasama dengan Pemda Kabupaten Sleman
- Tri Cahyo Wibobowo, <http://tricahyowibow.blogspot.com/2014/02/realitas-sosio-kultural.html>, diunduh tanggal 26 Juni 2014
- Tri Sakti Handayani & Sugiyarti, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, Universitas Negeri Malang.
- Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Efek Modal dan Dukungan Sosial terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia Peserta Program *Home Care*

The Effect of Social Capital and Social Support toward Elderly Welfare Members of Home Care Program

Mariani¹, Subhan Kadir², dan Sunarru Samsi Hariadi³

PSTW Gau Mabaji Gowa, Jl. Poros Malino Km. 26 Samaya Kab. Gowa. Email: mariani.gunawan@yahoo.co.id.¹
Sekolah Pasca Sarjana UGM, Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Jl. Bulaksumur, Sleman Yogyakarta.
Email: subhan.kadir@mail.ugm.ac.id CP: +6281342441480²

Diterima 25 November 2014, direvisi 11 Maret 2015, disetujui 23 Mei 2015.

Abstract

The purpose of the research is to analyze the influence of social capital and social support toward elderly welfare, involving 35 elderly participants in Home Care Program as respondents. This research is quantitative method. The results showed that although social capital and social support are at a high level, but they did not necessarily have impact on improving the welfare for the elderly. The result of regression analysis showed no significant effect of social capital ($t = 0.812$, $P > \alpha 0.05$) and social support ($t = 0.333$, $P > \alpha 0.05$) separately and collectively ($F = 0.552$, $P > \alpha 0.05$) on the welfare of the elderly. The value of $R = 0.191$ indicates a very weak relationship between social capital and social support to the elderly welfare. Contribution influenced of social capital and social support to the elderly welfare is only 3.6persen ($R^2 = 0.036$). The rest of 96.4 persen are caused by other factors not included in the variables of this study. The effect of social capital and social support to welfare of the elderly is on physical and psychosocial aspects only. Other aspects included welfare indicators consist of environmental conditions, especially housing, access to public and social services, and household economic are not maximal. It is recommended that home care program further to strengthen social capital and social support should be specifically directed to elderly welfare. The program should be implemented by encouraging active participation of community in order to continue the program without depending external parties.

Keywords: *Social Capital; Social Support; Home Care; Elderly Welfare*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh modal sosial dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan lanjut usia. Melibatkan 35 lanjut usia peserta Program *Home Care* sebagai responden. Penelitian menerapkan metode kuantitatif korelasional. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa walaupun modal sosial dan dukungan sosial berada pada tingkat yang tinggi tetapi tidak serta merta berdampak pada meningkatnya kesejahteraan bagi lanjut usia. Analisis regresi menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan modal sosial ($t = 0,812$, $p > \alpha 0,05$) dan dukungan sosial ($t = 0,333$, $p > \alpha 0,05$) secara terpisah dan secara bersama ($F = 0,552$, $p > \alpha 0,05$) terhadap kesejahteraan lanjut usia. Nilai $R = 0,191$ menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara modal sosial dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan lanjut usia. Sumbangan pengaruh modal sosial dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan lanjut usia hanya 3,6 persen ($R^2 = 0,036$). 96,4 persen disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini. Modal sosial dan dukungan sosial mempengaruhi kesejahteraan lanjut usia hanya pada aspek fisik dan Psikososial saja. Aspek lainnya yang termasuk dalam indikator kesejahteraan meliputi kondisi lingkungan terutama tempat tinggal, akses terhadap pelayanan publik dan sosial, serta ekonomi keluarga belum maksimal. Disarankan agar program *Home Care* lebih memperkuat Modal Sosial dan Dukungan Sosial yang secara spesifik diarahkan kepada kesejahteraan lanjut usia. Program dijalankan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat agar terus berlanjut secara berkesinambungan tanpa bergantung pihak luar.

Kata kunci: *Modal Sosial; Dukungan Sosial; Home Care; Kesejahteraan Lanjut Usia*

A. Pendahuluan

Fenomena sosial yang dihadapi negara maju dan berkembang dewasa ini adalah meningkatnya jumlah populasi lanjut usia. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya kualitas hidup dan panjangnya usia harapan hidup. Terjadi perubahan komposisi penduduk dalam dekade terakhir dimana penduduk lanjut usia lebih besar dibandingkan penduduk usia anak dan dewasa. Data menunjukkan lanjut usia di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sensus BPS tahun 2010 mencatat jumlah lanjut usia sebanyak 19.036.600 jiwa. Diprediksi terus mengalami peningkatan, di tahun 2020 menjadi 28.986.200 jiwa, dan di tahun 2025 menjadi 35.916.000 jiwa.

Lanjut usia rentan mengalami permasalahan sosial berupa kemiskinan, keterlantaran baik secara ekonomi maupun sosial, dan perlakuan salah (tindak kekerasan). Negara berkewajiban memberikan perlindungan sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia nomor 13 tahun 1998. Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia yang ada di Sulawesi Selatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan jumlah lanjut usia yang ada. Tercatat ada tiga Panti Sosial Tresna Werdha, masing-masing milik Kemensos, Pemda, dan Masyarakat (yayasan). Daya tampung ketiga panti tersebut kurang lebih hanya 255 orang (Direktorat Bina Pelayanan Lanjut Usia, 2004). Jika dibandingkan dengan jumlah lanjut usia Sulsel berdasarkan data BPS tahun 2013 yaitu sebanyak 614.892 orang, berarti daya tampung Panti hanya 0,04 persen saja.

Data di atas menunjukkan keterbatasan lembaga kesejahteraan lanjut usia untuk dapat diakses oleh lanjut usia. Banyak lanjut usia yang memilih untuk tetap dalam perawatan keluarga daripada harus masuk dalam layanan Panti. Faktor psikologis merupakan alasan utama. Ketidakmauan untuk meninggalkan tempat tinggal yang telah dihuni cukup lama yang telah memberikan cukup banyak kenangan. Dan bayangan akan sulitnya beradaptasi terhadap suasana baru yang dijalani di dalam panti yang mungkin saja

banyak berbeda dengan nilai-nilai yang dianut selama ini.

Keluarga merupakan tempat paling baik bagi lanjut usia dibandingkan panti, namun kenyataannya tidak semua lanjut usia memiliki keluarga. Banyak di antara mereka tinggal sebatang kara. Hidup sendiri tanpa sanak keluarga dengan kondisi ekonomi dan fasilitas rumah tangga yang serba terbatas. Atau memiliki sanak keluarga tetapi hidup terpisah karena masing-masing membentuk rumah tangga sendiri-sendiri. Dalam kondisi seperti itu yang paling membantu lanjut usia adalah adanya kepekaan sosial atau masyarakat dan keluarga sendiri untuk memberikan bantuan, perlindungan, serta perhatian. Kekerabatan yang kuat, kepercayaan, dan jaringan sosial yang ada merupakan bentuk-bentuk modal sosial. Sedangkan bantuan yang diterima dari orang lain ataupun lingkungan sosial dikenal sebagai dukungan sosial. Program pelayanan lanjut usia di rumah, keluarga, bahkan dalam lingkungan masyarakat sendiri perlu dikembangkan. Program ini sebaiknya menumbuhkan kembangkan peran modal sosial dan dukungan sosial. Salah satu program yang fokus pada pengembangan kapasitas keluarga dan masyarakat untuk memberikan perawatan kepada lanjut usia adalah program *Home Care*.

Home Care adalah bentuk pelayanan pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di rumah sebagai wujud perhatian terhadap lanjut usia dengan mengutamakan peran masyarakat berbasis keluarga. Program ini berupaya memperkuat peran anggota keluarga dan masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada lanjut usia. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lanjut usia menyesuaikan diri; memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia secara wajar; meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan upaya kesejahteraan lanjut usia; menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi lanjut usia (Kemensos, 2009).

Ada tiga pihak yang terlibat dalam program ini yaitu: Pelaksana Program dalam hal ini adalah PSTW Gau Mabaji Gowa; Pendamping, direkrut

dari masyarakat setempat; dan Keluarga Lanjut Usia peserta program. Pelaksana program mempunyai tugas sebagai fasilitator dan koordinator. Memberikan pelatihan kepada Pendamping dan melakukan supervisi. Membiayai, membuat pelaporan dan penanggung jawab dalam kegiatan. Pendamping memberikan pelayanan secara langsung kepada lanjut usia, maupun tidak langsung melalui penguatan peran keluarga. Sebagai pendamping lanjut usia dalam memperoleh pelayanan publik dan memperkuat jaringan dalam masyarakat. Sedangkan Keluarga bekerja sama dengan Pendamping secara aktif dalam perawatan lanjut usia. Dengan kata lain Program *Home Care* ini sebagai bentuk pemberian dan penguatan Dukungan Sosial.

Bentuk pelayanan yang diberikan dalam *Home Care* adalah perawatan sosial dan pendampingan sosial. Perawatan sosial umumnya secara fisik maupun emosional yang bersifat non medis yang menjamin lanjut usia dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari (*activity of daily living*), perawatan sosial juga bagian dari unsur medis dan praktek pekerjaan sosial. Pendampingan sosial yaitu suatu proses kegiatan yang terencana dan berkesinambungan, mulai dari sosialisasi sampai terminasi, sebagai upaya membantu lanjut usia, keluarga dan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lanjut usia yang bersangkutan (Kemensos, 2009).

Program *Home Care* yang dilaksanakan oleh PSTW Gau Mabaji Gowa menggunakan anggaran DIPA PSTW. Program berjalan selama setahun pada satu wilayah kemudian dilanjutkan pada tahun berikutnya di wilayah berbeda. Dengan alasan keterbatasan anggaran program hanya bisa menanggung sekitar 30-40 orang lanjut usia setiap tahun. Program harus berpindah tempat (wilayah garapan program) ke tempat lain dalam satu periode untuk alasan pemerataan pelayanan.

Realisasi program *home care* di masyarakat tidak menutup mata pada kearifan lokal warga setempat. Kearifan dalam bentuk modal sosial masyarakat perlu di tumbuh kembangkan. Gagasan utama mengenai modal sosial adalah ada-

nya jaringan sosial yang dapat dijadikan aset yang bernilai. Jaringan memberikan dasar terhadap kohesi sosial karena mendorong orang-orang bekerja sama satu sama lain untuk memperoleh manfaat timbal balik.

Beberapa pakar mengemukakan definisi modal sosial misalnya Bourdieu, Coleman, dan Putnam. Pada penelitian ini menggunakan definisi modal sosial Putnam, dimana modal sosial sebagai kebersamaan dalam suatu kehidupan *associational* yang di dalamnya terdapat kepercayaan, norma dan jaringan. Ketiga nilai tersebut akan menjadi efisien jika dikoordinasi dengan baik (Field, 2011).

Kepercayaan atau dalam bahasa inggris *Trust* merupakan kata benda dan kata kerja. *Trust* berarti kepercayaan, keyakinan atau juga rasa percaya. Sedangkan sebagai kata kerja *Trust* berarti proses mempercayai sesuatu yang jelas sasarannya (Lawang, 2005). Fukuyama (2002) menyatakan “komunitas tergantung pada kepercayaan timbal balik dan tidak akan muncul secara spontan tanpanya”. Menurutnya modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan abadi di tengah-tengah masyarakat atau pada bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Lawang (2005) mendefinisikan kepercayaan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial.

Jaringan menurut Lawang (2005) adalah keterkaitan antara orang atau kelompok oleh adanya hubungan sosial. Dimana hubungan itu diikat oleh kepercayaan yang dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak. Dari adanya pertukaran yang berjalan saling menguntungkan maka akan muncul norma dalam bentuk hak dan kewajiban bersama sehingga kedua belah pihak diuntungkan oleh pertukaran tersebut. Norma bersifat resiprosikal artinya bahwa norma berisi hak dan kewajiban yang dapat menjamin keuntungan bersama.

Penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh positif modal sosial yang terdiri dari asosiasi lokal dan karakteristik masyarakat ter-

hadap tingkat kesejahteraan ekonomi objektif dan kesejahteraan ekonomi subjektif keluarga dengan nilai beta (β) masing-masing 4,46 dan 3,74. Hal ini berarti semakin tinggi modal sosial yang dimiliki keluarga maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya (Suandi, 2014). Penelitian serupa mengenai peran modal sosial terhadap kesejahteraan anggota kelompok tani. Menunjukkan hasil bahwa modal sosial berperan aktif dalam penyelesaian masalah dalam kelompok tani (Anam & Suman, 2013). Hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa modal sosial memprediksi kesejahteraan secara tidak langsung. Tercatat bahwa modal sosial berpengaruh terhadap perilaku kewirausahaan (t hitung $16,56 > t$ tabel $3,7$), hubungan yang sangat kuat ($R=0,89$) dan modal sosial memprediksi 79 persen perilaku kewirausahaan (R^2 $0,7921$) (Thobias, Tungka, & Rogahang, 2013).

Selain modal sosial program *home care* juga berupaya menumbuhkembangkan dukungan sosial (*social support*). Dukungan sosial merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerangkan bagaimana hubungan sosial memberikan manfaat bagi kesehatan mental atau kesehatan fisik individu. Dukungan sosial sebagai satu diantara fungsi pertalian atau ikatan sosial. Ikatan-ikatan sosial menggambarkan tingkat dan kualitas umum dari hubungan interpersonal.

Taylor, et al (1997) mendefinisikan dukungan sosial sebagai pertukaran interpersonal dimana salah seorang memberikan bantuan kepada orang lain. Senada dengan itu, Gibson, et al (1996) mendefinisikan dukungan sosial sebagai kesenangan, bantuan, yang diterima seseorang melalui hubungan formal dan informal dengan orang lain atau kelompok. Dukungan sosial timbul oleh adanya persepsi bahwa akan ada orang yang membantu jika ada suatu peristiwa yang dipandang sebagai masalah. Bantuan tersebut dapat meningkatkan perasaan positif dan meningkatkan harga diri. Kondisi psikologis ini dapat mempengaruhi respon dan perilaku antar individu sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan secara umum.

Sarafino (1998) menyebutkan lima bentuk dukungan sosial. Dukungan Emosional mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap orang yang bersangkutan. Memberikan dampak positif sebagai sarana pelepasan emosi, mengurangi kecemasan, membuat individu merasa nyaman, tentram, diperhatikan serta dicintai saat menghadapi tekanan hidup. Dukungan Penghargaan terjadi lewat ungkapan penghargaan positif individu, dorongan untuk maju, atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu, dan perbandingan positif individu dengan individu lain. Dukungan Informatif mencakup pemberian nasehat, petunjuk-petunjuk, saran-saran, informasi atau umpan balik. Dukungan Instrumental dapat berupa bantuan langsung, berupa jasa atau materi. Dukungan Jaringan Sosial mencakup perasaan keanggotaan dalam kelompok, saling berbagi kesenangan dan aktifitas sosial.

Hasil penelitian sebelumnya telah membuktikan pengaruh dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologis, misalnya mengatasi kesepian pada lanjut usia (Hayati & Marini, 2010), hubungan negatif antara dukungan sosial dengan depresi pada lanjut usia (Saputri & Indrawati, 2011). Dukungan sosial juga memiliki hubungan positif dengan kebermaknaan hidup bagi pengidap Odha (R $0,885 < \alpha$ $0,01$), dukungan sosial memprediksi kebermaknaan hidup sebesar 78,2 persen (Astuti & Budiyan, 2010).

Tujuan paling utama dari program *home care* pada dasarnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Kesejahteraan memiliki makna sangat luas sehingga perlu dibahas batasan kesejahteraan yang ideal bagi lanjut usia. Secara umum Kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial, sehingga dapat hidup layak dan mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial). Kesejahteraan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun

spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Badan Pusat Statistik menggunakan beberapa indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga meliputi: Tingkat pendapatan keluarga; komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; tingkat pendidikan keluarga; tingkat kesehatan keluarga; dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Indikator kesejahteraan tersebut memiliki aspek yang sangat luas, tidak hanya pada fisik, rohani dan sosial, tetapi melingkupi faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kondisi lingkungan atau perumahan. Pangkahila (2007) memberikan batasan sederhana kesejahteraan lanjut usia meliputi indikator peningkatan kualitas hidup dari segi fisik, psikososial, kemandirian, hubungan sosial, lingkungan dan spiritual (Pangkahila, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ada, selain faktor modal sosial dan dukungan sosial yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, kesejahteraan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Misalnya penelitian Iskandar, et al (2006) kesejahteraan dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan unsur manajemen keluarga. Faktor internal meliputi: pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset dan tabungan. Faktor eksternal meliputi kemudahan akses finansial pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, kemudahan akses dalam kredit barang/peralatan dan lokasi tempat tinggal. Unsur manajemen sumber daya keluarga meliputi: perencanaan, pembagian tugas, dan pengontrolan kegiatan. Pendapatan dan aset yang dimiliki keluarga adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan.

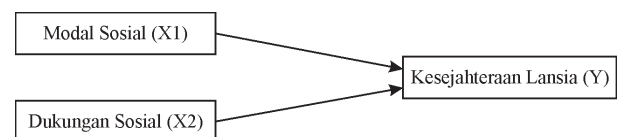
Penelitian lainnya menunjukkan ada dua faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pada petani adalah: tingkat pendidikan ($r=0,280$) dan tingkat pendapatan ($r=0,213$) (Handayani, Juita, & Nefilinda, 2013). Penelitian di Temanggung tercatat ada empat faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga, yaitu: Faktor Keluarga (jumlah anggota keluarga dan jumlah anggota keluarga usia produktif); Faktor Status Sosial (tingkat pendidikan kepala keluarga, pekerjaan kepala keluarga); Faktor Produktifitas (umur kepala keluarga, jenis kelamin kepala keluarga, dan status kepesertaan keluarga berencana) (Prastyaningrum, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal sosial dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan Lanjut Usia peserta Program *Home Care*.

B. Metode Penelitian

Menerapkan metode penelitian survei kuantitatif dan melibatkan 35 responden peserta program *Home Care* yang dilaksanakan oleh PSTW Gau Mabaji Gowa. Teknik pemilihan sampel secara sensus atau sampel total dipilih karena populasi penelitian kecil. Penelitian dilakukan di Desa Bajeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Variabel dalam penelitian ini ada tiga, yaitu: modal sosial dan dukungan sosial sebagai variabel bebas serta kesejahteraan lanjut usia sebagai variabel terikat. Variabel penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1
Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini modal sosial didefinisikan sebagai suatu nilai-nilai sosial berupa kebersamaan dalam suatu kehidupan bersama yang di dalamnya terdapat kepercayaan, norma, dan jaringan yang berguna sebagai sumber daya

mewujudkan kesejahteraan lanjut usia. Definisi tersebut sesuai dengan konsep modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam (Field, 2011). Pengukuran modal sosial menggunakan tiga indikator yaitu: kepercayaan, jaringan, dan norma dengan menggunakan kuisioner yang terdiri dari 13 item pertanyaan. Respon dalam pernyataan kuisioner diukur dengan menggunakan skala lima poin: 1 sangat tidak baik, 2 tidak baik, 3 cukup baik, 4 baik, dan 5 sangat baik.

Dukungan sosial didefinisikan sebagai evaluasi subjektif individu mengenai kenyamanan, perhatian, penghargaan, dan bantuan yang diperoleh dari hasil interaksinya dengan orang lain. Definisi tersebut sesuai konsep dari Sarafino (1998). Untuk mengukur dukungan sosial digunakan lima indikator yaitu: dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informatif, dukungan instrumental, dan dukungan jaringan sosial. Indikator tersebut kemudian dijabarkan kedalam kuisioner yang terdiri dari 14 item pernyataan. Pernyataan dalam kuisioner diukur menggunakan skala lima poin: 1 sangat tidak baik, 2 tidak baik, 3 cukup baik, 4 baik, dan 5 sangat baik.

Sedangkan kesejahteraan lanjut usia didefinisikan sebagai aspek kualitas hidup lanjut usia dari segi fisik, psikososial, independensi (kemandirian), hubungan sosial, lingkungan dan spiritual. Definisi tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Pangkahila (2007). Kesejahteraan lanjut usia diukur melalui indikator: kualitas fisik, kualitas psikososial, independensi, kualitas hubungan sosial, kualitas lingkungan, dan kualitas spiritual. Kuisioner kualitas hidup lanjut usia telah digunakan sebelumnya oleh

Kadir (2011) yang menunjukkan validitas dan reliabilitas yang baik di dalam penelitiannya kepada lanjut usia program *day care services*. Kuisioner tersebut terdiri 20 item pernyataan yang diukur menggunakan skala lima poin: 1 sangat tidak memuaskan, 2 tidak memuaskan, 3 netral atau ragu-ragu, 4 memuaskan, dan 5 sangat memuaskan.

Untuk menguji kehandalan instrumen dilakukan uji validitas dan reliabilitas (Bungin, 2008). Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur apa yang ingin diukur. Melalui uji validitas item, Instrumen menunjukkan validitas yang baik, masing-masing item pertanyaan menunjukkan nilai probabilitas di bawah α 0,05. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menilai konsistensi alat ukur apakah instrumen yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran di ulang. Uji reliabilitas menggunakan metode Alfa (*Cronbach's*). Hasil uji menunjukkan instrumen memiliki reliabilitas yang baik dengan nilai *Alfa Cronbach* masing-masing: 0,75 untuk modal sosial; 0,73 untuk Dukungan Sosial; dan 0,74 untuk Kesejahteraan lanjut usia.

Salah satu yang dipersyaratkan untuk uji *parametric* adalah distribusi data harus normal. Untuk mengetahui normalitas data dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara deskriptif dengan melihat grafik atau plots dan cara analisis melalui uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk (Dahlan, 2009). Dalam penelitian ini menggunakan analisis karena cara ini menghindarkan peneliti dari penilaian subjektif. Kolmogorov-Smirnov digunakan jika responden lebih banyak (di atas 50) dan sebaliknya jika lebih sedikit

Tabel 1
Hasil Analisis Distribusi Normal

Variabel	Kolomogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig	Statistic	df	Sig
Modal sosial	0,150	35	0,044	0,949	35	0,103*
Dukungan sosial	0,164	35	0,018	0,959	35	0,212*
Kesejahteraan	0,204	35	0,001	0,947	35	0,092*

Sumber: diolah dari data primer, *signifikan di atas 0,05

Tabel 2
Karakteristik Responden

Kriteria		Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
Kategori Umur	60-69 tahun	15	42,9
	70-79 tahun	13	37,1
	80-89 tahun	7	20,0
Jenis Kelamin	Laki-laki	11	31,4
	Perempuan	24	68,6
Pendidikan	Tidak Sekolah	35	100,0
Pekerjaan	Wiraswasta	32	91,4
	Tidak bekerja	3	8,6
Status perkawinan	Tidak menikah	1	2,9
	Janda/duda	21	60,0
	Menikah	13	37,1
Kedudukan dalam RT	Anggota Keluarga	18	51,4
	Kepala keluarga	17	48,6
Kemampuan dalam AKS	Mandiri	33	94,3
	Bantuan sebagian	2	5,7

digunakan Shapiro-Wilk (Dahlan, 2009). Oleh penelitian ini hanya melibatkan 35 responden maka dipilih cara kedua yaitu Shapiro-Wilk. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan di atas 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 1.

Hasil analisis kuantitatif univariat yang bertujuan mendeskripsikan responden dan setiap variabel penelitian dan analisis multivariat yang bertujuan menganalisis pengaruh dua variabel terikat yaitu modal sosial dan dukungan sosial terhadap satu variabel bebas, yaitu kesejahteraan lanjut usia dengan menggunakan analisis regresi (menggunakan SPSS) dengan tingkat kepercayaan 95 persen atau kurang dari α 0,05, menunjukkan bahwa sebagai berikut. H1: Modal sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan lanjut usia. H2: Dukungan sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan lanjut usia. H3: Modal sosial dan dukungan sosial secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan lanjut usia.

C. Hasil dan Pembahasan (Efek Modal Sosial dan Dukungan Sosial terhadap kesejahteraan Lanjut Usia)

Karakteristik Responden: Usia responden berkisar antara 60-89 tahun dengan usia rata-rata 72 tahun. Terbanyak kelompok usia 60-69 tahun (42,9 persen). Sebagian besar perempuan 68,6 persen. Semua responden tidak memiliki latar belakang pendidikan formal. 91,4 persen masih berwiraswasta sebagai pembuat batu merah dan bertani. 60 persen berstatus janda/ duda. Dalam keluarga kebanyakan status mereka kembali menjadi anggota keluarga (51 persen), kepala keluarga diambil oleh anak mereka yang telah menikah dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kebanyakan dari mereka masih mampu memenuhi aktifitas kebutuhan sehari-hari (ADL) secara mandiri (94,3 persen). Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Frekuensi Kategorikal Variabel Modal Sosial, Dukungan Sosial, dan Kesejahteraan: Masing-masing variabel dikategorikan menjadi Rendah, Sedang, dan Tinggi. Tujuannya agar memberikan gambaran tentang karakteristik dari setiap variabel. Perhitungan kedalam kategori dilakukan dengan rumus (Nazir, 2011):

Tabel 3
Rentang Kategorikal Variabel Penelitian

Variabel	Jml item	Nilai terendah	Nilai tertinggi	Interval kelas	Rentang kategorikal		
					Rendah	Sedang	Tinggi
MS	13	13	65	17,3	13 s.d 30	31 s.d 47	48 s.d 65
DS	14	14	70	18,6	14 s.d 32	33 s.d 51	52 s.d 70
K	20	20	100	26,6	20 s.d 46	47 s.d 73	74 s.d 100

MS: moda sosial, DS: dukungan sosial, K: kesejahteraan lanjut usia, s.d: sampai dengan.

Sumber: diolah dari data primer

$$K = \frac{R}{I}$$

Keterangan: K = interval kelas; R = range / jangkauan (nilai total maksimum dikurangi nilai total minimum); I = jumlah kelas. Untuk mengetahui rentang kategorikal masing-masing variabel berdasarkan rumus di atas dapat dilihat pada Tabel 3.

Data modal sosial, dukungan sosial, dan kesejahteraan lanjut usia yang diperoleh melalui kuisioner kemudian diolah berdasarkan kriteria rentang kategori sebagaimana pada Tabel 4. Hasil yang terangkum pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa variabel modal sosial 100 persen dalam kategori tinggi. Begitupun variabel dukungan sosial 85,7 persen dalam kategori tinggi dan hanya 5 persen dalam kategori sedang. Berbeda dengan variabel kesejahteraan sebagian besar berada pada kategori sedang (68,6 persen) dan hanya 11 persen dalam kategori tinggi. Semua variabel tidak memiliki kategori rendah.

Tabel 4
Frekuensi Kategori Variabel Penelitian

Variabel	Kategori	Jumlah	Persen
Modal Sosial	Rendah	0	0,0
	Sedang	0	0,0
	Tinggi	35	100,0
Dukungan Sosial	Rendah	0	0
	Sedang	5	14,3
	Tinggi	30	85,7
Kesejahteraan	Rendah	0	0,0
	Sedang	24	68,6
	Tinggi	11	31,4

Pengaruh Modal Sosial dan Dukungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia:

Analisis dengan regresi dilakukan untuk mengetahui empat hal. Pertama: Analisis korelasi ganda (*R*), di gunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai *coefficient* dapat menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. Nilai berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati 1 berarti hubungan semakin kuat, sebaliknya mendekati 0 hubungan semakin lemah (Priyatno, 2008). Hasil menunjukkan nilai *coefficient* korelasi (*R*) sebesar 0,191 hal ini menunjukkan hubungan antara variabel modal sosial dan dukungan sosial bersama-sama terhadap variabel kesejahteraan lanjut usia sangat lemah. Hal tersebut berpedoman pada interpretasi berikut (Sugiono, 2007): 0,00 – 0,199 = sangat lemah; 0,20 – 0,399 = lemah; 0,30 – 0,599 = sedang; 0,60 – 0,799 = kuat; 0,80 – 1,000 = sangat kuat.

Kedua, mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (*X*₁ dan *X*₂) secara serentak terhadap variabel terikat (*Y*), dapat di ketahui dengan analisis determinasi (*R*²). *Coefficient* ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel terikat. berdasarkan nilai yang diperoleh pada Tabel 5, nilai *R*² sebesar 0,036 atau 3,6 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh modal sosial dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan lanjut usia hanya 3,6 persen saja. Sedangkan sisanya sebesar 96,4

persen di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Ketiga, untuk mengetahui apakah model regresi variabel bebas X1 dan X2 secara terpisah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) dapat diketahui dengan *coefficient* regresi secara parsial (uji t). Pada tabel 5 menunjukkan nilai probabilitas uji t untuk variabel modal sosial menunjukkan angka 0,812. Nilai tersebut lebih besar dari α 0,05 (tingkat kepercayaan 95 persen). Hal tersebut berarti hipotesis yang menyatakan modal sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan lanjut usia peserta *home care* di tolak. Sedangkan nilai probabilitas untuk variabel dukungan sosial menunjukkan angka 0,333. Nilai tersebut juga lebih besar dari α 0,05 yang juga berarti bahwa hipotesis yang menyatakan dukungan sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan lanjut usia peserta program *home care* di tolak. Uji t menyimpulkan bahwa modal sosial dan dukungan sosial secara terpisah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan lanjut usia.

Keempat, untuk mengetahui apakah variabel bebas (X1 dan X2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Y), dapat diketahui dengan uji *coefficient* secara bersama-sama (uji F). Jika signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan). Nilai probabilitas untuk uji F pada tabel 5 menunjukkan angka 0,552 lebih besar dari α 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga yang mengatakan modal sosial dan dukungan sosial secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan lanjut usia peserta program *home care* di tolak. Dapat disimpulkan bahwa modal sosial dan dukungan sosial secara bersama-sama tidak berpengaruh

signifikan terhadap kesejahteraan lanjut usia peserta program *home care*.

Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan tingkat yang tinggi pada variabel modal sosial dan dukungan sosial, sedangkan variabel kesejahteraan lanjut usia menunjukkan tingkat yang sedang. Lokasi penelitian termasuk dalam daerah kategori pedesaan dimana masyarakatnya masih menjunjung budaya dan norma agama terutama dalam hal bagaimana memperlakukan orang tua. Semangat kerja sama dan tolong menolong sebagai bentuk modal sosial dan dukungan sosial antar keluarga maupun warga masyarakat masih tinggi. Pada aspek kesejahteraan berdasarkan data yang diperoleh tergolong dalam tingkat sedang. Hal itu sangat terkait dengan data demografi responden, misalnya tingkat pendidikan yang rendah (100 persen tidak mengenyam pendidikan formal), tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap anggota keluarga, bekerja pada sektor nonformal sehingga tidak memiliki jaminan hidup berupa pensiun. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar, et al., (2006); Prastyaningrum, (2009); dan Handayani, et al., (2013).

Tidak ditemukan pengaruh secara signifikan modal sosial dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan lanjut usia. Hal ini berarti walaupun modal sosial dan dukungan sosial masyarakat tinggi tidak serta merta dapat meningkatkan kesejahteraan. Kesimpulan tersebut berbeda dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang mencatat pengaruh positif modal sosial terhadap kesejahteraan, seperti pada temuan penelitian oleh Suandi (2014) dan temuan penelitian Anam & Suman (2013).

Kesejahteraan berdasarkan definisi dan hasil penelitian sebelumnya tidak hanya dipengaruhi

Tabel 5
Analisis Regresi Modal dan Dukungan Sosial terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia.

Model	t	Sig	F	Sig	R	R Square
Modal Sosial	0,240	0,812	0,605	0,552	0,191	0,036
Dukungan Sosial	0,982	0,333				

Sumber: diolah dari data primer (N=35)

oleh aspek psikososial saja, misalnya modal sosial dan dukungan sosial. Kontribusi modal sosial dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan lanjut usia hanya 3,6 persen; selebihnya 96,4 persen di pengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan namun tidak dimasukkan sebagai variabel dalam penelitian ini meliputi ekonomi misalnya pendapatan, jumlah anggota keluarga yang ditanggung, tingkat pendidikan kepala keluarga, kondisi tempat tinggal atau lingkungan, akses terhadap pelayanan sosial oleh pemerintah, akses untuk mendapat bantuan pinjaman finansial, dan faktor manajemen sumber daya dalam keluarga. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilaporkan oleh Iskandar, et al. (2006), Prastyaningrum (2009), dan hasil penelitian Handayani, et al. (2013).

Program *Home Care* merupakan program yang sangat baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendidik anggota keluarga dalam memberikan perawatan yang terbaik kepada lanjut usia. Namun pelaksanaan program masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Program berjalan sangat singkat dalam satu wilayah program, setelah berjalan setahun selanjutnya berpindah ke wilayah lain. Dengan alasan keterbatasan anggaran dan pemerataan program akhirnya program tidak kontinyu. Masyarakat tidak dididik untuk tetap menjalankan program *Home Care* secara swadaya. Program yang dijalankan terkesan menciptakan ketergantungan lalu menghilang.

Walau tidak memiliki pengaruh yang signifikan, modal sosial dan dukungan sosial masih memiliki hubungan (hubungan yang lemah) terhadap kesejahteraan ($R = 0,091$). Adanya modal sosial dan dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan pada aspek fisik, psikis dan sosial. Keluarga merupakan sumber semangat bagi lanjut usia, bantuan baik materi maupun non materi dari anggota keluarga sangat berarti dalam meningkatkan moral lanjut usia. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilaporkan oleh Astuti & Budiyan, (2010),

Hayati & Marini (2010), dan penelitian yang dilaporkan oleh Saputri & Indrawati (2011).

D. Penutup

Kesimpulan: Modal sosial dan dukungan sosial pada penelitian ini ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan lanjut usia peserta program *home care*. Perlu dicatat bahwa modal sosial dan dukungan sosial masih memiliki andil terhadap kesejahteraan (hubungan lemah tetapi tidak signifikan secara statistik), terutama pengaruhnya pada aspek fisik dan psikososial lanjut usia. Apabila tingginya modal sosial dan dukungan sosial dipadukan dengan program lain (misalnya program untuk meningkatkan ekonomi keluarga, pendidikan, akses sosial, perbaikan tempat tinggal, dll) dalam jangka panjang, maka akan memberikan dampak yang besar pada kesejahteraan keluarga dan lanjut usia.

Rekomendasi: Penguatan modal sosial dan dukungan sosial yang secara spesifik diarahkan untuk lanjut usia perlu digalakkan. Perluasan program *Home Care* dengan memadukan pada aspek-aspek ekonomi, pendidikan, manajemen sumber daya keluarga, perbaikan lingkungan dan tempat tinggal, kemudahan akses pada pelayanan publik (rumah sakit, perbankan, pemerintahan, dll) dapat membantu mencapai kesejahteraan yang lebih luas bagi lanjut usia. Disarankan agar dilakukan upaya yang berkesinambungan dengan menciptakan partisipasi aktif masyarakat agar program dapat berjalan tanpa tergantung dengan pihak luar.

Pustaka Acuan

- Anam, K., & Suman, A. (2013). *Identifikasi modal sosial dalam kelompok tani dan implikasinya terhadap kesejahteraan kelompok tani*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya .
- Astuti, A., & Budiyan, K. (2010). *Hubungan antara dukungan sosial yang diterima dengan kebermaknaan hidup pada odha*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana.
- Bungin, B. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dahlan, M. S. (2009). *Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan* (4th Edition). Jakarta: Salemba Medika.

- Depsos. (2004). *Lanjut Usia Dalam Data Dan Informasi* (4th ed.). Jakarta: Direktorat Bina Pelayanan Lanjut Usia, Departemen Sosial RI.
- Field, J. (2011). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Fukuyama, F. (2002). *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Gibson, Ivancevich, & Donnelly. (1997). *Oranizations; Behavior, Structure, Processes*. Chicago: Irwin.
- Handayani, F. S., Juita, E., & Nefilinda. (2013). Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani kelapa di Nagari Kuranji Hilir Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. *Ejurnal STKIP PGRI*, 2 (1).
- Hayati, S., & Marini, L. (2010). *Pengaruh dukungan sosial terhadap kesepian pada lansia (skripsi)*. Medan: Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara.
- Iskandar, Hartoyo, Sumarwan, U., & Khomsan, A. (2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. *repository.usu.ac.id*, 133-141.
- Kadir, S. (2010). *Program day care services dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan lanjut usia (tesis)*. Makassar: Fakultas Sosiologi, Universitas Hasanuddin.
- Kemensos. (2009). *Mengenal Home Care*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
- Lawang, R. M. (2005). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*. Jakarta: FISIK UI Press Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pangkahila, W. (2007). *Anti aging medicine: memperlambat penuaan meningkatkan kualitas hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Prastyaningrum, W. (2009). *Analisis faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung (skripsi)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Priyatno, D. (2008). *Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Services Solution) Untuk Analisis Data & Uji Statistik*. Yogyakarta: Media Com.
- Saputri, M. A., & Indrawati, E. S. (2011). Hubungan antara dukungan sosial dengan depresi pada lanjut usia yang tinggal di panti wredha wening wardoyo Jawa Tengah. *Jurnal Psikologi Undip*, 9 (1), 65-72.
- Sarafino, E. (1998). *Health Psychology: Biopsychosocial Interaction* (3th Edition). New York: John Wiley & Sons Inc.
- Suandi. (2014). Hubungan modal sosial dengan kesejahteraan ekonomi keluarga di daerah pedesaan Jambi. *Jurnal Komunitas*, 6 (1), 38-46.
- Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tailor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (1997). *Social Psychology* (9th Edition). New Jersey: Prentice Hal Internationals Editions.
- Thobias, E., Tungka, A., & Rogahang, J. (2013). Pengaruh modal sosial terhadap perilaku kewirausahawan. *Jurnal Acta Diurna*.

Peraturan-peraturan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Analisis Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal *Analyze on Social Insurance and Protection of Informal Workers*

Akhmad Purnama

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),
Jalan Kesejahteraan Sosial No.1 Nitipuran Yogyakarta. Telp. (0274) 377265, Fax (0274) 373530.
Badiklit Kesos Kementerian Sosial RI. Email: akhmadpurnama19@gmail.com.
Diterima 2 Oktober 2014, direvisi 21 Maret 2015, disetujui 25 Mei 2015.

Abstract

This research means to know the beneficiary of New Initiative Social Welfare Insurance program on informal workers protection. The research is implemented in Pemalang Regency, Central Java Province. Data resources are participant and implementer of the program (LPA management team, program guides, and controller) all are 60 people. Data are gathered through interview, documentary analysis, and focus group discussion. Data are analyzed through qualitative-descriptive technique. The result shows that New Initiative Social Welfare program is very beneficial for informal workers, create safety feeling for the participant and get income substitute should they face working accident and dye, reduce family bandage and enhance lives needs normally. It is recommended that The Ministry of Social Affairs, through the General Directorate of Social Insurance and Protection resume the program for informal workers with low wage and widen the outreach of contribution assistance receivers (PBI). It needs also socialization and procures adequate facilities of the program holders. It needs also joint-venture between The Ministry of Social Affairs and Social Insurance Board holder in covering health, working accident, and mortal insurance. The improvement of LPA role and guidance motivate low waged informal workers of the importance to participate in social insurance.

Keywords: *Informal Workers; Social Protection; New Initiative Social Welfare*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemanfaatan program Askesos *New Initiative* dalam perlindungan bagi pekerja informal. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, sumber data penelitian meliputi peserta dan pelaksana (LPA, pendamping, tim pengendali, PT Jamsostek) berjumlah 60 orang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan telaah dokumen serta dilakukan FGD. Analisis penelitian digunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Program Askesos *New Initiative* yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang sangat bermanfaat bagi pekerja sektor informal, yaitu terciptanya rasa aman bagi peserta; Mandapatkan pengganti penghasilan apabila terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian; dapat mengurangi beban keluarga dan meningkatkan kebutuhan hidup secara layak. Rekomendasi yang diajukan Kementerian Sosial RI cq Direktorat Linjamsos untuk melanjutkan melanjutkan program jaminan sosial bagi pekerja informal penghasilan rendah dan memperluas jangkaun penerimaan bantuan iuran (PBI). Perlu adanya sosialisasi dan mempersiapkan sarana prasarana yang memadai oleh penyelenggara. Perlu kerjasama antara Kementerian Sosial dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai cakupan program jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Peningkatan peran LPA dan Pendamping memotivasi Pekerja Sektor Informal berpenghasilan rendah tentang pentingnya ikut jaminan sosial.

Kata Kunci: *Pekerja Sektor Informal; Perlindungan Sosial; Program Askesos New Initiative*

A. Pendahuluan

Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk

intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 2005: 9). Demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana,

terarah, dan berkelanjutan. Salah satu upaya mewujudkan taraf kesejahteraan sosial adalah melalui jaminan sosial. Jaminan sosial sebagai skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Undang-undang No 11 Tahun 2009). Sistem jaminan sosial sebenarnya telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yaitu sistem jaminan sosial yang berbasis masyarakat dan diselenggarakan oleh institusi lokal, seperti: kelompok arisan, kelompok keagamaan atau majelis taklim, kelompok kekerabatan, dan paguyuban.

Jaminan sosial menjadi hak bagi setiap orang sebagaimana amanat UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2 yaitu bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian juga dalam pasal 28 ayat 3 dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya pasal 34 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Undang-undang No 11 Tahun 2009 pada pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kelangsungan hidupnya secara layak. Undang-undang No 32 Tahun 2004 mewajibkan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang tertuang dalam pasal 22 huruf h. Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam pasal 4 Undang-undang No 11 Tahun 2009. Hal tersebut di atas merupakan dasar bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial secara layak dan pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial setiap warga negara Indonesia.

Perlindungan sosial (*social security*) dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai inisiatif baik yang bertujuan menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan, meningkatkan status dan hak sosial masyarakat yang terpinggirkan. Perlindungan sosial juga diartikan sebagai seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan (*vulnerability*) melalui perluasan pasar kerja yang efisien, pengurangan resiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan (Ditjen Banjamsos, 2006). Pentingnya perlindungan sosial di Indonesia dilandasi alasan: Menguatnya konsep *welfare pluralism*, *civil society* dan *social capital*, dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial; *Local safety net*, perlindungan sosial merupakan bagian dari budaya Indonesia dan telah dipratikkan oleh kelompok masyarakat sebagai mekanisme informal dalam melindungi warganya; *Decentralization mainstreaming*, pengarusutamaan desentralisasi pembangunan yang menekankan pentingnya kebutuhan lokal dan partisipasi publik (Ditjen Banjamsos, 2006). Kebijakan dan program perlindungan sosial menurut Suharto (2006) mencakup lima komponen, yaitu: Kebijakan pasar kerja (*labour market policies*), dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan beroperasinya hukum penawaran dan permintaan kerja secara efisien. Sasarannya untuk angkatan kerja baik yang bekerja disektor formal maupun informal dan para pengangguran; Bantuan sosial (*social assistance*), yakni berupa program jaminan sosial yang berbentuk tunjangan uang, barang atau pelayanan kesejahteraan yang diberikan pada kelompok rentan yang tidak memiliki penghasilan layak. Sasarannya meliputi keluarga miskin, pengangguran, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, dan yatim piatu (sesuai pasal 9 Undang-undang Kesejahteraan Sosial Tahun 2009); Asuransi

sosial (*social insurance*), merupakan jaminan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya berupa premi atau tabungan yang dibayarkannya, meliputi asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kecacatan, asuransi hari tua, pensiun, dan kematian; Jaring pengaman sosial berbasis masyarakat (*community based-social safety nets*).

Jaminan sosial (*social security*) merupakan salah satu jenis kebijakan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. Setiap negara memiliki definisi, sistem, dan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, sehingga memiliki sistem dan strategi jaminan sosial yang berbeda pula. Jaminan sosial umumnya diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk tunjangan pendapatan secara langsung (*income support*) yang terkait erat dengan kebijakan perpajakan dan pemeliharaan pendapatan (*taxation and income-maintenance policies*). Namun demikian, jaminan sosial juga meliputi berbagai skema peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Jaminan sosial yang berbentuk tunjangan pendapatan dapat disebut *benefits in cash*, sedangkan yang berwujud bantuan barang atau pelayanan sosial sering disebut *benefits in kind* (Suharto, 2011).

Sistem jaminan sosial nasional dibuat sesuai dengan “paradigma tiga pilar” yang direkomendasikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Pilar-pilar itu adalah Program bantuan sosial untuk anggota masyarakat yang tidak mempunyai sumber keuangan atau akses terhadap pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Program asuransi sosial yang bersifat wajib, dibiayai oleh iuran yang ditarik dari perusahaan dan pekerja. Iuran yang harus dibayar oleh peserta ditetapkan berdasarkan tingkat pendapatan, dan berdasarkan suatu standar hidup minimum yang berlaku di masyarakat; Asuransi yang ditawarkan oleh sektor swasta secara sukarela, yang dapat dibeli oleh peserta apabila mereka ingin mendapat perlindungan sosial

lebih tinggi daripada jaminan sosial yang mereka peroleh dari iuran program asuransi sosial wajib. Iuran untuk program asuransi swasta ini berbeda menurut analisis risiko dari setiap peserta. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem Jaminan Sosial Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional)). Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan, berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jaminan sosial tenaga kerja sangat diperlukan oleh tenaga kerja diluar hubungan kerja (TKLH) yang pada umumnya berusaha pada usaha-usaha ekonomi informal. David L Bickelhaupt (1964: 29) megolongkan asuransi menjadi dua yaitu pertama Asuransi sosial (*social insurance*) adalah asuransi sosial yang terbit berdasarkan undang-undang, sebab asuransi sosial diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada masyarakat.

Keberadaan sistem jaminan sosial dewasa ini sangat penting seiring dengan meningkatnya resiko ketidakpastian sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin, sehingga mengganggu ketahanan keluarga, karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup. Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) sebagai salah satu bentuk jaminan kesejahteraan sosial merupakan sistem asuransi sosial untuk memberikan perlindungan, pertanggung jawaban bagi masyarakat miskin, terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama mengalami sakit, kecelakaan ataupun meninggal dunia. Kemiskinan di Indonesia masih cukup besar, menurut data BPS pada Maret tahun 2012 mencapai 29,13 juta jiwa atau 11,96% dari jumlah penduduk sebanyak 241 juta jiwa. Jumlah tersebut umumnya bekerja pada sektor informal dan pekerja mandiri. Pekerjaan di sektor informal sangat rentan terhadap resiko kecelakaan kerja, sakit bahkan kematian. Jumlah pekerja sektor informal yang tidak mempunyai hubungan kerja (TKLH) sebesar 17.480.227

orang dan sebesar 62,7% tidak memiliki perlindungan sosial (Kompas, 12 Juli 2012). Hal ini disebabkan pekerja sektor informal tidak mampu membayar premi, karena sebagian besar miskin berpenghasilan kecil dan tidak menentu, bahkan seringkali tergantung pada musim, dan keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial khususnya jaminan sosial tenaga kerja. Mereka umumnya belum terjangkau oleh jaminan sosial tenaga kerja. Oleh sebab itu, maka perlu perlindungan dan jaminan sosial. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi tenaga kerja, salah satunya melalui program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Program Askesos merupakan program Kementerian Sosial RI yang dimulai sejak tahun 2003 dan diujicobakan sampai dengan tahun 2011 di seluruh Indonesia, sebagai salah satu model perlindungan sosial berupa jaminan sosial bagi pekerja informal dan pekerja mandiri berkategori miskin. Program Askesos ini memberikan jaminan sosial berupa pengganti penghasilan yang hilang, akibat sakit, kecelakaan kerja dan kematian. Perkembangan program Askesos mengalami perbaikan yang terakhir menjadi Askesos *New Initiative*. Sejalan dengan peraturan yang berlaku (Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perasuransian) serta akuntabilitas program Askesos dapat lebih dipertanggungjawabkan. Askesos *New Initiative* telah berjalan sejak tahun 2012 dalam implementasinya melibatkan organisasi sosial sebagai Lembaga Pelaksana Askesos (LPA) dan PT. Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Askesos *New Initiative* merupakan pengganti dari Askesos yang pada awalnya penyelenggaraan jaminan diberikan kepada lembaga pelaksana Askesos yang kemudian penyelenggaraan jaminan diberikan kepada badan yang berwenang yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Peserta yang diberikan adalah pekerja informal miskin yang sudah ditentukan dari Kementerian Sosial. Premi yang

dibayarkan ditanggung pemerintah dan klaim yang diterima bagi peserta yang meninggal dalam kecelakaan kerja yaitu sebesar 21 juta.

Askesos *New Initiative* telah memberikan dampak bagi penerima manfaat dan dapat mencapai sasaran, yakni memberi jaminan sosial bagi TKLH. Oleh karena itu, diperlukan kajian implementasi program Askesos *New Initiative* guna memberi *input* pada Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial. Perlu dilakukan penelitian perlindungan pekerja informal melalui program Askesos *New Initiative*. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana kemanfaatan program Askesos *New Initiative* bagi perlindungan pekerja informal dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Askesos *New Initiative*? Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Askesos *New Initiative* dapat melindungi pekerja informal. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian adalah diketahui kemanfaatan program Askesos *New Initiative* bagi perlindungan pekerja informal; diketahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Askesos *New Initiative* bagi perlindungan pekerja informal. Selanjutnya penelitian ini diharapkan sebagai masukan/pertimbangan bagi Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam rangka keberlanjutan program Askesos *New Initiative*

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu mendiskripsikan tentang manfaat Program Askesos *New Initiative* bagi pekerja sektor informal. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu di Kabupaten Pematang dengan alasan daerah tersebut sudah melaksanakan program Askesos *New Initiative* dan memiliki pekerja sektor informal yang sebanyak 582.672 orang (BPS Kabupaten Pematang, 2013). Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program Askesos *New Initiative* sebanyak 60 orang. Terdiri dari peserta 41 orang yang memiliki kriteria sebagai pekerja sektor informal, berusia

18 tahun- 55 tahun, sebagai pencari nafkah utama dan sebagai peserta Askesos *New Initiative*. Pengelola ada 19 orang terdiri pengurus LPA sebanyak 12 orang, pendamping terdiri empat orang, Tim pengendali dua, dan dari PT Jamsostek ada satu orang sebagai responden.

Data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian karena hakekat dari penelitian adalah pencarian data atau informasi. Berkait dengan hal tersebut maka pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut. Teknik wawancara kepada peserta, pengelola, pendamping dan PT Jamsostek dalam rangka untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kemanfaatan dan pelaksanaan program Askesos *New Initiative*; FGD dilakukan untuk mendapatkan data yang valid yaitu dengan cara cek dan ricek dari sumber yang berbeda dari penerima, pengurus LPA, Pendamping, Pengendali dan PT Jamsostek; teknik Observasi untuk mengetahui kondisi penerima manfaat program Askesos *New Initiative* yang sudah menerima klaim; Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang belum tercover dalam wawancara, FGD maupun observasi yaitu berupa dokumen, file dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Askesos *New Initiative*.

Setelah data terkumpul dilakukan reduksi data: data yang diperoleh difokuskan pada permasalahan yang diteliti; Display data: menunjukkan data yang telah diklasifikasikan atau bagian tertentu dari penelitian; Penarikan kesimpulan (verifikasi): memberikan makna atau interpretasi terhadap hasil temuan penelitian. (Moleong, 2002). Analisis penelitian melalui analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan (Kebermanfaatan Askesos *New Initiative* sebagai Perlindungan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Pemalang)

Wilayah Kabupaten Pemalang merupakan daerah dataran tinggi, pantai, dataran rendah dan pegunungan. Luas wilayah Kabupaten Pemalang ada 1.115,30 Km² yang terdiri dari lahan sawah 378,74 Km² dan bukan sawah 736,56 Km². Ter-

bagi dalam 14 Kecamatan yang terdiri dari 222 desa/kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tercatat sebanyak 1.271.157 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 631.095 Jiwa dan perempuan ada 640.062 jiwa. Rasio jenis kelamin jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,6 yang berarti dari sekitar 100 penduduk perempuan, penduduk laki-laki yaitu 98,6 jiwa. Kabupaten Pemalang memiliki jumlah penduduk kategori usia produktif ada sebanyak 729.611 jiwa (57%) dan yang tidak produktif 541.546 jiwa (43%). (BPS Kabupaten Pemalang 2012).

Jumlah pencari kerja pada tahun 2011 ada sebanyak 9.125 orang sedangkan lowongan kerja yang telah dipenuhi menurut lapangan usaha sebanyak 2.024 orang. Pencari kerja yang sudah memperoleh pekerjaan menurut tingkat pendidikan selama tahun 2011 terbanyak adalah lulusan SLTA dari 7.271 pencari kerja memperoleh pekerjaan sebanyak 1.549 orang sedangkan yang terkecil adalah lulusan sarjana dari jumlah 438 orang pencari kerja hanya satu orang yang memperoleh pekerjaan. (BPS Kabupaten Pemalang, 2012). Jumlah Organisasi sosial/Lembaga Sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Pemalang ada sebanyak 28 organisasi. Sementara jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ada sebanyak 2.609 jiwa yang berasal dari berbagai macam latar belakang baik dari karyawan pemerintah, karyawan swasta, buruh, tani/nelayan dan dagang. Organisasi Karang Taruna di Kabupaten Pemalang ada sebanyak 222 buah dengan rincian kategori berkembang ada sebanyak 220 dan ada dua kategori percontohan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten Pemalang cukup besar. Apabila potensi organisasi sosial tersebut diberdayakan dan didayagunakan maka dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada.

Askesos *New initiative* adalah asuransi yang diberikan kepada tenaga kerja sektor informal yang berkategori miskin dalam bentuk pengganti penghasilan yang hilang, akibat kecelakaan kerja dan atau kematian. Program Askesos *New*

Initiative bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja sektor informal berkategori miskin, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak bagi keluarganya apabila terjadi resiko kecelakaan kerja dan atau kematian, sehingga ketahanan keluarga tetap terjaga. Kelembagaan Askesos *New Initiative* terdiri dari penanggungjawab program adalah Direktorat Jaminan Sosial Direktorta Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah PT. Jamsostek dan Lembaga Pelaksana Askesos (LPA) adalah Organisasi sosial.

Lembaga pelaksana Askesos Al-Hidayah terletak di Kecamatan Purwosari yang didirikan tahun 2007 dengan dasar pendirian akta notaris No. 27/2007. Struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris dan bendaharan dilengkapi dengan dua koordinator lapangan serta koordinator anggota. LPA Al-Hidayah Purwosari mempunyai tempat sekretariat di Desa Purwosari yang berdekatan dengan pasar. LPA Al-Hidayah mempunyai anggota sebanyak 590 orang dan masing-masing terdiri dari pekerja di sektor informal yang berpenghasilan rendah. Keanggotaan LPA Al-Hidayah berasal dari tujuh lokasi pedesaan diantaranya; Desa Purwosari dengan jumlah anggota 233 orang; Desa Lowa dengan jumlah anggota 50 orang; Desa Guntung dengan jumlah anggota 48 orang; Desa Sikayo dengan jumlah anggota 88 orang; Desa Gandhi dengan jumlah anggota 41 orang; Desa Kauman dengan jumlah anggota 80 orang; Desa Ambo Kulon dengan jumlah anggota 70 orang.

590 orang anggota sebagian besar terdiri dari pekerja sektor informal sebagai pedagang pasar, sedangkan lainnya bekerja sebagai supir, tukang becak, petani dan pekerja serabutan. Kegiatan LPA Al-Hidayah berupa pendidikan ditingkat TK, Taman pendidikan Al-quran dan kegiatan-kegiatan sosial seperti pengajian, pemberian santunan anak yatim piatu.

Pelaksana Askesos adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Askesos yaitu pengelola, pendamping, tim pengendali dan petugas dari PT. Jamsostek. Pendidikan merupakan salah satu syarat seseorang memiliki pengetahuan yang luas dan banyak, dengan pendidikan seseorang akan mendapatkan tempat atau jabatan yang lebih baik dan tinggi daripada orang yang tidak berpendidikan. Tabel 1 adalah menyajikan karakteristik pelaksana Askesos di Kabupaten Pemalang.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pelaksana Askesos *New Initiative* di Kabupaten Pemalang dilihat dari aspek umur pelaksana memiliki umur yang variatif yaitu ada satu orang (5 %) yang sudah berumur di atas 60 tahun. Hal ini dapat dimaknai bahwa orang yang sudah tua tetap berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, ada delapan orang (42 %) pada rentang kelompok umur 40 – 49 tahun, mereka tergolong usia produktif dan memiliki semangat kerja sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai pengelolaan dengan baik. Pengelolaan Askesos *new initiative* membutuhkan tenaga yang handal dan memiliki kepedulian terhadap orang miskin.

Tabel 1
Umur dan Pendidikan Pelaksana Askesos di Kabupaten Pemalang

No	Kriteria Umur	f	%	Pendidikan	f	(%)
1	20 - 29	2	11	SD	-	-
2	30 – 39	5	26	SMP	1	5
3	40 – 49	8	42	SLTA	5	26
4	50 – 59	3	16	Diploma	2	11
5	Di atas 60	1	5	Sarjana	10	53
				Pascasarjana	1	5
Jumlah		19	100	Jumlah	19	100

Sumber data: Jawaban Responden Pelaksana (N=19)

Pelaksana Askesos yang terdiri dari Tim Pengelola (ketua terdiri lima orang, sekretaris ada tiga orang, dua orang bendahara, petugas lapangan terdiri dua orang), tim pengendali dari Dinas Sosial terdiri dua orang pendamping dari Tokoh Masyarakat Maupun TKSM serta PT Jamsostek sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksana Askesos New Initiative sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Jabatan masing-masing mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda mulai dari sosialisasi, rekrutment sampai dengan pelaporan. Peran dan tugas yang berbeda tersebut diharapkan program Askesos dapat terlaksana dengan baik sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.

Peserta Askesos adalah pekerja serta informal miskin, PMKS diutamakan peserta PKH dan penerima program layanan sosial berdasarkan data PPLS. Syarat menjadi peserta Askesos *New Initiative* adalah Sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga; Berasal dari keluarga miskin; Maksimal berusia 55 tahun; Bekerja di sektor informal; Terdaftar sebagai peserta Askesos dan bantuan iurannya sudah dibayarkan. Masa pertanggungjawaban program askesos adalah satu tahun terhitung mulai premi pertama dibayarkan kepada PT. Jamsostek sebagai BPJS ketenagakerjaan. Hasil pendataan yang dilakukan melalui wawancara diperoleh data atau informasi mengenai pekerja informal yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pematang melalui program Askesos *New Initiative*. Program tersebut ditentukan persyaratan antara lain peserta Askesos *New Initiative* adalah pen-

cari nafkah utama dalam keluarga yang bekerja disektor informal dengan penghasilan setara atau kurang dari upah minimum kabupaten Pematang yaitu Rp. 908.000,- dan berumur antara 18 tahun atau sudah menikah sampai dengan 55 tahun. Berdasarkan persyaratan tersebut dan data yang diperoleh lapangan mengenai peserta Askesos *New Initiative* meliputi umur, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, status perkawinan dan jumlah tanggungan keluarga disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Umur sangat menentukan dalam produktivitas kerja seseorang, sehingga seseorang yang memiliki umur muda sangat memungkinkan aktivitas kerja lebih giat apabila dibandingkan dengan seseorang yang telah berusia lanjut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas kerja karena pada umumnya seseorang usia relative muda tenaganya lebih kuat sehingga produktivitas kerja juga tinggi. Seseorang dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh umur ataupun pendidikan. Umur yang masih produktif dan pendidikan yang baik memungkinkan orang dapat meningkatkan penghasilan ataupun pendapatan keluarga. Umur dan pendidikan peserta Askesos *New Initiative* tersaji pada Tabel 2.

Umur merupakan salah satu ukuran untuk membedakan antara orang satu dengan orang lain dalam melakukan aktivitas kerja produktif, baik disektor formal maupun informal. Selain itu, umur juga dijadikan salah satu persyaratan yang digunakan dalam menentukan seleksi formasi kerja baik disektor formal maupun informal. Tabel dua jika dicermati menunjukkan bahwa peserta askesos kebanyakan berumur antara

Tabel 2
Peserta berdasarkan Umur, dan Tingkat Pendidikan

No	Kriteria Umur	f	%	Pendidikan Peserta	f	%
1	< 18	-	-	SD	25	61
2	19 – 30	4	10	SMP	9	22
3	31 – 42	22	54	SLTA	7	17
4	43 – 54	15	36	-	-	-
5	55	-	-	-	-	-
Jumlah		41	100		41	100

Sumber data: Jawaban Responden Peserta (N=41)

31-42 tahun berjumlah 22 orang (54 persen). Hal ini menunjukkan bahwa peserta askesos dalam golongan usia produktif dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka dalam melakukan aktivitas kerja terutama yang bekerja disektor informal sangat riskan mengalami resiko kerja, seperti kecelakaan kerja ataupun kematian. Apabila terjadi kecelakaan kerja bahkan kematian akan berdampak terhadap membuat perubahan sosial ekonomi keluarga. Keadaan ini apabila tidak segera diantisipasi menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi yang lebih parah dalam kehidupannya. Mereka perlu mendapatkan perlindungan sosial khususnya menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Berdasarkan temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagai peserta mereka merasa terlindungi karena telah terjamin sehingga membuat para pekerja sektor informal merasa aman dan bekerja lebih giat ada jaminan kelangsungan hidup. Pernyataan peserta mengatakan, *“saya merasa terlindungi dengan ikut menjadi peserta Askesos New Initiative hati menjadi tenteram apabila mendapat musibah ada yang menalangi.”* Peserta Askesos *New Initiative* memiliki usia 18–54 tahun berarti telah memenuhi kriteria persyaratan sebagai peserta yang sudah digariskan dalam pedoman kepesertaan. Dengan demikian program Askesos *New Initiative* secara umum memenuhi syarat dan tepat sasaran diharapkan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi peserta.

Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya, wawasan pengetahuan dan cara berpikir. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang kelihatan dari segi pengetahuan, pemahaman dan keahliannya. Jika diperhatikan tabel dua di atas menunjukkan tingkat bahwa, pendidikan peserta Askesos *New Initiative* mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar yaitu 25 orang (61 persen) berpendidikan setingkat SLTA terdapat 7 orang (17 persen), mereka bekerja dalam bidang jasa seperti tukang ojek. Hal ini menunjukkan bahwa peserta Askesos *New Initiative* berpendidikan rendah yakni

83 persen pendididkan SLTP ke bawah, tentunya juga akan berpengaruh terhadap pekerjaan dan pendapatan mereka serta tingkat kesejahteraan mereka kurang memadai.

Data penelitian menunjukkan bahwa peserta laki-laki lebih banyak dari pada perempuan yakni 34 orang atau (83 persen) sedangkan peserta perempuan 7 orang (17 persen). Peserta askesos berarti didominasi laki-laki, karena laki-laki lazimnya sebagai tulang punggung keluarga, kepala keluarga dan bahkan menjadi peran utama dalam keluarga. Tujuh orang (17 persen) yang berjenis kelamin perempuan namun demikian ada dua orang sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena sudah menjanda, sedangkan lima orang mewakili peserta laki-laki (suami) karena bekerja di laut sebagai nelayan sehingga dalam berkegiatan dimasyarakat mereka sering mengalami hambatan untuk hadir.

Kondisi daerah Pemalang yang memiliki wilayah pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai mungkin penduduk di Kabupaten Pemalang memiliki berbagai macam profesi pekerjaan. Pekerja Sektor Informal (PSI) adalah orang atau pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri dengan modal yang sangat terbatas dan atau rentan terhadap setiap perubahan sosial, ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan dasar secara layak.

Ciri pekerja sektor informal, antara lain, yaitu: Berskala mikro dengan ukuran kecil; Menggunakan teknologi sederhana; Menghasilkan barang dan atau jasa dengan kualitas relatif rendah; Tempat usaha tidak tetap; Mobilitas tenaga kerja sangat tinggi; Kelangsungan usaha tidak terjamin; Jam kerja tidak teratur; Tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap (Kementerian Sosial RI, 2012: 13). Pekerjaan merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan tertentu harus memenuhi syarat dan keahlian seseorang untuk mendapatkan kedudukan dan penghasilan yang cukup baik. Namun berbeda bagi mereka yang bekerja tanpa keterampilan,

keahlian sehingga mereka bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah. Berikut Tabel 3 tentang jenis pekerjaan dan penghasilan responden.

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa peserta Askesos mencakup berbagai macam profesi. Sebagian besar peserta Askesos bekerja sebagai buruh yaitu 24 orang (59 persen), meliputi buruh serabutan, buruh tani dan buruh nelayan. Pekerjaan sebagai buruh merupakan pekerjaan yang tidak menentu kadang-kadang mereka mendapatkan pekerjaan kadang tidak. Pernyataan peserta, *“saya kadang-kadang mendapat kerja memotong padi tapi kadang kalau sudah habis semua panen saya hanya nganggur.”* Apabila dikaitkan dengan tabel dua yakni tentang pendidikan bahwa mayoritas (83%) berpendidikan rendah, maka mereka wajar bekerja disektor informal, karena bekerja disektor informal tidak memerlukan syarat pendidikan formal tertentu, yang penting ada kemauan, bekerja keras dan ulet. Kondisi tersebut apabila mereka tidak dapat memanfaatkan penghasilan yang mereka dapatkan, akan membuat keadaan perekonomian dalam keluarga banyak yang mengalami kegoncangan. Dilihat dari penghasilan mereka sebagian besar yaitu

29 orang (71 persen) dalam rentang antara Rp 500.000,- s.d. Rp 1000.000,-, sedangkan yang berpenghasilan di atas Rp 1000,000,- yaitu 7 orang (17 persen). Mereka ini adalah pekerja serabutan yang penghasilannya diperoleh dari jasa sehingga tergantung pada penggunaan jasa mereka. Dengan demikian pendapatan tersebut tidak rutin setiap bulan.

Status seseorang dalam kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya status perkawinan. Berikut status perkawinan dan tanggungan keluarga responden. Tersaji dalam Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa peserta askesos berstatus nikah terbanyak yaitu 39 orang (95 persen) dan ada dua orang sebagai janda. Dua orang janda ini menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya telah meninggal dunia, sehingga mereka harus menanggung anak-anak dan berusaha untuk menghidupi keluarga demi kelangsungan kehidupan selanjutnya. Apabila diperhatikan tabel empat tentang tanggungan keluarga, kebanyakan peserta memiliki tanggungan keluarga cukup banyak rata-rata memiliki tanggungan empat sampai enam orang ke atas sebanyak 27 informan (69 persen). Hal ini

Tabel 3
Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Penghasilan

No	Jenis Pekerjaan	f	%	Penghasilan	f	%
1	Buruh	22	54	Kurang dari Rp 500.000,-	5	12
2	Buruh tani	2	5	Rp 500.000,- -	29	71
3	Pengojek (Becak)	2	5	Rp1.000.000,-	7	17
4	Bengkel	1	2	Rp 1.000.000,- Ke atas		
5	Wiraswasta	14	24			
Jumlah		41	100	Jumlah	41	100

Sumber data: Jawaban Responden Peserta (N=41)

Tabel 4
Berdasarkan Status Perkawinan dan Tanggungan Keluarga

No	Status	f	%	Tanggungan Keluarga	f	%
1	Kawin	39	95	1 - 3	14	24
2	Tidak kawin			4 - 6	22	54
3	Janda	2	5	6 ke atas	5	12
Jumlah		41	100	Jumlah	41	100

Sumber data: Jawaban Responden Peserta (N=41)

menunjukkan bahwa peserta Askesos cukup berat dan harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Dengan demikian mereka perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial sebagai jaminan keamanan dalam bekerja yaitu program Askesos. Program askesos bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja sektor informal yang berkategori miskin dengan program jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Program Askesos *New Initiative* di Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan dan hambatan. Faktor pendukung adalah kecepatan untuk mendapatkan pelayanan yaitu apabila terjadi resiko kecelakaan kerja bahkan sampai meninggal dalam waktu 2 x 24 jam, peserta segera melaporkan kepada petugas LPA dengan dilengkapi syarat pengajuan klaim ke PT Jamsostek. Klaim lebih besar dibandingkan askesos model lama, sangat dirasakan manfaatnya ketika terjadi resiko kecelakaan dan kematian. Adapun hambatan program Askesos *New Initiative* adalah sosialisasi yang kurang maksimal dan tidak optimal serta buku pedoman yang diberikan tidak ada pada setiap LPA sehingga kesulitan untuk memahami program terlaksana dengan optimal. Kesulitan dan kesadaran peserta dalam hal menabung masih sedikit, padahal tabungan sangat membantu mereka apabila membutuhkan uang segera. Pelaku program yaitu LPA/Tim Pengelola, Pendamping kurang memahami fungsi dan peran sebagai advokasi dan pendampingan, mekanisme pelaksanaan program. Menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat karena mereka tidak semua masuk menjadi peserta Askesos *New Initiative*.

Perlindungan sosial bagi masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya melalui program Askesos *New Initiative*. Program Askesos *New Initiative* yang diimplementasikan mulai tahun 2012 telah menerapkan konsep Asuransi murni sebagai bentuk perlindungan sosial bagi PMKS khususnya Pekerja Sektor Informal dan pelaku ekonomi mikro. Program Askesos yang memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian telah dikelola oleh suatu lembaga

Asuransi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan jaminan sosial yaitu PT Jamsostek (Persero). Hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang No 2 tahun 1992, Undang-undang No 40 tahun 2004, Undang-undang No 11 tahun 2009 dan Undang-undang No 24 tahun 2011. Program Askesos yang dilaksanakan di kabupaten Pemalang, telah terlaksana dengan baik, yaitu memberi perlindungan bagi peserta. Pada umumnya peserta Askesos menyatakan merasa aman dan terlindungi jika terjadi kecelakaan kerja setelah menjadi peserta Askesos. Di Kabupaten Pemalang hal tersebut dinyatakan oleh 41 peserta (100 persen), Sebagian peserta Askesos juga menyatakan dengan menjadi peserta Askesos dapat mengurangi beban, yaitu ketika mendapat musibah selain dapat klaim dari PT Jamsostek juga mendapat bantuan/kunjungan/perhatian/tali kasih dari pengurus LPA. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi peserta Askesos, terutama ketika mengalami musibah sakit ataupun kematian. Akan tetapi peserta Askesos tidak yakin bahwa dengan menjadi peserta Askesos, maka kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi semuanya sehingga mereka tidak dapat menjawab secara yakin. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kecelakaan, maka sebagian dana klaim dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi karena mereka belum pernah mendapat dana klaim, sehingga mereka tidak tahu atau tidak bisa menjawab.

Selama menjadi peserta program Askesos pada kurun waktu kurang lebih sembilan bulan memberi pemahaman yang beragam terhadap program Askesos. Namun semua peserta sepakat bahwa program Askesos bermanfaat dan perlu dilanjutkan bahkan diusulkan menambah program yakni jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Hal ini diusulkan oleh peserta, LPA, pendamping dan juga pengendali dalam forum FGD. Seorang pendamping mengusulkan agar dana untuk perlindungan bagi masyarakat dilakukan dengan melalui sharing dana, yaitu pemerintah memberi bantuan sebagian untuk membayar premi dan sebagian dana dari peserta. Selain itu peserta bahkan

mengusulkan agar anggota keluarganya bisa dicover oleh program Askesos. Manfaat yang dirasakan oleh peserta yang telah mendapatkan klaim dengan jumlah besaran klaim yang sangat signifikan yakni Rp 21.000.000,- untuk klaim kematian bukan karena kecelakaan kerja dan Rp 48.000.000,- untuk klaim kematian karena kecelakaan kerja ternyata mendorong masyarakat yang belum menjadi peserta untuk menjadi peserta dan bagi yang sudah menjadi peserta untuk melanjutkan kepesertaannya.

Pelaksanaan Askesos sudah ada sesuai dengan standar operasional prosedur. Lembaga sosial yang ditunjuk telah melakukan kegiatan pelayanan melalui dana bantuan iuran premi bersumber dari DIPA Dit jamsos tahun 2012 disalurkan melalui mekanisme pusat maupun dana dekonsentrasi kepada cabang PT Jamsostek. Proses pelaksanaan program Askesos sudah dilaksanakan akan tetapi belum berjalan maksimal. Pelaku program yaitu LPA/Tim Pengelola dan Pendamping kurang memahami perannya terutama peran advokasi dan pendampingan, mekanisme pelaksanaan program. Sehingga kalau terjadi klaim belum maksimal untuk dilakukan terutama dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencairan dan lama waktu yang dibutuhkan. Peserta program askesos ada sebagian yang belum memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai peserta, masa pertanggungan, manfaat KPJ, dan siapa yang membayar premi. Hal ini disebabkan rekrutmen peserta didaerah dilakukan secara terburu-buru bahkan terkesan “dipaksakan”. Dalam waktu hanya dua hari harus memperoleh 584 peserta dengan data *by name* dan *by adrres*. Sehingga masih ditemukan ketidaktepatan sasaran peserta juga terdapat ketidakesesuaian data KTP dengan KPJ, dikhawatirkan dapat berpotensi menjadi kendala dalam pencairan klaim.

Program Askesos *New Initiative* meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja atau keluarga/ahli waris yang diberikan dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari

penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja. Hasil temuan dilapangan sebagian besar peserta telah memiliki polis dan Kartu Peserta Jamsostek sebagai bukti kepesertaan. Kewajiban peserta adalah menabung CDS tetapi peserta belum berjalan sesuai yang diharapkan. Program Askesos bermanfaat bagi peserta berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan nilai pertanggungan yang cukup besar. Peserta yang mengalami musibah baik kematian maupun kecelakaan kerja telah mengajukan klaim dan terbayar semua. Namun ada kendala dalam pencairan klaim, antara lain; Keterlambatan pada saat pengajuan klaim ke PT Jamsostek karena kekurangtahuan peserta dan ataupun LPA mengenai mekanisme pengajuan klaim; Waktu pencairan klaim cukup lama, rata-rata dua bulan baru cair. Hal ini, cukup meresahkan peserta; Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan sakit peserta harus membayar biaya Rumah Sakit dulu baru kwitansi ditukarkan di PT Jamsostek.

Aksesos *New Initiative* berbeda dengan asuransi yang lain apabila kita ikut asuransi lain (mandiri) maka kita harus membayar premi itu menggunakan uang kita sendiri. Askesos *new Initiative* uang premi dibayar oleh pemerintah sebagai perlindungan bagi pekerja sektor informal yang telah ditentukan syarat-syaratnya. Peserta asuransi mandiri mendapatkan klaim sesuai dengan premi yang dibayarkan oleh peserta kalau askesos *new initiative* klaim sudah ditentukan yaitu Rp 21.000.000,- untuk klaim kematian bukan karena kecelakaan kerja dan Rp 48.000.000,- untuk klaim kematian karena kecelakaan kerja.

Para peserta program Askesos akan mendapat manfaat yang besar, maka diharapkan program dapat dilanjutkan sampai peserta bisa membayar premi secara mandiri. Bahkan peserta mengharapkan program ditambah yaitu jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk anggota keluarganya bisa disertakan. Hal ini didukung dari hasil temuan di lapangan

dari peserta yang mengutarakan bahwa manfaat sebagai peserta sangat dirasakan seperti pernyataan penerima klaim “*sak sampunipun kula nderek dados peserta askesos new initiative sanget ageng manfaatipun kula angsal klain 21 juta awit kematian semahkula. Arta klaim saget kula ginaken kangge selamatan, nambal gubuk lan ugi kangge mbantu putra-putra.*” Artinya setelah ikut menjadi peserta Askesos *new initiative* besar sekali manfaatnya saya mendapat klain 21 juta akibat kematian istri saya. Uang klaim dapat saya gunakan selamatan, membangun rumah dan membantu anak-anaknya.

Perlindungan Jaminan Sosial di Indonesia selama ini telah mengalami beberapa perubahan (lihat Tabel 5). Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berdasarkan Undang-undang No 40 2004 sebagai penyelenggara jaminan sosial

oleh Badan Penyelenggara yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri dan PT. Taspen. Program yang dilakukan meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Adapun yang menjadi pesertanya adalah PNS, Pensiunan, ABRI, Pengusaha dan Pekerja dan masyarakat mampu. Sumber dana/ premi yang didapatkan dari pemerintah, pengusaha dan pekerja serta mandiri. Kemudian untuk Program Askesos *New Initiative* yang merupakan program perlindungan bagi pekerja sektor informal miskin dilaksanakan oleh Kementerian Sosial berdasarkan undang-undang no 11 tahun 2009. Adapun penyelenggaranya dilakukan oleh PT Jamsostek, program yang ditawarkan adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Peserta dari program ini adalah pekerja sektor informal

Tabel 5
Bagan Perubahan Perlindungan Jaminan Sosial

No	Indikator	Lama	Baru
1	Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	Askesos <i>New Initiative</i>	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2	Dasar Hukum Undang-undang No 40 2004	Undang-undang No 11 Tahun 2009	Undang-undang No 24 Tahun 2011
3	Badan Penyelenggara a) PT Jamsostek b) PT Taspen c) PT Askes d) PT Asabri	PT. Jamsostek	a) BPJS Kesehatan b) BPJS Ketenagakerjaan
4	Program a) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan b) Jaminan Hari Tua c) Jaminan Kecelakaan Kerja d) Jaminan Kematian e) Jaminan Pensiun	a) Jaminan Kecelakaan Kerja b) Jaminan Kematian	a) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan b) Jaminan Hari Tua c) Jaminan Kecelakaan Kerja d) Jaminan Kematian e) Jaminan Pensiun
4.	Peserta a) PNS b) Pensiunan c) ABRI d) Pengusaha dan Pekerja e) Masyarakat Mampu f) Masyarakat miskin	Pekerja Sektor Informal (PSI) berpenghasilan rendah	Seluruh WNI
5	Sumber Dana/Premi a) Pemerintah b) Pengusaha dan Pekerja c) Mandiri	Pemerintah/Kemensos, DIPA Dirjen Jamsos	a) Pemerintah b) Pengusaha, dan Pekerja c) Mandiri

Sumber data: Disarikan dari Buku SJSN (2004); Askesos (2012); BPJS (2011)

berpenghasilan rendah. Dana yang dihimpun atau premi berasal dari Pemerintah/Kementerian Sosial. Selanjutnya undang-undang No 24 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa perlindungan jaminan sosial dilakukan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial. Penyelenggara perlindungan jaminan sosial dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Ketenaga kerjaan. Adapun program yang ditawarkan meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Peserta meliputi seluruh warga negara Indonesia dan premi bagi masyarakat miskin dibayarkan oleh pemerintah, pengusaha serta bagi pekerja serta secara mandiri.

Perubahan dalam penyelenggaraan tersebut mengandung konsekuensi bahwa peserta pada pekerja sektor informal berpenghasilan rendah mereka termasuk kategori miskin iuran dibayar oleh pemerintah (PBI). Pekerja sektor informal atau yang disebut tenaga kerja diluar hubungan kerja (TKLH) tidak diwajibkan mengikuti seluruh program Jamsostek karena keterbatasan dalam pembayaran premi. Keikutsertaan program dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar premi dari tenaga kerja yang bersangkutan.

D. Penutup

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa manfaat Program Askesos *New Initiative* sebagai bentuk perlindungan sosial bagi Pekerja Sektor Informal sangat dirasakan. Terciptanya rasa aman bagi peserta karena sudah ada jaminan dari asuransi dan mendapatkan pengganti penghasilan apabila terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian dalam bentuk penggantian biaya pengobatan, perawatan termasuk pengangkutan ke Rumah Sakit, santunan sementara tidak bisa bekerja (STMB) dan santunan kematian. Diperolehnya klaim asuransi sangat bermanfaat bagi peserta dan atau keluarganya yang mengalami resiko. Hal ini karena dapat mengurangi beban keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup secara layak ketika pencari nafkah utama dalam keluarga tidak

dapat melaksanakan perannya. Sedangkan dalam pelaksanaannya faktor yang menghambat sosialisasi yang kurang maksimal dan tidak optimal serta buku pedoman yang diberikan tidak ada pada setiap LPA. Kedisiplinan peserta dalam hal menabung, Pelaku program yaitu LPA/Tim Pengelola, Pendamping kurang memahami fungsi dan peran sebagai advokasi dan pendampingan, mekanisme pelaksanaan program. Menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat karena mereka tidak semua masuk menjadi peserta Askesos *New Initiative*. Adanya perubahan penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial dari PT Jamsostek kemudian dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan membawa konsekuensi bagi pekerja sektor informal yang berpenghasilan rendah mereka masuk kategori keluarga miskin premi dibayar oleh pemerintah (sebagai PBI).

Rekomendasi: Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang kemanfaatan perlindungan berupa jaminan sosial (Program Askesos *New Initiative*) bagi pekerja informal maka disarankan kepada Kementerian Sosial RI Cq Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial diharapkan melanjutkan program jaminan sosial bagi pekerja informal penghasilan rendah agar hidup layak. Selain untuk memperluas jangkauan penerimaan bantuan iuran (PBI) bagi pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin yang belum tercover dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI). Keikutsertaan ikut asuransi agar lebih lama, tidak dibatasi hanya satu tahun sehingga akan mendapatkan jaminan dan ketenteraman hidupnya. Perubahan penyelenggaraan program jaminan sosial dari PT Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan tentunya membawa konsekuensi antara lain perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, tentang prosedur menjadi anggota, hak serta kewajiban sebagai anggota. Disamping itu perlu kesiapan sarana prasarana yang memadai dan sehingga meningkatkan mutu pelayanan (khususnya memperpendek waktu penyelesaian klaim) yang lebih baik. Perlunya peningkatan pelayanan bagi PT Jamsostek dan Rumahkesehatan

Perlu kerjasama antara Kementerian Sosial dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai program jaminan sosial bagi pekerja sektor informal berpenghasilan rendah. Untuk itu agar kerjasama ini dapat memenuhi jaminan sosial yang dibutuhkan Pekerja sektor informal berpenghasilan rendah terkait jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Peningkatan peran LPA dan Pendamping untuk mengoptimalkan motivasi bahwa perlindungan sosial perlu bagi pekerja sektor informal berpenghasilan rendah yaitu dengan menumbuhkan kesadaran menabung secara tertib, sebagai pembelajaran pola hidup yang berorientasi ke masa depan dan mendorong mengikuti jaminan sosial secara mandiri.

Pustaka Acuan

- David L. Bickelhaupt. (1964). *General Insurance*, Richard D. Irwin: Inc. Homewood Illionis.
- Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial. Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. (2006). *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial RI
- _____. (2006). *Standar Pelaksanaan Askesos*. Jakarta: Departemen Sosial RI
- _____. (2011). *Panduan Manajemen Asuransi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Edi Suharto, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- _____. (2012). *Askesos New Initiative, Apa, Mengapa, Untuk Apa? Hand Out Askesos New Initiative*. B2P3KS. Yogyakarta: Kementerian Sosial,
- Man H. Suparman & Endang. (2003). *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Bandung: Penerbit PT Alumni
- Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusdakarya
- Undang-Undang no. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian
- Undang-Undang no. 3 tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Undang-Undang no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- Undang-Undang no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang no. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Peraturan Pemerintah no. 53 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RI No, Per 24/MEN/VI/2006 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja*. Edisi April 2012
- <https://isearch.avg.com/search> Biro Pusat Statistik (2012). *Kabupaten Pematang*.
- (redaksi@bisnis.co.id Koran Yogya 13 Desember 2012 Jumlah UKM dinilai lebih Pekerja Informal mencapai 41% Rio Sandy & Lutfi Zaenudin).
- http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional

Kinerja Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam Pengentasan Kemiskinan

Business Group Program Performance on Poverty Elevation

Sri Yuni Murti Widayanti dan A. Nururrochman Hidayatulloh

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI,
Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Yogyakarta, Telp (0274) 377265, Fax (0274) 373530.

E-mail: <yunimurti@rocketmail.com> dan <anhidayatullah79@gmail.com>.

Diterima 5 Desember 2014, direvisi 27 Maret 2015, disetujui 5 Mei 2015.

Abstract

This research means to reveal business group (Kube) seen from social, economic, and institutional aspects, including its benefit to the members of the poor community, its handicap and supporting factors. This research is qualitative-descriptive approach. Data resources are from eight business groups, the informants are rural local officials from related institution, social guides, social volunteers, informal leaders, women cadets, cooperational partners, and community members from Kupang Municipality and Regency. Data are gathered through interview, observation, and documentary analysis. Data are analysed through interpretive-descriptive technique. The result shows that kubes are in developing category. If they seen from social performance aspect, five kubes have good score, three kubes have sufficient score, seen from social aspect there are five kubes have good score, three kubes have sufficient score. If they seen from institutional aspect, one kube has good score, and three kubes have sufficient score, and four Kubes have poor score. kube as a mean of empowerment and poverty elevation should improve its performance so that kube as a business group can be achieved. Kube can be economic institution that based on the spirit of togetherness and solidarity, national loyalty, that it can improve lives and social welfare qualities.

Keywords: *Performance; Business Group; Poverty Elevation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap implementasi kinerja Kube dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kube, serta manfaat Kube bagi anggota dan masyarakat yang dijadikan indikator keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data informan terkait, meliputi aparat pemerintah desa, pendamping, relawan sosial, tokoh masyarakat, kader perempuan, dan mitra usaha (dunia usaha yang terlibat kegiatan Kube). Rincian informan meliputi, pejabat instansi terkait, pendamping kube, relawan, tokoh informal, mitra usaha, warga masyarakat sekitar kube dari Kabupaten dan Kota Kupang. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data yang telah terkumpul di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan delapan Kube dalam kategori berkembang. Berdasarkan pada analisis kinerja kube dilihat dari aspek sosial, ada lima kube bernilai baik dan tiga kube bernilai kurang, dilihat dari aspek ekonomi terdapat satu kube bernilai baik, tiga kube bernilai cukup, dan empat kube bernilai kurang. Dilihat dari aspek kelembagaan, ada satu kube yang bernilai baik dan tiga kube bernilai cukup serta empat Kube bernilai kurang. Kube sebagai wadah pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan perlu meningkatkan kinerjanya agar keberhasilan Kube menjadi usaha ekonomi kelompok dapat terwujud. Kube dapat menjadi potensi ekonomi berbasis kelompok yang mengedepankan semangat kebersamaan berlandaskan kesetiakawanan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: *Kinerja; Kube; Pengentasan Kemiskinan*

A. Pendahuluan

Kemiskinan dalam konsep, kesejahteraan sosial, dimaknai sebagai masalah sosial yang

disandang oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang menyebabkan mereka mengalami keterbatasan tingkat kesejahteraan

sosialnya. Kesejahteraan sosial yang dimaksud menurut UU No 11 tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemiskinan merupakan persoalan yang mengandung banyak dimensi yang menuntut pemecahan secara integral. Seperti yang dikemukakan Jamasy (dalam Heru Nugroho, 2000) bahwa kemiskinan telah melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Tidaklah mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan diobjektifkan (dikuantifikasi) dalam bentuk angka-angka, seperti halnya dalam pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan yang hingga kini masih menjadi perdebatan.

Booth dan Mc Cawley (dalam Supriyatna Tjahya, 1997:82), mengemukakan bahwa suatu keadaan dikatakan miskin apabila ditandai oleh kekurangan atau ketidakmampuan memenuhi tingkat kebutuhan manusia. Kemiskinan tersebut meliputi kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan. Kemiskinan dilihat dari aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah. Heru Nugroho (2000) menambahkan, bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga politik dan budaya.

Faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan sumber daya ekonomi (Suyanto, 1995). Kemiskinan kultural bukan bawaan melainkan akibat dari ketidakmampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan sumber daya ekonomi lebih melihat pada akar kemiskinan yang terletak pada ketidakmampuan sumber daya ekonomi seperti tanah, modal, pendidikan dan keterampilan, karena pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diiringi dengan sumber

daya ekonomi yang tersedia. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dibuat oleh manusia yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. Disebut kemiskinan struktural karena yang membuat sebagian masyarakat miskin adalah perseorangan melainkan struktur ekonomi dan politik yang tidak hanya bersifat eksplorasi terhadap pihak yang kurang memiliki sumberdaya, tetapi juga hanya berpihak pada orang-orang yang memiliki akses ekonomi dan politik.

Kemiskinan didefinisikan kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Masalah kemiskinan merupakan masalah multi dimensional yang sangat mendasar dan krusial karena menyangkut kehidupan dan penghidupan banyak penduduk di negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam berita resmi statistik nomor 06/01Th.XVII, tanggal 2 Januari 2014 menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2013 sebanyak 28,55 Juta Orang dengan persentase nasional sebanyak 11,47 persen bila dibandingkan dengan penduduk pada bulan Maret 2013 yang sebanyak 28,07 Juta orang atau mengalami peningkatan sebesar 0,48 juta orang atau sekitar 11,37 persen. Hal tersebut menandai kenaikan angka kemiskinan masih tetap menghantui kondisi Indonesia. Sebagai program prioritas penanggulangan kemiskinan terus menerus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Beberapa program yang pernah digulirkan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah program Prokesra, Program Inpres Desa Tertinggal, Program P2KP untuk masyarakat perkotaan, Program PPK untuk masyarakat pedesaan, Program Kredit Mikro, Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Daerah, Pengembangan Prasarana Perdesaan, Program Beras Miskin dan BLSM untuk Keluarga Miskin.

Undang-Undang RI No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ditindaklanjuti

Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan UU RI No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan. Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mencangkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam rangka Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) (Kementerian Sosial, 2011).

Kelompok Usaha Bersama (Kube) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial melalui proses kegiatan Prokesos untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial (Departemen Sosial RI, 1997). Kube sebagai pendekatan program penanggulangan kemiskinan dilandasi suatu pertimbangan atas kenyataan adanya keterbatasan yang melekat pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan keluarga miskin, seperti rendahnya sumber daya manusia, kurangnya modal usaha dan keterbatasan kemampuan dalam menjalin jaringan pemasaran. Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (Kube) merupakan pendekatan yang terintegrasi dari 15 program penanganan fakir miskin. Kegiatan kelompok diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anggota (PMKS keluarga miskin) dalam berwirausaha dan berinteraksi sosial dengan sesama anggota ataupun masyarakat, sehingga pada gilirannya mereka dapat meningkatkan kualitas taraf hidup, mengembalikan dan meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Jalinan kerjasama dalam Kube diharapkan timbul efek lain, yaitu kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Cara tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam Proses Produksi yang dilakukan oleh para anggota Kube. Dengan demikian, bukan hanya anggota Kube yang meningkat penghasilannya, tapi masyarakat sekitarnya pun

merasakan manfaat dengan keberadaan kube (Departemen Sosial RI, 2003)

Arah yang ingin dicapai dari Kube adalah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan melalui upaya peningkatan kemampuan berusaha pada anggota Kube secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota Kube dengan masyarakat sekitar. Secara umum Kube dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial untuk penanggulangan kemiskinan.

Kementerian Sosial RI, Sejak tahun 2003 memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Miskin melalui pendekatan terpadu Kube dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Beberapa program kegiatan Kube yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial diprioritaskan pada: Pertama, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) bagi fakir miskin. Kedua, Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Kube Sejahtera yang didirikan di setiap desa miskin atau terpencil untuk memfasilitasi modal usaha bagi Kube fakir miskin.

Berbagai upaya di atas diharapkan dapat: Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin. Kedua, mewujudkan kemandirian usaha ekonomi keluarga fakir miskin. Ketiga, meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan sosial. Keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan. Kelima, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah kemiskinan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dapat dilakukan dengan strategi pemberdayaan fakir miskin dalam arti memampukan fakir miskin baik dalam konteks individu maupun kelompok, melalui pemberian bimbingan sosial dan keterampilan teknis

ekonomi Produktif, pengelolaan manajemen usaha ekonomi produktif, manajemen pemasaran usaha dan pengembangan jaringan usaha, kewirausahaan, keswadayaan, pengembangan pribadi dalam usaha, peranan keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial (UKS) serta keterampilan IKS, asesmen kebutuhan, masalah keluarga dan lingkungan

Sejak Kube dicanangkan sebagai pendekatan dalam penanganan kemiskinan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial RI selama kurang lebih sebelas tahun (sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014), maka perlu dikaji, apakah pendekatan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan sosial mereka? Penelitian dilakukan di Kabupaten dan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingat di lokasi tersebut merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi dan terdapat program penanggulangan kemiskinan melalui Kube. Adapun permasalahan penelitian dirumuskan Bagaimana gambaran pelaksanaan kinerja Kube ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, kelembagaan? Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kube? Apakah manfaat Kube bagi anggota dan masyarakat? Seiring dengan permasalahan yang diungkapkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah diketahui gambaran pelaksanaan Kube ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, teridentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kube.

Sejalan dengan permasalahan yang akan diungkap di atas maka tujuan penelitian ini adalah diketahui gambaran kinerja Kube ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kinerja Kube, diketahui manfaat Kube bagi anggota dan masyarakat. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: sebagai salah satu referensi dan bahan pertimbangan kepada Kementerian Sosial RI, khususnya Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selaku pembuat kebijakan terkait dengan upaya untuk mening-

katkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Kube, dan sebagai upaya pengembangan teoritik dan pengembangan pengetahuan praktek di bidang pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Secara eksplisit tujuan pembentukan Kube adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan sosial keluarga binaan sosial (KBS) melalui UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial). Kedua, meningkatkan prinsip berkoperasi dalam meningkatkan UEP kelompok; Ketiga, mampu menyisihkan hasil usahanya untuk ditabung guna menghadapi keperluan mendadak atau sebagai tambahan modal; Keempat, terbinanya kegiatan anggota keluarga; Kelima, meningkatkan kesejahteraan sosial kelompok binaan sosial (KBS) dan terbinanya usaha Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKS) yang berbasis masyarakat

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan (UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin) maka yang menjadi sasaran program Kube adalah keluarga fakir miskin (Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin hal 17 Tahun 2010) dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, kepala keluarga fakir miskin yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan (tingkat pengeluaran sama dengan 480 kg setara beras untuk perkotaan dan 320 kg untuk perdesaan); Kedua, warga masyarakat yang berdomisili tetap; Ketiga, menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok; Keempat, memiliki potensi dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mengidentifikasi dan menggambarkan tentang pelaksanaan kinerja kube ditinjau dari aspek sosial,

ekonomi dan kelembagaan sebagai implementasi program penanganan kemiskinan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kube dalam pengentasan kemiskinan, serta manfaat Kube bagi anggota dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan teknik deskriptif dalam bentuk siklus, simultan, alami dan wajar mulai dari data *reduction, display, conclusion drawing, verification* (Mill dan Huberman dikutip Sunit Agus Tri Cahyono, 2010: 39). Analisis data dilakukan sejak dalam proses pengumpulan data sampai setelah pengumpulan data di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengambil Kabupaten dan Kota Kupang sebagai lokasi penelitian karena menurut data dari BPS jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut relatif banyak yakni 21,03 persen pada maret 2011. Dengan melihat permasalahan tersebut, Kementerian Sosial RI memberdayakan penduduk miskin melalui Kube. Pelaksanaan pemberdayaan program kemiskinan melalui kube disesuaikan dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara berpanduan, observasi, dan telaah dokumen. Secara teknis diambil delapan Kube fakir miskin yang berdiri antara tahun 2005-2009 sebagai sasaran analisis. responden penelitian adalah dua orang anggota dan empat orang pengurus di setiap Kube, merupakan sumber data primer yang dianggap memiliki kompetensi untuk menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan dan manfaat kube. Informasi yang diberikan responden penelitian menggambarkan kinerja kube dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga miskin beserta faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam pengelolaan kube. Untuk memperoleh data yang lebih akurat penelitian berupaya menggali informasi dari berbagai informan yang dipilih secara *purposive*. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu sejumlah orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan kube. Informan yang dimaksud meliputi

aparatur pemerintah desa, pejabat instansi terkait, pendamping, relawan sosial, tokoh masyarakat, kader perempuan, dan mitra usaha (dunia usaha yang terlibat kegiatan kube). Rincian informan meliputi aparat kelurahan dua orang, pejabat instansi terkait sebanyak dua orang, pendamping kube lima orang, relawan sebanyak dua orang, tokoh informal sebanyak tiga orang, mitra usaha sebanyak dua orang, warga masyarakat sekitar Kube sebanyak delapan orang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis kinerja Kube akan dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan dan serta faktor-faktor pendukung dan menghambat pelaksanaan kube. Teknik analisis data kualitatif yang menggambarkan pelaksanaan program Kube beserta faktor-faktor yang mempengaruhi (data yang bersifat kualitatif dari informan penelitian) akan dianalisis secara deskriptif interpretatif.

C. Hasil dan Pembahasan: Kinerja Kube dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

1. Deskripsi Wilayah Penelitian Kabupaten dan Kota Kupang

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di selatan khatulistiwa pada posisi 8°–12° Lintang Selatan dan 118°–125° Bujur Timur. Adapun batas wilayah Provinsi NTT di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan Negara Timor Leste dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur, berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010 (BPS, 2010) 4.679.316 jiwa, dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki tercatat 2.323.534 jiwa, sedang 2.355.782 jiwa lainnya berjenis kelamin perempuan. Penyebaran penduduk terbanyak di NTT masih bertumpu di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebesar 9,41 persen dari total penduduk NTT, menyusul Kabupaten Belu sebesar 7,53 persen, dan Kota Kupang sebesar 7,17 persen. Kabupaten yang

memiliki jumlah penduduk paling sedikit atau terendah adalah Sumba Tengah, Sabu Raijua, dan Sumba Barat masing-masing berjumlah 62.510 orang, 73.000 orang, dan 111.023 orang. Kabupaten Sikka di Pulau Flores merupakan kabupaten yang paling banyak penduduknya untuk wilayah di luar Pulau Timor, yakni sebanyak 300.301 orang.

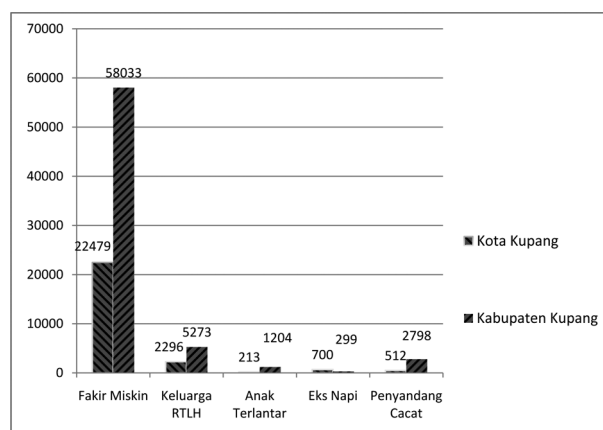
Persentase penduduk miskin Provinsi NTT pada Maret 2011 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2010 dari sebesar 23,03 persen menjadi 21,23 persen pada Maret 2011. Keadaan penduduk miskin Provinsi NTT pada periode 2010-2011 juga mengalami penurunan sebesar 1,2 ribu. Penurunan penduduk miskin pada periode dua tahun ini yaitu Maret 2010 sebesar 1.014,1 ribu (23,31 persen) menjadi 1.012,9 ribu (21,23 persen) pada Maret 2011. Pada periode 2007-2011 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 1.163,6 ribu (27,51 persen) pada tahun 2007, menjadi 1.098,3 ribu (25,65 persen) tahun 2008, 1.013,2 ribu (23,31 persen) tahun 2009, 1.014,1 ribu (23,03 persen) pada tahun 2010 dan menjadi 1.012,9 ribu (21,23 persen) pada tahun 2011. Pada periode 2012-2013 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 20,41 persen (1.009.15 ribu) pada tahun 2012 menjadi 20,24 persen menjadi 1.000,29 ribu di tahun 2013.

Kabupaten Kupang terletak antara 121° 30' BT – 124° 11' BT dan 9° 19' LS–10° 57' LS. Batas-batas kabupaten ini adalah sebagai berikut. Utara dan Barat dengan laut Sawu, Selatan dengan Samudera Hindia dan Timur dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Negara Timor Leste. Kabupaten Kupang mencakup 27 pulau, di antaranya terdapat delapan pulau yang belum memiliki nama. Hanya lima pulau yaitu Pulau Timor, Sabu, Raijua, Sema, dan Kera yang telah dihuni. Permukaan tanah di wilayah Kabupaten Kupang umumnya berbukit-bukit, bergunung-gunung dan sebagian terdiri dari dataran rendah dengan tingkat kemiringan rata-rata mencapai 45°. Sedangkan ketinggian Kabupaten Kupang permukaan laut adalah antara 0-500 meter. Kota Kupang secara geografis terletak di antara 10°

36' 14" - 10° 39' 58" Lintang Selatan (LS) dan 123° 32' 23" - 123° 37' 01" Bujur Timur (BT).

Kondisi geografis 180,27 km² atau 18.027 Ha. Daerah tertinggi di atas permukaan laut di bagian selatan berkisar antara 100–350 meter. Daerah terendah di atas permukaan laut di bagian utara antara 0-50 meter dan tingkat kemiringannya 15 persen. Jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2012 sebanyak 291.794 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 147.872 jiwa dan perempuan sebanyak 143.922 jiwa. Dalam kaitannya dengan persoalan sosial yang ada di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang ada beberapa hal yang menonjol terkait dengan permasalahan sosial diantaranya adalah sebagai berikut.

Grafik 1
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2012

Berdasarkan data PMKS yang paling menonjol adalah fakir miskin diikuti keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Fakir Miskin yang dimaksud adalah orang yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Hal itu terjadi mengingat kondisi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka merasa berat apalagi untuk membangun rumah yang

layak. Permasalahan yang paling menonjol di Kabupaten dan Kota Kupang adalah kemiskinan, maka Kementerian Sosial mencanangkan salah satu program penanggulangan kemiskinan yakni melalui Kube. Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui Kube tidak terlepas keterlibatan berbagai pihak diantaranya dunia usaha dan masyarakat baik perorangan maupun LSM dalam penanganan kemiskinan sangat diperlukan dari tingkat atas hingga masyarakat lokal sehingga harapan pemerintah untuk menanggulangi kemiskina atau paling tidak mengurangi jumlah warga miskin dapat terwujud.

2. Gambaran Kube di Kabupaten dan Kota Kupang

a. Gambaran Kube di Kabupaten dan Kota Kupang

Pada dasarnya Kube merupakan organisasi yang menekankan pada semangat berusaha dari anggota yang telah ditetapkan melalui keputusan bersama dalam menentukan arah tujuan bersama dalam konteks kesejahteraan. Secara eksplisit tujuan pembentukan Kube adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan sosial keluarga binaan sosial (KBS) melalui UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial). Kedua, meningkatkan prinsip-prinsip gotong royong dalam melaksanakan pembangunan serta mengumpulkan dana masyarakat melalui Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS). Ketiga, meningkatkan prinsip berkoperasi dalam meningkatkan UEP kelompok. Keempat, mampu menyisihkan hasil usahanya untuk ditabung guna menghadapi keperluan mendadak atau sebagai tambahan modal. Kelima, terbinanya kegiatan anggota keluarga. Keenam, meningkatkan kesejahteraan sosial kelompok binaan sosial (KBS) dan terbinanya usaha Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKS) berbasis masyarakat.

Mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan (UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin) maka yang menjadi sasaran Kube adalah keluarga fakir miskin

(Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin hal 17 Tahun 2010) dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, Kepala Keluarga fakir miskin yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan (tingkat pengeluaran sama dengan 480 kg setara beras untuk perkotaan dan 320 kg untuk perdesaan); Kedua, warga masyarakat yang berdomisili tetap; Ketiga, menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok; Keempat, memiliki potensi dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu.

Kebijakan dan strategi dalam pengentasan kemiskinan sangat erat dengan proses pemberdayaan terhadap individu, kelompok, masyarakat miskin. Proses pemberdayaan menurut Jim Ife (1997) didefinisikan sebagai berikut. *“Empowerment means providing people with resources, opportunities, knowledge, and skills to increase their own future, and participate in and effective life of their community”*. (Pemberdayaan berarti menyediakan manusia dengan sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan masa depan mereka dan berpartisipasi di dalam kehidupan yang efektif pada komunitasnya). Sementara Deopa Narayan (2001) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut: *“empowerment is the expansions of assets and capabilities of poor people so participate in, negotiate with influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives”*. (Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk memperluas akses dan kemampuan pada kelompok miskin sehingga mau berpartisipasi, dengan menekankan negosiasi, kontrol dan kepercayaan pemegang kekuasaan yang berpengaruh sehingga berdampak terhadap kehidupannya).

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk 'memampukan' atau 'membuat berdaya' orang miskin yang memiliki beberapa keterbatasan dan ketidakberuntungan di dalam kehidupannya sehingga mereka memiliki kekuatan atau kekuasaan baik secara fisik, material, ekonomi, kelembagaan, kerja sama dan intelektual (Istiana Hermawati, 2011: 105). Pember-

dayaan juga dapat dimaknai sebagai serangkaian proses untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas sumber daya manusia komunitas miskin. Kemampuan berdaya menurut Jamasy (2004: 39) mempunyai arti yang sama dengan kemandirian. Dapat disimpulkan, bahwa proses pemberdayaan yang dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan bertujuan untuk membuat orang miskin berdaya dan mandiri atau tidak tergantung pada orang lain. Dengan kemandirian yang dimilikinya tersebut orang miskin dapat menata kehidupannya secara relatif lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidupnya.

Proses pembentukan Kube Fakir Miskin di Kabupaten dan Kota Kupang mengikuti prosedur panduan Kube Kementerian Sosial RI, disesuaikan dengan potensi lokal, peluang pasar daerah sasaran dan kelayakan calon Kelompok Binaan Sosial (KBS). Proses pembentukan Kube meliputi kegiatan identifikasi dan seleksi calon KBS, orientasi dan observasi, penyuluhan sosial, perencanaan program, pembentukan Kube, bimbingan teknis keterampilan dan pengelolaan Kube dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial, serta pemberian dana bantuan stimulan. Sebelum dana bantuan stimulan diberikan kepada Kube, dilakukan kegiatan penyuluhan sosial atau sosialisasi program pemberdayaan keluarga fakir miskin melalui Kube. Kegiatan identifikasi dan seleksi dilaksanakan oleh aparat Dinas Sosial Kabupaten dan Kota Kupang bekerjasama dengan aparat kelurahan (Kaur Kesra) dan Lurah, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pendamping Kube dan Tokoh Masyarakat. Seleksi calon KBS sebagian besar sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial, dan sebagian kecil sebesar empat persen bukan fakir miskin namun dapat menjadi penggerak anggota dalam usaha ekonomi produktif secara berkelompok.

Orientasi dan observasi dilaksanakan agar jenis usaha Kube yang dibentuk sesuai potensi anggota, sumber daya lokal dan sesuai budaya lokal sehingga dapat berkembang. Hasil observasi dan orientasi sebagai dasar pertimbangan

dalam perencanaan dan penentuan jenis usaha sehingga Kube yang dibentuk sesuai kebutuhan, potensi dan keterampilan yang dimiliki anggota (*bottom up*). Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Kupang, kepada aparat kelurahan, instansi terkait, sumber daya sosial (tokoh masyarakat, pengurus LSM) untuk mendapatkan dukungan dengan harapan pelaksanaan program tersebut dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik.

Hasil wawancara dengan informan (pengurus dan anggota Kube), kepala kelurahan, tokoh masyarakat, Aparat Dinas Sosial dan instansi terkait serta pemerintah daerah (Bappeda) menunjukkan dukungan terhadap keberadaan Kube. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu faktor pendorong dalam perkembangan Kube. Namun dalam implementasinya perlu peningkatan koordinasi program lintas sektor terkait.

Bimbingan teknis keterampilan dan pengelolaan Kube serta pembinaan usaha kesejahteraan sosial, diberikan setelah Kube terbentuk kemudian pemberian dana bantuan stimulan. Bimbingan usaha ekonomi produktif dan bimbingan usaha kesejahteraan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pembina fungsional Kube berlangsung selama dua hari (12 jam latihan). Alokasi waktu pelatihan kurang memadai bila dikaitkan dengan bobot materi pelatihan yang harus diserap KBS. Mengingat sebagian besar KBS memiliki keterbatasan pengetahuan dan berpendidikan SD, temuan di lapangan penyerapan materi pemberdayaan yang diberikan kurang optimal, terbukti KBS kurang memahami pengadministrasian kegiatan Kube, Pengelolaan keuangan dan kurang mampu dalam mengakses akses sumber daya lokal untuk pengembangan Kube. Perlu adanya penambahan waktu, materi pelatihan, sarana, prasarana, dana, kurikulum teori dan praktek keterampilan teknis UEP seimbang yang disesuaikan kebutuhan Kube. Pemberian dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif

(UEP) diberikan melalui transfer ke rekening pengurus Kube setelah membuat proposal UEP dengan bimbingan pendamping Kube yang telah mendapat pelatihan pendampingan Kube dari Kementerian Sosial RI.

Proses pendampingan dilakukan sesuai dengan perannya sebagai pembimbing, pengarah, penghubung, perencana, advokasi/pendampingan untuk kepentingan Kube. Peran pendamping masih perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun secara kualitas sehingga Kube mampu berkembang optimal. Dukungan dan kerja sama dari masyarakat dan instansi terkait dalam pemberdayaan dan pembentukan Kube) relatif telah terbentuk, dalam arti sebagai fasilitator. Koordinasi program dari berbagai instansi terkait sebagai pembina teknis operasional bagi pengembangan Kube perlu ditingkatkan dalam upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten dan Kota Kupang. Pengendalian yang dilaksanakan oleh pendamping dan Dinas Sosial sebagai pembina fungsional dalam pemberdayaan keluarga fakir miskin dan pengendalian Kube telah dilaksanakan cukup baik.

Perkembangan Kube berdasarkan pada ketentuan kategorisasi Kube terbagi kedalam tiga kategori yaitu tumbuh, berkembang dan mandiri. (Depsos, 1997). Kategori Kube dilihat dari aspek organisasi, administrasi, kepemilikan aset, aset sumber, jangkauan pemasaran hasil usaha dan pengembangan usaha. Ada tiga kategori kube yaitu tumbuh, berkembang dan mandiri. Kriteria kube tumbuh yaitu memiliki struktur organisasi, pengadministrasian sederhana bahkan kurang lengkap (terinci), kepemilikan aset dan jangkauan pemasaran terbatas. Kriteria Kube berkembang yaitu administrasi lengkap, berkembangnya organisasi, kepemilikan aset, jenis usaha dan jangkauan pemasaran bertambah serta berkembangnya akses sumber. Kriteria kube mandiri, selain sama dengan kriteria Kube berkembang juga dapat mengakses lembaga keuangan komersial seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan koperasi.

Secara khusus perkembangan kube ditunjukkan oleh: Pertama, berkembangnya kerjasama

di antara sesama anggota kube dan antarkube dengan masyarakat sekitarnya. Kedua, mantapnya usaha kube. Ketiga, berkembangnya jenis kegiatan kube. Keempat, meningkatnya pendapatan Kube. Kelima, tumbuh berkembangnya kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dalam bentuk pengumpulan dana iuran kesetiakawanan sosial (IKS) (Departemen Sosial, 1997). Berdasarkan kategorisasi tersebut, delapan kube yang diteliti di Kabupaten dan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur semua (100 persen) berada pada kategori berkembang sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.

Dari delapan Kube di Provinsi NTT yang diteliti, dua Kube berlokasi di Kabupaten Kupang dan enam Kube berlokasi di Kota Kupang. Dua Kube yang berlokasi di Kabupaten Kupang lebih memfokuskan pada usaha ternak sapi di samping ternak babi dan kambing serta ayam yaitu Kube Jati diri sedangkan Kube Sinar bidang usaha yang ditekuni adalah pertanian. Kondisi di lapangan menunjukkan, bahwa dua Kube tersebut (yang seharusnya beranggotakan 10 orang, dalam kenyataannya memiliki anggota 20 orang). Hal itu tidak sesuai dengan persyaratan yang menyebutkan, bahwa keanggotaan Kube maksimal adalah 10 orang atau 10 KK. Melihat kondisi tersebut baik dinas sosial maupun pendamping Kube menyerahkan sepenuhnya pada kelompok sesuai dengan kearifan lokal masing-masing berdasarkan keputusan bersama. Beberapa jenis usaha yang paling banyak ditekuni Kube di daerah ini adalah bidang peternakan (sapi, babi, kambing dan ayam). Sementara usaha di luar sektor pertanian yang dikembangkan adalah sektor perdagangan dengan jenis kegiatan perkiosan.

Keberadaan Kube di lokasi Kabupaten dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan Kube masuk dalam kategori berkembang. Kriteria Kube dalam kategori berkembang ditunjukkan dengan kepemilikan buku administrasi cukup lengkap namun dalam pencatatan kegiatan, ada yang cukup lengkap administasi tetapi ada juga yang kurang terinci. Pengurus dan anggota cukup memahami tugasnya. Di antara

Tabel 1
Kategorisasi Kube di Kota dan Kabupaten Kupang Provinsi NTT

No	Nama	Tahun Berdiri	Jenis Usaha	Jumlah Anggota	Lokasi Keterangan	Kategori KUBE
1	Tunas Baru	2008	Peternakan Babi	10 Orang	Kelurahan Manutapen, Kota Kupang	Berkembang
2	Robadeo	2007	Peternakan Sapi	10 Orang	Kelurahan Manutapen, Kota Kupang	Berkembang
3	Usaha Mekar	2008	Perkiosan/ Pertokoan	10 Orang	Kelurahan Lasiana, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang	Berkembang
4	Pelita Kasih	2008	Peternakan babi/ayam,Usaha Tenun dan Sanggar	10 Orang	Kelurahan Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang	Berkembang
5	Sehati	2008	Peternakan Babi, Perkiosan/ Warung	10 Orang	Kelurahan Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang	Berkembang
6	Merpati	2008	Perkiosan	10 Orang	Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Berkembang
7	Jati Diri	2009	Peternakan sapi, kambing dan babi	20 Orang	Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang	Berkembang
8	Sinar	2008	Pertanian	20 Orang	Desa Tanah Merah, Kec.Kupang Tengah, Kabupaten Kupang	Berkembang

Sumber: Dokumen Profil Kube NTT (2014)

Kube di Kabupaten dan Kota Kupang memiliki uraian tugas yang jelas dan tertulis dan ada yang tidak memiliki uraian tugas yang jelas namun tidak tertulis. Pemilikan aset secara umum bertambah. Kegiatan yang cukup berkembang di Nusa Tenggara Timur antara lain dengan adanya usaha membuka warung sebagai sarana pengembangan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anggota kube.

Kategori Kube berkembang merupakan langkah awal untuk meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan kube mandiri. Upaya yang dilakukan dengan mempersiapkan segala hal antara lain struktur organisasi, tata kerja pembagian tugas yang jelas secara tertulis, memiliki aturan yang jelas hasil musyawarah bersama (surat kesepakatan bagi hasil, persyaratan dan peraturan bagi pemohon pinjaman). Pengadministrasian kegiatan usaha bersama secara lengkap dan jelas, adanya berbagai catatan kegiatan yang terlihat dalam berbagai buku daftar pengurus dan anggota, buku tamu, buku daftar hadir dan notulen rapat, buku inventaris, buku surat keluar-masuk, buku kas, UEP kelompok, buku kas simpan pinjam, buku kas tabungan pribadi masing-masing

anggota, buku kegiatan kelompok, buku kas IKS (UKS). Perkembangan Kube dari kategori tumbuh menjadi berkembang hingga mandiri memerlukan waktu antara empat sampai dengan enam tahun.

b. Gambaran Kinerja Penyelenggaraan Kube

Keberlanjutan Kube tidak dapat terlepas pada peran kinerja organisasi. Kinerja Organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Kinerja individu, kelompok maupun organisasi diperlukan suatu penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai. Penilaian kinerja sangat penting dilakukan karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Selain itu kinerja dapat digunakan untuk mengukur tingkat prestasi atau kebijakan individu maupun kelompok individu.

Kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen sedangkan kinerja organisasi adalah bentuk hasil kerja yang didapatkan dalam suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Keban (2004) menyebutkan bahwa kinerja (*performance*) dalam organisasi didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil "*the degree of accomplishment*" atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan. Kinerja menggambarkan sampai seberapa jauh organisasi tersebut mencapai hasil ketika dibandingkan dengan kinerjanya terdahulu (*previous performance*) dibandingkan dengan organisasi lain (*benchmarking*) dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan (Keban, 2004).

Keban (2004), menyatakan pencapaian hasil kinerja dapat dinilai menurut pelaku yaitu: Pertama, kinerja individu yang menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh kelompok atau instansi; Kedua, kinerja Kelompok yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh kelompoknya atau instansi; Ketiga, kinerja organisasi yaitu menggambarkan seberapa jauh satu kelompok telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai visi dan misi institusi; Keempat, kinerja program yaitu berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sesuai program, kebijakan, visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi didalam mencapai

tujuan dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Kinerja Kube menggambarkan pelaksanaan kegiatan Kube dari aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Aspek sosial terdiri dari indikator yaitu motivasi berkelompok, kerja sama antar anggota Kube dan antar kube, kesetiakawanan sosial dan tanggung jawab sosial, iuran kesetiakawanan sosial (IKS) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS), keaktifan anggota kube dalam kegiatan kemasyarakatan, perubahan perilaku positif (tentang pendidikan, kesehatan, gizi makanan dan kebersihan lingkungan). Pengukuran kinerja kube, berdasar pedoman petunjuk pelaksanaan (juklak) Kelompok Usaha Bersama (Kube) direktorat penanggulangan kemiskinan perdesaan Kemensos RI tahun 2014. Pedoman tersebut menjadi dasar terhadap penilaian kinerja terhadap aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan kube.

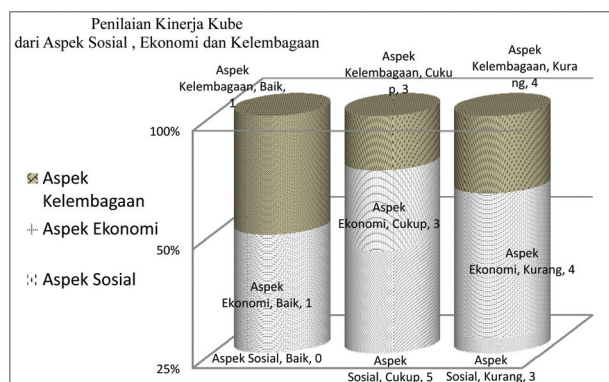
Aspek Ekonomi terdiri dari indikator persepsi terhadap dana stimulan UEP, intensitas usaha dan jumlah jenis usaha, peningkatan kualitas produk, kemampuan mengakses sumber dan potensi (ekonomi), kemampuan merencanakan usaha, melihat peluang pasar, kemampuan pemupukan modal, kemampuan menabung, peningkatan usaha simpan pinjam, kemampuan menjalin kerja sama (kemitraan usaha).

Aspek Kelembagaan terdiri dari indikator kepengurusan dan pembagian tugas, pengadministrasian, proses pengambilan keputusan, pertemuan anggota, pemeliharaan (sarana, prasarana, peralatan), perencanaan usaha, peningkatan SDM, pengelolaan keuangan, kemitraan dan pengendalian (monitoring, evaluasi dan pelaporan).

Pengukuran kinerja Kube terdiri dari tiga gradasi, yaitu baik, cukup dan kurang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Aspek Sosial terdiri dari tujuh pertanyaan, nilai terendah 7 dan nilai tertinggi 21. Kinerja Kube dari aspek sosial dinilai baik apabila mendapat skor antara (17–21), cukup apabila mendapat skor antara (12–16), kurang apabila mendapat skor (7–11). Aspek Ekonomi terdiri dari 10 pertanyaan, nilai

terendah 10 dan tertinggi 30. Kinerja Kube dari aspek ekonomi dinilai baik apabila mendapatkan skor antara 24-30, cukup apabila mendapat skor antara 17-23 dan kurang apabila mendapat skor 10 antara 10-16. Aspek Kelembagaan terdiri dari 14 item nilai terendah 14 dan nilai tertinggi 42, kinerja Kube dari aspek kelembagaan dinilai baik apabila mendapat skor antara 33-42, cukup mendapat skor antara 23-32 dan kurang mendapat skor 14-22. Gambaran kinerja Kube secara rinci dapat dilihat pada grafik 3 berikut.

Grafik 3
Penilaian Kinerja Kube Berdasarkan Aspek Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan



Sumber: Dokumen Profil Kube NTT (2014)

Grafik 3 di muka menggambarkan kinerja delapan Kube yang diteliti dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Dari Aspek sosial, menunjukkan bahwa sebanyak lima Kube (62,5 persen) kinerjanya dalam kategori cukup, tiga Kube (37,5 persen) dalam kategori kurang. Dari data ini dapat disimpulkan, bahwa secara umum kinerja Kube dilihat dari aspek sosial dalam kategori cukup baik. Namun demikian, tidak ditemukan Kube dalam kategori baik. Dari hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa kinerja Kube dilihat dari aspek sosial dalam kategori cukup dapat dilihat dari anggota memiliki motivasi kelompok, saling memiliki ikatan emosional dalam menjalin hubungan satu sama lain. Hal tersebut ditunjukkan mereka merasa senang menghadiri setiap pertemuan yang diadakan, terbukti pertemuan rutin yang

dilakukan secara berkala selalu dihadiri lebih dari 79 persen anggota.

Hasil wawancara terhadap salah satu anggota Kube, mereka mengatakan, “Saya selalu hadir dalam pertemuan rapat anggota Kube, kecuali ada keperluan mendesak, karena kegiatan itu dapat memberi manfaat untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman dan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi baik permasalahan pribadi maupun permasalahan kube.” Sebagian besar responden beranggapan dengan adanya Kube, mereka merasa memiliki kekuatan atau keberanian dalam menghadapi masalah dan beranggapan tidak sendirian dalam menghadapi kehidupan.

Sebagai bentuk kepedulian dan kesetiakawanan sosial terhadap sesama anggota, dilaksanakan iuran kesetiakawanan sosial (IKS) setiap bulan sesuai kesepakatan di masing-masing Kube. Temuan di lapangan menunjukkan, bahwa setiap tahun kube memberi dana IKS, dana kesejahteraan sosial, kepada anggota kube yang terkena musibah. Walaupun nilainya relatif kecil tetapi cukup berarti, karena merasa diperhatikan dan mendapat bantuan pemecahan masalah yang dihadapi serta dapat mengurangi beban keluarga. Di samping untuk kepentingan anggota, sebagian dana dipergunakan untuk membantu uang transport pendamping, apabila hadir pada pertemuan kelompok. Sebagian besar responden menyadari arti penting pendamping untuk kemajuan kube.

Kinerja Kube dilihat dari Aspek Ekonomi menunjukkan, bahwa sebanyak satu Kube (12,5 persen) kinerjanya dalam kategori baik, tiga Kube (37,5 persen) kinerjanya dalam kategori cukup dan sebanyak empat kube (50 persen) dalam kinerjanya dalam kategori kurang. Dari data ini dapat disimpulkan, bahwa secara umum kinerja kube dilihat dari aspek ekonomi dalam kategori kurang. Dari hasil pengumpulan data di lapangan, kube dalam kategori kurang, diketahui persepsi para anggota terhadap bantuan stimulan. Anggota kurang mendukung bantuan stimulan untuk pengembangan usaha. Stimulan yang diberikan dianggap bantuan hibah yang

tidak perlu mengembalikan sehingga kurang adanya tanggung jawab pengembangan usaha untuk pengguliran kepada masyarakat sekitar. Kube tersebut hanya menggeluti satu jenis usaha, belum ada upaya untuk melakukan diversifikasi usaha, kurang kreatif dan kurang memahami dan mengakses sumber untuk pengembangan usaha. Kube kurang mampu mengakses sumber dan mengembangkan jaringan usaha.

Kube pada kinerja aspek ekonomi kategori cukup ditunjukkan adanya persepsi positif terhadap bantuan stimulan yang harus dikembangkan bukan dibagi habis oleh anggota, adanya keberlanjutan usaha, diversifikasi usaha termasuk usaha simpan pinjam dan upaya peningkatan kualitas produk, cukup dapat melihat peluang pasar walaupun belum maksimal hasil usahanya. Kube sudah mulai membangun kerjasama dalam pemasaran, sebagaimana adanya kerjasama antara kube dalam melayani pelanggan. Jangkauan pemasaran sudah mulai diluar lingkungan walaupun belum optimal. Kube mampu mengakses dana usaha dari luar terutama untuk usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam, secara ekonomi dapat menjadikan peningkatan modal usaha. Temuan di lapangan, kube yang kinerjanya baik, cukup baik maupun kurang ada dalam kategori berkembang.

Kube sebagai kelompok usaha yang dikelola secara bersama oleh KBS dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi indikator sebagai berikut. Pertama, secara umum keberhasilan kube tercermin pada meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang dan papan); Kedua, meningkatnya dinamika sosial; Ketiga, meningkatnya kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah.

Hasil pengamatan di lapangan, semua kube dalam kategori berkembang menunjukkan adanya keberlanjutan usaha, adanya upaya peningkatan kualitas produk, kemampuan yang cukup dapat melihat peluang pasar walaupun belum maksimal hasil usahanya, telah mulai ter-

lihat membangun kerja sama dalam pemasaran, sebagaimana adanya kerja sama antara kube dalam melayani pelanggan. Jangkauan pemasaran mulai di luar lingkungan setempat meskipun belum optimal. Untuk meningkatkan usahanya kube mengakses dana usaha dari luar terutama untuk usaha simpan pinjam, dengan adanya simpan pinjam, secara ekonomi dapat menjadikan peningkatan modal usaha kube meskipun sedikit jumlahnya, juga dapat meningkatkan jumlah usaha ekonomi masyarakat, sehingga dapat merasakan manfaat kube.

Dari aspek kelembagaan menunjukkan, bahwa lebih dari separuh Kube kinerjanya pada kategori kurang yaitu sebanyak empat Kube (50 persen), sebanyak tiga Kube (37,5 persen) kinerjanya pada kategori cukup dan selebihnya yaitu sebanyak satu Kube (12,5 persen) kinerjanya pada kategori baik. Dari data ini dapat disimpulkan, bahwa secara umum kinerja kube dilihat dari aspek kelembagaan dalam kategori kurang baik. Kinerja kube pada kategori kurang terlihat dari indikator lemahnya dalam administrasi (buku kurang lengkap dan pencatatan kurang rinci), uraian tugas kurang jelas dan kurang dipahami oleh pengurus, dalam pengendalian kube kurang dilakukan evaluasi kegiatan dan laporan kurang lengkap, kemitraan terbatas, tidak menginventarisasi sumber atau kurang bisa mengakses sumber untuk perkembangan kube, pengelolaan aset kurang memadai terbukti ada aset yang mengalami kerusakan tidak diperbaiki dengan yang baik. Kube pada kategori cukup, terlihat dari indikator: memiliki buku administrasi cukup lengkap dan pencatatan cukup terinci, pengurus dan anggota cukup memahami tugas yang dibebankan, dapat menjalin kemitraan dengan berbagai sumber untuk perkembangan kube (tetapi perlu ditingkatkan), sarana dan prasarana yang dimiliki kube cukup memadai dan dapat menunjang kegiatan usaha serta pengelolaan aset dan keuangan cukup memadai sehingga aset yang dimiliki tidak berkurang. Kube pada kategori baik, terlihat dari sarana administrasi lengkap dan pencatatan terinci, jalinan kemitraan

berkembang lebih luas dan pengelolaan aset keuangan relatif lebih baik dibandingkan dengan kube pada kategori cukup.

Sebagian besar kinerja Kube dilihat dari kelembagaan yakni 50 persen masuk dalam kategori kurang, terbukti kepemilikan buku kurang lengkap dan pencatatan kurang rinci, hanya mengungkapkan nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan namun tidak mengungkapkan potensi yang dapat dikembangkan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Buku agenda kelompok pertemuan tidak mengungkapkan topik dan materi hasil pertemuan sebagai dokumen atau bahan evaluasi dalam upaya pengembangan Kube. Kegiatan Kube tidak melalui perencanaan. Bendahara hanya memiliki catatan buku kas sederhana tanpa menyertakan bukti pengeluaran. Pengurus kurang memiliki inisiatif, kreatif, dan inovatif dalam pengembangan usaha. Kube masih memiliki keterbatasan dalam kemitraan dan mengakses sumber-sumber untuk kemajuan Kube. Evaluasi sebagai pengendalian Kube kurang dilakukan dan dalam penyusunan laporan masih sangat tergantung pada peran pendamping.

Kelembagaan kube pada kategori cukup, terlihat kube memiliki pembagian tugas secara tidak tertulis, namun tetapi pengurus dan anggota cukup memahami tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Ketua kube mampu menggerakkan dan mendayagunakan potensi anggota kelompok. Ketua kube dapat mengidentifikasi, mengakomodasi, dan menggerakkan serta memanfaatkan segenap potensi atau kemampuan dan sumber-sumber yang dimiliki. Dalam menggerakkan anggota, mengacu pada aturan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota. Pengadministrasian kegiatan dan keuangan cukup tertib dan terinci disertai bukti pengeluaran, terbukti kube memiliki kelengkapan buku catatan yang dibutuhkan. Kube mampu menjalin kemitraan dengan berbagai sumber dalam upaya diversifikasi usaha untuk perkembangan kube meskipun masih perlu ditingkatkan. Kube telah memiliki prasarana dan

sarana yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan usaha. Pengelolaan aset dan keuangan cukup memadai terbukti aset yang dimiliki tidak berkurang tetapi semakin berkembang.

Dari data di lapangan hanya ditemukan satu kube dilihat dari aspek kelembagaan dalam kategori baik yakni Kube Jati Diri terlihat dari adanya pembagian kerja yang jelas, rinci secara tertulis yang dipahami oleh pengurus dan anggota. Ketua sebagai pemimpin kelompok bertugas mengkoordinir pengelolaan, mengatur pelaksanaan usaha. Sekretaris, bertugas melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan kube dibantu oleh pengurus yang lain. Demikian juga tugas bendahara yakni menjalankan pengelolaan keuangan baik yang masuk maupun keluar sepengetahuan ketua. Memiliki kelengkapan buku administrasi dan pencatatan terinci, antara lain: buku daftar pengurus dan anggota kube, buku tamu, buku daftar hadir rapat pengurus, buku administrasi surat masuk-keluar, buku daftar inventaris, buku kas usaha kelompok, buku kas IKS, buku kas simpan pinjam, buku kegiatan kelompok, buku rencana kerja, buku kas tabungan pribadi masing-masing anggota. Selanjutnya anggota bertugas sebagai pemasaran, mendokumentasikan kegiatan, dan membantu pengurus dalam menjalankan, mengatur dan menjaga peralatan inventaris yang dimiliki.

Kesuksesan kube dapat dilihat dari: Pertama, usaha ekonomi berdasarkan rencana usaha dan anggaran belanja yang disepakati bersama; Kedua, usaha ekonomi berorientasi pasar; ketiga, menggunakan modal usaha sesuai dengan kebutuhan usaha; Keempat, menggunakan bahan baku yang mudah diperoleh dari lingkungan setempat; Kelima, melakukan usaha sesuai dengan keterampilan yang dimiliki; Keenam, sistem pengelolaan usaha ekonomi dapat dilaksanakan semua anggota; Ketujuh, ada komitmen dan kerjasama yang kuat dari setiap anggota untuk berhasil; Kedelapan, harga yang ditawarkan menguntungkan dan bersaing di pasar. Kesembilan, adanya kebersamaan dalam menghadapi berbagai hambatan usaha.

1. Manfaat Kube bagi Anggota

Penggalan secara kualitatif terhadap dampak Kube bagi anggota dapat dilihat dari manfaat kube bagi anggota dan masyarakat di sekitarnya. Dari hasil wawancara diperoleh informasi, bahwa manfaat Kube bagi anggota antara lain: Pertama, sebagai wadah aktualisasi diri terhadap lembaga usaha bersama secara kolektif mengangkat derajat sesama anggota; Kedua, kube sebagai media pembelajaran secara ekonomi baik secara individu maupun berkelompok; Ketiga, Kube memberikan pemahaman bagi setiap individu mengenai interaksi sosial sesama anggota Kube itu sendiri; Keempat, sebagai ajang untuk berorganisasi antara satu dengan anggota yang lain dalam satu organisasi kube; Kelima, memahami kerangka kerja administratif pengelolaan dan manajemen kube; Keenam, membangun kesetiakawanan dan solidaritas antaranggota kube

2. Manfaat Kube bagi Masyarakat

Manfaat kube bagi masyarakat sekitar meskipun tidak dapat dilihat secara langsung tetapi keberadaan kube di lingkungan masyarakat tersebut memiliki arti penting yaitu sebagai sebuah pranata yang secara sosial dan ekonomi mengupayakan sebuah kebersamaan, terbingkai dalam kolektivitas kerja sosial demi meningkatkan kesejahteraan secara berkelompok melalui kube. Beberapa manfaat kube bagi masyarakat meliputi: Pertama, terdapatnya manfaat sosial kelembagaan secara kelompok bagi Fakir Miskin yang memberdayakan Kelompok fakir miskin tersebut. Kedua, semakin berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat yang tergolong kurang mampu; Ketiga, kube dalam masyarakat menjadi penguat jaringan kerja bagi kelompok fakir miskin; Keempat, kube sebagai bagian dari area publik bagi fakir miskin dalam mengakses sumber sumber potensi kesejahteraan sosial; Kelima, kube sebagai ornamen motivator bagi kelompok fakir miskin untuk membentuk kekuatan ekonomi dan sosial demi kesejahteraan masyarakat secara umum karena kaum fakir miskin merupakan bagian dari sebuah komunitas yang perlu

diberdayakan; Keenam, kube dapat diharapkan menjadi bagian dari pranata sosial masyarakat untuk dijadikan acuan kelompok bersama secara ekonomi dalam menentukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kube

Faktor yang menjadi pendukung akan keberhasilan usaha kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui program Kube, yakni semangat anggota kelompok yang cukup tinggi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui program Kube, seperti keaktifan anggota Kube dalam mengadakan kegiatan rutin, kedisiplinan anggota kube dalam pengelolaan administrasi dan keuangan serta penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan; Kuatnya rasa ikatan persaudaraan di antara anggota kube (tercermin dari sikap saling membantu, tolong-menolong, gotong royong, dan kerja sama yang baik). Semangat kerja sama dan gotong royong tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kelompok, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kelompok, seperti arisan dan simpan pinjam; Adanya pendampingan sosial yang selalu berusaha menjalin relasi sosial diantara pendamping, anggota kube dan masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat akses dan mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial; Masih tingginya minat masyarakat miskin untuk dapat berkembang bersama dalam program Kube; Interaksi sosial yang tinggi atas dasar kesamaan visi dan pandangan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik; Terdapatnya sistem atau jaringan kerja kelembagaan serta keberfungsian pendamping dalam mengarahkan dan membimbing kube sehingga kinerja kube meningkat di masa mendatang; Adanya Perda No 14 Tahun 2011 tentang keterlibatan semua sektor dalam penanganan kemiskinan tetapi dalam implementasinya perlu peningkatan koordinasi program lintas sektor terkait.

Faktor yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha kesejahteraan sosial program pengentasan kemiskinan melalui Kube adalah sebagai berikut. Pertama, rendahnya tingkat pendidikan anggota kelompok, yang menyebabkan kemampuan untuk pengelolaan kube relatif kurang, mengakibatkan usaha yang dilakukannya kurang bisa berkembang secara optimal. Kedua, terbatasnya kemampuan diversifikasi usaha, kelompok terbiasa dalam kondisi sebelumnya dan tidak berani berspekulasi untuk membuka usaha yang baru. Ketiga, rendahnya mobilitas yang menyebabkan sempitnya pemasaran hasil usaha, kondisi ini merupakan penyebab kecilnya daya serap dana bantuan secara maksimal. Dana bantuan yang diperoleh cenderung dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif dibanding usaha produktif. Keempat, kurangnya keterbukaan antar pengurus dan anggota kube dalam mengelola usaha bersama yang pada akhirnya mendorong terjadinya rendahnya partisipasi dan semangat kebersamaan di antara para anggota kube dan kurang kondusifnya iklim kerja di kelompok. Kelima, kendala budaya berupa adanya rasa kurang saling percaya di antara para anggota kube yang berasal dari marga yang berbeda. Apabila anggota kube terdiri dari berbagai etnis dan beragam karakter, budaya dan istiadat yang berbeda, berimplikasi pada perbedaan strategi dalam mengembangkan usaha Kube. Ketujuh, kondisi geografis yang kurang mendukung sehingga komunikasi menjadi kurang lancar antara kube dengan pembina dan atau pendamping. Kedelapan, proses pembentukan kube yang relatif lemah dalam asesmen, sehingga kegiatan kube kadang tidak berdasarkan kebutuhan riil anggota kube dan tidak sepenuhnya diawali dengan pemberian kegiatan bimbingan penyuluhan sosial, pelatihan manajemen usaha, UEP, IKS dan UKS. Muatan kegiatan lebih banyak bermaterikan tertib administrasi organisasi. Kesembilan, kelemahan anggota kube dalam merencanakan program kegiatan usaha, manajemen organisasi, dan rendahnya kemampuan mendistribusikan hasil produksi kube ke berbagai institusi ekonomi sebagai akibat dari lemahnya kemampuan

menjalin relasi kerja (*networking*). Kesepuluh, sistem kerja kelompok yang belum tertata dengan baik ditingkat internal dan anggota belum secara penuh dilibatkan dalam setiap kegiatan. Kesebelas, manajemen pengelolaan dan sistem pengadministrasian kube yang relatif masih sederhana, meskipun di beberapa kube telah ada sistem yang relatif baik.

D. Penutup

Hasil penelitian Kube di lokasi Kabupten dan Kota Kupang dapat disimpulkan sebagai konklusi penelitian. Ditinjau dari kategori Kube, dari delapan Kube yang diteliti di lokasi penelitian, mayoritas Kube (100 persen) termasuk dalam kategori berkembang. Kinerja dilihat dari aspek sosial, menunjukkan terdapat lima Kube (62,5 persen) memiliki kinerja cukup baik dan terdapat tiga Kube (37,5 persen) memiliki kinerja kurang. Kinerja Kube ditinjau dari aspek ekonomi menunjukkan terdapat empat Kube (37,5 persen) memiliki kinerja kurang, tiga Kube (37,5 persen) memiliki kinerja cukup, dan satu Kube (12,5 persen) memiliki kinerja baik. Dilihat dari aspek kelembagaan menunjukkan terdapat empat Kube (37,5 persen) memiliki kinerja kurang baik, tiga Kube (37,5 persen) memiliki kinerja cukup, dan satu Kube (12,5 persen) memiliki kinerja dalam kategori baik. Ditinjau dari ketiga aspek kinerja Kube yang diteliti, ditemukan kelemahan pada aspek kelembagaan dan ekonomi. Hal ini tampak dari hasil evaluasi pada kedua aspek ini berada dalam kategori kurang. Pada aspek sosial masuk pada kategori cukup.

Dilihat dari faktor yang mempengaruhi kinerja Kube dapat dilihat beberapa faktor pendukung dan penghambat antara lain semangat anggota kelompok yang tinggi, kuatnya rasa kebersamaan, adanya pendamping yang kompeten, adanya dukungan masyarakat, adanya dukungan SDA potensi lokal dan nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar anggota Kube. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan Kube diantaranya adalah rendahnya kualitas SDM sasaran (pendidikan rendah dan keterampilan dalam mengelola usaha terbatas),

kendala geografis dan nilai sosial-budaya yang kurang kondusif, lemah dalam membangun *networking*.

Rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Dayasos Ditjen Dayasos dan Gulkin Kementerian Sosial mengenai kinerja kube khususnya dari aspek ekonomi dan kelembagaan terbukti kurang, sementara aspek sosial menunjukkan hasil cukup. Ke depan agar kinerja kube menjadi lebih baik, dalam penyusunan program pemberdayaan keluarga miskin, di samping menekankan pada pengembangan aspek sosial juga menekankan pada pengembangan aspek ekonomi dan kelembagaan dalam porsi yang seimbang. Perlu adanya sinergi pada aspek ekonomi dan kelembagaannya yang terintegrasi dengan aspek sosial. Dari sisi pendamping kube juga diharapkan agar meningkatkan kinerja advokasi sosial kelembagaan dalam pengelolaan kube dengan menekankan pada dimensi ekonomi dan kelembagaan dengan melakukan penyadaran pada elemen anggota. Bagi Dinas Sosial setempat, perlunya peningkatan koordinasi (program) dengan instansi terkait, baik dalam proses pembentukan, pelaksanaan maupun dalam pengembangan kube. Perlu adanya pendampingan dan peningkatan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk untuk mencapai hasil usaha dan perkembangan kube yang optimal, perlu peningkatan kelengkapan sarana/prasarana, pengadaan insentif yang memadai bagi pendamping dan waktu pendampingan yang intensif dalam rangka menunjang perkembangan Kube. Perlu peningkatan kualitas KBS agar dapat memiliki kemampuan pengelolaan usaha (manajemen) kube, kemampuan mengakses sumber daya sosial ekonomi, kemampuan mengakses peluang pasar, dan kemampuan menjalin kemitraan usaha (*networking*).

Pustaka Acuan

Biro Pusat Statistik, 2005-2014. *Statistik Indonesia dan Susenas*. Jakarta: BPS RI
Departemen Sosial Republik Indonesia, 1996. *Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama*, Jakarta: Departemen Sosial.

—————, 1997. *Peranan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama*, Jakarta: Departemen Sosial.
—————, 2003. *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Depsos RI
—————, 2003. *Profil KUBE Berkembang*, Jakarta: Departemen Sosial.
—————, 2003. *Profil Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Pusdatin Kesos Depsos RI
—————, 2003. *Mewujudkan Kemandirian Keluarga Melalui KUBE KMM*, Jakarta: Depsos RI.
—————, 2003. *Panduan Pengelolaan Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri*, Jakarta: Depsos RI
—————, 2003. *Petunjuk Teknis Penanggulangan Fakir Miskin Melalui Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Depsos RI
—————, 2004. *Panduan Umum Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif Melalui KUBE dan LKM*, Jakarta: Depsos RI
Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2010. *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Dirjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan.
—————, 2014. *Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Ditjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan.
Heru Nugroho. 2000. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
Ife, Jim. 2002. *Community development. Community based alternatives in an age of globalizational second edition*. South Melbourne: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd.
Issac, S, Michael, W.D. 1981. *Handbook in Research and Evaluation: For Education and the Behavioural Sciences (2nd edittion)* . San Diego California : Ed III Publishers.
Istiana Hermawati, 2001. *Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE (Suatu Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Sosial)*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fisip UI, tidak diterbitkan.
Istiana Hermawati dkk. 2005. *Efektifitas Program Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: B2P3KS
Khatib Pahlawan Kayo, 2009, KUBE Sebagai Wahana Intervensi Komunitas dalam Praktek Pekerjaan Sosial, Padang: B2P2KS
Narayan, Deopa. 2002. *Empowment and Poverty Reduction a Source Book*. Washington, DC: The World bank
Owin Jamasay. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Bandung: Blantika
Sutrisno Hadi, 1991. *Metodologi Research Jilid 3*, Yogyakarta: Andi Offset

Tjahya Supriyatna, 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: PT Humaniora Utama Press

Weiss, CH (1972). *Evaluation Research Method for Assessing Program Effectiveness*. Engle word cliffs : Prentice. Hall.Inc.

Yeremias T. Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta. Gaya Media

Peraturan Perundangan

Inpres No 3/ 1996 tentang *Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan*

Inpres RI no.5/ 1993 tentang *Program Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan*

Perpres No.15 Tahun 2010 tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*

Peraturan Pemerintah No 42/ 1981 tentang *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 27 dan 34)

Undang-undang No 22/ 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* (Sejak Januari 2001 terkenal dengan UU tentang *Otonomi Daerah*)

Undang-Undang no 25 tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004*.

Undang-undang No 11/ 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*

Menakar Perubahan Sosial Keluarga Migran

Measuring Social Change of Migrant Family

Sri Kuntari

Balai Besar Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Badiklit Kesos, Kementerian Sosial RI,
Jl. Kesejahteraan Sosial No 1, Nitipuran, Yogyakarta. Telpn (0274) 377265 Fax (0274) 373530
Email: <srikuntari48@yahoo.com>.

Diterima 23 Desember 2014, direvisi 12 April 2015, disetujui 11 Mei 2015

Abstract

The research on measuring social welfare of migrant families is to describe social change in migrants familie structure. Methodologically, the approach used is qualitative-descriptive. Research location ditermined purposively in Sukabumi Regency, West Java Province, based on cosideration that in this regency many migrant workers go abroad, especially women working in informal sector. Subjects in this research are migrant worker women, chosen purposively, based on criteria they ever worked or are on leave status and will work back abroad. Data are gathered through interview and documentary analysis, and analyzed through qualitative-descriptive technique. The research finds that the decession of working abroad as migrant workers causes basic change in family lives to be better. The change caused by remintant contribution from working abroad, families are able enhance life quality, both on their children education and economic-social improvement. But behind its positive change there is negative change, namely the cofusing of family member functions, between husbands and wives during they are abroad. It is recommended it should be set an integrated services unit, untited from related agencies to identifty problems and needs of social services to ex-migrant workers, also it should be set local group work and communication forum for ex-migrant workers under supervision and guidance of related agencies.

Keywords: *Migrant Worker Family; Social Change*

Abstrak

Penelitian menakar kesejahteraan sosial keluarga pekerja migran bertujuan mengetahui perubahan sosial dalam struktur keluarga migran. Secara metodologis, metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan bahwa daerah ini banyak mengirim pekerja migran ke luar negeri, umumnya dilakukan oleh perempuan dan bekerja di sektor informal. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive* yang didasarkan pada kriteria tertentu yakni orang yang pernah menjadi pekerja migran dan yang sedang pulang kampung tetapi masih ingin bekerja lagi sebagai pekerja migran ke luar negeri. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan pengumpulan dokumen, data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan perempuan pergi ke luar negeri menjadi pekerja migran menyebabkan perubahan mendasar dalam kehidupan keluarga ke arah yang lebih baik. Perubahan terjadi dengan kontribusi remitan yang diperoleh selama menjadi pekerja migran, keluarga mampu memperbaiki kualitas hidup, baik dalam hal pendidikan anak maupun dalam peningkatan sosial-ekonomi. Namun di balik keberhasilan tersebut ditemukan adanya suatu perubahan negatif, yaitu kekacauan fungsi keluarga (suami atau istri) selama ditinggal ke luar negeri. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya dibentuk unit pelayanan terpadu yang terdiri atas beberapa instansi terkait dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pelayanan sosial bagi eks pekerja migran, juga perlunya dibentuk kelompok kerja dan forum paguyuban pekerja migran di daerah asal dengan pengawasan dan pembinaan dari unit pelayanan terpadu.

Kata Kunci: *Perubahan Sosial; Keluarga Migran*

A. Pendahuluan

Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang sampai sekarang masih ada dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk

segera dilakukan penanganan adalah besarnya jumlah penduduk miskin dan tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin

sampai bulan September 2013 mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen). Berbagai program penanganan kemiskinan dan percepatan mengatasi pengangguran yang telah dilakukan pemerintah belum dapat sepenuhnya mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran secara signifikan, sehingga masih banyak penduduk miskin dan penganggur yang membutuhkan pekerjaan. Kondisi ini yang menjadi faktor pendorong seseorang mencari pekerjaan ke luar negeri dengan menjadi pekerja migran.

Dalam buku standar pemberdayaan dan rujukan pekerja migran dijelaskan pekerja migran adalah orang yang berpindah ke daerah ke daerah lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu (Sutaat dkk, 2011: 6). Seseorang memutuskan menjadi pekerja migran karena alasan ekonomi, hal ini sesuai dengan pendapat Titus (1978) yang mengemukakan bahwa motivasi seseorang untuk pindah atau melakukan migrasi karena motif ekonomi.

Berdasarkan laporan BNP2TKI pada tahun 2013 jumlah pekerja migran yang bekerja di luar negeri mencapai 512.168 orang yang terdiri dari 285.197 orang bekerja di sektor formal dan 226.871 orang di sektor non formal. Dari jumlah tersebut tenaga kerja wanita masih mendominasi jumlahnya mencapai 203.490 orang, yang sebagian besar bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT). Dalam hal jumlah pengiriman pekerja migran ke luar negeri, Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2014 menurut Kepala BNP2TKI Moh. Jumhur Hidayat masih menjadi daerah pengirim terbesar pekerja migran yakni sebesar 119.620 orang terdiri dari pekerja migran formal dan non formal.

Direktur Penyiapan dan Pembekalan pemberangkatan BNPTKI Wisantoro menyatakan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) mencatat pada Januari-September 2014 sebanyak 105.694 orang dan 23,44 persen hanya tamat sekolah dasar (SD), yang tamat sekolah menengah pertama (SMP) 37,79 persen. Pekerja migran terutama perempuan, memilih menjadi pekerja migran di luar

negeri dengan harapan mendapat gaji yang lebih tinggi daripada bekerja di negeri sendiri dengan pekerjaan yang sama. Merantainya perempuan, terutama istri ke luar negeri dapat berdampak pada perubahan fungsi dan peran dalam rumah tangga, dimana perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Menjadi pekerja migran dapat berdampak adanya perubahan pada tingkat kesejahteraan sosial ekonomi keluarga yang ditandai adanya perubahan tingkat kesejahteraan fisik-material keluarga sebagai hasil remitansi, juga membawa perubahan sosial berupa pranata yang didalamnya berisi peran dan fungsi keluarga; perubahan status sosial yang menyangkut aspek kekuasaan ekonomi, harga diri di masyarakat sebagai konsekuensi dari keberhasilan sebagai pekerja migran, dan adanya konsekuensi perubahan perilaku akibat dari adanya kontak atau interaksi antara pekerja migran dengan budaya masyarakat tempat tujuan bekerja.

Banyaknya kaum perempuan yang memilih menjadi pekerja migran di satu sisi berharap dapat mengubah kehidupan yang semula berada pada kondisi sosial ekonomi rendah sehingga mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan dasar, dengan pekerjaan baru mereka berharap mampu mengubah dan meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga. Undang-undang No 11 Tahun 2009 menyebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Dengan demikian dapat dikatakan kondisi keluarga sejahtera apabila dapat terpenuhi sebagai besar kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial.

Perempuan merantau, baik istri maupun anak, akan mengurangi intensitas komunikasi

interpersonal dengan anggota keluarga yang ditinggal di rumah, sehingga kepergian istri bekerja dalam jangka waktu lama dimungkinkan terjadi permasalahan sosial seperti terjadinya perselingkuhan yang dilakukan suami karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis dalam jangka waktu lama. Pekerja migran perempuan juga rentan terhadap berbagai tindak kejahatan di antaranya eksploitasi, perkosaan, kekerasan yang dilakukan oleh majikan, contoh kasus yang dialami oleh dua pekerja migran asal Kabupaten Sukabumi Nesi dan Eni, terancam hukuman mati karena dituduh membunuh majikannya di Arab Saudi. Kisah pilu lain menimpa Satinah asal Ungaran, Semarang, Jawa Tengah yang tinggal menghitung hari untuk menjalani hukuman pancung, karena tidak mampu membayar diyat sebesar 25 miliar yang divonis bersalah oleh Pengadilan Arab Saudi karena membunuh istri majikan dan mencuri uang sebesar 37 Riyal, walaupun apa yang dilakukan Satinah semata-mata untuk membela diri dari siksaan majikan.

Banyaknya kaum perempuan yang memilih menjadi pekerja migran, mempunyai tujuan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga, hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah perubahan sosial apa yang terjadi dalam keluarga migran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam keluarga migran. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dalam perumusan program, kebijakan, dan strategi penanganan masalah kesejahteraan sosial pekerja migran.

B. Penggunaan Metode Penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menyelidiki suatu fenomena sosial, memaparkan atau menggambarkan segala peristiwa yang diperoleh di lapangan, untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh, dan bertujuan untuk memberikan penjelasan dari variabel

yang diteliti (Satori & Aan Komariah, 2009: 25), menggambarkan secara obyektif perubahan sosial yang terjadi dalam keluarga migran yang bekerja di luar negeri. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa barat, dengan pertimbangan daerah ini banyak mengirim pekerja migran ke luar negeri, yang umumnya dilakukan oleh perempuan dan bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga (Ikawati, dkk, 2004: 38).

Subjek dalam penelitian ditentukan secara *purposive*, didasarkan pada kriteria orang yang pernah menjadi pekerja migran dan yang sedang pulang kampung tetapi masih ingin bekerja lagi sebagai pekerja migran ke luar negeri. Subjek penelitian sebanyak 22 orang yang berasal dari Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi. Pengumpulan data menggunakan dua teknik yaitu wawancara dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat pedoman wawancara yang berisi garis besar materi wawancara yang harus dikembangkan sendiri oleh peneliti, dengan tujuan untuk mengungkap, mengetahui, memahami dan menganalisis dinamika perubahan sosial keluarga migran. Penelusuran data juga dilakukan dengan menggunakan cara telaah dokumen dari berbagai data baik berupa catatan maupun dokumen yang meliputi permasalahan kesejahteraan sosial pekerja migran. Telaah dokumen untuk memperkaya informasi setelah wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan tehnik deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan (Perubahan Sosial Keluarga Migran)

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kecamatan Cireunghas merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Batas wilayah antar kecamatan adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukalarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gegerbitung, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kebonpedes dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cianjur, yang dibatasi dengan jalan kabupaten dan jalan provinsi.

Jarak dari ibu kota kabupaten (Pelabuhan ratu) adalah 72 km. Luas wilayah Kecamatan Cireunghas adalah 2.783.292 ha, secara administratif, Kecamatan Cireunghas terdiri atas lima desa yaitu, Desa Cipurut, Cereunghas, Bencoy, Cikurutug dan Desa Tegalpanjang, serta 50 RW da 179 RT.

Kecamatan Cireunghas berada pada ketinggian 500-700 meter dari permukaan laut, dengan kondisi topografi beraneka ragam. Kondisi topografi di wilayah Kecamatan Cireunghas yaitu daerah landai berupa lahan sawah sebesar 25 persen, bergelombang 52,5 persen berupa lahan sawah dan darat serta daerah berbukit 27,5 persen berupa lahan darat. Kecamatan Cireunghas berpenduduk 31.511 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 15.781 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 15.730 jiwa (BP3K Cireunghas). Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Sukabumi termasuk di Kecamatan Cireunghas diantaranya adalah menurunnya kepemilikan dan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman penduduk, tidak seimbangnya komposisi antara peluang kerja yang ada dan jumlah pencari kerja, serta rendahnya upah tenaga kerja, sehingga menimbulkan masalah kesejahteraan sosial terutama kemiskinan dan pengangguran.

Kondisi masyarakat yang miskin juga disebabkan oleh ketidakberdayaan dan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan sumber daya individu dalam keluarga, sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut, istri ataupun anak dilibatkan dalam mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan migrasi atau pindah penduduk ke daerah lain atau ke luar negeri, yang memungkinkan mereka mendapatkan penghidupan yang lebih layak di daerah tujuan. Terjadinya migrasi pada masyarakat di Kecamatan Cireunghas sesuai dengan pendapat Lee yang menyebutkan migrasi ialah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu

apakah perpindahan itu bersifat sukarela atau terpaksa, serta tidak diadakan perbedaan antara migrasi dalam negeri dan migrasi ke luar negeri. Keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan, perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan (Lee, 2000: 8). Faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan migrasi dilatarbelakangi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja, sehingga seseorang rela mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asal dengan resiko yang tidak sedikit (Darwin, 2003: 3).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Sukabumi, animo warga kabupaten Sukabumi, Jawa Barat melakukan migrasi ke luar negeri yaitu untuk mengadu nasib sebagai tenaga kerja terutama ke Negara-negara Timur Tengah datanya terbilang tinggi, sehingga kabupaten ini merupakan salah satu daerah pemasok migran ke luar negeri terbesar. Pengiriman pekerja migran ke luar negeri merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga pekerja, walaupun ada juga beberapa permasalahan yang timbul dari pengiriman tenaga kerja misalnya ada yang disiksa majikannya, ditipu dan tidak dibayar.

Pekerja migran Kabupaten Sukabumi 24.269 orang, rata-rata sebulan mencapai 300-400 orang. Dari jumlah tersebut 3.585 orang sebagian adalah sebagai pekerja non-formal, dan sebagian besar perempuan (BPS, Kabupaten Sukabumi, 2013). Pekerja migran legal yang tercatat di Disnakertrans Kabupaten Sukabumi pada tahun 2011 4.785 orang terdiri dari laki-laki 191 dan perempuan 4.549 orang. Pekerja migran yang berasal dari Kecamatan Cireunghas belum ada data yang dapat diakses. Beberapa negara tujuan pengiriman pekerja migran ke luar negeri asal Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Pekerja Migran Legal Kabupaten Sukabumi Menurut Negara Tujuan

No	Negara	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Malaysia	-	13	13
2	Brunei Darussalam	26	-	26
3	Singapura	-	64	64
4	Taiwan	2	119	121
5	Hongkong	-	42	42
6	Saudi Arabia	150	2.485	2.635
7	Emirat Arab	8	1.091	1.099
8	Oman	-	168	168
9	Bahrain	1	238	239
10	Qatar	4	345	349
Jumlah		191	4.594	4.785

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Sukabumi (2014)

Data pada Tabel 1 menunjukkan, ternyata tenaga kerja wanita banyak, 4.594 orang, yang rela bekerja ke luar negeri dengan tujuan membantu suami mencari nafkah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga. Dalam perspektif keluarga, seorang perempuan yang memutuskan melakukan migrasi ke luar negeri selain menunjukkan partisipasi perempuan dalam mengatasi persoalan finansial keluarga, juga memberi gambaran adanya perubahan sosial dalam struktur dan fungsi keluarga. Perubahan itu terutama pada relasi jender yang mengarah pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, meskipun peran laki-laki di dalam keluarga masih dominan, perempuan sudah memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat dan berani mengambil keputusan sendiri.

Fenomena ini menunjukkan pembagian kerja yang selama ini berlaku dalam keluarga telah mengalami pergeseran, batas-batas pekerjaan sektor domestik dan publik antara suami dan istri menjadi kabur. Perempuan tidak lagi memiliki peran utama sebagai ibu rumah tangga, tetapi telah memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga karena memiliki penghasilan sendiri.

2. Pengiriman Pekerja Migran ke Luar Negeri

Dalam rangka melindungi para pekerja migran sebelum, selama penempatan sampai

kepulungan ke tanah air, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Pengerahan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, upaya pengiriman tenaga kerja dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkoordinasi dengan BNP2TKI serta perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia. Peraturan daerah tersebut bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, juga menjamin dan melindungi calon tenaga kerja di negara tujuan sampai kembali ke daerah asal.

Ditinjau dari negara tujuan yang diminati oleh migran adalah Negara Arab (4029 orang), Kuwait (24 orang), Yordania (14 orang) dan Taiwan sebanyak 17 orang, dari jumlah tersebut 96 persen berjenis kelamin perempuan (Diolah dari data BPS Kabupaten Sukabumi, 2013). Pada umumnya para tenaga kerja bekerja di sektor non-formal seperti pembantu rumah tangga, buruh perkebunan, dan pelayan rumah makan. Banyaknya perempuan bekerja sebagai pekerja migran lintas negara merupakan satu bentuk partisipasi perempuan di bidang ekonomi. Dari hasil wawancara, motivasi perempuan menjadi pekerja migran karena alasan ekonomi, diakui oleh keluarga pekerja migran bahwa dengan pekerjaan tersebut memberikan kontribusi

ekonomi yang cukup signifikan bagi keluarga.

Namun tidak dapat dipungkiri fenomena tersebut telah menggeser peran suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, merupakan perubahan peranan dan fungsi yang dijalankan oleh suami dan istri dalam keluarga. Hal tersebut berlangsung secara tidak sengaja, sebagian besar responden beralasan bahwa bekerja menjadi tenaga kerja di luar negeri bermula dari motivasi memperbaiki kondisi ekonomi keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, mereka beranggapan bekerja di luar negeri dengan pekerjaan yang sama akan mendapatkan gaji lebih besar dibandingkan dengan bekerja di negeri sendiri.

3. Gambaran Umum Responden

Jenis kelamin dan usia responden: Seluruh responden berjenis kelamin perempuan, jika ditinjau dari aspek usia tergolong dalam kategori produktif. Dari 22 responden, sebagian besar berusia antara 24-34 berjumlah 15 orang (68,18 persen), sedang yang berusia antara 35-49 lima orang (22,72 persen) dan dua orang (10 persen) responden berusia di atas 50 tahun. Status mereka sudah menikah dan sebagian besar responden masih berusia produktif, sehingga mereka masih bersemangat bekerja untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan merupakan faktor utama responden memutuskan menjadi migran dengan bekerja ke luar negeri, sedang faktor lain pemicu menjadi pekerja migran karena semakin sempitnya lahan pertanian, kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat kemampuannya, serta rendahnya upah tenaga kerja. Dari penjelasan salah satu responden Bu ENR (37 tahun), *“Suami saya mengizinkan saya bekerja menjadi TKW ke Arab karena kondisi ekonomi kami yang masih kurang, kami tidak mempunyai sawah/ladang, dan suami hanya bekerja sebagai buruh bangunan yang kadang tidak ada kerjaan. Walaupun harus meninggalkan anak dan suami tetapi hasil yang saya peroleh dapat digunakan untuk membantu suami mencukupi kebutuhan rumahtangga dan sedikit*

untuk memperbaiki rumah, dulu rumah saya masih dari papan sekarang Alhamdulillah sudah sudah seperti ini, lantai sudah keramik, dinding dari batako. Kalau suami masih mengizinkan saya masih ingin kembali bekerja karena majikan saya baik dan cocok dengan cara kerja saya, sampai sekarang saya masih sering di tilpon disuruh kembali bekerja disana.” Kondisi yang dialami oleh responden senada dengan pendapat Mulyati yang menyatakan faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan migrasi karena kurang bervariasinya peluang kerja dan kesempatan berusaha khususnya di luar sektor pertanian; semakin sempitnya lahan pertanian; rendahnya upah tenaga kerja; keterbatasan sarana dan prasarana sosial; dan adanya perasaan lebih terpondasi bila dapat bekerja di kota serta tidak merasa cocok lagi dengan pola kehidupan di desa (Mulyati, 2013: 152). Merasakan realitas kehidupan sehari-hari yang dialami, atas persetujuan keluarga mereka memutuskan melakukan migrasi ke luar negeri yaitu ke Arab Saudi, Abu Dhabi, Qatar dan Kuwait, seluruh responden bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dengan harapan memperoleh penghasilan lebih banyak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pekerjaan yang ditekuni di luar negeri tidak terlepas dari tingkat pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki, dengan tingkat pendidikan yang sebagian rendah, mereka tidak mempunyai banyak alternatif untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendaki. Dari penjelasan responden, mereka harus menerima pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga meskipun pekerjaan tersebut di daerah asal dianggap sebagai jenis pekerjaan yang harus dihindari karena dianggap pekerjaan yang rendah. Namun pekerjaan ini diminati oleh responden karena gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang sama di daerah asal responden, dan adanya perasaan bangga dan lebih terpondasi karena mereka dapat bekerja di luar negeri, dengan gaji yang lebih tinggi dapat membantu suami mencukupi kebutuhan hidup keluarga bahkan dapat meningkatkan status kehidupan ekonomi keluarga.

Tingkat Pendidikan: Sebagian besar responden yaitu 14 orang (63,63 persen) berpendidikan sekolah dasar dan delapan orang (36,33 persen) berpendidikan SLTP. Ketidakmampuan mengakses pendidikan tinggi menjadi salah satu penyebab ketidakberdayaan mereka memperoleh pekerjaan yang layak. Dalam pendalaman lebih lanjut melalui wawancara, ternyata rendahnya pendidikan mereka berkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga yang relatif miskin ketika mereka masih berusia sekolah. Pada saat itu, mereka dibesarkan oleh keluarga petani tradisional yang memiliki pendidikan rendah bahkan tidak memiliki pendidikan sama sekali. Menurut pengalaman responden (YY, 26 tahun), banyak keluarga yang tidak memiliki pendidikan yang memadai serta mengalami keterbatasan ekonomi, sehingga penghasilan yang diperoleh hanya cukup bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari. Gambaran tentang kemiskinan yang dialami oleh keluarga responden senada dengan pendapat Sumodiningrat yang menyatakan kondisi keluarga miskin ditandai dengan: Pertama, jumlah rata-rata anggota keluarga rumahtangga miskin cenderung lebih besar dibanding jumlah rata-rata anggota keluarga tidak miskin; Kedua, rumah tangga miskin menanggung beban sosial ekonomi lebih besar dibanding rumahtangga tidak miskin; Ketiga, beban rumahtangga miskin di daerah perdesaan dalam memenuhi kebutuhan hidup lebih besar daripada rumahtangga miskin di daerah perkotaan; Keempat, tingkat pendidikan kepala rumahtangga miskin rendah; Kelima, penghasilan utama rumahtangga miskin di perdesaan bersumber pada kegiatan sektor pertanian (Sumodiningrat, 2000: 24).

Rendahnya tingkat pendidikan juga tidak memungkinkan bagi mereka mengakses informasi dari luar yang mampu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman hidup mereka. Oleh karena itu, informasi tentang pekerjaan sebagai tenaga kerja ke luar negeri lebih banyak diperoleh dari saudara yang terlebih dahulu menjadi migran ke luar negeri. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa tidak semua informasi awal mencari pekerjaan ke luar negeri

dilakukan melalui jalur yang benar seperti di kantor Dinsosnakertrans dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengerah tenaga kerja ke luar negeri yang bekerjasama dengan pemerintah. Sebanyak 77,27 persen responden yang mencari informasi tentang pendaftaran kerja ke luar negeri kurang memperhatikan status perusahaan pengerah tenaga tersebut, apakah sudah terdaftar di Dinsosnakertrans atau belum. Mereka juga tidak menanyakan lebih lanjut tentang persyaratan yang lebih rinci, prosedur pengiriman mulai dari pemberangkatan, penempatan dan kepulangan, mereka cenderung hanya menyerahkan sepenuhnya kepada petugas pengerah tenaga kerja tempat mereka daftar. Responden yang mencari informasi langsung kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Dinsosnakertrans sebanyak 22,73 persen, mereka adalah pencari kerja yang mengetahui prosedur pengiriman tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Alasan bekerja ke luar negeri: Perubahan peran dalam keluarga, maka dapat kita lihat fenomena yang terjadi mengenai peran perempuan yang tidak hanya sebagai ibu rumahtangga dan pengasuh anak namun juga menjadi pekerja membantu suami mencari nafkah, bahkan terkadang memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami. Peran perempuan bekerja tidak hanya dituntut bekerja mencari nafkah tetapi juga harus mampu mendidik dan berinteraksi dengan anak dan keluarga.

Demikian juga dengan responden, mereka beralasan memilih menjadi perempuan pekerja karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, kondisi yang demikian menjadi alasan responden memilih bekerja ke luar negeri. Dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa penghasilan yang diperoleh digunakan untuk biaya sekolah anak, dan merenovasi rumah yang layak (22,72 persen), merubah nasib agar kehidupan bertambah baik (27,27 persen), membantu suami mencari tambahan penghasilan (27,27 persen), membayar hutang (13,63 persen), ingin hidup mandiri agar tidak menjadi beban orangtua (4,54

persen), dan untuk modal membuka usaha (4,54 persen).

Alasan bermigrasi ke luar negeri sebagian besar karena alasan ekonomi, meskipun juga dijumpai alasan non-ekonomi yaitu ingin hidup mandiri dan mencari pengalaman kerja, diemukakan oleh responden yang belum menikah. Apabila dicermati lebih mendalam, baik alasan ekonomi maupun non ekonomi memiliki tujuan utama adanya perubahan, dalam arti keinginan mengubah hidup dari keluarga yang semula berada pada kondisi sosial ekonomi rendah sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan pekerjaan baru mereka berharap mampu mengubah dan meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga. Alasan ekonomi, ini senada dengan pendapat Titus dalam Kuntari yang mengemukakan bahwa motivasi untuk pindah atau melakukan migrasi karena motif ekonomi (Kuntari, 2010: 34).

Pekerjaan Responden Sebelum Bermigrasi: Sebelum menjadi pekerja migran, sebanyak 12 orang (54,54 persen) responden bekerja sebagai pembantu rumah tangga baik di Jakarta maupun di Kota Sukabumi, dua orang (9,11 persen) sebagai pelayan toko, satu orang (4,54 persen) sebagai tukang sayur dan tujuh orang (31,81 persen) tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga. Terdapat pengaruh antara pekerjaan, penghasilan dan pemenuhan kebutuhan keluarga, pekerjaan responden belum menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Bagi keluarga responden yang terpenting adalah setiap hari dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga, sedang dalam hal biaya sekolah anak, kebutuhan sandang dan papan belum dapat terpenuhi secara wajar. Berangkat dari kenyataan ini, responden atas persetujuan keluarga memutuskan mencari pekerjaan yang dianggap mampu meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dengan bekerja menjadi migran ke luar negeri. Pemahaman responden senada dengan pendapat Lee yang menyatakan pekerja migran mencari pekerjaan di wilayah manapun selama di wilayah tersebut mereka mendapatkan penghasilan yang

lebih tinggi (Lee, 2000: 5).

Pekerjaan Responden Sesudah Bermigrasi: Dari hasil wawancara dengan responden diperoleh penjelasan bahwa lima orang (22,73 persen) masih ingin melanjutkan pekerjaan sebagai pekerja migran di tempat yang sama dengan majikan yang sama, karena masih dianggap cocok dan tidak terjadi permasalahan dengan majikan. Sedang satu orang (4,54 persen) beralih pekerjaan dengan membuka warung di rumah, satu orang (4,54 persen) sebagai pelayan toko dan dua orang (9,11 persen) masih menunggu untuk diberangkatkan kembali menjadi tenaga kerja di Negara Arab dengan majikan yang sama. Tiga responden (13,63 persen) bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga yang membutuhkan jasanya, dan 10 orang (45,45 persen) kembali menjadi ibu rumah tangga.

Bagi responden yang kembali menjadi ibu rumah tangga mengemukakan beberapa alasan di antaranya ingin beristirahat karena usia sudah tua, tidak mau kembali menjadi pekerja migran karena sewaktu bekerja mendapat majikan yang keras, bahkan ada seorang pekerja migran yang pernah ditangkap pihak berwajib karena dituduh “mengguna-gunai” majikan, tetapi di pengadilan tidak terbukti sehingga responden tidak mendapat hukuman dan dilepaskan, dengan kejadian tersebut responden memilih pulang ke kampung dan merasa jera tidak lagi tertarik bekerja di luar negeri walaupun dijanjikan gaji tinggi. Responden yang menyatakan ingin kembali menjadi pekerja migran karena kondisi di daerahnya tidak memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji seperti gaji yang mereka peroleh sebagai pekerja migran. Revenstein menyatakan faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pekerjaan di daerah asal dan kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan. Daerah tujuan harus mempunyai nilai kefaedahan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah asal (Refenstein dalam Mantra, 1999:12).

Penghasilan Responden: Penghasilan responden sebagai pekerja migran bervariasi

tergantung dari kesepakatan antara penyalur dan majikan yang akan ditempati, juga tergantung di negara mana responden bekerja. Dari hasil wawancara dengan responden diperoleh penjelasan bahwa penghasilan yang diperoleh sebagai pembantu rumah tangga berkisar antara Rp1.500.000-Rp 2.000.000. Sebanyak tujuh orang (31,82 persen) berpenghasilan Rp 2.000.000, sedang sembilan orang (40,90 persen) berpenghasilan Rp 1.900.000, dan sisanya sebanyak enam orang (27,28) berpenghasilan antara Rp 1.500.000 sampai Rp 1.800.000. Perbedaan penghasilan dipengaruhi oleh adanya standart pengupahan yang ditetapkan oleh negara tujuan serta pengalaman dan lamanya waktu kerja.

Dibandingkan dengan penghasilan suami, gaji yang diperoleh responden relatif lebih tinggi, walaupun kehidupan dan beban kerja di negara penempatan juga relatif lebih berat. Dari hasil wawancara penghasilan yang diterima responden pada waktu menjadi pekerja migran, setelah mendapatkan gaji, sebagian dikirimkan ke keluarga. Dari hasil cross cek dengan suami responden PW (37 tahun) menyatakan, *dengan kondisi ekonomi kami yang kurang, saya menyetujui istri saya bekerja menjadi tkw di arab selama dua tahun, selama bekerja disana penghasilan yang diperoleh sebagian dikirimkan ke kampung untuk membantu mencukupi kebutuhan rumahtangga dan biaya sekolah anak, karena pekerjaan saya hanya sebagai buruh pabrik yang penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Alhamdulillah istri saya dapat membantu bahkan gajinya jauh lebih tinggi dari saya.* "Saat kami tanya mengenai keharmonisan hubungan suami istri, jawaban yang diberikan *"Wah masalah itu tidak menjadi masalah, yang penting orang berumah tangga saling percaya, dan saya tidak pernah berbuat yang aneh-aneh, kasihan istri saya sudah rela jauh dari anak dan suami demi membantu saya yang tidak mampu mencukupi kebutuhan rumahtangga, saya sudah terhibur dengan anak dan sering komunikasi lewat tilpon bagi saya sudah cukup"*. Pengiriman uang (remitan) ini selain berfungsi ekonomi juga berfungsi sebagai perekat ikatan

batin dalam keluarga. Merujuk pendapat Connel, remitan adalah pengiriman uang, barang bahkan ide-ide selagi migran berada di daerah lain atau di bawa ke daerah asal (Cornel dalam Kuntari, 2010: 35).

Penjelasan lebih lanjut diperoleh dari satu responden yang menyatakan bahwa penghasilan sebagai pekerja migran yang pernah dilakukan dua tahun sebelum wawancara ini dilakukan dipergunakan untuk modal usaha membuka warung dirumah, dampak yang terlihat adalah peningkatan kesejahteraan sosial keluarga dalam jangka panjang. Hasil wawancara dengan Bu DDH (47 tahun) menyatakan *"Saya bekerja di Abu Dhabi selama dua tahun, gaji yang saya peroleh Alhamdulillah sebagian dapat saya kumpulkan. Setelah pulang kampung uang tabungannya saya gunakan sebagai modal buka warung walaupun kecil, dan sekarang sudah semakin banyak dagangan saya, ya seperti yang ibu lihat sekarang"*. Responden lain menyatakan penghalannya dipergunakan untuk biaya sekolah, juga ada yang digunakan untuk merenovasi rumah dan membeli perabotan rumah tangga, serta ada yang digunakan untuk melunasi hutang keluarga. Besar kecilnya remitan yang dikirim kepada keluarga di daerah asal dapat menyumbang pendapatan keluarga. Dalam kaitan ini, Curson menyebutkan pengiriman remitan bertujuan untuk menyokong keluarga, dalam arti remitan yang dikirim disamping untuk mencukupi kebutuhan keluarga, juga untuk membayar hutang sendiri maupun keluarga dan digunakan sebagai investasi untuk berusaha, membeli ternak atau membeli tanah (Curson dalam Sakur, 1981: 23).

4. Perubahan Sosial Pada Struktur Keluarga Migran.

Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermanfaat. Ira kaufman menyatakan bahwa perubahan sosial sebagai

suatu proses yang berlangsung dalam struktur dan fungsi suatu sistem sosial (Ira Kaufman dalam Jusman, 1993: 3). Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya proses perubahan sosial yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari sistem sosial budaya keluarga dan masyarakat yang bersangkutan akibat adanya inovasi dalam bentuk ide, gagasan baru, atau peralatan baru. Faktor ekstern berasal dari luar sistem sosial budaya daerah asal migran yang dapat menyebabkan perubahan baik pada pranata keluarga maupun masyarakat.

Menurut Mulyadi, faktor intern yang menjadi penyebab adanya perubahan sosial bagi pekerja migran seperti munculnya gagasan melakukan migrasi. Kesulitan ekonomi, terbatasnya lapangan kerja dan menyempitnya lahan pertanian menjadi latar belakang munculnya gagasan untuk melakukan migrasi, dengan harapan dapat membawa perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Faktor ekstern yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial karena adanya kontak, komunikasi dan interaksi dengan budaya luar yang kemudian dibawa, dianut dan diterapkan dalam kehidupan keluarga di daerah asal.

Bentuk perubahan sosial yang diharapkan pada keluarga yang salah satu anggota keluarganya menjadi pekerja migran adalah perubahan yang membawa keuntungan terhadap kehidupan sosial ekonomi yaitu peningkatan taraf kesejahteraan sosial keluarga. Namun pada sisi lain perubahan sosial dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan sosial keluarga berupa keterlantaran anak, kasus perceraian, perselingkuhan dan kasus pekerja migran yang mendapat perlakuan tidak manusiawi oleh majikan maupun oleh agen penyalur tenaga kerja (Yad Mulyadi, 1999: 63).

Kepergian istri ke luar negeri menjadi pekerja migran menyebabkan terjadinya perubahan mendasar pada struktur keluarga. Perubahan yang terjadi di antaranya adalah perubahan peran pengasuhan anak, perubahan pemberian kesempatan bersekolah, perubahan hubungan kasih sayang dalam keluarga, perubahan hubungan

sosial dengan masyarakat, dan perubahan kondisi ekonomi keluarga.

Perubahan peran pengasuhan anak: Peran pengasuhan anak sebelum istri menjadi migran lebih banyak dilakukan oleh ibu (90,90 persen) walaupun tidak mengesampingkan peran ayah dalam pengasuhan dan pengawasan terhadap anak, dan dua orang (9,10 persen) tidak mempunyai tanggungan anak. Saat istri masih di rumah peran ayah lebih banyak sebagai pencari nafkah, dan pengasuhan anak lebih banyak dilakukan oleh ibu, sehingga interaksi emosional antara anak dan ibu terjalin dengan baik, kondisi seperti ini akan menyebabkan anak merasa mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang utuh walaupun dalam keterbatasan ekonomi. Interaksi timbal-balik antara orangtua dan anak menimbulkan keakraban dalam keluarga. Anak terbuka kepada orangtua, sehingga komunikasi bisa dua arah dan segala permasalahan dapat dipecahkan bersama karena adanya kedekatan dan kepercayaan antara orangtua dan anak. Interaksi sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, ibu yang sering berinteraksi lebih mengetahui perkembangan anak dibandingkan dengan ibu yang tidak sering berinteraksi (Agustinus, dalam Widayanti, 2008: 226).

Pada saat istri menjadi migran bekerja ke luar negeri, anak di bawah pengasuhan ayah dan dalam pengasuhan nenek (72,72 persen), dalam pengasuhan keluarga lain yang masih ada hubungan darah (18,18 persen). Informasi yang diperoleh selama istri bekerja diluar negeri, strategi yang ditempuh adalah menyerahkan tanggung jawab pengasuhan anak kepada suami, nenek dan keluarga terdekat. Tiga orang responden (13,63 persen) menyebutkan kepergian ibu bekerja di luar negeri berdampak kurang baik bagi perkembangan anak karena terjadi kesenjangan komunikasi dan merenggangnya interaksi fisik antara anak dan orangtua, anak menjadi kurang mendapat perhatian yang berakibat anak lebih senang bermain bersama teman sebaya daripada berada dirumah bersama nenek yang sudah tua. Kondisi ini lebih disebabkan kurangnya kebersamaan dan keterlibatan ibu dalam pengasuhan

anak. Hasil wawancara dengan anak responden KN (16 tahun), *“Saat mamak bekerja di luar negeri, saya dirumah dengan bapak dan kakak perempuan, mungkin karena saya laki-laki dan kebetulan saya lebih dekat dengan mamak jadi saat mamak pergi saya merasa tidak punya teman apalagi sore hari saya merasa kesepian ditinggal mamak, saya sering pergi main dengan teman-teman paling nongkrong di warung atau di rumah teman, saat itulah saya mengenal rokok dan sampai sekarang walaupun mamak sering marah tapi saya belum bisa meninggalkan rokok, maaf mak uangnya habis untuk beli rokok.”* Permasalahan yang dialami ketiga responden ternyata tidak sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soetjiningsih yang menyatakan interaksi tidak ditentukan berapa lama kita bersama anak, tetap lebih ditentukan oleh kualitas dari interaksi tersebut yaitu pemahaman terhadap kebutuhan masing-masing dan upaya optimal untuk memenuhi kebutuhan yang dilandasi oleh rasa saling menyayangi (Soetjiningsih, 1995).

Setelah istri tidak lagi bekerja di luar negeri, pengasuhan anak kembali dilakukan oleh ayah dan ibu. Dalam melakukan pengasuhan anak, lebih banyak mengadopsi pola pengasuhan yang dilakukan oleh majikan pada saat responden menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri, yaitu pola pengasuhan anak menjadi lebih demokratis. Hasil wawancara dengan responden yang masih mempunyai tanggungan anak, dalam hal pengasuhan mereka lebih bersikap realistis terhadap kemauan anak untuk mengembangkan kemampuannya, walaupun dalam batas kemampuan orangtua. Dengan pola asuh seperti ini responden berharap anak menjadi mandiri, bertanggung jawab terhadap masa depannya dan dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial tanpa mengalami hambatan. Pendapat responden senada dengan pendapat Hurlock yang menyatakan perkembangan sosialisasi sangat penting dan perlu diperhatikan dalam mendidik anak. Perkembangan sosialisasi yang dimaksud adalah kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan, mengerti keadaan

lingkungan dan mempengaruhi dalam perilaku baik kepada dirinya maupun terhadap orang lain (Hurlock, 1998: 27). Sosialisasi pada anak sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga dan lingkungan anak tumbuh dan berkembang. Tempat anak menghabiskan waktu sehari-hari sangat menentukan perkembangan sosialisasi anak tersebut (Berns dalam Widayanti, 2013: 224).

Perubahan Pemberian Kesempatan Sekolah: Hasil wawancara dengan semua responden yang memiliki anak sekolah (90,90 persen) diperoleh penjelasan, dengan minimnya penghasilan keluarga membuat mereka merasa kesulitan membiayai sekolah anak walaupun biaya sekolah gratis, tetapi untuk biaya pembelian buku, seragam sekolah, transportasi dan uang saku masih menjadi beban bagi responden. Setelah terbukanya kesempatan mereka bekerja ke luar negeri ternyata telah menguatkan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap pemenuhan ekonomi, termasuk dalam hal menanggung biaya sekolah anak. Hasil wawancara dengan responden EN (29 tahun), diperoleh penjelasan bahwa perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran di daerahnya setelah pulang ke tanah air kebanyakan telah berubah pola berfikirnya dalam hal pendidikan anak. Lebih lanjut dijelaskan yang semula menganggap walaupun anak disekolahkan akan tetap sulit mendapatkan pekerjaan, tetapi sekarang menganggap bahwa pendidikan bukan semata-mata untuk mencari pekerjaan, tetapi mencari ilmu sebagai bekal kehidupan di masa depan. Suatu keluarga yang sudah berdaya dapat mengandalkan sekolah-sekolah untuk mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi masa depan mereka, mewarisi dunia yang lebih baik (R. Wirjana, 2008: 97).

Tanggung jawab responden sebagai orangtua sejalan dengan pendapat Gunarso yang menyatakan fungsi keluarga tidak hanya sebatas fungsi reproduksi penerus generasi, tetapi juga meliputi fungsi ekonomi, pendidikan, sosial dan rekreasi. Dalam fungsi ekonomi, keluarga harus dapat menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi seluruh anggota keluarga. Dalam fungsi pendidikan, orangtua wajib mengembangkan

intelektualitas anak baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Dalam fungsi sosial dan rekreasi, keluarga berperan memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan menjalin silaturahmi untuk mempererat ikatan emosional baik antaranggota keluarga maupun dengan lingkungan sosial (Gunarso, 1986: 3).

Perubahan hubungan kasih sayang dalam keluarga: Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan di luar rumah bahkan sampai ke luar negeri menyebabkan waktu yang tercurah untuk menjalin hubungan kasih sayang baik dengan suami ataupun anak menjadi sangat terbatas. Keterbatasan waktu untuk menjalin interaksi dengan anggota keluarga menempatkan mereka pada posisi dilematis, karena tanpa bekerja kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi. Sebaliknya, dengan bekerja ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama disatu sisi perempuan lebih mandiri dan mampu memberi sumbangan pada perbaikan ekonomi keluarga, namun disisi lain kewajibannya sebagai istri yang wajib melayani suami dan sebagai ibu yang berkewajiban mengasuh anak menjadi terabaikan.

Terlebih bagi ibu yang masih mempunyai anak balita, seperti YY (26 tahun) saat memilih menjadi pekerja migran ke Arab Saudi masih memiliki anak berusia empat tahun, dia memilih bekerja dibandingkan hanya mengasuh anak di rumah tetapi mengalami keterbatasan ekonomi, dengan mengambil resiko terjadi kerenggangan hubungan interaksi dengan anak. Agar anak tidak kehilangan kasih sayang dan figur seorang ibu maka selama bekerja pengasuhan anak diserahkan kepada nenek, walaupun tidak mengesampingkan peran ayah sebagai orang yang berkewajiban mengasuh anak selama ibu tidak berada di rumah. Salah satu hak anak adalah untuk dicintai dan dilindungi. Anak memerlukan kasih sayang dan perlakuan yang adil dari orangtuanya, agar dikemudian hari menjadi anak yang tidak sombong dan memberi kasih sayang pula kepada sesama (Soetjningsih, 1995). Hasil wawancara dengan Bu Eng (56 tahun) “YY saat akan bekerja ke Arab meminta ijin pada saya, dan menitipkan anak yang waktu itu baru berusia empat tahun.

Yah karena ingin mencari uang ya saya iijinkan, dan DDN anak YY saya bawa ke rumah, saya asuh sampai ibunya pulang, ya untungnya DDN tidak pernah sakit, hanya flu biasa. Selama DDN saya asuh, suami YY setiap sabtu sore datang mengambil DDN dibawa pulang, tapi minggu sore diantar lagi ke rumah karena suami YY bekerja sebagai tukang dan hanya minggu dia libur sehingga dapat mengasuh DDN.”

Perubahan hubungan sosial dengan masyarakat: Pola hubungan sosial dapat bersifat positif dan negatif. Bersifat positif apabila hubungan sosial dapat mempererat jalinan atau solidaritas antaranggota keluarga maupun dengan masyarakat di lingkungannya. Sebaliknya, hubungan sosial yang bersifat negatif adalah hubungan yang justru dapat merenggangkan jalinan atau solidaritas keluarga dan masyarakat yang telah terbangun dengan baik. Secara fisik pengambilan keputusan responden menjadi pekerja migran telah menurunkan intensitas interaksi responden dengan tetangga di sekitarnya, di antaranya mereka tidak lagi dapat melaksanakan kewajiban sosial seperti melayat, pertemuan dasa wisma, menghadiri upacara pernikahan dan upacara adat di desa. Relasi sosial menjadi renggang karena faktor geografis dan jarak sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik sebagaimana saat para responden belum bekerja ke luar negeri.

Dari hasil wawancara dengan responden ibu DDH (36 tahun), diperoleh penjelasan “*Saya lebih memilih untuk bekerja walaupun harus ke Arab demi membantu suami mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Masalah hubungan sosial seperti menghadiri undangan manten, melayat ataupun kegiatan sosial lain yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat disini, masih bisa dilakukan suami, dan masyarakat memaklumi karena di kampung ini banyak ibu-ibu yang bekerja ke Arab. Tapi pas saya sudah di rumah, ya, saya kembali seperti semula, bergaul dengan lingkungan masyarakat seperti semula.*” Responden lebih memilih sementara mengabaikan interaksi sosial dengan masyarakat dan lebih memilih memprioritaskan kelangsungan hidup

keluarga, namun pada saat pulang karena kontrak kerja yang sudah habis hubungan sosial terjalin kembali dengan baik. Bila mengacu dari hasil wawancara dengan responden maka hal tersebut sesuai dengan pendapat Gizman yang menyatakan bahwa keberfungsian keluarga dilihat dari kemampuan: Dalam melaksanakan peran sosial, memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah yang dihadapi keluarga serta kemampuan dalam melaksanakan tugas kehidupan (Gizman dalam Heru Sukoco, 2000: 9).

Terdapat keyakinan di kalangan responden, bahwa dengan membaiknya kondisi ekonomi keluarga akan diikuti dengan perubahan kehormatan di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, nilai kesejahteraan sosial tidak hanya direfleksikan dalam bentuk kemampuan keluarga dalam melaksanakan peranan dan fungsi sosialnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan jumlah kepemilikan kekayaan, melainkan juga adanya keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dalam komunitas serta adanya peningkatan status sosial di mata masyarakat.

Perubahan kondisi ekonomi keluarga:

Pada umumnya para pekerja migran perempuan mengaku mengalami perubahan dalam aspek kesejahteraan ekonomi. Hasil wawancara dengan seluruh responden bahwa ternyata sebanyak 86,37 persen mengalami kesulitan ekonomi sebelum mereka memutuskan menjadi pekerja migran ke luar negeri. Dengan penghasilan suami yang relatif kecil mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga secara wajar, seperti pemenuhan gizi pada anak, pendidikan anak, dan biaya perbaikan rumah dan mengganti perabotan rumah yang sudah tidak layak. Namun setelah menjadi pekerja migran remitan yang dikirimkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu menjadi 90,90 persen, hal ini dinyatakan oleh responden bahwa sebelum menjadi pekerja migran kondisi rumah mereka masih menggunakan anyaman bambu sekarang sudah berhasil membangun rumah dengan menggunakan batu bata, peralatan rumah tangga yang cenderung sudah modern (mempunyai kulkas, perabotan rumah tangga

lebih baik) dan sudah mampu membiayai sekolah anak. Hasil yang diperoleh selama menjadi pekerja migran ternyata habis untuk keperluan konsumtif, hanya ibu RDY (42 tahun) yang mampu membuka usaha warung di rumah sehingga penghasilan yang diperoleh dari bekerja di luar negeri tidak habis untuk biaya yang bersifat konsumtif. Pendapat yang dikemukakan Kuntari yang menyatakan remitan yang dikirim kepada keluarga mampu mempengaruhi kondisi kesejahteraan keluarga, berupa adanya perubahan dalam taraf hidup keluarga seperti terpenuhinya pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis sehingga dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga (Kuntari, 2010: 37).

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan: Kemiskinan yang dialami keluarga responden mengakibatkan mereka hidup dalam status sosial pada strata lapisan paling bawah (miskin dan kurang sejahtera), tidak mau terkukung dalam kemiskinan, mereka berkeinginan mencari penghidupan yang lebih baik. Upaya untuk merubah status sosial mereka ke arah status sosial yang lebih tinggi dengan melibatkan perempuan mencari nafkah dengan bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran. Menjadi pekerja migran ternyata mampu membawa perubahan sosial dalam keluarga. Perubahan sosial yang berhubungan dengan jenis kelamin adalah terjadinya pergeseran pada pranata keluarga terutama peran dan fungsi keluarga yang diperankan oleh suami dan istri. Perubahan ekonomi terlihat dari adanya perubahan tingkat kesejahteraan fisik keluarga sebagai hasil remitansi pekerja migran ke luar negeri. Dengan adanya perubahan tersebut mampu mengangkat status sosial mereka di mata masyarakat.

Perubahan sosial dalam hal hubungan sosial dengan masyarakat disekitarnya, selama menjadi pekerja migran responden secara fisik tidak lagi dapat mengikuti kegiatan sosial yang ada di masyarakat, namun secara ekonomi tidak dapat lepas dari tanggungjawab sebagai masyarakat seperti tetap melayat, memberi kado saat ada hajatan walaupun yang datang hanya suami atau

diwakilkan pada keluarga yang tinggal di rumah. Namun setelah pulang ke tanah air, hubungan sosial kembali terjalin seperti sebelum menjadi migran.

Perubahan sosial juga terjadi pada pola hubungan suami istri yang tidak lagi berdasarkan peranan tradisional, dengan perubahan ini hubungan suami istri menjadi setara, demikian juga perubahan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin adalah terjadinya pergeseran peran dan fungsi keluarga yang diperankan oleh suami dan istri. Dengan pendapatan yang diperoleh responden merasa lebih mandiri, tidak lagi banyak tergantung pada suami dan lebih percaya diri dalam memutuskan suatu persoalan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan persoalan ekonomi. Dengan kepergian istri ke luar negeri dalam jangka waktu lama juga, mempunyai resiko terganggunya hubungan pribadi antara suami dan istri. Demikian juga dengan aspek lainnya seperti pengasuhan anak, pemberian kasih sayang, dan perlindungan menjadi terganggu. Peranan ibu yang selama ini menjadi kunci utama dalam memberikan pendidikan, perlindungan kepada anak, juga hubungan kasih sayang yang biasanya lebih banyak dilakukan oleh ibu yang mempunyai hubungan emosional khusus dengan anak, kemudian harus diserahkan kepada ayah dan nenek dengan pola pengasuhan yang berbeda, bagi anak akan sangat sulit dan tidak mudah menerima perubahan ini, sehingga anak menjadi kecewa dan merasa ditinggalkan baik dalam pendidikan dan maupun pengasuhan. Namun setelah istri kembali ke tanah air, baik pola hubungan relasi antara suami dan istri maupun peran ibu akan kembali berubah, responden juga banyak mengadopsi pola pengasuhan anak dari majikannya dengan pola pengasuhan yang lebih demokratis.

Rekomendasi: Berkait dengan hasil penelitian ini, maka direkomendasikan kepada Kementerian Sosial dan Dinas terkait sebagai berikut. Pertama, dalam rangka mengatasi dampak yang dihadapi keluarga pekerja migran, pemerintah beserta instansi terkait seyogyanya berupaya memberdayakan eks-pekerja migran agar dapat

mengelola pendapatannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi tanpa harus pergi ke luar negeri, dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Kedua, upaya yang memungkinkan dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk pelayanan terpadu antarinstansi terkait dalam melakukan kegiatan dapat melibatkan pendamping sosial yang bertugas mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pelayanan sosial bagi para eks pekerja migran. Upaya ini sebagai dasar bagi terbentuknya kelompok kerja (pokja), selanjutnya pokja tersebut perlu diberdayakan dengan menumbuhkan semangat keswadayaan dan kewirausahaan, sehingga hasil kerja sebagai migran ke luar negeri dapat dimanfaatkan menjadi penggerak tumbuhnya usaha bersama dan mampu menjadi sumber penghasilan di daerah asal, kegiatan ini dilakukan dengan pemberian bimbingan keterampilan yang berorientasi pada kebutuhan pasar. Ketiga, perlu dibentuk suatu Forum Paguyuban Pekerja Migran di daerah asal dibawah pengawasan dan pembinaan dari Unit Pelayanan Terpadu yang terdiri dari beberapa instansi yang terkait. Fungsi dari forum ini adalah sebagai wadah yang dapat digunakan untuk menampung dan mengatasi berbagai permasalahan sosial yang dihadapi pekerja migran dan eks pekerja migran, yang selanjutnya dapat dilakukan penanganan oleh instansi yang berwenang.

Pustaka Acuan

- Bernardine R Wirjana. (2008). *Mencapai Masa Depan Yang Cerah, Pelayanan Sosial yang berfokus pada anak*. Yogyakarta: Yayasan Sayap Ibu.
- Dwi Heru Sukoco. (2000). *Makalah Fungsi-fungsi Pekerjaan Sosial*. Bandung: BDPTS.
-, (2013). *Data dan Informasi kemiskinan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
-, (2013). *Kabupaten Sukabumi dalam angka*. BPS Kota Sukabumi.
- Elizabeth B Hurlock. (1998). *Psikologi perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Everret S. Lee. (2000). *Teori Migrasi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Gunawan Sumodiningrat. (2000). *Pembangunan daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

- Ikawati Dkk. (2009). *Penanganan Eks Tenaga Kerja Indonesia di Daerah Asal*. Yogyakarta: Citra Media.
- Ida Bagus Mantra. (1995). *Mobilitas Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat penelitian kependudukan, Universitas Gajah Mada.
- Jusman Iskandar. (1993). *Strategi Dasar Membangun Kekuatan Masyarakat*. Bandung: Koperasi STKS.
- Lia Mulyati. (2013). *Pembelajaran Study Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Muhajir Darwin. (2003). *Pekerja Migran dan Seksualitas*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Perda No 3 tahun 2009 tentang *Penggerakan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri*.
- Singgih D Gunarso. (1986). *Psikologi untuk keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia
- Sakur. (1988). *Mobilitas penduduk dan remitan study kasus di Desa Nguter Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Soetjiningsih. (1995). *Tumbuh kembang anak*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Satori & Aan Komariah. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sri Kuntari. (2010). *Kontribusi Remitan Migran Sirkuler Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga*. Yogyakarta: Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol IX, No 31 Maret 2010.
- Sutaat dkk. (2011). *Pendamping sosial bagi calon pekerja migran dan keluarganya di daerah asal: studi masalah dan kebutuhan*. Jakarta: P3KS Press.
- Wiwik Widayanti. (2013). *Menjaga Pola Interaksi Sehat antara Ibu Bekerja dan Anak Ketika Memasuki Day Care*. Yogyakarta: Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol 37 No 3 September 2013.
- Titus, Milan J. (1978). *Migrasi antar daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga kependudukan UGM.
- Yad Mulyadi. (1999). *Antropologi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Faktor yang Mempengaruhi Anak Bekerja

The Influential Factors of Children to Work

Ikawati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).

Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta. Nomor telpon: (0274) 377265.

Email: <ikawati.susaty@yahoo.com>. Diterima 16 Februari 2015, direvisi 16 Maret 2015, disetujui 15 April 2015.

Abstract

This research is to analysis the influential factors children to work and its impact on their physical, psychical, and social condition, and its contribution on economic and social, including family, community, and government efforts on stemming the number of working children. This research is qualitative descriptive, research location determined purposively in West Java, East Java, West Nusa Tenggara. Research subjects are children working abroad that happen having vacation in their villages. Based on purposive determination, it is found 30 children as samples. Data gathered through interview, focus group discussion, observation, and documentary analysis. Data are analyzed through qualitative-descriptive technique. The research finds that the causal factors of children to work are the condition of parent education and their low income, and the number of many family members that should be held, and family in harmony. The impact of children working is delaying their growth, physically, psychologically, and socially. The contribution of children work is increasing the social and economy of the family, such as income and schooling members of the family, and increasing members of the family in social activity. Some family, community, and government efforts to stem the number of working children are sending the children until primary school, diffusing information on the important of children education, monitoring on learning time, forming learning group, looking for reference on school grant, making data on children drop out, giving work skills, giving entrepreneur capital for family with vulnerable economy, monitoring on identity card faking, and limiting working letter to children under age. Some of the government effort to stem the number of working children are, nine-year schooling obligation program, electronic identification card, issuing regulation on the protection of working children and law measurement on children traffickers. It is recommended for the Ministry of Social Affairs through the Directorate of Violent Victims of Migrant Workers on poor family empowerment program, that in sending migrants workers areas based on local potential, children committing in work should be prevented.

Keywords: *Working Children; Causal Factors*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak bekerja, dampaknya terhadap kondisi fisik, psikis, sosial anak, dan kontribusinya terhadap ekonomi dan sosial, serta upaya keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam menekan jumlah anak bekerja. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ditentukan secara purposif di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Subyek penelitian adalah anak yang bekerja di luar negeri dan secara kebetulan sedang berada atau libur di desanya, berdasarkan teknik purposif ditemukan 30 anak. Pengumpulan data menggunakan wawancara, FGD, observasi dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab anak bekerja adalah kondisi tingkat pendidikan orangtua dan penghasilan yang rendah serta jumlah tanggungan orangtua yang banyak dan adanya ketidakharmonisan keluarga. Dampak anak bekerja dapat menghambat tumbuh kembang mereka, baik secara fisik, psikis dan sosial. Kontribusi anak bekerja adalah meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial keluarganya, seperti peningkatan penghasilan, dapat menyekolahkan anggota keluarga, dan meningkatnya keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan sosial. Upaya keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam menekan jumlah anak bekerja antara lain keluarga telah menyekolahkan anak (tamat SD), mengadakan penyuluhan tentang pentingnya tumbuh kembang anak, pemantauan jam belajar anak, membentuk kelompok belajar, mencari rujukan bea siswa, pendataan anak putus sekolah, memberikan keterampilan kerja, modal usaha kepada keluarga rawan sosial ekonomi, memantau terjadinya pemalsuan KTP, dan membatasi memberikan surat keterangan bekerja bagi anak yang masih di bawah usia. Upaya pemerintah dalam menekan jumlah anak yang bekerja antara lain, wajib belajar sembilan tahun, kartu penduduk sistem elektronik, penerbitan peraturan tentang perlindungan anak yang bekerja dan penindakan hukum bagi pelaku *trafficking*. Rekomendasi yang diajukan pada Kementrian Sosial RI melalui Direktorat Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran dalam program pemberdayaan keluarga miskin di daerah asal pekerja migran (PM) berbasis potensi local, agar dapat tercegah keterlibatan anak yang bekerja.

Kata kunci: Masalah-Anak-Bekerja

A. Pendahuluan

Anak seharusnya dapat menikmati masa kanak-kanak dan remaja dengan bersekolah, bermain dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam naungan kasih sayang keluarga. Namun kenyataannya tidak sedikit kita jumpai anak-anak yang tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menikmati masa kanak-kanak dan remaja dengan bahagia, bahkan tercerabut dari lingkungan keluarga yang disebabkan dorongan ekonomi maupun kekerasan dalam keluarganya.

Banyaknya anak putus sekolah berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi dan pemahaman orangtua tentang perlunya pendidikan bagi masa depan anak (St. Sularto, 2000). Kesulitan finansial keluarga terutama keluarga miskin mengakibatkan meningkatnya jumlah anak putus sekolah secara signifikan meningkat juga jumlah anak yang harus bekerja, kesulitan diatas juga dapat mengakibatkan menurunnya status gizi dan kesehatan. Kondisi ini juga dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah prostitusi yang dilakukan anak, karena mereka belum siap berkompetitif dalam dunia kerja, yang disebabkan kurang pengalaman, pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang dimiliki anak, sehingga mereka harus bekerja menjadi pekerja seks komersial yang tidak memerlukan persyaratan tertentu. Ledakan pengangguran yang berpendidikan menengah kebawah (SMP-SD) merupakan makanan empuk bagi para majikan di sektor ekonomi, karena mampu menekan pasar tenaga kerja dengan upah murah. Kondisi tersebut dikarenakan rendahnya pendidikan, terbatasnya kemampuan dan ketrampilan sehingga gaji yang didapatpun juga rendah. Krastawan (1992) mengatakan bahwa wujud keterlibatan anak dalam dunia kerja formal maupun informal terjadi hampir pada semua kasus ekonomi dan pemerintah harus mengakui bahwa anak bekerja merupakan akibat dari "*pembangunan*" itu sendiri, sehingga standar upah minimal yang diterapkan di Indonesia masih di bawah standar, hal ini membuktikan bahwa problem kemiskin-

an di masyarakat lapisan paling bawah belum terpecahkan.

Masyarakat miskin pada awalnya ingin memperbaiki ekonomi, atas dasar motivasi tersebut, maka mereka terdorong untuk mengadu nasib ke kota-kota besar bahkan ke luar negeri, dengan dalih mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan masa depan yang lebih cerah. Ironisnya banyak kasus orangtua atau kerabat menyerahkan anaknya kepada para calo atau agen yang berkeliling desa, karena dijanjikan akan dibayar hutang-hutangnya yang melilit keluarganya, apabila anaknya mau dicarikan kerja dan juga "*diiming-imingi gaji besar*".

Lilitan utang pada keluarga miskin biasanya diciptakan oleh agen/calo tenaga kerja, mucikari dan lain-lain terhadap anak dan keluarganya. Sistem ini sengaja diciptakan guna menjerat si anak untuk tetap bekerja secara paksa, akibatnya anak tersebut semakin sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaannya baik sebagai pelacur, pelayan toko, perawat bayi, perawat lanjut usia, pembantu rumah tangga baik yang bekerja didalam negeri maupun luarnegeri.

Pengiriman pekerja migran ke luar negeri merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan di tanah air, sehingga dapat merubah tingkat kesejahteraan keluarganya melalui remitansi dan sumber devisa negara. Namun demikian ada problem yang mendasar yang dihadapi oleh para pekerja migran kita di luar negeri. Perundang-undangan kita belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pekerja migran diluar negeri agar bisa nyaman bekerja dan mendapat perlindungan hukum. Menurut Galuh Endar dkk (Ikawati, 2008) dalam penelitiannya menemukan penyebab banyaknya masyarakat menjadi tenaga kerja wanita antara lain desakan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, keinginan untuk mendapat honor yang lebih tinggi dan dorongan dari pihak luar yang sudah berhasil. Dibalik pengiriman pekerja tersebut keluar negeri selain dapat memecahkan masalah diatas, banyak masalah-masalah

yang dihadapi mereka di daerah tujuan seperti gaji tidak dibayarkan, dipenjara, disiksa, bunuh diri karena tidak tahan terhadap permasalahan yang dialaminya. Kondisi tersebut dapat terjadi dikarenakan pengiriman tenaga kerja mempunyai sumber daya manusia yang rendah, sehingga hanya dapat mengisi sektor informal yang berisiko sangat tinggi (Depnakertrans, 2007). Menurut Nina Karinina dan Sri utami (2005) mengatakan bahwa ada beberapa faktor holistik yang berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja atau pekerja migran salah satunya yang mendasar faktor ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang rendah menjadi pendorong mencari peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi dengan cara bekerja keluar negeri.

Aktivitas mobilitas penduduk yang berlangsung memunculkan dampak nyata, terutama pada kehidupan migran, keluarga migran dan masyarakat di sekitarnya. Pada skala mikro berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan keluarga, berubahnya perilaku konsumtif keluarga, terjadinya mobilitas sosial melalui perubahan status sosial ekonomi keluarga migran yang ditujukan dari pemilikan rumah dan benda-benda berharga lainnya merupakan salah satu hal nyata yang mudah dilihat. Pada skala yang lebih luas, aktivitas mobilitas penduduk juga secara tidak langsung ikut mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan perilaku masyarakat yang ditandai dengan perubahan perilaku konsumtif dan berkembangnya kehidupan ekonomi di sekitar daerah migran. Perubahan-perubahan fisik juga tidak dapat dilepaskan dari remitan yang dihasilkan.

Aktivitas migrasi yang dilakukan juga membutuhkan biaya sosial yang sangat tinggi seperti terjadi disintegrasi keluarga dan ketidakharmonisan hubungan antar generasi. Disintegrasi keluarga yang ditandai dengan banyaknya kasus perceraian dan keretakan di dalam keluarga. Mobilitas penduduk mengakibatkan munculnya berbagai dampak positif maupun negatif oleh karena itu dampak positif perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dan dampak negatif dapat dikurangi atau dihilangkan. Khusus dengan

dampak ekonomi perlu dipikirkan kebijakan penggunaan remitan yang tidak selalu ke aspek konsumtif, tetapi ke aspek ekonomi produktif sekalipun mulai dengan skala usaha yang kecil. Dari yang kecil diharapkan dapat berkembang sehingga menjadi diversifikasi usaha, atau menambah kesempatan kerja, atau mengurangi pengangguran yang muaranya meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yaitu apa faktor yang mempengaruhi anak bekerja? Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor penyebab anak bekerja, dampaknya terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial anak dan kontribusinya terhadap ekonomi dan sosial keluarganya, serta mengetahui upaya keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam menekan jumlah anak bekerja. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran dalam program pemberdayaan keluarga miskin di daerah asal pekerja migran (PM).

B. Penggunaan Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang ada di lapangan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, fenomena yang diselidiki (Arikunto, 2002). Pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini akan memberi pemaknaan tentang fakta yang ditemukan di lapangan melalui prosentase dan kemudian pemaknaan tersebut akan disimpulkan untuk dipakai sebagai bahan penyusunan saran dan tindakan (Nawawi dan Martini, 1996). Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, berdasarkan daerah yang banyak menyumbangkan pekerja migran ke luar negeri. Pertama, Provinsi Jawa Barat, yaitu di desa Bongas kecamatan Bongas, kabupaten Indramayu dan di desa Tugu, kecamatan Sliyeg, kabupaten Indramayu dan di desa Cipurut, kecamatan Cireungas, kabupaten Sukabumi; Kedua, Provinsi Jawa Timur, yaitu di Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dan Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, kabupaten

Malang; Ketiga, Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu di kelurahan Praya, kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah dan Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Data primer diperoleh dari informan yaitu orang yang dipandang dapat memberikan keterangan tentang obyek yang akan diteliti (Moleong, 2000), dalam penelitian ini yakni anak yang bekerja di luar negeri dan secara kebetulan sedang berada atau libur di desa dijadikan sampel. Teknik penentuan sampel adalah purposif jumlahnya 30 orang. Sasaran obyek penelitian adalah faktor-faktor penyebab anak bekerja, dampaknya terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial anak dan kontribusinya terhadap ekonomi dan sosial keluarga.

Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam terhadap sampel, untuk menghindari tidak terjawabnya suatu pertanyaan dan biasanya digunakan untuk sampel yang tingkat pendidikannya rendah. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan digunakan apabila sampel yang diamati tidak terlalu besar jumlahnya. Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini adalah non-partisipan yaitu peneliti tidak ikut terlibat tetapi hanya sebagai pengamat independen, dengan cara mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat dibuat kesimpulan tentang apa yang diamati. Good, dkk. (Sutrisno Hadi, 2000) mengemukakan, bahwa teknik ini dipilih agar peneliti mampu membuat kesimpulan tentang apa yang diamatinya dan juga untuk mengecek kebenaran data yang dikumpulkan. Telaah dokumen digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumentatif sebagai sumber data yang nantinya dapat untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan (Moleong, 2000). Telaah dokumen dapat melengkapi teknik wawancara dan observasi (Sudjono, 1998). Diskusi kelompok dipergunakan untuk memperoleh data primer melalui diskusi dengan LSM yang peduli terhadap penanganan anak bekerja yang rawan menjadi korban *trafficking*, instansi terkait dan melalui forum ini didapatkan masukan yang komprehensif yang

berkaitan dengan masalah anak bekerja yang rawan terjadinya *trafficking*.

Data dianalisis dengan mempergunakan deskriptif-kualitatif dan interpretatif (persentase) yaitu penggambaran tentang obyek yang diteliti, kemudian dikaitkan dengan tujuan penelitian untuk dipakai mendapatkan kesimpulan yang nantinya sebagai rekomendasi atau tindakan (Nawawi dan Martini, 1996)

C. Hasil dan Pembahasan Faktor Penyebab Anak Bekerja)

1. Faktor-Faktor Penyebab Anak Bekerja

Salah satu tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor penyebab anak bekerja, berdasarkan temuan di lapangan maka faktor-faktor penyebab tersebut adalah kondisi tingkat pendidikan ayah dan ibu yang rendah (<SMP yaitu 83 persen -100 persen). Pendidikan orangtua yang rendah menyebabkan mereka mempunyai keterbatasan dalam mendapat peluang kerja ada sekitar 26-47 persen yang mengalami hal tersebut. Temuan di atas didukung oleh temuan dari Musni Umar (2011) bahwa pencari kerja yang tidak memiliki kepakaran, keahlian, ketrampilan dan tingkat pendidikan yang tidak memadai, maka akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan yang didapat hanya terbatas, maka akan berpengaruh terhadap besarnya penghasilan orangtua yaitu kurang dari 300 ribu ada sebanyak 67-83 persen, penghasilan yang terbatas akan semakin terasa berat, apabila jumlah tanggungan orangtua juga banyak, tampak dalam penelitian ini ditemukan jumlah tanggungan orangtua yang lebih dari 3 orang 80 persen. Data tersebut didukung hasil penelitian dari Hugo (Abdul Haris, 2002) bahwa penyebab seseorang mobilitas untuk mencari kerja di luar daerah asal dikarenakan kondisi ekonomi. Perbedaan kondisi ekonomi yang ada di daerah asal dan daerah tujuan (Goma, 1993). Dengan kata lain migrasi terjadi apabila dua wilayah mempunyai perbedaan kefaedahan yaitu daerah asal dan daerah tujuan (Mantra, 1999). Sedangkan menurut Utama (1994) faktor penyebab seseorang, mobilitas besar-besaran, karena ada

ketimpangan dalam faktor ekonomi yang bersifat selektif seperti perbedaan upah yang sangat menyolok.

Keterbatasan ekonomi dalam keluarga berdampak terhadap kesejahteraan keluarganya, seperti terjadi ketidakharmonisan seperti pertengkaran kadang-kadang sering terjadi (70 persen), terjadi kekerasan fisik orangtua kepada anak (73 persen) dan terjadinya hubungan yang tidak baik antara anak dan orangtua (70 persen). Menurut Suyanto (2003) kenyataan di masyarakat tidak semua orangtua dapat melakukan kewajibannya, seperti hubungan yang ada tidak serasi dalam keluarga, disharmoni, ketegangan, kekerasan. Surya Mulandar (1996) juga menemukan bahwa kurang-harmonisan dalam hubungan keluarga, kondisi orangtua seperti di atas yang menyebabkan anak harus terjun ke dunia kerja. Selain kondisi orangtua tersebut yang dapat menyebabkan anak bekerja adalah kondisi anak sendiri antara lain keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan anak harus putus sekolah, artinya anak mempunyai tingkat pendidikan yang terbatas (tidak tamat SD sampai dengan tidak tamat SMP ada sebanyak 50 persen) dan yang 50 persen adalah tidak tamat SLTA sampai dengan tamat SLTA. Kurangnya pemahaman keluarga akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan ada suatu anggapan bahwa anak merupakan aset ekonomi keluarga serta peluang untuk bekerja atau tenaga anak guna membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Effendi Tadjuddin Noer (1992), bahwa anak-anak yang bekerja dikarenakan kemiskinan orangtuanya, kondisi ini bila berlarut-larut maka banyak anak yang menjadi korban *trafficking*. Hasil tersebut juga diperkuat dengan hasil temuan Mariana Amiruddin (2008) bahwa feminisasi kemiskinan, pengangguran kronis dan kurangnya kesempatan ekonomi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perdagangan anak dan perempuan.

Dalam penelitian ditemukan usia anak pada waktu bekerja dibawah 18 tahun ada sebanyak 90 persen. Bekerja diusia muda tentu saja kepemilikan ketrampilan kerja juga terbatas, dari 30 responden ditemukan yang tidak mempunyai

ketrampilan kerja ada sebanyak 70 persen, maka pekerjaan anakpun yang didapat juga terbatas biasanya ada di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, pelayan restoran, perawat lansia atau anak dan buruh pabrik. Jenis-jenis pekerjaan yang didapat tersebut yang rawan, berbahaya, merendahkan dan kotor, dikarenakan tidak adanya keahlian atau ketrampilan, sehingga para calo tenaga kerja mengincar melalui penipuan atau sesuatu pembayaran yang disepakati (Amiruddin, 2008). Nuryana (2005) di dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa permasalahan yang dihadapi tenaga kerja perempuan antara lain minimnya keterampilan teknis sebagai persyaratan tentang ketentuan pokok pemerintah. Kondisi yang menyebabkan anak harus bekerja antara lain agar orangtua tidak merasa terbebani anak, maka anak dinikahkan pada usia muda dengan harapan dapat membantu adik-adiknya, hampir semua responden dinikahkan pada usia kurang dari 18 tahun (100 persen). Selain dinikahkan di usia muda, agar orangtua tidak terbebani, persyaratan kerja ke luar negeri biasanya seseorang yang sudah menikah, sehingga anak dipaksa menikah guna kepentingan mencari kerja. Perkawinan yang tidak dilandasi cinta dan ketidaksiapan secara mandiri tentunya dapat berakibat buruk bagi anak antara lain terjadi perceraian (55 persen), Hubungan kurang sampai dengan tidak baik antara suami-istri (70 persen) dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga kadang-kadang sampai dengan sering ada sebanyak 80 persen. Data tersebut diatas diperkuat temuan yang dilakukan oleh Musni Umar (2011) bahwa perempuan yang sudah berkeluarga dan harus meninggalkan rumahtangganya dengan waktu yang lama, maka akan rawan terjadi ketidakharmonisan. Kondisi orangtua dan kondisi anak diatas yang menyebabkan orangtua memperkerjakan anak atau anak terjun ke dunia kerja.

2. Dampak Anak Bekerja terhadap Kondisi Fisik Psikis dan Sosial

Hasil temuan pada penelitian ini adalah diketahuinya dampak anak bekerja terhadap

kondisi fisik, psikis dan sosialnya, berdasarkan hasil temuan di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa anak yang bekerja pada usia muda, maka anak tersebut ada pada posisi rentan dan apabila anak harus bekerja, maka akan dapat menghambat perkembangan kepribadiannya dan pada akhirnya dapat menghambat tumbuh kembangnya (Sumadi Suryabrata, 1982; Asril Aini, 1982). Menurut Brechendrige dan Vincent (Ikawati 2003), mengatakan “Apabila seorang anak harus bekerja berat, maka kondisinya pada umumnya akan lemah, karena pekerjaan yang ringanpun bila dikerjakan terus-menerus dalam waktu yang lama, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tubuh dan psikososialnya.” Dampak tersebut dapat terlihat apabila anak bekerja dalam waktu yang lama, ternyata anak bekerja lebih dari sembilan jam sehari, dari 30 responden yang mengalami hal tersebut ada 70 persen.

Anak sangat membutuhkan istirahat, bermain dengan teman sebaya, memperoleh pendidikan, semua itu harus dipenuhi oleh anak, apabila karena bekerja sehingga kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, akibatnya anak terhambat tumbuh kembangnya. Anak bekerja pada usia muda, maka keterbatasan pendidikan, wawasan dan keterampilan kerja juga terbatas, sehingga anak dalam melakukan pekerjaan banyak melakukan kesalahan. Kondisi ini yang memicu kejengkelan majikan yang pada akhirnya anak kadang-kadang sampai dengan sering mendapatkan perlakuan kasar dan tindak kekerasan di tempat kerja (100 persen). Bentuk tindak-tindak kekerasan tersebut bersifat fisik, psikis dan sosial. Menurut Suyanto (2003), anak bekerja merupakan fenomena terjadinya *trafficking* karena telah terjadi terabainya hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal.

Anak yang bekerja sangat lemah dan rentan terhadap kondisi kesehatannya, dalam penelitian ini dapat dilihat frekuensi sakit anak dalam satu bulan ternyata, dari 30 responden ada lebih lima kali ke dokter (67 persen). Sakitnya bervariasi yaitu pusing kepala, maag, sakit perut, asam urat, flu dan bahkan ada yang terkena penyakit

kelamin. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 10 tahun 1987 bahwa jam kerja bagi anak yaitu empat jam dalam sehari, apabila lebih dari itu dan melebihi ambang batas yang dapat ditolerir, maka dapat berdampak pada kondisi fisik, psikis dan sosialnya (Irwanto, dkk 1999), sedangkan Sumadi Suryabrata (1982) mengemukakan bahwa apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, berdampak pada terhambatnya perkembangan kepribadiannya. Usia anak bekerja sangat rentan terhadap berbagai hal yang negatif seperti terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa mereka kadang-kadang sampai sering ditawari narkoba (63 persen), Irwanto, dkk (1999) menemukan bahwa seorang anak yang terpaksa bekerja rawan terhadap eksploitasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa yang mengeksploitasi adalah orangtuanya sendiri (100 persen) yaitu melalui jerat hutang dari agen pencari kerja, orangtua rawan terhadap eksploitasi, salah-satunya terhadap terjerumusnya dalam penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan uang muka dari agen, nanti anaknya yang membayar dengan bekerja. Jeratan hutang tersebut dari agen kepada orangtuanya dan biasanya dipergunakan untuk membeli tanah, memperbaiki atau beli rumah, kendaraan.

Anak bekerja, menerima uang dan ada pemotongan upah yang katanya untuk biaya orangtua di daerah asal (70 persen), tidak digaji beberapa bulan alasan untuk biaya keberangkatan (18 persen), tidak diberi kebebasan berhubungan dengan orang lain, teman dan keluarga (70 persen) dan pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan (57 persen). Kondisi ini sangat memprihatinkan, kadang orangtua tidak tahu perlakuan yang didapat anak di tempat kerja, tetapi orangtua selalu menuntut anak untuk selalu mengirim hasil kerjanya, baik melalui kiriman langsung maupun melalui jeratan hutang dari agen pencari kerja. Semua yang dirasakan anak ditempat kerja tidak dihiraukannya, asal keluarganya bahagia dan sejahtera. Kondisi di atas menurut Debora Imelda, dkk (2004) menemukan persamaam dan perbedaan dengan sistem *ijon*

di bidang pertanian dan di perdagangan orang atau manusia atau *trafficking* antara lain melalui jeratan hutang kepada keluarga calon yang akan diperkerjakan. Dalam krisis ekonomi keluarga, tidak ada salahnya memanfaatkan anak untuk bekerja (Mohamad Farid, 1999).

3. Kontribusi Anak Bekerja terhadap Ekonomi dan Sosial keluarganya

Salah satu tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi anak bekerja terhadap kondisi ekonomi dan sosial keluarganya, berdasarkan data di lapangan maka temuan dalam penelitian bahwa kontribusi anak bekerja terhadap keluarganya baik secara ekonomi maupun sosial tidak dapat dipungkiri, hal ini dapat dilihat tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya di daerah asal, sehingga menyebabkan perputaran uang menjadi lebih cepat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat disekitarnya (*multi-player effect economy*). Kegiatan ekonomi yang ditimbulkan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu, yang lebih penting adalah kontribusi terhadap kondisi ekonomi dan sosial keluarganya. Dalam penelitian ini ditemukan kondisi ekonomi keluarga seperti peningkatan penghasilan yang dulunya kecil bahkan tidak punya penghasilan, setelah anaknya bekerja ke luar negeri penghasilannya dapat mencukupi keluarganya. Hal tersebut di lapangan dapat dilihat dalam peningkatan penghasilan yaitu yang dulunya kurang dari 300 ribu per bulan kemudian lebih dari satu juta (80 persen dari 30 responden). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa pekerja migran anak mampu membawa perubahan terutama ekonomi dengan berbagai konsekuensi negatif dan positif (Sunit ATC, dkk, 2010). Hasil anak bekerja juga dapat menabung secara rutin (70 persen), dari penghasilannya tersebut dapat mempunyai roda dua (100 persen), kendaraan roda empat (40 persen), untuk beli rumah (60 persen), tanah (33 persen) dan perhiasan (80 persen). Penghasilan yang didapat responden juga dapat memberikan modal untuk keluarganya (40 persen), untuk modal suami (30 persen) dan untuk modal anaknya (20

persen). Semua kebutuhan sehari-hari keluarganya juga dapat dipenuhi (80 persen).

Kontribusi sosial dampak anak bekerja dalam penelitian ini ditemukan, responden bisa menyekolahkan anak (33 persen), menyekolahkan kakaknya (17 persen) dan adiknya (20 persen). Dengan penghasilan responden ternyata mampu memberikan kontribusi pada keluarganya yaitu ikut terlibat dalam kegiatan sosial (100 persen), yang dulunya tidak pernah dilakukannya dikarenakan waktunya habis untuk mencari nafkah. Kegiatan sosial lainnya seperti menengok keluarga dan tetangga yang sakit dan membantu keluarga dan tetangga yang membutuhkan. Data yang ditemukan di lapangan ini juga didukung penelitian Ikawati, dkk (2009) yang menemukan bahwa sebelum pekerja migran anak bekerja ke luar negeri akses keluarga untuk melakukan kegiatan sosial kurang dimiliki, tetapi setelah bekerja dengan kontribusi secara ekonomi melalui remitan kepada keluarganya, maka keluarga dapat melakukan fungsi sosial di masyarakat.

4. Upaya Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah dalam Menekan Jumlah Pekerja Anak

a. Upaya Keluarga dalam Menekan Anak Terjun ke Dunia Kerja

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga melakukan imigrasi, dengan harapan dapat mencari pekerjaan yang lebih baik, sehingga dapat membayar hutang dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak atau baik. Informasi tentang bekerja baik di dalam atau luar negeri dengan upah atau gaji yang tinggi mendorong mereka untuk bermigrasi dengan perhitungan yang matang, akibatnya mereka terperangkap para calo atau penipu tenaga kerja (*trafficker*) yang menjadikan sebagai korban *trafficking*. Perdagangan manusia bukan suatu hal yang baru di muka bumi ini dengan makin beradabnya manusia, perbudakan tidak kemudian berhenti atau hilang, tetapi beralih menjadi perdagangan pada jenis manusia yang dilemahkan yaitu perempuan dan anak.

Kondisi keluarga yang miskin mendesak dan memaksa anaknya untuk tidak melanjutkan sekolah dikarenakan tidak ada biaya, akibatnya anak terpaksa bekerja dengan bekal tingkat pendidikan yang rendah, walaupun demikian keluarga telah menunjukkan upaya dalam menekan jumlah anak bekerja, antara lain melalui pemberian pendidikan di bangku sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari kepemilikan tingkat pendidikan responden (SD tamat, 13 persen), sedangkan yang mengatakan SLTP tidak tamat 5 orang (17 persen), SLTP tamat 6 orang (20 persen), SLTA tidak tamat 8 orang (27 persen) dan SLTA tamat 7 orang (23 persen). Kondisi tersebut dapat dimaknai bahwa orangtua sudah berupaya agar anak mendapat bekal pendidikan walaupun sebatas kemampuan mereka yaitu nampak terlihat yang tidak tamat SD tidak ada dan rata-rata pernah mengenyam bangku sekolah walaupun hanya sampai SLTA. Data di atas diklarifikasikan pada orangtua responden ternyata ada beberapa statemen yang mendukung data tersebut antara lain: "Saya menyekolahkan anak cukup bisa baca dan tulis saja sudah cukup, minimal anak saya sekolahkan hingga tamat SD sudah cukup." "Saya punya banyak anak, agar semua dapat sekolah, ya, gantian dengan adik-adiknya cukup lulus SD minimal." "Saya membekali anak sekolah minimal SMP, biar gantian dengan adik-adiknya yang penting anak saya tidak bodoh." "Saya sekolahkan anak saya sampai SLTA, agar mudah dapat cari kerjanya." "Saya hanya mampu menyekolahkan anak sampai dengan lulus SMP saja."

Menurut Aswarni Sudjud (1999), masa anak merupakan masa strategis sekaligus kritis. Strategis, karena masa ini merupakan masa peka untuk memperoleh stimulan dan pembelajaran yang memungkinkan anak dikondisikan memperoleh keberhasilan di dalam kelompoknya. Kritis, apabila terjadi salah asuh dapat menyebabkan gangguan perkembangan atau pembelajaran yang pada akhirnya terganggu perkembangan selanjutnya. Pada kaitan di atas keluarga telah berupaya menyekolahkan anak dan tampak tidak ada yang tidak sekolah.

b. Upaya Masyarakat dalam Menekan Anak Bekerja

Penyuluhan Sosial tentang Pentingnya Memberi Pendidikan Anak: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak berserta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari penelantaran, kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah atau negara (Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). Berdasarkan hal tersebut, masyarakat wajib melakukan kegiatan dalam rangka perlindungan anak antara lain telah dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang pentingnya memberi pendidikan anak, dengan maksud orangtua dapat memahami pentingnya anak bersekolah, sehingga dapat mencegah tidak terjadi pemaksaan anak bekerja demi membantu ekonomi keluarga. Dari 30 responden yang mengatakan rutin mendatangi penyuluhan tersebut, ada 10 orang (33 persen), yang mengatakan apabila perlu saja mendatangi penyuluhan, 9 orang (30 persen) dan responden yang mengatakan tidak pernah mendatangi 11 orang (67 persen). Data tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat telah berupaya melakukan agar jumlah anak yang bekerja dapat dicegah, untuk dapat melihat manfaat penyuluhan tersebut bagi orangtua responden dapat diklarifikasikan pada statemen sebagai berikut.

"Saya setelah dapat pengetahuan melalui pertemuan di RW tentang anak harus disekolahkan, maka saya berusaha anak disekolahkan walaupun hanya sampai SD." "Saya berusaha menyekolahkan anak sampai SLTA, agar anak punya bekal nantinya di masyarakat." "Saya tahu bahwa anak harus sekolah di balai desa, saat itu saya sekolahkan anak-anak saya, walaupun hanya sampai SLTP."

Pemantauan Jam Belajar: Upaya masyarakat dalam menekan jumlah anak bekerja telah dilakukan melalui pemantauan jam belajar anak

yaitu antara jam 18.00–21.00, tujuan diadakan pemantauan tersebut antara lain agar anak bisa konsentrasi belajar sehingga tidak bermasalah dalam proses belajar, anak tidak terpengaruh perilaku yang tidak baik di sekitarnya, anak dapat lancar sekolahnya (naik kelas) serta memotivasi anak lain untuk melakukan kegiatan belajar. Data tersebut dapat digambarkan, 30 responden yang mengatakan ada pemantauan, 12 orang (40 persen), yang mengatakan kadang ada pemantauan 8 orang (27 persen) dan yang mengatakan tidak pernah dipantau 10 orang (33 persen). Data tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat telah mengupayakan penekanan jumlah anak bekerja melalui pemantauan jam belajar, diharapkan anak-anak tidak terhambat proses belajar dan dapat memotivasi anak terus bersekolah. Data tersebut diklarifikasikan pada responden yang mendukung temuan di atas antara lain: “Saya merasa ada yang memperhatikan belajar bila ada pemantauan.” Saya tidak enak bila jam belajar, saya tidak belajar.” “Saya merasa terdorong untuk belajar selama ada aturan waktu belajar.” “Mau tidak mau saya harus membiasakan bahwa pada waktu jam belajar tidak pergi dan harus belajar.” “terdorong untuk belajar selama ada aturan waktu belajar.” “Mau tidak mau saya harus membiasakan bahwa pada waktu jam belajar tidak pergi dan harus belajar.”

Mencarikan kepada Instansi Terkait untuk Beasiswa: Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, terutama dalam mencegah jumlah anak yang bekerja tentunya dapat melihat apa yang telah terjadi di sekitar atau lingkungannya seperti telah terjadi banyaknya anak yang dipaksa orangtuanya bekerja. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat telah berupaya mencegah timbulnya anak yang karena sesuatu hal harus bekerja, dari 30 orang yang mengatakan sering mencari rujukan apabila ada anak yang tidak bersekolah, 3 orang (10 persen), yang mengatakan kadang-kadang melakukan rujukan 6 orang (20 persen) dan yang mengatakan belum pernah rujukan 21 orang (70 persen). Data tersebut setelah diklari-

fikasikan dengan responden (masyarakat, tokoh masyarakat, kader, tokoh ulama, tokoh adat), ada beberapa yang mendukung data tersebut antara lain: “Rujukan biasa dilakukan ke instansi terkait apabila ada warga atau orangtua yang menelantarkan anaknya tidak diperbolehkan sekolah, dan harus bekerja.” “Rujukan dilakukan bila lingkungan sudah tidak bisa mengatasi, maka dimintakan bantuan ke instansi terkait.” “saya membantu mencari rujukan apabila anak memang memerlukan, agar anak dapat sekolah dengan tenang biaya gratis.” “selama lingkungan sekitar dapat membantu permasalahan anak, maka kami tidak merujuk ke instansi lain, karena masalah dapat diselesaikan antar RT/RW dengan swasembada.”

Melakukan Pendataan kepada Anak Putus Sekolah: Efektivitas dalam memecahkan permasalahan anak terutama dalam menekan jumlah anak yang bekerja dilakukan pendataan kepada anak-anak yang putus sekolah, kemudian ditindaklanjuti dengan suatu aksi agar anak tercegah dalam dunia kerja. Gambaran ini dapat dilihat dalam temuan di lapangan, 30 orang yang mengatakan ada pendataan 10 orang (33 persen), setelah diklarifikasikan dengan salah satu responden ada yang mengatakan “Biasanya saya melakukan pendataan kepada anak-anak putus sekolah yang dikarenakan keterbatasan ekonomi saja.” yang mengatakan tidak ada pendataan 20 orang (66,67 persen), salah satu responden yang mendukung data yang ditemukan tersebut dengan statemen berikut. “Saya tidak melakukan pendataan, karena bila perlu saja atau mendesak bila ada permasalahan anak putus sekolah.”

Memberi Ketrampilan Kerja dan Modal Usaha bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi: Keterbatasan ekonomi keluarga, menyebabkan orangtua harus memaksa anak tidak lagi sekolah karena harus membantu ekonomi keluarganya. Masyarakat berupaya membantu melalui keluarga atau orangtuanya dengan pemberian ketrampilan kerja dan modal usaha pada keluarga rawan sosial ekonomi, dengan harapan pemberian keterampilan mampu meningkatkan

penghasilan keluarga yang pada akhirnya dapat membiayai sekolah anak-anaknya. Data tersebut dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini, dari 30 responden yang mengatakan diberikan secara rutin 5 orang (17 persen), yang mengatakan tidak rutin 6 orang (20 persen) dan yang mengatakan tidak pernah ada kegiatan pemberian keterampilan dan modal usaha kepada keluarga rawan sosial ekonomi 19 orang (63 persen). Data tersebut setelah diklarifikasikan pada responden ada beberapa yang menyatakan: “Keterampilan bengkel yang pernah diberikan kepada saya cukup membantu ekonomi keluarga saya.” “Saya pernah menanyakan kepada Pak Lurah, kenapa saya tidak pernah diikuti dalam pelatihan, tetapi jawabannya nunggu giliran atau bertahap.”

Memantau Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP): Pemalsuan KTP sebelum ada KTP elektronik sangat marak terjadi, biasanya dibuat untuk memalsukan usia anak (< 18 tahun) menjadi usia kerja (>18 tahun) atau sesuai permintaan perusahaan yang akan ditempati kerja. Pembuatan KTP melalui elektronik salah satunya berlaku *on line* artinya terdata di seluruh Indonesia dan apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja akan terpantau

c. Upaya Pemerintah dalam Menekan Anak Terjun ke Dunia Kerja

Wajib Belajar Sembilan Tahun: Upaya pemerintah melalui wajib belajar (pembebasan uang SPP) yang telah dilakukan untuk mengurangi adanya siswa putus sekolah (*drop out*), tetapi kenyataannya masih tetap banyak yang tidak sekolah. Kondisi tersebut menurut pengamatan peneliti dikarenakan kemiskinan, sehingga keluarga miskin sangat sulit menyekolahkan anak, walaupun ada pembebasan uang SPP, tetapi mereka juga tetap harus mengeluarkan uang untuk membeli buku, uang saku, uang transpot bila jarak sekolah dengan rumah jauh. Selain hal tersebut masih ada anggapan masyarakat bahwa anak adalah potensi keluarga untuk dapat membantu mencari nafkah keluarganya, maka anak tidak bisa menolak harus patuh

terhadap orangtuanya sehingga anak harus terjun ke dunia kerja. Apabila wajib belajar sembilan tahun dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka angkatan kerja usia 10 -14 tahun akan berangsur-angsur berkurang, karena proporsi yang melanjutkan sekolah akan semakin besar sehingga akan berdampak pada pengurangan angkatan kerja pada usia tersebut.

Wajib belajar sembilan tahun diselenggarakan agar anak di keluarga miskin atau tidak mampu mempunyai akses terhadap pendidikan, apabila perlu wajib belajar ditentukan tanpa biaya artinya mereka dibebaskan dari semua pengeluaran pendidikan. Wajib belajar diperkuat dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat 1 tentang setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Pertama, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Melalui Sistem Elektronik (EKTP). Sistem elektronik salah satunya bertujuan untuk mencegah seseorang mempunyai KTP di beberapa tempat dan mencegah anak dibawah umur melakukan pekerjaan buruk serta mencegah aparat dapat melakukan pemalsuan identitas terutama usia, status perkawinan dan alamat.

Kedua, Peraturan Perundang-undangan: Banyaknya anak terjun ke dunia kerja salah satunya telah terjadi pemalsuan usia, agar anak bisa diterima kerja, karena apabila tidak dipalsukan akan terkena sanksi yang tertulis dalam undang-undang yang mengatakan bahwa seseorang yang masih berusia kurang dari 18 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan yaitu dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002, Undang-undang ketenagakerjaan tahun 2003 dan Undang-undang nomor 20 tahun 1999 tentang pengesahan ILO *Convention nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) dan Undang-undang nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO nomor 189 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 11 bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam pengembangan diri. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak harus dilakukan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan peraturan perundang-perundangan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut maka undang-undang tentang perlindungan anak harus berazaskan non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Azas dalam undang-undang tersebut telah dijabarkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 14 tentang setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan aturan hukum syah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam undang-undang tentang perlindungan anak menyatakan bahwa kewajiban kita semua dalam melaksanakan perlindungan anak. Pasal 26 ayat 1 mengatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua dalam perlindungan anak antara lain mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minat serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 juga menjabar perlindungan anak melalui kewajiban

tanggungjawab masyarakat yaitu melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 25).

Kewajiban tanggung jawab negara dan pemerintah dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 dijabarkan dalam pasal 20, 21, 22, 23 dan pasal 24 tentang pengawasan menjamin penyelenggaraan perlindungan anak. Selanjutnya pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah dan lain-lain. Pada ayat 1 dan ayat 2, apabila orangtua, wali atau pengasuhan anak melakukan segala bentuk perlakuan (ayat 1 diatas), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Perundang-undangan Ketenagakerjaan menurut Menaker RI, SE-12/M/BM tahun 1997 tentang larangan anak bekerja lebih dari 4 jam, apalagi di sektor yang berbahaya. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 memperkuat larangan tersebut yaitu anak yang berusia 13-15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan yang ringan apabila ada izin tertulis orangtua atau wali, waktu kerja maksimal tiga jam dan dilakukan di siang hari serta tidak mengganggu sekolah, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan adanya hubungan yang jelas penerimaan upah.

Upaya yang dilakukan masyarakat guna menekan jumlah anak bekerja antara lain memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan bagi anak kepada keluarga yang rawan memperkerjakan anak, ternyata masyarakat sangat peduli terhadap permasalahan pekerja anak terlihat dalam temuan di lapangan dari 30 responden, rutin mendatangi penyuluhan ada 33 persen dan masih ada 67 persen yang kadang-kadang tidak pernah mendatangi Upaya masyarakat juga melakukan pemantauan jam belajar anak, agar anak dapat konsentrasi dan lancar sekolahnya sehingga anak termotivasi un-

tuk sekolah dari pada bekerja dari 30 responden ada 40 persen, sedangkan masih ada 60 persen yang mengatakan kadang-kadang- tidak pernah memantau jam belajar anak.

Masyarakat juga membentuk kelompok belajar secara rutin 30 persen dari 30 responden yang melakukan hal tersebut, sedangkan masih ada 70 persen yang tidak membentuk kelompok belajar. Upaya masyarakat dalam rangka menekan jumlah anak bekerja antara lain mencari rujukan seperti bea siswa dari 30 persen 10 persen dari 30 responden, masyarakat juga telah melakukan pendataan kepada anak-anak yang putus sekolah ada sebanyak 33 persen dari 30 responden dan upaya masyarakat juga memberikan ketrampilan kerja, baik secara rutin (17 persen) maupun tidak rutin (20 persen) dari 30 responden dan masyarakat memberikan modal usaha kepada keluarga yang rawan sosial ekonomi (63 persen), masyarakat juga memantau terjadinya pemalsuan KTP (26 persen) dari 30 responden dan masyarakat juga membatasi memberikan surat keterangan untuk bekerja bagi anak usia di bawah 18 tahun. Upaya yang dilakukan pemerintah/instansi terkait dalam menekan jumlah anak yang bekerja antara lain wajib belajar sembilan tahun, kartu penduduk sistem elektronik, penerbitan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang bekerja dan penindakan hukum bagi orang-orang pelaku *trafficking*

D. Penutup

Kesimpulan: ditemukan faktor-faktor penyebab anak bekerja adalah kondisi tingkat pendidikan orangtua, penghasilan yang rendah serta jumlah tanggungan orangtua yang banyak, dan adanya ketidakharmonisan dalam keluarga. Dampak anak bekerja dapat menghambat tumbuh kembangnya baik secara fisik, psikis dan sosial. Kontribusi anak bekerja yaitu meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial keluarga, seperti peningkatan penghasilan, dapat menyekolahkan anggota keluarga, dan meningkatnya keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan sosial. Upaya keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam

menekan jumlah anak bekerja antara lain, keluarga telah menyekolahkan anak (tamat SD), masyarakat melalui kegiatan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan anak, pemantauan jam belajar anak, membentuk kelompok belajar, mencari rujukan beasiswa, pendataan anak putus sekolah, memberi ketrampilan kerja, modal usaha kepada keluarga rawan sosial ekonomi, memantau terjadinya pemalsuan KTP dan membatasi memberikan surat keterangan bekerja bagi anak di bawah usia. Upaya pemerintah dalam menekan jumlah anak bekerja, antara lain wajib belajar sembilan tahun, kartu penduduk sistem elektronik, penerbitan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang bekerja dan penindakan hukum bagi pelaku *trafficking*.

Rekomendasi: Berdasarkan temuan hasil penelitian direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Korban Tindak-Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran dalam program pemberdayaan keluarga miskin di daerah asal pekerja migran (PM) berbasis potensi lokal agar dapat mencegah keterlibatan anak yang bekerja, melalui program-program dengan pendekatan holistik komprehensif kepada anak yang terpaksa bekerja melalui pendidikan formal yaitu program wajib belajar yang telah dicanangkan pemerintah, sehingga dapat member waktu anak agar dapat belajar dan sedikit bekerja. Pendidikan non-formal perlu dilakukan untuk kemampuan keterampilan dan kreatifitas anak yang nantinya dapat untuk bekal masa depannya. Keluarga yang rawan memperkerjakan anak perlu adanya pemberdayaan baik dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, sehingga keluarga mendapat penghasilan yang pada akhirnya anak dapat mencegah tidak terlibat dalam dunia kerja. Masyarakat dapat sebagai mediator dalam penyampaian informasi tentang pentingnya hak anak dan perlindungannya, sehingga masyarakat juga peduli dan ikut berpartisipasi dalam pencegahan terjadinya keterlibatan anak dalam dunia kerja

Pustaka Acuan

- Asril Aini. (1982). *Anak Yang Terpaksa Bekerja dan Masalahnya*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM dan BP3K Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Aswari Sujud. (1999). *Beberapa Aspek Perkembangan Anak dan PAUD*. Yogyakarta: PSW, UII.
- Arikunto, S. (2002). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). (2007). *Pekerja Migran dalam Perspektif Hukum Indonesia – Malaysia*. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.
- Effendi, Tadjuddin Noer. (1992). *Buruh Anak Phenomena di Kota dan Pedesaan*. Seminar Nasional. Jakarta Indonesia: Kerjasama Pusat Pembinaan SDM (PPSM) Yayasan Tenaga Kerja Indonesia dan Friedrich Ebert-stifing.
- Farid, M. (1999). *Kekerasan Seksual, Eksploitasi Seksual dan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak*. Jakarta.
- (1999). *Anak Yang Dilacurkan di Indonesia*. Semarang
- Goma, Johana Naomi. (1993). *Mobilitas Tenaga Kerja Flores Timur ke Sabah Malaysia dan Pengaruhnya terhadap Daerah Asal : Studi Kasus Desa Neleren, Kecamatan Adonaru, Kabupaten Flores Timur*. Yogyakarta: UGM.
- Haris, Abdul. (2002). *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta Dibalik Migrasi Orang Sasak Ke Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nawawi, H dan Martini, M. (1996). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ikawati dkk. (2003). *Uji coba Pola Pencegahan Hilangnya Masa Perkembangan pada Pekerja Anak*. Yogyakarta: B2P3KS.
- . (2008). *Pekerja Migran dan Permasalahan Suatu Studi Kasus di Lombok Tengah NTB*. Yogyakarta: Jurnal penelitian Kesejahteraan sosial Vol.VII, Nomor 25 september 2008.
- . (2009). *Penanganan Eks Tenaga Kerja Indonesia di Daerah Asal*. Yogyakarta: Citra Media.
- Irwanto, dkk. (1999). *Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Indonesia*. Analisis Situasi kerjasama PKPM Unika Atmajaya. Jakarta: Depsos RI UNICEF.
- Johana Debora Imelda, dkk. (2004). *Utang Selilit Pinggang: Sistem Ijon dalam Perdagangan Anak dan Perempuan*. Yogyakarta: Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Krastawan, W. (1992). *Buruh Anak pada Sektor Tradisional*. Seminar Nasional. Kerjasama Pusat Pembinaan SDM (PPSM) dan Yayasan TKI dan Friedrich Ebert. Stifing (FES). Jakarta.
- Mantra, Ida Bagoes dkk. (1999). *Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia: Studi Kasus Flores Timur, Lombok Tengah dan Pulau Bawean*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Mantra, Ida Bagoes, (1999). *Mobilitas Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Mariana Amirudin. (2008). *Wilayah Tertinggal Migrasi dan Perdagangan Manusia*. Jurnal Perempuan nomor 59. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Moleong, Lexy, J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Nuryana, Mukman. (2005). *Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Wanita Indonesia Perjalanan Pekerja Migran Indonesia dari Desa Hingga Negara Tujuan*. Jakarta: Litbangkesos, Departemen Sosial.
- Karinina, N dan Sri Utami. (2005). *Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Wanita Indonesia: Permasalahan Pekerja Migran Perempuan di Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Pusat Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial.
- Sudjana, (1998). *Statistik*. Bandung: Tarsito.
- Sularto, St. (2000). *Seandainya Aku Bukan Anakmu*. Jakarta : Kompas.
- Sumadi, Suryabrata. (1982). *Hubungan antara Perkembangan Pribadi dan Keterlantaran*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi dan BP3K Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sunit, ATC dkk. (2010). *Perubahan Sosial dalam Struktur Keluarga Migran Domestik dan Lintas Negara pada Penduduk Miskin di Pedesaan*. Yogyakarta: B2P3KS PRESS.
- Surya Mulandar. (1996). *Dehumanisasi Anak Marjinal*. Bandung: Yayasan Akatiga 4 Gugus Analisis.
- Sutrisnohadi. (2000). *Metodologi Research*. Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suyanto, Bagong. (2003). *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*. Surabaya: Litfansah
- Suyanto, Bagong. (2003). *Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Komersial anak Perempuan*. Jurnal Perempuan nomor 29. Edisi Mei 2003. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Utama Bey Sapta. (1994). *Migrasi dan Pembangunan Daerah di Indonesia*. Dalam Warta Demografi, tahun ke 24 nomor 3.

Pengetahuan Masyarakat tentang Penyebaran HIV/AIDS

People Knowledge on HIV/AIDS

Soetji Andari

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1, Telpun (0274) 377265. E-mail soetjiandari@gmail.com.
Diterima 20 Oktober 2014, direvisi 30 Maret 2015, disetujui 3 Mei 2015.

Abstract

The highest number of people living with HIV/AIDS are of childbearing age. The cumulative proportion of people living with HIV/AIDS in Yogyakarta is located at the level of 20-29 years of age. High activity in this age group makes a lot of productive risky sexual behavior. In the number of persons over the last ten years has increased tenfold. The research is meant to find out about people's knowledge on the spread of HIV/AIDS in Yogyakarta. This study used is descriptive method, a research procedure that produces descriptive data in the form of words written or spoken by persons or behavior that being observed. This research is directed at the background of the individual in holistic and detail description on the phenomena of various things about the knowledge of the various groups on HIV/AIDS. The results of the study shows that there are many who do not know the transmission mode of this virus. They do not know how the disease is transmitted and only know the transmission of disease when in contact with people living with HIV/AIDS. Nearly 50 percent of respondents of the communities living around people with HIV/AIDS can not name a single cause of HIV/AIDS. This means that public knowledge about the disease around the respondents are not widely known. However, the level of knowledge possessed by peers (peer group) is quite good, because they are able to explain the cause of the spread of HIV/AIDS. Similarly with PLWHA (People Living with HIV/AIDS) and OHIDA (People living with people with HIV/AIDS) are used as the respondents have a fairly good knowledge about the causes of the spread of HIV/AIDS.

Keywords: *People; Knowledge; HIV/AIDS*

Abstrak

Jumlah terbanyak dari penyanggah HIV/AIDS adalah usia produktif. Secara kumulatif proporsi penyanggah HIV/AIDS di Yogyakarta berada pada tataran usia 20-29 tahun. Aktivitas yang tinggi pada usia ini membuat banyak kelompok produktif yang melakukan perilaku seks berisiko. Pertambahan jumlah penyanggah selama sepuluh tahun terakhir meningkat sepuluh kali lipat. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang penyebaran HIV/AIDS di Yogyakarta, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh), mendeskripsikan secara terperinci fenomena tentang berbagai pengetahuan dari berbagai kalangan masyarakat tentang virus HIV/AIDS, dan berusaha menggambarkan suatu gejala sosial tersebut. Hasil penelitian menunjukkan ternyata warga masyarakat banyak yang tidak tahu cara penularannya virus ini. Mereka tidak mengetahui bagaimana penyakit tersebut ditularkan dan hanya tahu penularan penyakit apabila bersentuhan dengan penyanggah HIV/AIDS. Hampir 50 persen responden dari unsur masyarakat yang tinggal di sekitar penyanggah HIV/AIDS tidak dapat menyebutkan satu pun penyebab HIV/AIDS. Artinya pengetahuan masyarakat tentang penyakit di sekitar responden sedikit. Namun tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh teman sebaya (*peer group*) cukup baik, karena mereka mampu menjelaskan penyebab penyebaran HIV/AIDS. Demikian pula dengan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) atau OHIDA (Orang yang hidup dengan penyanggah HIV/AIDS) yang dijadikan responden memiliki pengetahuan baik mengenai penyebab penyebaran HIV/AIDS.

Kata kunci: *Masyarakat; Penyebaran; HIV/AIDS*

A. Pendahuluan

Penyebaran penyakit HIV/AIDS sudah melanda hampir semua provinsi di Indonesia, ter-

masuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan

oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). HIV adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh, sehingga tidak bisa bertahan terhadap penyakit-penyakit. apabila sistem kekebalan tubuh rusak atau lemah, berbagai jenis penyakit seperti TBC, diare, sakit kulit akan mudah menyerang. Kumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh manusia itulah yang disebut AIDS. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada 2012 HIV ditemukan sebanyak 21.511 kasus dan AIDS sebanyak 5.686 kasus. Berdasarkan persentase kasus AIDS menurut faktor risiko pada 1987 hingga Desember, secara kumulatif faktor risiko penularan HIV terbanyak pada heteroseksual (58,7 persen), *injecting drug users* (IDU) sebanyak 17,5 persen, penularan perinatal 2,7 persen, dan homoseksual sebanyak 2,3 persen.¹

Gambaran epidemiologi penularan HIV/AIDS cukup tinggi di kelompok penduduk usia produktif yang menjadi korban keganasan HIV. Sebagian besar masyarakat belum mengenal penyakit HIV/AIDS merupakan retrovirus yang menjangkiti sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia. Sebagian besar orang yang terkena infeksi HIV tidak menyadari gejala infeksi HIV tahap awal karena tidak ada gejala mencolok. Meskipun infeksi HIV tidak disertai gejala awal, seseorang yang terinfeksi HIV akan membawa virus HIV dalam darahnya. Orang yang terinfeksi tersebut akan sangat mudah menularkan virus HIV kepada orang lain, terlepas dari apakah penderita tersebut kemudian terkena AIDS atau tidak. Untuk menentukan apakah virus HIV ada di dalam tubuh seseorang adalah dengan tes HIV². Kendatipun infeksi HIV tidak disertai gejala awal, seseorang yang terinfeksi HIV sangat mudah menularkan virus tersebut kepada orang lain. Satu-satunya cara untuk menentukan apakah HIV ada di dalam tubuh seseorang adalah melalui tes HIV. Infeksi HIV menyebabkan penurunan dan melemahnya sistem kekebalan tubuh, sehingga menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi penyakit dan dapat menyebabkan berkembangnya AIDS³.

Jumlah pengidap HIV/AIDS menurut Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta hingga Oktober 2012 tercatat 160 kasus HIV dan 355 kasus AIDS jumlah keseluruhan 515 orang yang terkena kasus HIV/AIDS di Yogyakarta, angka populasi yang cenderung beresiko pengidap HIV/AIDS tergolong tinggi. Menurut data dari hasil KPA (Komisi Penanggulangan Aids) Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Oktober 2012 Kota Yogyakarta merupakan daerah paling banyak kasus HIV/AIDS dan angka ini belum menggambarkan kasus keseluruhan yang ada di masyarakat sehingga ke depan masih dimungkinkan adanya peningkatan penemuan kasus⁴. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang hanya tercatat kasus HIV 107 orang dan 182 kasus AIDS dengan faktor resiko penularan meningkat lebih dari 50 persen.

Resiko penularan HIV/AIDS melalui kontak seksual semakin tinggi karena fenomena *free sex* yang mulai marak di Indonesia, tidak ada cara apapun yang bisa mendeteksi apakah pengunjung atau penjaja cinta sudah terjangkit virus. Padahal, ketika terlanjur melakukan kontak seksual dengan ODHA, semuanya sudah terlambat karena virus sudah terlanjur menular. Berdasarkan keterangan yang dilansir oleh Komisi Nasional Penanggulangan AIDS Nasional dalam simposium internasional mengenai AIDS, kecenderungan penularan HIV/AIDS pada kurun 2011 didominasi oleh seks bebas yang mencapai persentase 76,3. Data ini berbanding terbalik dengan data pada 2006 yang hanya menunjukkan persentase 38,5.⁵ Penularan juga akibat kontaminasi darah yang terinfeksi dengan virus, melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian antara ODHA dengan orang sehat atau melalui transfusi darah. Penggunaan jarum suntik erat hubungannya dengan penggunaan jarum untuk memasukkan narkotika ke dalam tubuh. Ketika sekelompok pecandu berkumpul dan melakukan pesta, seringkali mereka menggunakan jarum suntik secara bergantian. Dalam situasi ini, jarum menjadi media primer yang bisa menghantarkan virus ke orang lain. Penularan HIV/AIDS juga bisa terjadi pada masa

prinatal, tetapi hanya melibatkan ibu dan anak. Masa prinalat mencakup saat di dalam rahim, proses persalinan, dan menyusui.

Penyebaran HIV/AIDS belum dapat ditanggulangi secara terpadu sehingga masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mempunyai implikasi sosial ekonomi luas. Penderitaan bukan saja dialami oleh orang yang tertular HIV/AIDS, tetapi juga dirasakan oleh keluarga dan masyarakat, karena belum ditemukan vaksin pencegah dan obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS. Penyebaran penyakit ini masih akan berkepanjangan karena masih terdapatnya faktor-faktor yang memudahkan penularan. Beberapa cara penularan infeksi HIV antara melalui hubungan seks yang tidak aman, transfusi darah, dan penyalahgunaan Napza dengan menggunakan jarum suntik.

Upaya mengurangi penyebaran penyakit ini telah dilakukan oleh berbagai lembaga peduli HIV/AIDS, meskipun hasilnya belum memuaskan. Melalui kelompok dukungan sebaya, oleh dan untuk orang dengan HIV/AIDS (ODHA): Orang yang terinfeksi HIV (ODHA) sangat membutuhkan dukungan psikososial. Pendamping penyanggah HIV/AIDS atau OHIDA dapat membantu minum obat secara teratur, mendampingi dalam menjalani gaya dan perilaku hidup sehat, ODHA berani mengakui secara terbuka bahwa dirinya terinfeksi HIV. Berbagai jaringan ODHA berupaya memberi layanan yang berkualitas untuk hidup mandiri dan bermartabat bagi anggotanya.

Pendidikan dan penyuluhan bagi penyanggah HIV/AIDS didasari oleh norma agama dan budaya telah dilakukan bersamaan dengan intervensi kesehatan masyarakat seperti pencegahan, pengobatan infeksi menular seksual, upaya pengobatan, perawatan dan dukungan bagi ODHA, dan dengan OHIDA. Upaya pencegahan yang dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan masyarakat ini terutama ditujukan kepada kelompok berisiko tinggi dan kelompok rentan menyebarkan penyakit seperti pekerja seks, waria, penghuni lembaga pemasyarakatan,

dan pemuda yang disyalir pengguna Narkoba dengan jarum suntik. Upaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan, baik berbasis klinis maupun masyarakat, perlu dikembangkan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah ODHA, karena tingkat penyebaran HIV/AIDS tidak hanya di perkotaan, tetapi telah masuk ke wilayah kecamatan, bahkan di tingkat kelurahan. Meningkatnya jumlah penyanggah HIV/AIDS yang begitu cepat di Kota Yogyakarta, mendorong dilakukannya penelitian ini guna mengetahui pengetahuan masyarakat tentang penyebaran penyakit HIV/AIDS, cara penularan HIV/AIDS, dampak penyebaran virus HIV/AIDS, dan bahaya penyakit HIV/AIDS di kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pembuat kebijakan pada instansi pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penanganan masalah HIV/AIDS.

B. Penggunaan Metode Penelitian

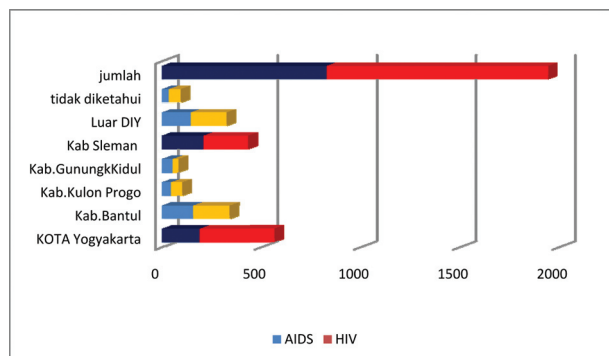
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif (Moleong, 2004), yang menekankan pada makna daripada generalisasi dan keabsahan. Data diperoleh melalui triangulasi dengan melakukan klarifikasi kebenaran yang diperoleh dari pihak ketiga, kemudian dianalisis secara induktif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, untuk membuat deskripsi tentang pengetahuan masyarakat terhadap penyebaran penyakit HIV/AIDS sehingga mendapat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di sekitar masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara menggunakan *interview guide* dengan 30 responden yang terdiri dari tokoh masyarakat, teman sebaya (*peer group*), ODHA, OHIDA dan keluarga yang diduga salah satu anggota keluarga terjangkit HIV/AIDS, dan masyarakat yang berada di sekitar penyanggah HIV/AIDS di kota Yogyakarta. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan (Pengetahuan Masyarakat tentang HIV/AIDS)

1. Penyebaran HIV/AIDS di Yogyakarta

Penyebaran HIV/AIDS di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sangat meluas dan mengkhawatirkan dengan meningkatnya kasus penyakit per tahun. Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional mengestimasi penyandang sebanyak 61.350, sementara estimasi HIV positif 3.320. Dari data estimasi HIV positif, penyandang yang terkena HIV/AIDS di DIY dapat di lihat dalam Grafik.1 berikut.

Grafik 1
Data Estimasi Pengidap HIV Positif di Empat Kabupaten/Kota DIY



Sumber: Komisi Penanggulangan AIDS DIY (2014)

Angka populasi risiko pengidap di Kota Yogyakarta tergolong tinggi. Dari empat kabupaten dan 1 kota terdapat 1.941 penyandang, estimasi HIV positif 1.110 dan yang dinyatakan AIDS 831 penyandang. Angka estimasi yang tertinggi berada di Kota Yogyakarta, yaitu 377 orang positif, dan 189 dinyatakan AIDS, disusul Kabupaten Sleman dengan jumlah penyandang HIV positif 225, dan yang dinyatakan AIDS 208, Kabupaten Gunungkidul HIV positif 29, dan yang dinyatakan AIDS 59, di Kabupaten Bantul HIV positif 184 dan yang dinyatakan AIDS 157, dan Kabupaten Kulonprogo HIV positif 56 dan yang dinyatakan AIDS 45.

Kehadiran virus dalam tubuh menyebabkan defisiensi (kekurangan) sistem imun. AIDS atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* disebabkan salah satu kelompok virus yang disebut

dengan retroviruses (HIV). Seorang yang terkena atau terinfeksi HIV AIDS sistem kekebalan tubuhnya akan menurun drastis. AIDS disebabkan oleh virus yang di sebut HIV, virus ini ditemukan oleh Montagnier, seorang ilmuwan Perancis (Institute Pasteur, Paris 1983), yang mengisolasi virus dari seorang penderita dengan gejala limfadenopati, sehingga pada waktu itu dinamakan *Lymphadenopathy Associated Virus* (LAV). Gallo (National Institute of health, USA 1984) menemukan virus HTL-III (Human T Lymphotropic Virus) yang juga adalah penyebab AIDS. Pada penelitian lebih lanjut dibuktikan bahwa kedua virus ini sama, sehingga berdasarkan hasil *per-temuan International Committee on Taxonomy of Viruses* (1986) WHO memberikan nama resmi HIV (Widoyono, 2005).

Penyebaran virus HIV dapat ditularkan dengan berbagai cara antara lain hubungan seksual bebas, seperti hubungan seksual dengan pasangan berganti-ganti dan hubungan heteroseksual dengan pasangan yang menderita infeksi HIV tanpa menggunakan pelindung (kondom). HIV juga dapat ditularkan melalui pemakaian jarum suntik secara bergantian yang terkontaminasi, juga melalui perantara produk darah seperti transfusi darah atau organ lain (Smeltzer & Bare, 2001). *Aquired* artinya didapat, bukan berasal dari penyakit keturunan. *Immune* terkait dengan sistem kekebalan tubuh. *Deficiency* berarti kekurangan. *Syndrome* atau sindrom berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah lahir. Jelasnya AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia yang didapat (bukan karena keturunan), tetapi di sebabkan oleh virus HIV. Perbedaan antara penderita HIV positif dengan penderita AIDS adalah kalau penderita HIV positif seseorang yang tertular tampak sehat tanpa gejala penyakit apapun, tetapi dapat menularkan virus AIDS kepada orang lain. Sedangkan penderita AIDS adalah seseorang yang menunjukkan gejala dari sekumpulan penyakit yang setelah sekian waktu

terinfeksi HIV, biasanya timbul antara 5-10 tahun setelah tertular HIV. Penularan HIV/AIDS tidak mudah seperti penularan virus influenza, karena virus HIV terdapat di dalam darah, cairan sperma, cairan vagina dan sedikit dalam ASI (Maryunani, 2009).

Data terbaru Penyebaran menurut Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Yogyakarta hingga Maret 2014, tercatat ada 714 kasus terjadi di Kota Yogyakarta, jumlah tersebut meningkat 5,4 persen dari jumlah kasus tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, penyebab paling banyak (56 persen) adalah perilaku seks heteroseksual. Rata-rata umur penderita 20 hingga 29 tahun. Sekitar 64 persen dari 714 kasus tersebut adalah oleh laki-laki. Estimasi paling banyak adalah di Kota Yogyakarta. Pengidap HIV di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat cukup signifikan dalam tiga bulan terakhir, yakni dari 700 menjadi 832 kasus (KPA DIY, 2014). Hal itu disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan darah ke rumah sakit atau laboratorium.

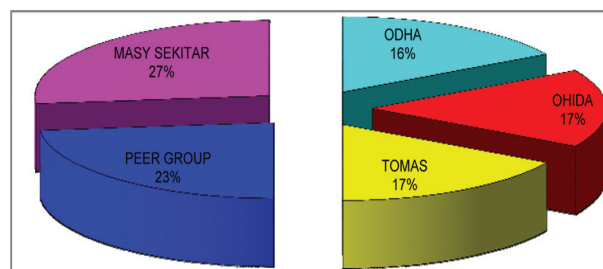
2. Meluas Penyebaran Virus HIV/AIDS di Yogyakarta

Faktor terbesar penyebaran virus HIV/AIDS adalah adanya praktek seksual bebas serta penggunaan alat suntik bagi pengguna narkoba. Banyak sekali pendatang terutama mahasiswa yang merupakan kalangan pengguna narkoba suntik. Perilaku seksual dari pemuda-pemudi pendatang dari luar daerah yang kos tanpa pengawasan dari pemilik rumah di Yogyakarta menyuburkan penyebaran HIV/AIDS. Untuk mengetahui identitas responden berkaitan dengan penelitian ini dapat dijabarkan pada Grafik 2.

Responden yang berasal dari ODHA (orang dengan HIV/AIDS) 5 orang (16,6 persen), responden OHIDA (orang yang hidup dengan penyandang HIV/AIDS) 5 orang atau (16,6 persen), sedangkan responden dari unsur tokoh masyarakat 7 orang (23,3 persen). Responden

berasal dari teman sebaya atau *peer group* dan 8 orang atau (26,7 persen), responden berasal dari tetangga sekitar rumah yaitu orang yang tinggal tidak jauh dari rumah penyandang HIV/AIDS 5 orang.

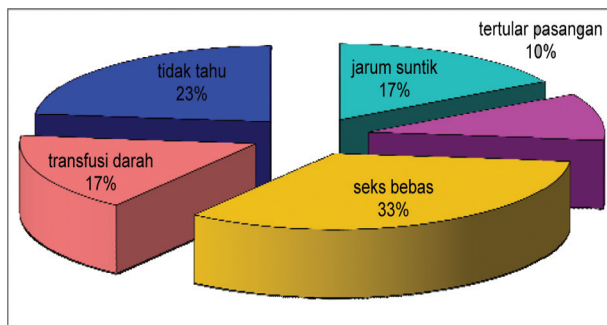
Grafik 2
Identitas Responden dalam Penelitian



Sumber data: Identifikasi Responden (N = 30)

Seorang ODHA tidak dapat hidup sendiri, sehingga memerlukan teman atau pendamping yang disebut OHIDA. OHIDA sebutan bagi mereka yang tinggal bersama dengan ODHA. ODHA yang seharusnya memperoleh dukungan, khususnya dukungan emosional dari semua pihak, sehingga permasalahan yang dialami ODHA tidak meluas. Akan tetapi orang yang memiliki sikap negatif sebaliknya terhadap ODHA, cenderung menolak. Namun sikap negatif ini juga dapat menghambat upaya pencegahan, dengan membuat orang takut untuk mengetahui apakah mereka terinfeksi atau tidak. ODHA dilihat sebagai suatu masalah, bukan sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi masalah, sebuah proses yang seharusnya mendorong penerimaan terhadap kondisi mereka. Namun, masyarakat dan lembaga terkadang memberikan opini negatif serta memperlakukan ODHA sebagai warga masyarakat kelas dua atau inferior, sehingga dapat menyebabkan melemahnya kualitas hidup ODHA (Agung, 2009). Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pengetahuan masyarakat tentang penyebaran penyakit HIV/AIDS dapat dijelaskan dalam Grafik 3.

Grafik 3
Pengetahuan Responden tentang
Cara Penularan HIV/AIDS



Sumber: Jawaban Responden (N=30)

Menurut hasil wawancara tentang pengetahuan responden tentang cara penularan yang dialami oleh penyandang HIV/AIDS, kebanyakan responden menyatakan akibat dari seks bebas (33 persen), sedangkan yang tidak tahu cara penularannya yaitu 23 persen. Ada juga yang salah memahaminya dengan mengatakan bahwa penyakit tersebut ditularkan apabila bersentuhan dengan penyandang HIV/AIDS, artinya mereka tidak mengetahui penularan penyakit HIV/AIDS. Pengetahuan responden tentang penyebaran melalui penggunaan jarum suntik sebanyak 17 persen. Mereka mengetahui penyebaran penyakit HIV/AIDS akibat pengguna narkoba menggunakan media jarum suntik bersama-sama. Informasi mengenai penggunaan jarum suntik sebagai media penularan penyakit HIV/AIDS kurang begitu dipahami oleh responden. Mereka tidak menyadari dampak dari penggunaan jarum suntik secara bersama-sama dapat menularkan penyakit HIV/AIDS, alasannya penyandang HIV/AIDS menggunakan jarum suntik bersama-sama karena selain ekonomis juga menjaga solidaritas kelompok pengguna narkoba.

Salah seorang responden ODHA mengungkapkan pengalamannya, sebut saja MJ 32 Th): “Saya seorang laki-laki yang berusaha menjaga syahwat. Tapi, setelah melakukan hubungan seksual dengan beberapa pekerja seks. Selain pengalaman itu saya pernah menggunakan suntik ketika menggunakan narkoba...karena hal tersebut pada akhirnya saya cek darah “Saya baru

menyadari bahwa aku mengidap HIV, setelah dorongan dari beberapa sahabatku menyarankan agar saya mengikuti test di klinik kesehatan. Hasil dari tes tersebut sangat mengagetkan dan membuat aku nggak pernah menyangka akan terjangkit penyakit ini. setelah mendengar hasil tes, sukar menerima kenyataan dan gak dipercaya rasanya ingin mati saja dan Aku merasa terpuhul!” “Hidup saya terasa hancur, Saya frustrasi. Saya bingung dan harus apa. Saya mengalami depresi berat. Hidup saya habis hanya karena beberapa malam saya melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks. Saya takut dan tidak bisa tidur, saya merasa terkucilkan dan takut keluarga mengetahui penderitaanku.”

Perilaku seksual di usia pra-nikah dan pemakaian obat-obatan terlarang bagi pengguna *injecting drug user* (IDU) atau narkoba dengan jarum suntik, menempati peringkat kedua terbanyak. Penggunaan narkoba yang dilakukan bersama-sama merupakan hal untuk mengurangi rasa takut kepada aparat, takut kepada rasa bersalah karena menggunakan zat terlarang, takut ketahuan oleh keluarga atau masyarakat di sekitarnya. Pengetahuan masyarakat tentang penyebaran HIV/AIDS karena seks bebas 33 persen, akibat dari tertular pasangan suami/istri/pacar 10 persen. Artinya pengetahuan responden tentang penyebaran penyakit akibat hubungan seks yang tidak aman sudah cukup baik, sedangkan pengetahuan responden tentang HIV/AIDS akibat transfusi darah 17 persen. Responden menjelaskan tentang teman terkena HIV/AIDS padahal dia belum menikah dan tidak pernah memakai narkoba apapun, setelah ditelusuri dia tertular penyakit ini karena transfusi darah akibat kecelakaan yang pernah dialaminya. Dampak yang dirasakan setelah dia mengalami radang saluran pernafasan atas yang berulang-ulang, kemudian setelah tes HIV ternyata positif.

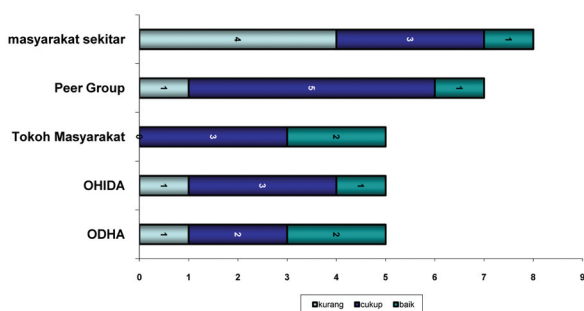
Masyarakat seharusnya memberikan dukungan, khususnya dukungan emosional pada ODHA sehingga permasalahan yang dialami oleh ODHA tidak meluas. Ketika ODHA sudah mencapai masa AIDS, keluarga dan teman serta lingkungannya diharapkan memberikan

dukungan yang positif agar semangat hidupnya tetap tinggi. Masyarakat mempunyai beberapa tanggung jawab yang sangat penting untuk penanggulangan HIV/AIDS, yaitu mencari dan memberikan informasi yang jelas dan benar kepada orang yang memerlukannya tentang penularan HIV/AIDS, bersikap bersahabat, tidak menggossipkan, dan meremehkan ODHA, mendukung dan membantu program pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS, membantu ODHA menemukan mekanisme pertahanan yang sehat, termasuk sikap yang selalu positif dalam menghadapi begitu banyak tantangan dan stres dalam perjalanan penyakitnya, dan membantu ODHA membangun strategi untuk berhadapan dengan krisis nyata yang mungkin terjadi, baik dalam kesehatan maupun sosioekonomi.

3. Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit HIV/AIDS

Dari hasil wawancara dengan responden mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang Penyakit HIV/AIDS dapat terlihat pada Grafik 4.

Grafik 4
Pengetahuan Responden tentang Penyakit HIV/AIDS



Sumber: Jawaban Responden (N=30)

Keterangan : Kurang apabila tidak dapat menyebutkan satupun penyebab HIV/AIDS

Cukup apabila dapat menjelaskan lebih dari 1 penyebab HIV/AIDS

Baik apabila dapat menjelaskan lebih dari 3 penyebab HIV/AIDS

Dalam Grafik 4, ternyata 50 persen dari responden dari unsur masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan penyandang HIV/AIDS

tidak dapat menyebutkan satu pun penyebab HIV/AIDS. Artinya pengetahuan masyarakat lingkungan sekitar penyandang HIV/AIDS tidak banyak yang tahu tentang penyebaran penyakit HIV/AIDS, hal ini terjadi karena pemukiman yang padat di tengah kota. Penduduk sekitar menghabiskan waktu untuk mencari uang, petugas sudah sering melakukan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat tentang penyebaran penyakit HIV/AIDS tetapi kepedulian masyarakat rendah, sehingga tidak mengetahui penyebaran penyakit. Sebagai contoh, menyosialisasikan pencegahan dan bahayanya HIV/AIDS dengan cara menyebarkan brosur tidak ditanggapi masyarakat, banyak yang membuang brosur tersebut tanpa dipahami lebih dalam isi pesannya.

Kegiatan Sosialisasi bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peserta sosialisasi tentang hal-hal HIV/AIDS belum mampu meningkatkan informasi mendalam mengenai penyebaran dan informasi penyakit HIV/AIDS. Minat masyarakat tentang layanan kesehatan berupa pengecekan dan konsultasi HIV dan AIDS masih minim. Akibatnya, banyak orang dewasa mengalami gejala HIV dan AIDS tidak segera memeriksakan diri sehingga berpotensi menularkan pada orang lain. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman yang benar akan HIV/AIDS membuat pencegahan HIV/AIDS belum maksimal serta memunculkan stigma dan diskriminasi bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Salah satu tokoh masyarakat GH (45 thn) menggambarkan tentang penyakit HIV/AIDS, sebagai berikut.

“Saya sesungguhnya sangat takut terhadap orang yang terkena penyakit tersebut, selain takut menyebarkan penyakitnya ke keluarga dekat juga kepada masyarakat sekitar, meskipun saya tahu bahwa penularannya tidak mudah, seperti bersentuhan dengan penderita HIV/AIDS. Kemajuan dunia kedokteran saat ini telah mampu mengatasi penyebarannya, meskipun belum ada obat yang ampuh yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut.”

Tingkat pengetahuan yang dimiliki, baik oleh teman sebaya (*peer group*), maupun tokoh masyarakat, cukup baik karena mereka mampu menjelaskan lebih dari satu penyebab penyebaran HIV/AIDS. Demikian pula dengan ODHA dan OHIDA yang dijadikan responden, pengetahuan dari semua responden mengetahui cukup baik mengenai penyebab penyebaran HIV/AIDS. Mereka dapat menerangkan tentang penyebaran penyakit HIV/AIDS antara lain disebabkan dari pemakaian jarum suntik bergantian, hubungan seks tidak aman, berganti-ganti pasangan, dan transfusi darah. Sebagian besar ODHA berupaya untuk mengasingkan diri dari pergaulan. Hal tersebut wajar, karena memang mereka merasa terasing. Masih saja ada anggapan buruk dan perlakuan diskriminatif terhadap mereka yang sudah terinfeksi HIV/AIDS, akhirnya ODHA menjadi orang yang tidak mau terbuka karena takut statusnya diketahui oleh orang lain.

Pengidap HIV/AIDS memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus terutama bagi OHIDA dalam menetapkan tujuan pendampingan antara lain. Pertama, membantu ODHA mempertahankan kontrol akan hidupnya dan membantu menemukan mekanisme pertahanan yang sehat, termasuk sikap yang selalu positif dalam menghadapi begitu banyak tantangan dan stres dalam perjalanan penyakitnya. Kedua, membantu ODHA menghadapi perasaan bersalah, penyangkalan, panik, dan putus asa. Ketiga, berupaya untuk menciptakan perasaan self-respect (menghormati diri sendiri) dan menyelesaikan konflik mereka jika ada (misalnya homoseksualitas, penggunaan obat-obat terlarang, dan sebagainya). Keempat, membantu ODHA berkomunikasi dengan keluarga, pasangan hidup dan teman-teman mengenai penyakit mereka dan rasa takut akan penolakan serta ditinggalkan. Juga membantu mereka membina hubungan interpersonal yang memuaskan. Kelima, membantu ODHA dalam membangun strategi untuk berhadapan dengan krisis nyata yang mungkin terjadi, baik dalam kesehatan maupun sosioekonomi, dan hal-hal dalam kehidupan lainnya (Psikologizone, edisi 17 Des 2010).

ODHA mendapat pengetahuan tentang HIV/AIDS dengan baik karena pernah mengikuti konseling setelah dinyatakan positif HIV yang dilakukan oleh petugas medis di rumah sakit pada saat pemeriksaan dan perawatan, sedangkan bagi OHIDA pengetahuan tentang penyebaran HIV/AIDS melalui petugas medis setelah penyakit ini menimpa salah satu keluarga mereka. Keluarga sebagai OHIDA merupakan pihak pertama yang berhak dan berkewajiban mengetahui atas kondisi ODHA. Namun pada kenyataannya tempat makan, tempat tidur, dan alas kasur penderita HIV/AIDS dibakar begitu keluar dari ruang perawatan. Mereka juga dilecehkan, diusir, disisihkan dari lingkungan dan masih sering menjadi 'santapan' sehari-hari. Penderita HIV/AIDS juga belum bisa diterima oleh lingkungan kerja mereka sampai akhirnya dengan cara halus si penderita diminta untuk berhenti bekerja, padahal penderita selama ini menjadi tulang punggung bagi nafkah keluarga.

ODHA dikucilkan oleh masyarakat sekitar sehingga seharusnya keluarga yang menjadi pendamping, pendukung, dan pelindung bagi ODHA. Untuk menjadi pendamping ODHA, seorang harus mengutarakan kejujuran terlebih dahulu, paham seluk beluk HIV/AIDS, mengenali watak dari ODHA sehingga sebagai pendamping, orang tersebut bisa memahami ODHA. Meskipun keluarga sebelumnya tidak memiliki pengetahuan tentang penyakit ini secara mendalam. Jika dalam keluarga ODHA sudah dikucilkan bagaimana dengan dunia di luar keluarga. Sudah seharusnya keluarga yang menjadi pendamping, pendukung, dan pelindung bagi ODHA.

Salah satu tempat terbaik untuk merawat ODHA adalah di rumah, dengan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Banyak ODHA dapat tetap hidup aktif untuk waktu lama. Sebagian besar waktu ODHA tidak perlu dirawat di rumah sakit akan tetapi di rumah. Dirawat di rumah biasanya lebih murah, lebih menyenangkan, lebih akrab, dan membuatnya bisa mengatur hidupnya sendiri. Sebenarnya, penyakit yang berhubungan dengan ODHA biasanya akan

cepat membaik, dengan kenyamanan di rumah, dengan dukungan dari teman dan orang-orang yang dicintai.

Intervensi tingkat individu (*Individu Level*) peningkatan pengetahuan individu tentang HIV/AIDS dan PMS, promosi positif terhadap seks aman, dan meningkatkan keterampilan dalam menerapkan perilaku seks aman. Intervensi tingkat kelompok (*Group Level*), menciptakan norma-norma sosial untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat menerapkan perilaku seks aman. Di tingkat masyarakat (*Community Level*) mengubah situasi dan factor risiko penularan HIV dengan menghilangkan hambatan-hambatan terjadinya perubahan perilaku, melalui:

1. Meyakinkan tokoh panutan masyarakat agar remaja/pemuda memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk melindungi diri.
2. Mengusahakan agar persediaan alat kontrasepsi mencukupi, kualitas baik dan harga yang terjangkau.
3. Mengembangkan pelayanan penyakit menular seksual (PMS) yang mudah terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
4. Mengupayakan agar pendidikan agama tidak hanya dogmatis tetapi mudah dihayati oleh umat yang dapat diterapkan dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari (Gde Muninjaya, 1999)

Pada dasarnya orang yang mendiskriminasi ODHA karena orang tersebut tidak paham akan penyakit HIV/AIDS dan penularannya. Mereka belum pernah membayangkan bila mereka juga suatu saat terinfeksi HIV AIDS. Dari fakta dilapangan pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS, bahwa penularan penyakit tersebut dapat terjadi melalui hubungan intim saja, padahal penyakit ini bisa saja tertular melalui berbagai cara seperti jarum suntik yang digunakan bersama-sama, dan transfusi darah. Pengetahuan masyarakat tentang penyebaran HIV/AIDS masih rendah, mereka memiliki ketakutan yang besar terhadap penderita HIV/AIDS karena minimnya pengetahuan tentang pola

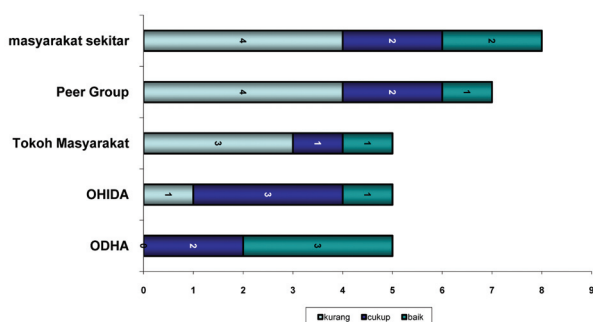
penularan HIV/AIDS. Selain itu dijumpai banyak keluarga menyembunyikan anggota keluarga yang terinfeksi HIV. Masyarakat sekitar hanya mengetahui bahwa penyakit ini dapat menular, dan belum ada obatnya, sehingga mereka sangat takut terhadap ODHA. Masyarakat melihat penyandang HIV/AIDS sebagai stigma, yang ada pikiran mereka bahwa AIDS merupakan jenis penyakit yang mematikan, mengerikan, bahkan membahayakan bila terjangkit pada manusia.

Dalam hal penanggulangan HIV/AIDS, penyuluhan oleh petugas kesehatan atau oleh sektor-sektor lain yang terkait biasanya dilakukan kalau ada permintaan dari masyarakat. Intervensi dalam pencegahan penyebaran HIV/AIDS menjadi 3 tingkatan intervensi, antarlain: *counseling*, *advocative*, dan *AIDS awareness campaign* (penyuluh lewat berbagai media). Banyak dilaksanakan di lapangan adalah penyuluhnya melalui ceramah (*AIDS awareness*). Jenis KIE (Komunikasi, informasi dan Edukasi) hanya menyentuh domain kognitif masyarakat umum atau kelompok masyarakat yang dijadikan sasaran program. Konseling ditujukan untuk individu atau grup kecil, berdasarkan kebutuhan klien. Tujuannya untuk membantu klien mampu keluar dari kemelut permasalahannya, sehingga mereka mampu mengambil keputusan lebih rasional, bertanggung jawab dan benar-benar menyadari akibat dari keputusan yang diambil. Advokasi ditujukan untuk mengubah sikap atau mitos yang berkembang pada diri individu ditujukan untuk mengubah kebijakan pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Sampai sekarang penyakit ini belum ditemukan obatnya, dan penyandang HIV/AIDS di dunia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Masyarakat yang mengetahui enggan bergaul dengan penyandang HIV/AIDS sehingga selalu menjauhinya. Namun tidak demikian dengan kelompok sebaya atau peer grup, mereka cukup memahami penyebab penularan penyakit ini. Mereka mengetahui setelah salah satu dari mereka terjangkit HIV/AIDS. Solidaritas mereka cukup tinggi meskipun salah satu dari mereka terjangkit penyakit ini tapi berkumpul

dalam kelompok tersebut masih tetap mereka jalankan. Dalam kelompok ini memiliki minat bersama antara lain suka menenggak minuman keras bersama, “*ngoplo*”, bahkan menggunakan zat terlarang secara bersama di sebuah tempat yang biasa mereka berkumpul.

Grafik 5
Pengetahuan Responden tentang Bahaya Penyakit HIV/AIDS



Sumber : data primer n = 30

Keterangan : Kurang apabila tidak dapat menyebutkan satupun bahaya penyakit HIV/AIDS. Cukup apabila dapat menjelaskan lebih dari 1 bahaya penyakit HIV/AIDS. Baik apabila dapat menjelaskan lebih dari 3 bahaya penyakit HIV/AIDS

Mengacu pada grafik 5 di atas, ternyata hampir semua responden termasuk tokoh masyarakat dan penduduk sekitar banyak yang belum mengetahui bahaya penyakit ini. Pengetahuan mengenai bahaya penyakit HIV/AIDS pada masyarakat sekitar masih rendah, hal tersebut diketahui bahwa 50 persen responden tidak dapat menyebutkan bahaya HIV/AIDS, sedangkan 25 persen responden dapat menjelaskan 1 bahaya penyakit ini. Mereka hanya tahu bahwa HIV/AIDS belum ada obatnya dan berbahaya karena penyandang kehilangan kekebalan tubuh. ODHA memiliki pengetahuan lebih baik dibandingkan responden lain mengenai bahaya HIV/AIDS. Bahaya orang yang telah mengidap virus AIDS akan menjadi pembawa dan penular AIDS selama hidupnya, walaupun tidak merasa sakit dan tampak sehat. AIDS juga dikatakan penyakit yang berbahaya karena sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang bisa mencegah virus AIDS. Orang yang terinfeksi virus AIDS akan merasakan tekanan

mental dan penderitaan batin karena sebagian besar orang di sekitarnya akan mengucilkan atau menjauhinya. Penderitaan akan bertambah lagi akibat tingginya biaya pengobatan. Bahaya AIDS yang lain adalah menurunnya sistim kekebalan tubuh, sehingga serangan penyakit yang biasanya tidak berbahaya pun akan menyebabkan penyandang sakit, bahkan meninggal.

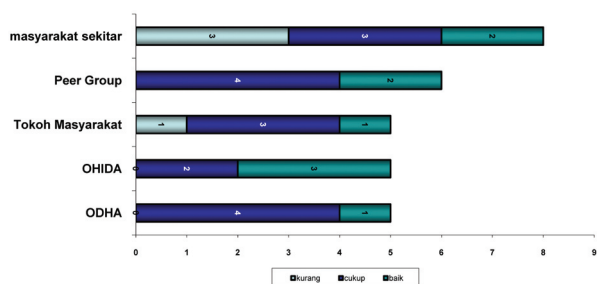
Semua responden ODHA dapat menjelaskan bahaya dari penyakit ini karena mereka pernah melakukan VCT atau *Voluntary Conseling and Testing*, yang merupakan kegiatan konseling atau pengarahan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang yang akan melakukan tes HIV dan meyakinkannya sebelum ia melakukan tes HIV, atau untuk mengetahui sejauhmana seseorang beresiko tertular HIV. Konseling diberikan kepada orang yang ingin mengetahui informasi mengenai HIV dan AIDS secara lebih mendalam. Konseling bertujuan menyiapkan mental orang yang akan melakukan tes HIV apabila hasil tesnya positif. Konseling bersifat rahasia dan dilakukan di sebuah ruangan tertutup yang di dalamnya hanya terdapat konselor dan kliennya. VCT tidak hanya dilakukan sebelum tes HIV. Konseling juga dilakukan setelah tes. Jika hasil tes seorang positif, konseling ini akan memberikan dukungan moril kepada orang tersebut.

Melalui konseling responden akan mengetahui cara-cara menghindari penularan HIV kepada orang lain. Mereka juga akan dibantu untuk dapat menghadapi dan menjalani kehidupan secara positif. Jika hasil tes yang didapatkan negatif, VCT tetap dilakukan. Konseling akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana menghindari penularan HIV, memperlakukan seorang penyandang HIV, dan menanggulangi HIV di masa mendatang. Dalam kelompok OHIDA, hanya 1 responden yang tidak dapat menjelaskan mengenai bahaya penyakit ini, mereka lebih tahu bahaya dari penularan virus HIV/AIDS karena mereka hidup dengan ODHA.

Berbagai gejala AIDS umumnya tidak akan terjadi pada orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh baik. Kebanyakan kondisi

tersebut akibat infeksi oleh bakteri, virus, fungi/jamur dan parasit, biasanya dikendalikan oleh unsur-unsur sistem kekebalan tubuh yang dirusak HIV. Sarkoma Kaposi adalah tumor yang paling umum menyerang pasien yang terinfeksi HIV, penyanggah AIDS beresiko lebih besar menderita kanker seperti sarkoma kaposi, hepatitis, kanker leher rahim, dan kanker sistem kekebalan yang disebut limfoma. Biasanya penyanggah memiliki gejala infeksi sistemik, seperti demam, berkeringat (terutama pada malam hari), pembengkakan kelenjar, kedinginan, merasa lemah, serta penurunan berat badan⁶.

Grafik.6
Pengetahuan Responden tentang
Dampak Penyebaran HIV/AIDS



Sumber: Jawaban Responden (N=30)

Keterangan:

Kurang apabila tidak dapat menyebutkan satupun dampak HIV/AIDS. Cukup apabila dapat menjelaskan lebih dari 1 dampak HIV/AIDS. Baik apabila dapat menjelaskan lebih dari 3 dampak HIV/AIDS

Pengetahuan responden mengenai dampak dari penyakit HIV/AIDS dapat dilihat pada Grafik 6, pengetahuan mengenai dampak pada masyarakat sekitar, 42 persen atau hampir setengah responden kurang mengetahui dampak penyebaran HIV/AIDS karena tidak dapat menjelaskan satu pun dampak penyakit tersebut. Sisanya, 48 persen responden hanya dapat menjelaskan satu dari dampak penyebaran HIV/AIDS. Hal ini berarti masyarakat sekitar masih banyak yang belum mengetahui secara jelas dampak penyebaran penyakit tersebut. Rendahnya pengetahuan HIV/AIDS dapat menyebabkan masyarakat tersebut menjauhi ODHA (Orang

Dengan HIV/AIDS). Masyarakat yang rendah pengetahuannya akibat kurangnya sosialisasi mengenai penyebaran penyakit ini selalu beranggapan bahwa penyanggah HIV/AIDS adalah seseorang yang berperilaku buruk, cenderung melakukan seks bebas.

Akibat kurangnya pengetahuan dan informasi tentang penyebaran penyakit HIV/AIDS, ODHA menjadi ancaman di masyarakat. Seringkali mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif dari orang-orang di sekitarnya. Perlakuan ini dilakukan oleh keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan petugas kesehatan. ODHA akan mengalami berbagai masalah seperti dikucilkan teman, bahkan oleh keluarga sendiri. ODHA menjadi takut untuk berbagi pengalaman, takut akan reaksi dan penerimaan orang lain atas dirinya, orang lain pun pasti akan menjaga jarak.

Persepsi bahwa pengidap adalah pembawa virus berbahaya memunculkan perilaku diskriminatif. Keluarga dan masyarakat cenderung melakukan tindak pengucilan pada ODHA. Misalnya, tidak mengizinkan anggota keluarga untuk mendekat pada ODHA, tidak diakui sebagai anggota keluarga lagi, mengusir ke pinggiran desa, dan mengucilkan dari pergaulan kemasyarakatan. Hasil penelitian tentang pengetahuan dampak penyebaran penyakit HIV/AIDS pada *peer group* atau teman sebaya sebanyak 37,5 persen dapat menjelaskan dampak penyebaran HIV/AIDS. Penjelasanannya, bahwa dampak dari penyakit ini tidak punya kekebalan sehingga rentan terhadap berbagai penyakit, seperti hepatitis dan tumor. Pengetahuan tokoh masyarakat hampir semua mengetahui dampak dari penyakit HIV/AIDS lebih dari satu jawaban. Responden dari kalangan tokoh masyarakat menjelaskan, dampak penyakit ini adalah dijauhi dari masyarakat sekitar karena mereka ketakutan akan tertularnya penyakit ini, timbulnya stigmatisasi, diskriminasi dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) terhadap pengidap dan keluarganya. Diskriminasi masih ditemukan pada tempat pelayanan kesehatan, sekolah, tempat kerja, bahkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

D. Penutup

Kesimpulan: Meningkatnya jumlah penyandang HIV/AIDS atau Orang Hidup Dengan HIV/AIDS (ODHA) memunculkan pertanyaan substantif pemikir pada area sosial tentang ODHA yang dapat hidup di lingkungan sekitarnya. Hal tersebut diiringi asumsi bahwa penyandang HIV/AIDS tidak dapat hidup di masyarakat akibat pengetahuan mengenai penyakit ini di masyarakat sekitar kurang, karena sosialisasi yang diberikan oleh instansi terkait belum memadai. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat menyebabkan penyandang HIV/AIDS merasa semakin terpuruk akibat dijauhi masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang penyebaran HIV/AIDS masih rendah, mereka memiliki ketakutan yang besar terhadap penderita HIV/AIDS karena minimnya pengetahuan tentang pola penularan HIV/AIDS. Banyak keluarga menyembunyikan anggota keluarga yang terinfeksi penyakit HIV/AIDS, karena ketidaksiapan menerima konsekuensi secara psikologi atau rasa malu akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit tersebut berdasarkan norma kehidupan dalam masyarakat setempat sehingga menimbulkan stigma terhadap orang yang positif HIV.

Terapi pemulihan bagi pecandu narkoba dengan sesama pecandu membantu pecandu yang lain untuk mengubah pola pikir. Peran orang tua dan keluarga sangat membantu dalam meningkatkan percaya diri penyandang HIV/AIDS. Semua keluarga besar yang membantu masa penyembuhan menggambarkan segala bentuk stigma dan diskriminasi terhadap ODHA maupun OHIDA, hal tersebut bersinggungan dengan hak asasi manusia penyandang HIV/AIDS. Akibat kurangnya pengetahuan dan informasi tentang penyebaran penyakit HIV/AIDS, ODHA menjadi ancaman di masyarakat. Mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif dari orang-orang disekitarnya. Perlakuan ini dilakukan oleh keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan petugas kesehatan. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman yang benar akan HIV/AIDS membuat pencegahan

HIV/AIDS belum maksimal dan memunculkan stigma dan diskriminasi bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).

Saran: Untuk mengurangi dampak yang lebih dalam bagi penyandang HIV/AIDS perlu ada pencegahan terhadap keluarga dan individu dari penularan HIV/AIDS yang salah satu anggotanya adalah ODHA. Mereka, baik ODHA maupun OHIDA yang hidup berdampingan dengan penderita HIV/AIDS, selain harus dapat hidup secara wajar juga harus didukung oleh masyarakat sekelilingnya. Permasalahan HIV/AIDS harus dihadapi secara bersama dan terbuka melalui kegiatan saling tukar pengalaman, informasi, memberikan dukungan kebersamaan dalam mengatasi masalah. Suatu masalah pada dasarnya akan lebih ringan apabila dapat diselesaikan secara bersama. Pemerintah hendaknya memberi dukungan kepada ODHA dan OHIDA dalam mengatasi penyakit ini, membantu dalam memulihkan diri mereka, dan menyosialisasikan penyakit HIV/AIDS agar penyebaran penyakit tidak meluas.

Pustaka Acuan

- Aris Ananta, (1994), *Biaya HIV/AIDS di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI.
- Bambang Sudibyo S, (2004), *Pengantar Metode Penelitian*, edisi revisi, Bandung: STIE-STIMIK PASIM.
- Gde Muninjaya, (1999), *AIDS di Indonesia Masalah dan Kebijakan Penanggulangannya*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- , (1998), *AIDS dan Kebijakan penanggulangan-nya di Indonesia*, Jakarta: Buku Penerbit Kedokteran EGC.
- Husein Umar, (2003). *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hutapea, Ronald, (1995). *Pencegahan AIDS. Dalam: AIDS & PMS dan Perkosaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L.J., (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda
- Susi Adisti, (2007), *Belenggu, Hitam Pergaulan dan Hancurnya Generasi Akibat Narkoba*, Jakarta: Restu Agung.
- Syaiful W Harahap, (2000), *Pers Meliput AIDS*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zubairi Djoerban, (2000), *Membidik AIDS Ikhtiar Memahami HIV dan ODHA*, Yogyakarta: Galang Press.

Website

- Harahap, Syaiful W, (2003). *Diskriminasi Terhadap Pengidap HIV*, Jakarta. Diperoleh dari: <http://www.kesrepro.info/?q=node/318> Diakses 16 Maret 2014
- Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta (2014), <http://aidsyogya.or.id/category/data-hiv-aids/>
- Sandy P. *VCT Tidak Hijrah Seorang Beresiko HIV/AIDS*. (2008). Diakses
- September (2013). URL : <http://www.surya.co.id/2009/06/16/kasus-hivaid-diindonesia-terus-naik.html>. September 2014 URL : <http://www.who.int>
- Sugeng W. *Kasus HIV/AIDS di Indonesia Terus Naik*. (2009). Diakses tanggal 17
- Sulis S. Stop Stigmatisasi ODHA. 2008. Diakses tanggal 17 September 2009 URL: http://www.jangkar.org/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=28=28078&Itemid=62

- UNAIDS, WHO (2008) AIDS Epidemic Update. 2008. Diakses tanggal 13
- URL: http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id

Footnotes

- ¹ Rois Jajeli, Penderita AIDS di Indonesia 5.686 dan HIV 21.511 Orang, Detik.com edisi Rabu, 03/04/2013 12:28 WIB
- ² Nursalam, & Ninuk Dian Kurniawati, (2007), *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Terinfeksi HIV/AIDS*, Jakarta: Salemba Medika. Hal 40.
- ³ Gde Muninjaya, 1998, *AIDS dan Kebijakan penanggulangannya di Indonesia*, Jakarta Buku Penerbit Kedokteran, hal 9
- ⁴ Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta 2012
- ⁵ Kompas edisi 21/11/2011
- ⁶ Ahamad Fanani, 2009, *Kamus Kesehatan*, Jakarta, Citra Pustaka, hlm 12

**Perubahan Sosial Masyarakat Segitiga Hilir
Dampak Pembangunan Waduk Kedungombo**
*Social Change of Downstream Triangle Community
as an Impact of Kedungombo Dam Development*

Gunanto Surjono

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Badiklit Kesos,
Kementerian Sosial RI. Jl Kesejahteraan Sosial No 1, Nitipuran, Yogyakarta, Indonesia. Telpn (0274) 377265.
E-mail gunsuryo@yahoo.com. Diterima 9 Februari 2015, direvisi 20 Maret 2015, 17 April 2015.

Abstract

This research is done to describe social change on the community living at downstream triangle of Kedungombo water reservoir; Central Java. Approaching model used in this research is quantitative-descriptive, which is implemented through informants choosing, gathering and analyzing data techniques as follows: Informants are chosen purposively those who saw and experienced their changing environment, from piece of farm land to water reservoir (dam). Data are gathered through interview with informants through snowball technique. The research finds that a significant change happens to the downstream triangle community during 25 years of their environmental change on the aspect of communal economy, family system, relation with local government, and local belief.

Keywords: *Social Change; Community; Downstream Triangle*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan perubahan sosial pada komunitas masyarakat di daerah segitiga hilir waduk Kedungombo, Jawa Tengah. Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yang diimplementasikan melalui teknik pengumpulan data wawancara, pemilihan informan secara purposif dengan jumlah yang ditentukan secara snowball terhadap informan yang mengalami perubahan alam lingkungan dari semula hamparan tanah pertanian ke air waduk irigasi. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan sosial terjadi dalam masyarakat segitiga hilir dalam aspek ekonomi lokal, sistem kekeluargaan, hubungan dengan pemerintah setempat, dan kepercayaan yang dianutnya setelah perubahan alam lingkungan berlangsung selama 25 tahun.

Kata Kunci: *Perubahan Sosial; Komunitas; Segitiga Hilir*

A. Pendahuluan

Pengalaman menunjukkan, bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara yang semula direncanakan secara matang untuk kesejahteraan masyarakat, sering menimbulkan dampak perubahan sosial negatif tidak terduga (*unintended impact*) bagi masyarakat tertentu. Pembangunan waduk Kedungombo di Jawa Tengah, yang semula direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lahan-lahan pertanian baru beririgasi teknis juga telah menimbulkan masalah kontroversial antara pemerintah dengan masyarakat desa yang tinggal di wilayah

pusat genangan. Disebut kontroversial karena pelaksanaan pembangunan waduk Kedungombo tidak semulus pembangunan waduk Jatiluhur, Purwakarta; Sempor, Kebumen; Gajahmungkur, Wonogiri; Wadaslintang, Wonosobo; dan Karangates, Malang. Sejak waduk Kedungombo mulai dioperasikan tahun 1989 dengan meninggalkan permasalahan bagi masyarakat terdampak yang belum tuntas benar,¹ ada beberapa perubahan sosial terjadi pada masyarakat yang tempat tinggalnya terkena sasaran proyek. Masyarakat tersebut adalah mereka yang tinggal di sebagian wilayah kecamatan Kemusu, Boyolali; kecamatan Geyer, Grobogan; dan kecamatan

an Sumberlawang, Sragen (disebut kemudian dengan masyarakat Segi Tiga Hilir).²

Waktu telah melintas selama 25 tahun sejak Waduk Kedungombo praktis digenangi pada tahun 1989, masyarakat yang memilih bertahan di sekitar genangan telah melakukan adaptasi berkaitan dengan perubahan lingkungan yang semula tanah pertanian ke hamparan air waduk, sehingga pola matapencaharian, hubungan sosial, mobilitas mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi tersebut yang mendorong dilakukannya penelitian tentang perubahan sosial masyarakat di wilayah segitiga hilir (sekitar genangan waduk). Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sejauhmana perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di wilayah segitiga hilir dan apa makna subjektif keberadaan Waduk Kedungombo yang telah 25 tahun melingkungi kehidupan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan sosial sehubungan dengan perubahan alam lingkungan masyarakat wilayah segitiga hilir dari semula tanah pertanian ke air waduk dan segala konsekuensinya bagi mata-pencaharian, hubungan sosial, dan mobilitas kehidupan mereka.

B. Metode Penelitian

Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan implementasi teknis pemilihan informan, pengumpulan dan analisis data sebagai berikut. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, dalam arti memilih kategori informan di wilayah segitiga hilir yang mengetahui dan mengalami perubahan lingkungan di wilayahnya sejak sebelum dan sesudah dijadikan waduk.

Pemilihan informan ditentukan secara *snow ball*, dalam arti tidak menentukan jumlah, tetapi kemudian dihentikan ketika data yang diperoleh dari informan dipandang sudah memenuhi tujuan penelitian. Pengumpulan data utama dilakukan dengan teknik wawancara dengan informan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif yang meliputi aspek perubahan mata-

pencaharian, hubungan sosial, dan pola mobilitas masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan (Perubahan Sosial Masyarakat Segitiga Hilir)

Hubungan antarsistem yang teratur, seimbang, dan bersatu, kemudian membawa ke arah pemahaman sekilas, bahwa masyarakat yang dipahami menurut fungsionalisme struktural cenderung stabil dan statis. Namun Parsons (2014: 230-231) menegaskan, bahwa *teori tindakan* sama-sama memperhatikan antara persyaratan stabilitas dan perubahan, karena dalam mempelajari mekanisme stabilitas juga harus mempelajari mekanisme pengubah, pemahamannya dapat dilakukan melalui struktur.

Dalam tujuh ciri umum tentang fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Van Den Berghe (dalam Demerath, 2011: 294-295) terdapat dua ciri yang menyangkut perubahan sosial. Pertama, perubahan berlangsung secara lambat dan lebih merupakan penyesuaian diri. Kedua, perubahan sebagai hasil penyesuaian terhadap apa yang terjadi di luar masyarakat bersangkutan, melalui penemuan internal. Neil Smelser (dalam Cuff et. al, 2014: 61) berpendapat, karena berbasis pada kestabilan dan keteraturan tersebut biasanya perubahan sosial dalam konsep fungsionalisme struktural selalu dimulai dengan ketegangan (*strain or tension*) antaranggota dalam komunitas.

Neil Smelser (Cuff, et. al., 2014: 61), masih dalam konteks pengembangan persepsi fungsionalisme struktural memandang perubahan sosial berpendapat, bahwa adanya kebutuhan akan kegiatan produksi yang tidak memadai lagi yang kemudian mendorong perubahan sistem pada struktur sosial masyarakat. Namun perubahan tersebut tetap dikendalikan oleh sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, sementara menurut Talcott Parson (Ritzer, 2011: 245), bahwa perubahan pada *personality system* sangat dipengaruhi oleh sistem sosial dan budaya masyarakat tempat *personal* tersebut berada, yang dipersatukan oleh norma, nilai, dan moral

yang dianut secara umum oleh masyarakat bersangkutan (Ritzer, 2011: 266).

Dalam kumpulan laporan tentang indikator sosial untuk pengembangan manusia (human development) yang dilakukan oleh *UNO for Social Condition* (1976) dan Sheldon Moore (2010: 57) diperincikan, bahwa indikator sosial meliputi aspek: kependudukan, lingkungan, ilmu dan teknologi, seni dan kebudayaan, pekerjaan, jam kerja, pendapatan dan pengeluaran, ketimpangan dan stratifikasi sosial, produksi dan konsumsi, aktivitas politik, hiburan, media massa, hukum dan kriminalitas, agama dan sistem kepercayaan, nilai, etika, dan hubungan antarkelompok sosial (Miles, 2010: 138-139).

Prakondisi: Dari data sekunder³ yang diambil dari 370 kepala keluarga diketahui, bahwa mata pencaharian masyarakat Segi Tiga Hilir sebagian besar adalah bertani (79 persen), pedagang hasil bumi (12 persen), dan sisanya (9 persen) sebagai pekerja di sektor formal pemerintahan. Dari keterangan informan, 85 persen masih bagian dari keturunan Etnis Samin, yang persebaran kehidupannya meliputi kawasan pegunungan Kapur Utara (sebagian kabupaten Blora, Cepu, Rembang, Boyolali, dan Sragen). Meskipun telah melewati beberapa generasi hidup bersosialisasi dengan masyarakat Jawa pada umumnya, jalinan batin antarsesama etnis Samin masih sangat kuat.⁴

Masyarakat Segi Tiga Hilir memakai bahasa komunikasi, cara berpakaian, dan alat kehidupan sehari-hari tidak berbeda dengan yang digunakan masyarakat Jawa pada umumnya yang tinggal berdekatan dengan mereka. Hal yang membedakan dengan masyarakat Jawa pada umumnya adalah sikap hidupnya yang keras, ulet, kritis, solider, dan spontan sehingga tampak menonjol sebagai struktur komunitas sosial tersendiri. Kebanyakan mereka hidup tenggang menenggang di sektor ekonomi pertanian berlahan kering. Lima sungai besar yang mengalir di kawasan dekat tempat tinggal masyarakat Segi Tiga Hilir (Serang, Lusi, Tuntang, Jragung, dan Juwana) tidak dapat memberi kemudahan irigasi tanah pertanian pada mereka disebabkan lahan perta-

niannya berada di lereng-lereng bukit (*slope hill farming*) sehingga aliran air sungai tidak dapat terangkat ke atas. Kemanfaatan kelima sungai besar bagi masyarakat Segi Tiga Hilir hanyalah hasil ikan, yang menjadi sumber nafkah mayor setelah penghasilan minor dari sektor pertanian tadah hujan.

Masyarakat desa segitiga hilir memiliki pola kerja tidak seperti masyarakat desa pada umumnya di Jawa, yang pada waktu tenggang kerja di sawah pergi berurbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan, masyarakat Segi Tiga Hilir tidak suka mencari pekerjaan di kota (urbanisasi) tetapi tetap bertahan di desa kecuali ke kota untuk menjual hasil ikan yang mereka tangkap dari Waduk Kedungombo. Mereka tidak acuh terhadap pekerjaan formal sehingga jarang yang berminat menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan tinggi. Sikap tidak acuh terhadap kehidupan formal tersebut dapat dirunut dari sikap beberapa generasi sebelumnya, yang tidak mau tunduk pada kekuasaan kerajaan Surakarta dengan tidak mau membayar pajak, tidak mau kompromi dengan pemerintahan Hindia Belanda (di lain pihak pemerintah Hindia Belanda sendiri memang kurang berminat menguasai kawasan yang menjadi tempat tinggal masyarakat Segi Tiga Hilir karena daerahnya kurang produktif). Setelah kemerdekaan, meskipun mereka mengakui pemerintahan republik, mereka masih sering menunjukkan sikap kritis terutama apabila menghadapi kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasinya.

Sistem Keluarga: Sistem pembentukan keluarga baru melalui perkawinan di kalangan masyarakat Segi Tiga Hilir masih lebih mengutamakan memilih pasangan hidup dari sesama (internal) Etnis Samin. Masing-masing satuan keluarga memiliki catatan jelas dalam ingatan yang selalu di ceritakan pada generasi berikutnya tentang garis keturunan mereka, mirip dengan sistem perkawinan keluarga Kalang di Kotagede, Yogyakarta.⁵ Kepala keluarga, lelaki, masih berfungsi menjadi penentu utama tanggung jawab, kebijakan, dan arah ketaatan dalam hubungan fungsional anggota keluarga dan dengan anggota

komunitas masyarakat lain. Meskipun demikian, hubungan fungsional suami-isteri, ayah-ibu-anak, dan antara saudara menyamping sangat egaliter, spontan, dan lugas. Hubungan fungsional yang egaliter ini diekspresikan dengan sistem komunikasi yang tidak menggunakan bahasa *andhap-asor* (*stratified language*) seperti bahasa yang digunakan masyarakat Jawa di lingkungan Keraton, tetapi menggunakan bahasa *ngoko*, bahkan dengan orang luar yang baru beberapa saat dikenalnya pun mereka dengan cepat berubah menggunakan bahasa *ngoko*, sehingga cepat terbangun suasana akrab dan egaliter.

Masyarakat Segi Tiga Hilir mengartikan keluarga lebih *extended*, meliputi hubungan horisontal dan vertical. Hubungan fungsional antaranggota keluarga sangat terbuka, dalam arti cepat dan mudah mengekspresikan kekecewaan dan kepuasannya, kebencian dan kesenangannya, dalam interaksi sehari-hari. Sumber dan akumulasi penghasilan keluarga ditumpukan pada satu orang, yaitu kepala keluarga, dan anggota keluarga yang lain meskipun sudah mampu bekerja sendiri (kecuali kalau sudah menikah) cukup meminta sepanjang ada kebutuhan. Fungsi ayah-ibu menafkahi, mendidik, dan melindungi serta mengawasi sosialisasi anak (William J. Goode, 1991: 186) dalam bayang-bayang kendali norma kakek-nenek. Konkretnya, kakek dan nenek, masih dirasa oleh cucu-cucunya memiliki kedekatan hubungan batin tidak ubahnya dengan ayah-ibu mereka sendiri, yang nasihat, petuah, dan restunya dipandang sebagai sesuatu yang harus diperhatikan oleh generasi yang lebih muda.

Sistem tersebut diungkapkan dengan panggilan *Pak Tuwo* dan *Mbok Tuwo* kepada kakek-neneknya, dan biasanya ketika ekonomi ayah-ibunya belum mapan (masih keluarga muda) pengasuhan anak masih dipegang oleh kakek-neneknya, sedang fungsi anak adalah membantu pekerjaan orangtua sampai kemudian menikah dan hidup mandiri. Fungsi “membantu” tersebut yang kemudian membawa konsekuensi anak tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena mereka berpendapat bahwa pekerjaan di sektor pertanian

tidak memerlukan orang dengan pendidikan tinggi.

Sistem Ekonomi dan Kemasyarakatan:

Meskipun masyarakat Segi Tiga Hilir telah melewati beberapa generasi, tetapi masing-masing satuan keluarga masih memiliki lahan tanah yang cukup untuk menafkahi secara subsistens keluarga mereka. Satuan keluarga yang tidak memiliki cukup lahan untuk menghidupi keluarga biasanya bekerja pada satuan keluarga yang memiliki lahan lebih luas. Perbandingan pemilikan tanah sebagai alat produksi antara keluarga yang paling luas tanah pertaniannya dengan keluarga yang paling sempit tanah pertaniannya di bawah kelipatan enam, yang menurut Svalastoga (2013: 86) berperan besar pada sikap egaliter hubungan fungsional antaranggota masyarakatnya.⁶

Satuan keluarga yang masuk kelompok berlahan lebih luas adalah mereka yang lepas dari *mainstream* sikap hidup Masyarakat Segi Tiga Hilir, yaitu menjadi pegawai negeri, atau pedagang hasil bumi. Kelompok tersebut berfungsi sebagai katup pengaman ekonomi bagi satuan keluarga berlahan sempit dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir, melalui penyediaan kesempatan kerja dalam pengelolaan sawah atau pada satuan keluarga berlahan sempit, atau menggarap sawah dengan sistem bagi hasil. Sistem pengupahan dalam hubungan kerja di sektor pertanian diwujudkan dalam bentuk *bawon* (bagian tertentu yang diberikan pekerja berdasarkan prestasi petik) khususnya di masa panen, pada masa garap diwujudkan dalam jaminan makan dua kali sehari ditambah dengan uang sekadarnya yang jauh dari standar upah di kota.

Apabila pemilik sawah ingin menjual hasil panennya (*tebas*) kepada pedagang, pekerja yang semula ikut menggarap mendapat hak bagian kecil dari penjualan, sepadan dengan jumlah *bawon* yang biasanya didapat, meskipun pekerja bersangkutan tidak ikut memanen tetapi karena ikut menanam dan mengelola sehingga mereka tetap mendapatkan hak atas hasil panen akhir. Apabila pemilik ingin memanen sendiri, pekerja penggarap tetap mendapat hak *previlige* bagian khusus dari *bawon* dibandingkan dengan

pekerja pemanen yang sejak awal tidak pernah terlibat dalam pengerjaan sawah. Hubungan kerja dengan sistem tukar jasa tenaga kerja, seperti konsep Sosrodihardjo (2011: 91), juga masih dilakukan masyarakat Segi Tiga Hilir, terutama bagi mereka yang memiliki lahan tanah setingkat, dengan pertimbangan apabila mereka saling tukar tenaga (*reciprocal*) pekerjaan di sawah akan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Sistem barter (*urup-urup*), yaitu menukar hasil panen dengan makanan jadi (siapa makan) juga masih dikenal masyarakat segitiga hilir. Hubungan kerja ini tidak dapat dilakukan dengan baik manakala masyarakat Segi Tiga Hilir bekerja sama dengan masyarakat luar, karena berangkat dari tradisi ekonomi pertanian lokal yang berbeda.⁷

Kelompok pemberi kerja dan pekerja, dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir tidak dikenal diferensiasi sosial. Sebutan kelompok elit seperti konsep Chambers (2013: 25) untuk menyebut satuan keluarga dalam masyarakat yang berlahan luas dan pedagangnya sebenarnya tidak tepat, karena hubungan fungsionalnya dengan satuan keluarga berlahan sempit sangat egaliter. Sikap egaliter tersebut dicerminkan dengan adanya kebebasan dari warga biasa untuk ikut menikmati barang-barang mewah (untuk ukuran desa) yang dimiliki oleh satuan keluarga berlahan luas seperti televisi, sepeda motor, mobil, traktor, pada saat-saat tertentu membutuhkan,⁸ sehingga yang dikenal dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir lebih tepat kalau disebut stratifikasi sederhana tetapi fungsional dan kolektif.

Struktur Sosial yang terstratifikasi secara fungsional ini tampak dari cara masyarakat Segi Tiga Hilir mengelola organisasi ekonomi desa, yang disebut *Lumbung Paceklik* dalam organisasi tersebut keluarga berlahan pertanian lebih luas membayar iuran padi lebih banyak, tetapi kemungkinan meminjam pada masa paceklik lebih sedikit. Dalam pengelolaan *Lumbung Paceklik* ini sistemnya terbalik dibandingkan hubungan fungsionalnya dengan pemerintah, seperti apa yang digambarkan oleh Sosrodi-

hardjo (2011: 48) bahwa keluarga berlahan luas membayar kewajiban banyak tetapi juga memperoleh hak lebih banyak. Akan tetapi sistem sosial masyarakat segitiga hilir, kelompok berada memiliki posisi donator semu bagi anggota yang masyarakat yang berekonomi miskin, sehingga hak kelompok berada dalam meminjam uang atau bahan pangan di *lumbung paceklik* belum tentu memiliki hak pinjam tinggi, bahkan tidak pernah meminjam.

Hubungan dengan Pemerintah Setempat:

Sistem pemerintah desa di kawasan Segi Tiga Hilir tidak berbeda dengan sistem pemerintah desa pada umumnya di Indonesia, yang berbeda hanyalah sistem implementasi sikap hubungan antara aparat dan warga. Kesempatan tertinggi yang pernah dicapai oleh masyarakat Segi Tiga Hilir dalam jabatan pemerintahan setempat adalah kepala desa. Hubungan fungsional aparat dan warga sangat egaliter, yang memang telah dikenal dari basis sistem keluarga. Kebijakan pembangunan desa selalu diserap dari aspirasi masyarakat, hubungan fungsional aparat dan warga sejak RT sampai Kepala Desa ada dalam suasana dialogis.

Pelayanan administrasi kependudukan lebih bersifat kekeluargaan, warga bisa dilayani kapan dan di mana saja, di rumah aparat atau di kantor desa, di pagi-siang-sore hari, tidak terikat jam kerja. Fungsi aparat lebih bersifat *pangemong praja* dibandingkan pemerintah formal. Atribut kekuasaan lebih luruh dalam hubungan fungsional aparat dan warga seperti konsep Soetardjo dalam *manunggaling kawulo gusti* (dalam Sosrodihardjo, 2011: 12-15). Sikap kritis dan membantah sering ditunjukkan dalam merespons kebijakan “instruktif” pemerintah yang berkaitan dengan desa tempat masyarakat Segi Tiga Hilir berada, khususnya kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah di atas kepala desa.

Namun sistem hubungan aparat dan warga tersebut hanya sampai pada tingkat kepala desa, di atas tingkat tersebut (karena biasanya sudah dijabat oleh orang yang bukan etnis Samin) hubungan fungsional tidak dapat diekspresikan lagi. Oleh karena itu, masyarakat Segi Tiga

Hilir apabila tidak dipaksa oleh keadaan, enggan meminta pelayanan administratif pada pejabat di atas kepala desa, bahkan kalau bisa mereka menghindari.

Sistem Kepercayaan Setempat: Kebanyakan masyarakat Segi Tiga Hilir belum menganut agama wahyu (yang secara umum dikenal sebagai Islam, Kristen, Budha, Hindu). Identitas Islam hanyalah terbatas pada apa yang tercantum dalam KTP. Namun demikian, ada tiga pegangan hidup, *tri purusa*, yang dipegang kuat dalam kehidupan mereka yaitu: (1) Percaya pada adanya Tuhan pencipta alam semesta (2) Jangan berkeinginan untuk memiliki hak orang lain secara tidak sah atau merugikan orang lain (3) Apabila mampu, menolong orang yang membutuhkan.⁹ Pegangan hidup tersebut meskipun tidak disertai dengan konsekuensi ibadah lahir dan formal seperti yang biasa dikenal dalam agama wahyu, tetapi warga masyarakat Segi Tiga Hilir akan merasa sempurna apabila dapat memenuhi tiga pegangan sederhana tersebut.

Masyarakat Segi Tiga Hilir juga percaya pada mitos-mitos tentang akan datangnya masa kesengsaraan dan kebahagiaan. Mitos tentang adanya ramalan leluhur yang memprediksi akan datangnya kesengsaraan apabila ada ikan memakan bunga kelapa (*iwak badher mangan manggar*) masih mengisi benak warga masyarakat Segi Tiga Hilir, khususnya kelompok tuanya. Juga mitos tentang akan datangnya kebahagiaan apabila sudah ada *Ratu Adil* (Stanley, 2014: 69). Sesembahan ritual banyak ditujukan pada leluhur yang dianggap menjadi *cikal bakal* mereka, diwujudkan dengan kunjungan rutin mereka ke makam setiap Senin sore atau Kamis sore bertepatan dengan hari Jawa Kliwon (*malem Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon*). Atau kepada dewi padi (Sri) dengan sesaji yang dibuat pada awal tanam dan panen, dan juga pada penguasa desa, sungai besar, pohon, dan perempatan jalan dalam manifestasi memberi sedekah kenduri tiap bulan, juga kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus yang menurut Geertz (2011: 19-37) menyebut sistem kepercayaan ini sebagai varian agama *abangan*.

Sistem keluarga, ekonomi dan kemasyarakatan, hubungan dengan pemerintah, dan kepercayaan setempat dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir tersebut saling berhubungan fungsional dalam mempertahankan eksistensi dan integrasi hidup mereka melewati beberapa generasi. Hubungan antarsistem tersebut juga menjadi karakteristik spesifik sebuah struktur sosial yang membedakan masyarakat Segi Tiga Hilir dengan masyarakat sekitarnya, dan menjadi *defense mechanism* dalam meneguhkan sikap, misalnya tidak berminat berurbanisasi dan meraih kedudukan formal seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa dari daerah pertanian berlahan kering pada umumnya, dan bangga dengan eksistensi diri mereka.

Timbulnya Faktor Pengubah: Hubungan fungsional antarsistem dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir yang berjalan seimbang, teratur, dan dalam suatu kesatuan tersebut tiba-tiba terusik oleh adanya suatu berita kebijakan dari pemerintah yang isinya akan menjadikan kawasan mereka sebagai lokasi pembangunan waduk irigasi besar. Pemaknaan masyarakat Segi Tiga Hilir dari basis sistem yang mereka kenal, kebijakan tersebut sangat instruksional, jauh dari tradisi sistem hubungan dengan pemerintah setempat (egaliter) yang selama ini mereka pahami, apalagi adanya konsekuensi bahwa mereka harus pindah dari tempat tinggalnya, bertransmigrasi atau pindah ke mana saja mereka suka dengan uang sendiri.

Namun kebijakan pemerintah tetaplah kebijakan, terlepas dari respons dari masyarakat Segi Tiga Hilir, pembangunan waduk yang kemudian dinamakan Kedungombo tetap dilaksanakan dan mulai operasi tahun 1989, setelah melalui berbagai ketegangan. Dari data sekunder tentang 300 kepala keluarga yang bertindak sebagai responden pada waktu prakondisi, 11 (4 persen) responden bersedia transmigrasi, 37 (12 persen) responden bertahan di tempat tinggal semula, dan 252 (83 persen) menolak transmigrasi dengan memanfaatkan kompensasi ganti rugi tanah untuk mencari tempat tinggal baru di lokasi yang berdekatan dengan waduk.⁶ Dengan demikian

benar menurut persepsi fungsionalisme struktural (dalam Lauer, 2013: 106), bahwa faktor pengubah tersebut datangnya dari luar struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir, yaitu adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk membangun waduk irigasi Kedungombo.

Hubungan antarsistem yang teratur, seimbang, dan bersatu, kemudian membawa ke arah pemahaman sekilas, bahwa masyarakat yang dipahami menurut fungsionalisme struktural cenderung stabil dan statis. Namun Parsons (2014: 230-231) menegaskan, bahwa *teori tindakan* sama-sama memperhatikan antara persyaratan stabilitas dan perubahan, karena dalam mempelajari mekanisme stabilitas juga harus mempelajari mekanisme pengubah, hanya pemahamannya harus melalui struktur dalam masyarakat.

Dalam tujuh ciri umum tentang fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Van Den Berghe (Demerath, 2011: 294-295), terdapat dua ciri yang menyangkut perubahan sosial. Pertama, perubahan berlangsung secara lambat dan lebih merupakan penyesuaian diri. Kedua, perubahan yang merupakan hasil penyesuaian terhadap apa yang terjadi di luar masyarakat bersangkutan, melalui penemuan internal. Neil Smelser (dalam Cuff et. al, 2014: 61) berpendapat, karena berbasis pada kestabilan dan keteraturan tersebut, biasanya perubahan sosial dalam konsep fungsionalisme struktural selalu dimulai dengan ketegangan (*strain or tension*). Dalam konteks masyarakat segitiga hilir, perubahan sosial masyarakat menemui kebenarannya, karena perubahan masyarakat segitiga hilir dimulai dengan adanya ketegangan karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk membangun waduk irigasi besar yang menggusur tempat tinggalnya.

Pos-kondisi: Sejak waduk Kedungombo dioperasikan, masyarakat Segi Tiga Hilir mengalami pergeseran demografis yang berkisar pada rentang 15-25 kilometer dari tempat tinggal semula. Kondisi alat produksi yang berupa lahan tanah juga mengalami perbedaan drastis, kalau dulu bisa ditanami padi sekarang tidak bisa karena kualitas kesuburan tanah di tempat yang baru lebih buruk. Lahan tanah yang dimiliki

masyarakat Segi Tiga Hilir juga menurun rata-rata 35 persen, apabila dihitung dengan nilai belanja dan uang konkret.⁷

Produk pertanian pascagenangan yang mampu dihasilkan oleh mereka hanyalah ketela, jagung, dan wijen. Suasana lingkungan yang dahulu berupa lahan tanah agraris berubah menjadi hamparan air waduk (aquaris). Perubahan sistem-sistem dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir tersebut adalah dalam rangka adaptasi lingkungan, sebagaimana menurut persepsi Fungsionalisme Struktural (Van Den Berghe dalam Demerath, 2011: 294-295), dalam rangka menuju pada keseimbangan, keteraturan, dalam mempertahankan eksistensi mereka. Dari pengamatan selama 10 tahun sejak waduk Kedungombo dioperasikan pada tahun 1989, perubahan hubungan fungsional antarsistem yang terjadi pada struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Sistem Keluarga: Apabila pada masa pra-kondisi kepala keluarga menjadi sentral tanggung jawab ekonomi seluruh anggota keluarga, pada masa pos-kondisi anggota keluarga terutama yang telah dewasa secara ekonomi lebih otonom. Perubahan tersebut disebabkan ditemukannya lapangan pekerjaan baru yang berbasis tidak pada lahan tanah keluarga secara turun temurun sehingga ada tradisi untuk menyerahkan pendapatan dari hasil kerja pada kepala keluarga, tetapi berbasis pada lahan air waduk milik umum sehingga tidak harus menyerahkan pendapatan dari hasil kerjanya pada kepala keluarga.

Pergeseran demografis dan sosialisasi dengan masyarakat Jawa yang menyebabkan masyarakat Segi Tiga Hilir sekarang tidak lagi mendominasi komunitas sosial, juga membawa konsekuensi banyak warga dari etnis Samin yang kemudian menikah dengan warga dari komunitas Jawa. Selama sepuluh tahun observasi, sudah ada 21 warga keturunan etnis Samin yang menikah dengan warga dari etnis Jawa. Letak persebaran tempat tinggal di tempat yang baru yang terpisah-pisah, meskipun masih dalam lingkungan satu desa, juga menyebabkan jalinan antaranggota ke-

luarga yang dulu *extended* menjadi terbatas pada satu generasi vertikal ke bawah dan ke atas.

Sistem Ekonomi dan Kemasyarakatan:

Dalam masa transisi ke bentuk lingkungan alam baru tersebut, kelompok yang semula berlahan tanah luas dan pedagang masih berfungsi sebagai katup pengaman ekonomi masyarakat Segi Tiga Hilir. Dengan keuangan modal yang dimiliki, mereka mampu jadi pionier untuk melakukan penemuan internal dalam bentuk alat produksi guna menopang kehidupan mereka di tempat yang baru (faktor ini juga yang dikonsepsikan oleh persepsi Strukturalisme Fungsional dalam memandang perubahan sosial). Perubahan sarana produksi yang semula dalam bentuk lahan pertanian ke bentuk lahan air, karena lahan pertanian di tempat baru tidak *menjanjikan* lagi, telah mendorong mereka untuk mengubah alat produksi yang semula dalam bentuk cangkul, garu, dan bajak ke bentuk jarring, keramba, bubu, dan sampan. Kemampuan beradaptasi tersebut segera diikuti oleh kelompok yang semula petani berlahan sempit (dengan penghasilan yang subsistens) untuk mengikuti cara produksi pendahulunya, tanpa merasa takut gagal.

Perubahan sarana dan alat produksi tersebut menyebabkan struktur dalam sistem ekonomi masyarakat Segi Tiga Hilir juga mengalami perubahan. Kalau dulu ekonomi jasa dengan pertukaran tenaga kerjanya lebih dominan, sekarang digeser dengan ekonomi uang. Sistem penjualan hasil produksi (ikan) yang langsung dapat dijual kepada pembeli menyebabkan uang lebih cepat didapat, upah dalam bentuk uang juga mudah diberikan, tidak lagi sekedar numpang hidup dengan jaminan makan dan upah sekadarnya. Sistem ekonomi tersebut menyebabkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja berpenghasilan riil, dalam arti mempunyai dan memegang penghasilan sendiri serta tidak terikat oleh kepala keluarga. Posisi ekonomi anggota keluarga dalam sistem keluarga menjadi lebih otonom, karena kalau tidak bekerja dalam satuan keluarga lain mereka juga dapat membuat alat produksi sendiri dengan lahan air waduk milik umum, sebagai nelayan, peternak keramba, dan

pekerja perahu penyebarangan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Segi Tiga Hilir ke daerah lain.

Kemampuan masyarakat Segi Tiga Hilir yang semula beradaptasi dengan lingkungan tersebut disebabkan mereka sebelumnya telah memiliki elemen dasar sebagai nelayan sungai sebagai profesi minor di samping profesi mayor sebagai petani. Elemen dasar tersebut yang menurut Auguste Comte (dalam Etzioni, 2013: 51) mampu mendorong masyarakat ke arah perubahan sosial. Perubahan pada alat dan sarana produksi yang menyebabkan perubahan pada sistem dan struktur ekonomi tersebut juga membawa perubahan pada organisasi ekonomi setempat, yang semula berbentuk *Lumbung Paceklik* dengan sistem iur padi, menjadi *Mina Mukti* dengan sistem iur uang.

Sistem Hubungan dengan Pemerintah Setempat: Pergeseran demografis masyarakat Segi Tiga Hilir ke tempat yang baru membawa konsekuensi status kependudukan mereka dalam struktur sosial masyarakat setempat berubah dari penduduk asli ke status komunitas pendatang. Mundurnya tokoh-tokoh formal dari etnis Samin yang dulu pernah berada dalam struktur pemerintahan di lingkungan masyarakat Segi Tiga Hilir karena hilangnya wilayah otoritas mereka oleh genangan waduk Kedungombo, menyebabkan mereka tidak dapat lagi mendominasi sistem dalam hubungannya dengan pemerintah setempat. Dalam struktur pemerintahan desa ke bawah mereka tidak lagi menjadi sistem tetapi sub sistem. Sebab, kesempatan berada dalam struktur jabatan formal hanya sampai pada tingkat RT, jabatan di atas RT sudah diduduki oleh orang-orang dari komunitas etnis Jawa, sehingga hubungan dengan pemerintah setempat tidak dapat lagi diwarnai dengan sistem egaliter seperti dulu yang mereka kenal, tetapi sistem hubungan yang formalistik.

Struktur sosial antarstatus warga biasa dan aparat pemerintahan, terutama sejak dari RW ke atas, tidak lagi *functional stratified* tetapi *formal stratified*. Masyarakat Segi Tiga Hilir memahami aparat tidak lagi sebagai *pamong projo* yang

setiap waktu bisa di ajak bicara dan dimintai pelayanan kapan dan di mana saja, tetapi sebagai orang yang harus dihormati dalam stratifikasi derajat tertentu. Salah satu bentuk konkret dari sistem tersebut adalah pelayanan administrasi kependudukan pada saat poskondisi hanya dapat dilayani pada saat jam kerja saja dan di kantor pemerintahan desa. Diawali dari sikap masyarakat Segi Tiga Hilir sebelum menempati pemukiman baru yang menolak transmigrasi, menjadikan sistem hubungan dengan aparat pemerintah di tempat tinggal yang baru menjadi lebih formal dan tidak egaliter.

Respons terhadap sistem tersebut sering diungkapkan oleh masyarakat Segi Tiga Hilir dalam sikap ketaatan semu, atau “sabotase”⁸ dalam arti apabila ada perintah bersih-bersih (desa) lalu diterjemahkan menjadi membersihkan segala hal, baik yang tidak berguna maupun yang berguna. Sikap yang sering “kritis” tersebut yang kemudian menjadikan masyarakat Segi Tiga Hilir sering memperoleh sebutan sebagai masyarakat *waton suloyo* dan *BAKMI* (*bosenan, aras-arasan, keset, malu dan isinan*) oleh aparat pemerintah setempat. Sebuah sebutan yang sebenarnya sangat bertolak belakang dengan realitas karakteristik etnis Samin.

Sistem Kepercayaan Setempat: Perubahan lingkungan dan alam Masyarakat Segi Tiga Hilir juga menyebabkan hilangnya sarana tradisi kegiatan dalam mengekspresikan kepercayaan setempat. Pemujaan pada leluhur yang diekspresikan dengan seringnya berkunjung ke makam-makam yang menjadi *cikal bakal* atau yang ditokohkan terpaksa tidak dapat diteruskan lagi karena makam-makam tersebut tenggelam oleh air waduk. Kepercayaan kepada Dewi Sri, sebagai dewi kesuburan (padi) yang diekspresikan dengan pemberian sesaji pada masa awal tanam dan panen, juga tidak dapat diteruskan karena sarana kepercayaan (sawah) yang sekarang dimiliki oleh masyarakat Segi Tiga Hilir sudah tidak dapat memberi mereka hasil padi lagi, bahkan tidak subur.

Kepercayaan pada *danyang-danyang* desa, yang menguasai sungai besar, pohon besar,

perempatan jalan, sudut-sudut desa juga tidak dapat direplikasikan di desa tempat mereka tinggal yang baru. Sebab, desa tersebut bukan peninggalan nenek moyangnya, sehingga kenduri bulanan dianggap tidak perlu dilakukan. Bahkan, genangan air waduk besar yang dulunya juga dipercayai sebagai salah satu tempat sakral dan mempunyai *danyang*, tidak dapat diterapkan pada kehadiran waduk baru yang lebih besar, yaitu Kedungombo. Masyarakat Segi Tiga Hilir sebaliknya memaknai waduk tersebut sebagai “simbol perjuangan” hidup baru, ke dalam hubungan fungsional sistem-sistem baru, dan struktur sosial yang baru.

Sistem kepercayaan setempat tersebut hanya tinggal di dalam benak generasi tuanya. Salah satu mitos yang masih kukuh dan makin kuat hadir di benak masyarakat Segi Tiga Hilir, terutama kelompok tuanya, adalah akan datangnya (dan kemudian telah datang) masa kesulitan yang ditandai dengan *iwak badher mangan manggar*, karena terbukti bahwa benar ada ikan yang memakan bunga kelapa, yaitu setelah waduk Kedungombo dioperasikan, ikan-ikan banyak yang makan bunga kelapa yang terbenam di dalam air waduk. Harapan yang ditunggu masyarakat Segi Tiga Hilir kemudian adalah datangnya *Ratu Adil* yang menandai datangnya masa kebahagiaan kembali. Namun di lain pihak, ada perubahan sistem kepercayaan pada generasi anak-anaknya. Sosialisasi dengan lebih banyak komunitas Jawa menyebabkan konsep kepercayaannya tidak terisi oleh informasi satu arah dari orangtuanya, tetapi juga dari pendidikan dasar dan pengaruh ketetanggaaan, sehingga banyak anak-anak dari masyarakat Segi Tiga Hilir yang belajar mengaji (Islam) sejalan dengan tersedianya sarana dan guru ibadah di tempat yang baru.

Namun perubahan sistem kepercayaan (ke Islam) tersebut tidak banyak terjadi pada kelompok tuanya, sehingga mereka rawan terhadap sebutan yang selalu dikait-kaitkan dengan partai terlarang. Sebutan yang, sebenarnya, juga tidak berdasarkan pemahaman etnis, tetapi hanya demi mempermudah menghitamputihkan kelompok masyarakat yang sering “kritis” terhadap kebi-

jakan yang bersifat instruksional dari pemerintah setempat.

D. Penutup

Kesimpulan: Dari hasil penelitian melalui pengamatan dan penggunaan *key-informant* secara *snowball* tentang masyarakat Segi Tiga Hilir sejak setahun pra-kondisi dan sepuluh tahun pos-kondisi dibangunnya waduk Kedungombo, terutama dilihat dari persepsi Fungsionalisme Struktural, perubahan yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir dapat disimpulkan sebagai berikut. Sistem yang menonjol dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir adalah sistem keluarga, ekonomi dan kemasyarakatan, hubungan dengan pemerintah setempat, dan kepercayaan setempat. Hubungan fungsional antarsistem tersebut telah menguatkan eksistensi masyarakat Segi Tiga Hilir dalam beberapa generasi. Seperti teori Talcott Parson, bahwa awal perubahan sosial masyarakat disebabkan oleh faktor dari luar. Masyarakat Segi Tiga Hilir mengalami hal yang sama, perubahan disebabkan oleh faktor dari luar, yaitu kebijakan pemerintah untuk membangun waduk Kedungombo di kawan tempat tinggal mereka. Perubahan yang berdampak pada alam lingkungan (dari agraris ke aquaris) tersebut menyebabkan hubungan fungsional antarsistem dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir juga mengalami perubahan, dari sistem menjadi sub sistem.

Sesuai dengan teori Neil Smelser, bahwa perubahan pada masyarakat selalu diwarnai dengan ketegangan (*strain or tension*) karena berangkat dari kondisi hubungan fungsional antar sistem yang sudah teratur, stabil, dan dalam keseimbangan, yang kemudian diikuti dengan kebutuhan perubahan akan alat produksi. Masyarakat Segi Tiga Hilir juga mengalami hal yang sama, ketegangan sebelum mereka pindah tempat tinggal dan diikuti dengan kebutuhan akan alat produksi baru dalam menyikapi lingkungan alam yang baru berupa hamparan air. Perubahan dari sistem ekonomi (petani ke nelayan), pertukaran jasa ke standar uang, menyebabkan perubahan

pada sistem keluarga (dari ekonomi keluarga yang tersentralisasi ke kepala keluarga, menjadi lebih otonom ke setiap anggota keluarga). Pergeseran demografi masyarakat Segi Tiga Hilir juga telah mengubah sistem perkawinan keluarga yang semula internal sesama etnis ke eksternal.

Perubahan pada kondisi alam juga telah mengubah sistem tradisi kegiatan dalam mengekspresikan kepercayaan setempat, yaitu hilangnya sarana persembahan leluhur berupa makam-makam; hilangnya tradisi kenduri desa bulanan untuk persembahan danyang-danyang desa karena tidak adanya fungsi ritual desa di tempat yang baru; dan hilangnya tradisi persembahan pada dewi padi (Sri) karena fungsi ritual sawah di tempat baru tidak seritual sawah di tempat asal (tidak subur dan tidak dapat menghasilkan padi). Perubahan demografis, dengan berpindahnya masyarakat Segi Tiga Hilir ke tempat tinggal baru menyebabkan yang semula merupakan sebuah struktur sosial yang di dalamnya memiliki hubungan fungsional sistem-sistem tersendiri, menjadi masyarakat subsistem dalam sistem struktur sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat di tempat tinggal yang baru dengan dominasi etnis Jawa. Perubahan demografi tersebut berakibat sistem hubungan fungsional warga dan aparat pemerintahan yang dulu egaliter menjadi terstratifikasi secara formal menurut budaya masyarakat di tempat yang baru.

Sesuai dengan persepsi fungsionalisme struktural, bahwa perubahan sosial antarsistem dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir tidak terjadi secara radikal (seperti persepsi teori konflik), tetapi sedikit demi sedikit (evolusi), dalam menuju ke kondisi hubungan fungsional antarsistem baru yang teratur, integratif, dan seimbang. Keberhasilan mencari keseimbangan baru yang dilakukan masyarakat Segi Tiga Hilir tersebut tergantung dari adanya sikap empati dari factor pengubah semula, yang berarti butuh kehadiran sistem-sistem baru dalam bentangan struktur sosial yang lebih besar, menuju pada kemanfaatan dampak pembangunan waduk Kedungombo untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, termasuk masyarakat Segi Tiga

Hilir, dengan sedapat mungkin meminimalisasi dampak negatifnya.

Pustaka Acuan

- Chamber, Robert (2010). *Membangun Masyarakat dari Belakang*. Jakarta: Rajawali.
- Cuff, E.C. et al; 2014; *Perspective in Sociology*; London, George allen & Unwin Co.
- Demerath, N.J.; 2011; *System, Change, and Conflict*; New York, Free Press.
- Etzioni, Amitai, and Eva Etzioni-Halevy; 2013; *Social Changes: Sources, Patterns, and Consequences*; New York, Basic Book Inc. Publisher.
- Geertz, Clifford; 2011; *Abangan, Santri, Priyayi, dalam Masyarakat Jawa*; Jakarta, Pustaka Jaya.
- Goode, William J.; 1991; *Sosiologi Keluarga*; Jakarta, Radar Jaya.
- Moore, J.F. (2010). *Community and Social Changes*. London: Sage.
- Miles, Ian; 2010; *Social Indication for Human Development*; London, Frances Printer Publiser.
- Lauer, Robert H.; 2013; *Perspektif tentang Perubahan Sosial*; Jakarta, Rineka Cipta.
- Parsons, Talcott and Edward A. Shils; 2014; *Toward General Theory of Action*; New York, Herper & Row.
- Poloma, Margaret M.; 2014; *Sosiologi Kontemporer*; Jakarta, Rajawali Pers.
- Ritzer, George; 2011; *Sociological Theory*; New York, The McGraw-Hill.
- Sosrodihardjo, Soedjito; 2011; *Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Pedesaan*; Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Stanley; 2014; *Seputar Kedungombo*; Jakarta, Elsam.
- Svalastoga, Kaare; 2013; *Deferensiasi Sosial*; Jakarta, Bina Aksara.

Footnotes

- ¹⁾ Di antaranya ganti rugi tanah yang terkena genangan waduk milik masyarakat setempat, yang kemudian di simpan di pengadilan negeri setempat sebagai uang konsinyasi.

- ²⁾ Disebut segitiga Hilir karena di wilayah tempat tinggal masyarakat yang terdampak genangan, kemudian menjadi hilir tiga sungai besar yang memasok air ke Waduk Kedungombo, yaitu sungai Jragung, Tuntang dan Serang.
- ³⁾ Data sekunder dikompilasikan dari monografi desa setempat.
- ⁴⁾ Almarhum Sadjono Jatiman, pembimbing penelitian Masyarakat Segi Tiga Hilir, juga mengaku keturunan dari etnis Samin. Beliau mengaku sebagai sedikit orang-orang keturunan Samin yang “menyimpang” dari tradisi, menjadi orang Samin yang bekerja di sektor formal, sebagai dosen FISIP-UI jurusan Sosiologi.
- ⁵⁾ Keterangan dari To Pawiro, ketua RT setempat. Wawancara dilakukan siang hari ketika To Pawiro sedang menikmati hari sehabis be-kerja di tanah pertanian di pagi harinya.
- ⁶⁾ Dalam tradisi Jawa pada umumnya, sistem bagi hasil buruh pemanen sawah dan pemilik sawah berlaku pembagian antara perdelapan dan perduabelas.
- ⁷⁾ Keterangan dari Bapak Parno, petani, warga masyarakat Segi Tiga Hilir yang mengaku bukan dari keturunan etnis Samin.
- ⁸⁾ Keterangan Bapak Saadi, pedagang, sekretaris organisasi ekonomi desa, *Lumbung Paceklik*
- ⁹⁾ Keterangan dari Bapak Sukilan, petani, tokoh yang dituakan dalam lingkungan masyarakat Segi Tiga Hilir.
- ⁶⁾ Menurut keterangan Sutar, pekerja perahu penyeberangan, yang bersedia transmigrasi adalah satuan keluarga yang tidak berasal dari etnis Samin.
- ⁷⁾ Keterangan dari Bapak Saroto, ketua RT, nelayan setempat.
- ⁸⁾ Soedjito Sosrodihadjo (1987: 56), pernah menggambarkan sedikit tentang sikap masyarakat Samin ini, meskipun dalam konteks yang berbeda.

Ucapan Terima Kasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 14 Nomor 2 Juni 2015, *review* dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si. (Pembangunan Sosial, UGM)
2. Drs. Latiful Khuluq, M.A., Ph. D. (Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga)
3. Harmona Daulay, S.Sos., M.Si. (Sosiologi, USU)
4. Drs. Doddy Sumbogo Singgih, M.Si. (Sosial Kemasyarakatan, Unair)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, dapat lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya, dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS